

Dr. Rahmat Hidayat, MA



PENDIDIKAN ISLAM *Kontemporer*

Editor: M. Fuad Zaini Siregar, M.Pd





Pendidikan Islam *Kontemporer*

Buku *Pendidikan Islam Kontemporer* membahas dinamika dan transformasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi di era modern. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pendidikan Islam beradaptasi dengan tuntutan global tanpa kehilangan esensi nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pembaca akan diajak untuk menelaah bagaimana konsep-konsep klasik dalam pendidikan Islam dapat direvitalisasi melalui pendekatan kontekstual dan integratif, sehingga pendidikan Islam tetap relevan dan progresif di tengah arus modernisasi dan sekularisasi.

Selanjutnya, buku ini menguraikan berbagai isu aktual yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam, mulai dari rekonstruksi kurikulum, penguatan epistemologi keilmuan Islam, hingga digitalisasi pembelajaran. Penulis menekankan bahwa pendidikan Islam kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media transformasi nilai dan pembentukan karakter Islami. Dengan pendekatan filosofis, historis, dan pedagogis, buku ini menawarkan kerangka berpikir baru tentang pentingnya integrasi antara ilmu agama dan sains sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam di era Revolusi Industri 4.0 dan menuju masyarakat 5.0.

Selain itu, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang peran guru, lembaga pendidikan, dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat eksistensi pendidikan Islam. Terdapat pembahasan tentang bagaimana pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam berupaya berinovasi untuk mencetak generasi Muslim yang berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat. Buku ini juga menyoroti pentingnya moderasi beragama, literasi digital, serta pendidikan multikultural sebagai bagian integral dari pendidikan Islam yang humanis dan inklusif.

Akhirnya, *Pendidikan Islam Kontemporer* menjadi kontribusi penting bagi para akademisi, mahasiswa, guru, dan praktisi pendidikan yang ingin memahami arah baru pendidikan Islam di era globalisasi. Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga praktik dan strategi implementatif dalam konteks Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Dengan gaya penulisan ilmiah namun komunikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam kajian pendidikan Islam modern, sekaligus inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan yang berkeadaban, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental.



Jl. KL. Yos Sudarso No. 224 Medan
Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi
undharpress@dharmawangsa.ac.id
Anggota IKAPI



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-623-95762-1-9



9 786239 576219

Dr. Rahmat Hidayat, MA

Pendidikan Islam Kontemporer

Editor: M. Fuad Zaini Siregar, M.Pd



Copyright © 2023, Penerbit Undhar Press, Medan

Judul Buku : Pendidikan Islam Kontemporer
Penulis : Dr. Rahmat Hidayat, MA
Editor : M. Fuad Zaini Siregar, M.Pd
Penerbit : Universitas Dharmawangsa Press
(Undhar Press)
Cetakan Ketiga : Desember 2023
Penata Letak : Mumtaz Advertising
Desain Sampul : Mumtaz Advertising
ISBN : 978-623-95762-1-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul *"Pendidikan Islam Kontemporer"* ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan dan bimbingan-Nya, karya ini tidak mungkin hadir di hadapan para pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan dan pembentukan karakter umat manusia.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus optimisme terhadap kondisi pendidikan Islam di era modern. Di satu sisi, pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan arus teknologi yang begitu cepat. Namun di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pendidikan Islam untuk menjadi kekuatan moral dan intelektual yang mampu menuntun arah peradaban manusia menuju nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan berkeadaban.

Penulis menyadari bahwa pendidikan Islam tidak lagi dapat berjalan dengan paradigma lama yang semata-mata berorientasi pada transfer pengetahuan. Dalam konteks kontemporer, pendidikan Islam harus mampu menumbuhkan kesadaran kritis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Buku ini berupaya untuk memotret bagaimana proses transformasi tersebut dapat diwujudkan secara konseptual dan praktikal.

Melalui pendekatan multidisipliner, buku ini menyajikan pandangan komprehensif tentang dinamika pendidikan Islam di tengah perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi. Pembahasan tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga implementatif, sehingga dapat menjadi panduan bagi para pendidik, mahasiswa, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang relevan dan solutif.

Selain itu, penulis mencoba menghadirkan sintesis antara nilai-nilai Islam klasik dan pemikiran pendidikan modern. Integrasi ini diharapkan mampu menjembatani jurang antara spiritualitas dan rasionalitas, antara tradisi dan inovasi. Pendidikan Islam kontemporer perlu dirancang bukan hanya untuk menghasilkan individu yang berilmu, tetapi juga berakhlak, berjiwa sosial, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Buku ini juga menyoroti peran lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang kini tengah beradaptasi dengan tuntutan era digital. Perubahan model pembelajaran, kurikulum berbasis integratif, serta penguatan kompetensi literasi digital menjadi bagian penting dari pembahasan dalam buku ini.

Penulis berkeyakinan bahwa pendidikan Islam memiliki kekuatan transformatif. Ia bukan hanya sarana transmisi ilmu, tetapi juga wadah pembentukan identitas dan budaya keislaman yang mampu menjawab tantangan zaman. Melalui pendidikan, nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan dapat diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana pendidikan Islam yang progresif dan kontekstual. Dalam setiap bab, pembaca akan menemukan pemikiran-pemikiran kritis yang membuka ruang refleksi tentang arah dan masa depan pendidikan Islam, baik di Indonesia maupun dunia Islam secara umum.

Penulis juga berusaha mengajak pembaca untuk memandang pendidikan Islam bukan sekadar sistem pengajaran agama, tetapi sebagai sistem kehidupan yang melibatkan seluruh dimensi manusia—spiritual, intelektual, sosial, dan emosional. Dengan perspektif demikian, pendidikan Islam dapat menjadi kekuatan pembebasan (*liberating force*) yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Penulis dalam penyusunan buku ini banyak belajar dari berbagai literatur klasik dan modern, serta melakukan refleksi terhadap praktik pendidikan Islam di berbagai lembaga. Oleh karena itu, isi buku ini merupakan hasil dari sintesis antara teori, penelitian, dan pengalaman empiris. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, dan praktisi pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan dalam penyajian data, argumentasi, maupun gaya penulisan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para kolega, mentor akademik, dan mahasiswa yang telah memberikan inspirasi dan masukan berharga selama proses penulisan. Apresiasi juga disampaikan kepada lembaga pendidikan dan penerbit yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini sehingga dapat hadir di tangan pembaca.

Akhirnya, penulis berharap agar buku *"Pendidikan Islam Kontemporer"* ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi pemicu lahirnya diskursus baru dalam studi pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberi manfaat luas bagi pengembangan pemikiran dan praktik pendidikan Islam yang humanis, moderat, dan berorientasi pada nilai-nilai Ilahiah. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengembangkan dunia pendidikan Islam yang berkeadilan, berkemajuan, dan ber peradaban.

Wassalam;
Penulis

Dr. Rahmat Hidayat, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I Hakikat Pendidikan Islam Kontemporer	1
A. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer	1
B. Tujuan Kajian Pendidikan Islam Kontemporer	4
C. Karakteristik Pendidikan Islam Kontemporer	5
D. Ruang Lingkup Pendidikan Islam Kontemporer	6
E. Pokok Bahasan Pendidikan Islam Kontemporer	10
F. Permasalahan Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia	11
Daftar Bacaan	12
BAB II Dinamika Pendidikan Islam	13
A. Makna dan Tujuan Pendidikan Islam	13
B. Karakteristik Pendidikan Islam	20
C. Doktrin Akidah dalam Pendidikan Islam	37
D. Manusia sebagai Subjek dan Objek Pendidikan	40
E. Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi	41
F. Demokratisasi Pendidikan dalam Perspektif Islam	48
Daftar Bacaan	55

BAB III Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah	57
A. Pendidikan Islam dari Masa Ke Masa.....	57
B. Sejarah Kelembagaan Pendidikan Islam.....	73
C. Pendidikan Tinggi Islam di Dunia dan Indonesia.....	77
D. Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Dunia dan Indonesia.....	80
E. Dinamika Organisasi Sosial Islam dalam Pendidikan.....	83
Daftar Bacaan	86

BAB IV Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani	91
A. Hakikat Masyarakat Madani	91
B. Masyarakat Madani dalam Sejarah.....	94
C. Karakteristik Masyarakat Madani.....	97
D. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani.....	100
Daftar Bacaan	102

BAB V Pertumbuhan dan Perkembnagan Lembaga Pendidikan Islam Indonesia	105
A. Sejarah Kelembagaan Pendidikan Islam	105
B. Eksisistensi Tradisi Pesantren di Era Globalisasi.....	107
C. Kiprah Madrasah dulu, kini dan Mendatang.....	114
D. Sekolah Islam Terpadu: Trend Baru Pendidikan Islam.....	120
E. Problematika Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum	125
F. Tantangan dan Peluang Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Tengah Perubahan Zaman.....	129
G. Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di era gobal village	137
Daftar Bacaan	144

BAB VI Pendidikan Islam dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat	147
A. Keluarga sebagai Basis Utama Pendidikan Islam	147
B. Pembentukan Perilaku Islami.....	152
C. Peran dan Fungsi Majelis Ta'lim ditengah Masyarakat Multikultur	160
D. Integrasi Pendidikan Islam antara Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat.....	168

E. Tantangan dan Arah Pengembangan Pendidikan Islam dalam Kehidupan Sosial Modern.....	173
Daftar Bacaan	178
BAB VII Ragam Bentuk Pendidikan Islam	181
A. Pendidik Islam Anak Usia Dini	181
B. Pendidikan Anak Islami.....	201
C. Pendidikan Remaja Islami	211
D. Pendidikan Islam Orang Dewasa.....	215
E. Pendidikan Islam Lanjut Usia	220
F. Pendidikan Inklusif Perspektif Islam	224
Daftar Bacaan	229
BAB VIII Pendidikan Karakter Islami dan Budaya Lokal	233
A. Pengertian Pendidikan Karakter.....	233
B. Pendidikan Karakter dalam Islam	235
C. Tujuan, Fungsi, dan Media Pendidikan Karakter	237
D. Sumber dan Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter.....	240
E. Proses Pembentukan Karakter.....	243
F. Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	245
G. Pendidikan Karakter sebagai Proses Sosialisasi, Enkulturas, dan Internalisasi Nilai.....	248
H. Urgensi Pendidikan Karakter bagi Pembangunan Bangsa	251
I. Nilai-Nilai Karakter dalam Budaya Lokal.....	253
J. Konstruksi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal	256
Daftar Bacaan	258
BAB IX Pendidikan Entrepreneurship dalam Prespektif Islam	261
A. Pengertian Pendidikan Entrepreneurship.....	261
B. Esensi dan Urgensi Pendidikan Entrepreneurship	264
C. Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan dalam Alquran.....	266
D. Proses Pendidikan Entrepreneurship.....	269
E. Peran lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan Entrepreneur Islami.....	271
F. Penerapan Jiwa Kewirausahaan dalam Pendidikan Islam.....	274
G. Pendidikan Madrasah Berbasis Entrepreneurship	277
H. Pendidikan Pesantren Berbasis Entrepreneurship.....	280
I. Strategi Perguruan Tinggi Mewujudkan Entrepreneurial	

Kampus.....	282
Daftar Bacaan	286
Daftar Pustaka	289
Biodata Penulis	305

Hakikat Pendidikan Islam Kontemporer

A. Pengertian Pendidikan Islam Kontemporer

Pendidikan Islam kontemporer merupakan sebuah konsep pendidikan yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai dasar Islam dengan tuntutan zaman modern. Istilah “kontemporer” merujuk pada konteks kekinian yang menuntut adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial budaya global (Azra, 2016). Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer tidak hanya berorientasi pada pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga pada pembaruan (tajdīd) dan pengembangan metode serta kurikulum agar tetap relevan di era modern.

Secara terminologis, pendidikan Islam kontemporer dapat dipahami sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan substansi spiritualnya (Nata, 2012). Artinya, pendidikan Islam harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam situasi yang terus berubah. Hal ini menuntut kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis bagi para pendidik dan peserta didik Muslim.

Pendidikan Islam kontemporer juga berfungsi sebagai upaya pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan

berakhlak mulia dalam konteks sosial modern (Abdullah, 2019). Pembentukan manusia seperti ini memerlukan integrasi antara pendidikan moral dan pendidikan sains agar tidak terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia.

Pendidikan Islam kontemporer menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya manusia Muslim yang mampu berkompetisi secara global tanpa kehilangan identitas keislamannya (Haneef, 2011). Dalam praktiknya, pendidikan Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat modern, seperti perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta pergeseran nilai moral. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu bersifat responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer, seperti kemiskinan, ketidakadilan, degradasi moral, dan krisis lingkungan (Abdullah, 2020).

Konsep pendidikan Islam kontemporer tidak hanya berfokus pada aspek metodologis dan kelembagaan, tetapi juga mencakup rekonstruksi epistemologis, yakni pembaruan cara pandang terhadap sumber dan struktur ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berupaya mengintegrasikan wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*) sebagai dua sumber utama dalam pembentukan pengetahuan yang utuh dan holistik. Upaya ini menegaskan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas, karena tujuan akhirnya bukan sekadar penguasaan pengetahuan duniawi, melainkan pengenalan diri dan pengabdian kepada Allah SWT (al-Attas, 1993).

Rekonstruksi epistemologis tersebut menjadi penting agar ilmu dalam pendidikan Islam tidak berhenti pada reproduksi pengetahuan, tetapi berkembang menjadi sarana transformasi dan pencerahan spiritual. Pendidikan Islam kontemporer harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami ilmu sebagai amanah dan sarana menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi kognitif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etik dan transendental yang menuntun manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Selain itu, pendidikan Islam kontemporer berperan penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap dinamika perubahan zaman. Dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan modernisasi sosial, pendidikan Islam dituntut untuk tidak sekadar mempertahankan tradisi,

tetapi juga melakukan pembaruan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini mencakup kemampuan untuk menilai, mengkritisi, dan menyaring arus informasi serta budaya global agar selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer berfungsi sebagai benteng moral sekaligus ruang dialog antara nilai-nilai keislaman dan tantangan modernitas (Hidayat, 2020).

Lebih dari sekadar transfer ilmu pengetahuan, pendidikan Islam kontemporer merupakan proses transformasi nilai dan budaya. Melalui pendekatan yang integratif dan kontekstual, pendidikan Islam berusaha membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berkomitmen terhadap kemaslahatan umat. Transformasi ini menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial, etika, dan spiritual yang berkelanjutan, sehingga lulusan pendidikan Islam mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai tauhid dan keadilan.

Pendekatan kontemporer dalam pendidikan Islam juga menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Islam sesuai situasi masyarakat lokal dan global. Artinya, Islam harus dipahami secara universal namun tetap relevan dengan kondisi sosial umat di setiap daerah (Nasir, 2018). Pendidikan Islam kontemporer menuntut sistem yang terbuka, adaptif, dan dialogis terhadap berbagai disiplin ilmu, baik sosial, humaniora, maupun sains modern. Kolaborasi lintas bidang ini menjadi kunci agar pendidikan Islam tidak terjebak dalam eksklusivisme intelektual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam kontemporer merupakan hasil dari proses modernisasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam yang berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap berakar kuat pada nilai-nilai wahyu sebagai sumber utama kebenaran dan pedoman hidup umat manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik agar mampu menghadapi kompleksitas kehidupan modern tanpa kehilangan identitas keislamannya (Azra, 2016; Nata, 2012).

Lebih lanjut, pendidikan Islam kontemporer menuntut adanya integrasi antara tradisi dan inovasi — memadukan nilai-nilai keislaman klasik dengan pendekatan pedagogis modern yang berbasis riset dan teknologi. Hal ini dilakukan agar pendidikan Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan global seperti sekularisasi, disrupsi digital, serta krisis nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer berorientasi pada pembentukan insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak, sekaligus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk berkontribusi dalam pembangunan peradaban modern (Hidayat, 2020; Azra, 2016).

B. Tujuan Kajian Pendidikan Islam Kontemporer

Tujuan Pendidikan Islam Kontemporer adalah untuk mengembangkan manusia yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan moral dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu agama dan umum. Pendidikan ini bertujuan menciptakan individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi serta keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman modern secara positif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Secara rinci tujuan kajian pendidikan Islam kontemporer adalah: *pertama*, membentuk manusia paripurna (insan kamil) yang mampu hidup secara produktif dan berakhlak mulia di tengah arus modernitas. Pendidikan ini diarahkan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual.

Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap realitas sosial. Peserta didik diharapkan mampu menilai dan merespons tantangan global berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan sekadar mengikuti arus modernisasi. *Ketiga*, membangun kesadaran keagamaan yang dinamis. Dalam konteks ini, keislaman tidak dipahami secara kaku, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Keempat, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama dalam satu kerangka epistemologi tauhid. Dengan demikian, tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama (Haneef, 2011). *Kelima*, meningkatkan kemampuan sosial umat Islam dalam menghadapi tantangan global, seperti sekularisasi, materialisme, dan hedonisme.

Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai spiritual yang menjadi kekuatan moral dalam kehidupan modern (Al-Attas, 1993).

Keenam, mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik secara seimbang. Proses pendidikan tidak boleh hanya fokus pada intelektualisme, tetapi juga pada moralitas (Hidayat, 2020). *Ketujuh*, memperkuat identitas keislaman dalam menghadapi pluralitas budaya dan ideologi global. Pendidikan harus menjadi alat untuk meneguhkan jati diri Muslim yang toleran namun tetap teguh dalam prinsip (Nasir, 2018).

Kedelapan, mencetak generasi yang berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui etos kerja Islami (Rahman, 2019). Sedangkan *Kesembilan*, membangun kesadaran ekologis berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti amanah dan tanggung jawab terhadap alam ciptaan Allah (Hidayat, 2020).

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam kontemporer mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekologis yang berpadu untuk mencetak insan yang berilmu, beriman, dan berakhlak (Azra, 2016; Nata, 2012; Abdullah, 2019). Yaitu individu yang seimbang secara intelektual dan spiritual, serta berakhlak mulia, dengan menggabungkan keunggulan agama dan sains.

C. Karakteristik Pendidikan Islam Kontemporer

Pendidikan Islam kontemporer memiliki karakter utama yaitu relevansi terhadap zamannya. Sistem pendidikan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan modern seperti globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak boleh bersifat statis, tetapi harus terus berinovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Relevansi ini menjadikan pendidikan Islam hadir sebagai solusi yang aplikatif, bukan sekadar simbolik, dalam membangun peradaban yang berkeadaban dan berkeilmuan.

Karakter kedua adalah berbasis pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan filosofis dan normatif utama. Nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber tersebut menjadi pedoman dalam seluruh proses pendidikan, mulai dari perumusan kurikulum, metode pembelajaran, hingga pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan Islam kontemporer berupaya menjaga keseimbangan antara modernisasi

dengan otentisitas ajaran Islam, sehingga modernitas tidak menjauhkan umat dari nilai-nilai spiritual, tetapi justru memperkuat keimanan dan ketakwaan.

Selanjutnya, pendidikan Islam kontemporer menekankan pada integrasi ilmu agama dan sains. Pendekatan ini menolak dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ilmu agama memberikan arah moral dan etika, sedangkan ilmu pengetahuan modern dan teknologi memberikan keterampilan serta kemampuan adaptif terhadap perubahan. Dengan integrasi ini, peserta didik diharapkan mampu menjadi insan ulul albab—berpikir kritis, kreatif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ilahiah.

Ciri berikutnya adalah pengembangan potensi manusia secara holistik. Pendidikan Islam kontemporer tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan kognitif, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Aspek jasmani, akal, dan spiritual dipandang sebagai satu kesatuan yang harus tumbuh seimbang agar manusia mencapai kesempurnaan (insan kamil). Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak melahirkan individu yang cerdas secara intelektual semata, tetapi juga berakhlak, berempati, dan bertanggung jawab secara sosial.

Terakhir, pendidikan Islam kontemporer berorientasi pada pembentukan individu yang berintegritas. Tujuannya adalah mencetak manusia yang seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan akhlak mulia. Integritas ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, jujur, dan beradab. Peserta didik yang berintegritas tidak hanya menjadi agen perubahan dalam bidang akademik dan profesional, tetapi juga menjadi teladan moral di tengah masyarakat. Dengan karakter-karakter tersebut, pendidikan Islam kontemporer diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial.

D. Ruang Lingkup Pendidikan Islam Kontemporer

Ruang lingkup pendidikan Islam kontemporer mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif semata, tetapi juga mencakup

pembinaan moral, spiritual, sosial, dan emosional yang menjadi bagian integral dari pembentukan karakter insan kamil. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian dan penguatan nilai-nilai keislaman yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek ruang lingkup tersebut mencakup tiga bentuk utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal (Nata, 2012). Bidang formal meliputi pengajaran di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Sementara bidang nonformal mencakup majelis taklim, pesantren, dan pelatihan keagamaan di masyarakat (Azra, 2016). Pendidikan informal mencakup pendidikan dalam keluarga dan komunitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam kontemporer berfungsi memperkuat peran keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak (Hidayat, 2020).

Selain lembaga, ruang lingkup pendidikan Islam kontemporer juga mencakup aspek kurikulum yang menuntut integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum tidak lagi dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang terpisah antara yang bersifat religius dan yang bersifat duniawi, tetapi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk manusia berpengetahuan dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, ilmu agama memberikan arah moral dan spiritual bagi pengembangan sains dan teknologi, sedangkan ilmu umum memperkaya wawasan umat agar mampu berkontribusi aktif dalam peradaban modern.

Kurikulum pendidikan Islam kontemporer harus dirancang secara kontekstual agar peserta didik mampu memahami Islam dalam dinamika sosial modern dan global (Haneef, 2011). Artinya, pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teks keagamaan, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Integrasi ini penting agar lulusan lembaga pendidikan Islam tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga kompeten dalam kehidupan profesional dan sosial. Dengan demikian, kurikulum menjadi instrumen strategis untuk melahirkan generasi Muslim yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing tinggi di tengah kompleksitas tantangan global.

Pendidikan Islam kontemporer juga meliputi aspek metodologi, di mana strategi pengajaran harus bersifat interaktif dan partisipatif, bukan sekadar ceramah satu arah. Pendekatan ini menuntut pergeseran

paradigma dari model pengajaran tradisional yang berpusat pada guru menuju model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena melibatkan pengalaman langsung, diskusi, kolaborasi, serta pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata.

Selain itu, metodologi pendidikan Islam kontemporer harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan media digital, platform pembelajaran daring, serta pendekatan berbasis proyek dan riset menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik. Metode seperti *blended learning* atau pembelajaran terpadu juga memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengakses sumber ilmu secara luas tanpa batas ruang dan waktu. Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi ini harus tetap diarahkan pada nilai-nilai etika dan spiritualitas agar tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kebijaksanaan moral. Dengan demikian, metodologi pendidikan Islam kontemporer berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan dunia modern yang terus berkembang.

Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, seperti guru, dosen, dan pengelola lembaga pendidikan Islam. Mereka perlu memiliki kompetensi pedagogik, spiritual, dan digital (Abdullah, 2019). Aspek evaluasi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam kontemporer. Evaluasi tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga perkembangan spiritual dan akhlak peserta didik. Ruang lingkup pendidikan Islam kontemporer juga mencakup integrasi antara pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis nilai Islam (Rahman, 2019).

Pendidikan Islam di era kontemporer memiliki peran strategis dalam membangun literasi digital di kalangan generasi Muslim modern. Melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi informasi, peserta didik diarahkan untuk tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan media digital secara produktif, kreatif, dan beretika. Pendidikan Islam mendorong umat untuk menjadi pengguna aktif

teknologi yang berkontribusi pada penyebaran ilmu pengetahuan, dakwah digital, serta penguatan identitas keislaman di ruang maya.

Selain itu, pendidikan Islam juga berperan penting dalam membentuk etika bermedia yang berlandaskan prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga kesadaran spiritual dan moral dalam mengakses, memproduksi, serta menyebarkan informasi. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi pondasi utama bagi generasi Muslim agar mampu menavigasi dunia digital secara bijak, menjaga adab komunikasi, dan menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta amanah dalam setiap aktivitas bermedia (Nasir, 2018).

Dengan demikian, ruang lingkup pendidikan Islam kontemporer sangat luas karena mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait dalam proses pendidikan. Ruang lingkup tersebut tidak hanya terbatas pada sistem pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal yang berlangsung di masyarakat dan keluarga. Setiap sistem ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk kepribadian peserta didik agar beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, para aktor pendidikan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat juga menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan penerapan pendidikan Islam dalam konteks kontemporer.

Lebih lanjut, ruang lingkup ini juga mencakup aspek kurikulum, metode, evaluasi, dan transformasi sosial. Kurikulum pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern agar relevan dengan perkembangan zaman. Metode pembelajaran pun perlu bersifat interaktif dan kontekstual, menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan spiritual peserta didik. Evaluasi pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas. Akhirnya, pendidikan Islam kontemporer berperan penting sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang beradab, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Ilahiah.

E. Pokok Bahasan Pendidikan Islam Kontemporer

Pokok bahasan pendidikan Islam kontemporer meliputi beberapa tema besar seperti modernisasi pendidikan Islam, integrasi ilmu dan agama, serta relevansi pendidikan dengan perubahan sosial (Azra, 2016).

Bahasan pertama adalah rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam agar ilmu pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai wahyu (al-Attas, 1993). Bahasan kedua meliputi pengembangan kurikulum integratif yang menyatukan sains dan agama. Tujuannya adalah melahirkan insan yang cerdas intelektual dan spiritual (Nata, 2012).

Bahasan ketiga menyoroti peran teknologi digital dalam pendidikan Islam modern. Teknologi harus dimanfaatkan untuk dakwah dan pembelajaran berbasis nilai. Bahasan keempat adalah pendidikan karakter Islami yang menanamkan nilai moral, etika, dan akhlakul karimah.

Selain itu, bahasan penting lainnya adalah transformasi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan perguruan tinggi agar adaptif terhadap globalisasi. Pokok bahasan berikutnya adalah peran guru sebagai agen perubahan yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter (Hidayat, 2020).

Pendidikan Islam kontemporer juga membahas tentang kebijakan pendidikan Islam nasional dan internasional dalam menghadapi tantangan global (Rahman, 2019). Selain itu, pokok bahasan juga meliputi pendekatan interdisipliner antara pendidikan Islam dengan psikologi, sosiologi, dan ekonomi.

Dengan demikian, pendidikan Islam kontemporer merupakan medan kajian yang dinamis dan multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya membahas proses transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga mencakup transformasi nilai, moral, dan spiritual dalam konteks sosial modern. Pendidikan Islam kontemporer berusaha menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip wahyu, sambil mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Selain itu, dinamika pendidikan Islam kontemporer menuntut pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya global. Kajian ini membuka ruang bagi rekonstruksi epistemologis, inovasi metodologi, serta pembaruan kurikulum yang

relevan dengan kebutuhan umat di era digital dan globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam kontemporer tidak hanya menjadi sarana penguatan iman dan moral, tetapi juga wahana pemberdayaan umat menuju masyarakat beradab, kritis, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi realitas dunia modern

F. Permasalahan Pendidikan Islam Kontemporer di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas, relevansi, dan pemerataan (Azra, 2016). Tantangan ini mencakup rendahnya mutu tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kurikulum dalam menjawab kebutuhan zaman. Selain itu, kesenjangan antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang signifikan, sehingga akses terhadap pendidikan bermutu belum merata. Relevansi pendidikan Islam dengan dunia kerja dan tantangan global juga perlu diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi spiritual, intelektual, dan profesional yang seimbang. Upaya pembenahan sistem, manajemen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk memperkuat eksistensi pendidikan Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin cepat.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya: *pertama*, dikotomi antara pendidikan agama dan umum yang masih kuat, sehingga menghambat integrasi ilmu (Nata, 2012). *Kedua*, rendahnya kualitas guru PAI, baik dari segi kompetensi pedagogik maupun literasi digital (Hidayat, 2020). *Ketiga*, kurikulum PAI sering kali belum kontekstual dengan isu sosial kontemporer seperti pluralisme, gender, dan lingkungan (Abdullah, 2019).

Keempat, lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kesenjangan fasilitas dan pendanaan yang signifikan. *Kelima*, globalisasi membawa nilai-nilai sekuler yang mempengaruhi moral generasi muda Muslim. *Keenam*, pendidikan Islam di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran efektif.

Ketujuh, sistem evaluasi masih berfokus pada aspek kognitif, bukan afektif dan spiritual. *Kedelapan*, masih lemahnya kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat dan dunia kerja.

Kesembilan, kurangnya penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan Islam kontemporer. Dan *Kesepuluh*, perlunya reorientasi paradigma pendidikan Islam agar mampu melahirkan generasi berdaya saing dan berakhlak.

Berbagai permasalahan di atas harus dicarikan solusinya agar dapat diselesaikan dengan baik. Terdapat beberapa solusi diantaranya: meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, mengembangkan kurikulum yang relevan, membenahi metode pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi dan infrastruktur. Selain itu, perlu ada peningkatan manajemen keuangan yang transparan, memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, dan mengatasi kesenjangan antar daerah melalui pemerataan fasilitas dan guru.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2019). *Islamic Studies in a Contemporary Context: Towards a New Paradigm*. Yogyakarta: UII Press.
- al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Azra, A. (2016). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Haneef, M. A. (2011). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia (IIUM) Press.
- Hidayat, M. (2020). *Pendidikan Islam dan Kewirausahaan Sosial di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Kartanegara, M. (2005). *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy.
- Nasir, M. (2018). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, F. (2019). *Islamic Ethics and Entrepreneurship*. London: Routledge.
- Sardar, Z. (2015). *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Syam, N. (2019). *Islam Nusantara dan Pendidikan Islam Multikultural*. Surabaya: UINSA Press.
- Tafsir, A. (2010). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, M. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Islam: Integrasi Nilai, Ilmu, dan Teknologi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zubaedi. (2019). *Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat: Rekonstruksi Filosofis dan Implementatif*. Jakarta: Kencana.

Dinamika Pendidikan Islam

A. Makna dan Tujuan Pendidikan Islam

Istilah pendidikan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” yang berarti pelihara dan latih. Selanjutnya kata tersebut diberi awal “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata pendidikan, yang berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses dan cara perbuatan mendidik. (Depdiknas, 2013: 326).

Istilah pendidikan dalam Islam dikenal dengan *at-Tarbiyah*, *at-Ta’lim*, *at-Ta’dib*, *at-Tahdzib*, *al-Wa’dz* atau *al-Mau’idzoh*, *ar-Riyadhah*, *at-tazkiyah*, *at-talqin*, *at-tadris*, *at-tafaqquh*, dan *al-tabyin*. Kesebelas istilah tersebut akan dibahas secara ringkas satu persatu sebagai berikut:

1. *At-Tarbiyah*

At-Tarbiyah Kata tarbiyah berasal berasal dari kata rabba, yarubbu, rabban yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh (anak). (Mahmud Yunus, 2007: 136). Kata rabba, yarubbu tarbiyatan yang mengandung arti memperbaiki (ashlaha), menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya.

Dengan menggunakan kata yang ketiga ini, meka terbiyah berarti usaha memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik, agar dapat survive lebih baik dalam kehidupannya. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2010: 11).

Kata *At-Tarbiyah* tersebut mengandung cakupan tujuan pendidikan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi; dan proses pendidikan, yaitu memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya. Karena demikian luasnya pengertian *At-Tarbiyah* ini, maka ada sebagian pakar pendidikan, seperti Naquib al-Attas yang tidak sependapat dengan pakar pendidikan lainnya yang menggunakan kata *At-Tarbiyah* dengan arti pendidikan.

Menurutnya kata *At-Tarbiyah* terlalu luas arti dan jangkauannya. Kata tersebut tidak hanya menjangkau manusia melainkan juga menjaga alam jagat raya sebagaimana tersebut. Benda-benda alam selain manusia, menurutnya tidak dapat dididik, karena benda-benda alam selain manusia itu tidak memiliki persyaratan potensional seperti akal, pancaindera, hati nurani, insting, dan fitrah yang memungkinkan untuk dididik. Yang memiliki potensi-potendi akal, pancaindera, hati nurani insting dan fitrah itu hanya manusia. Untuk itu Naquib al-Attas lebih memiliki kata *al-ta'dib* (sebagaimana nanti akan dijelaskan) untuk arti pendidikan, dan bukan kata *at-Tarbiyah*. (Abudin Nata, 2012: 11).

2. *At-Ta'lim*

Mahmud Yunus (2007: 278) dengan singkat mengartikan *at-Ta'lim* adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Sementara itu Muhammad Rasyid Ridha mengartikan *at-Ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2010: 19). Sedangkan H.M Quraishy Shihab, ketika mengartikan kata *yu'allimu* sebagaimana terdapat pada surah al-Jumu'ah (62) ayat 2, dengan arti mengajar yang intinya tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika serta fisika. (Abudin Nata, 2012: 11).

Kata *at-Ta'lim* dalam Alquran menunjukan sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci, wahyu, sesuatu yang belum diketahui manusia, keterampilan membuat alat pelindung, ilmu laduni (yang

langsung dari tuhan), nama-nama atau simbol-simbol dan rumus-rumus yang berkaitan dengan alam jagat raya, dan bahkan ilmu yang terlarang seperti sihir. Ilmu-ilmu baik yang disampaikan melalui proses *at-Talim* tersebut dilakukan oleh Allah Ta'ala, malaikat, dan para Nabi. Sedangkan ilmu pengetahuan yang berbahaya diajarkan oleh setan.

Kata *at-Ta'lim* dalam arti pendidikan sesungguhnya merupakan kata yang paling lebih dahulu digunakan dari pada kata *at-Tarbiyah*. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad di rumah al-Arqom (*daar al Arqom*) di Mekah, dapat disebut sebagai majlis *at-Ta'lim*. Demikian pula kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang dilaksanakan oleh para dai di rumah, mushala, masjid, surau, langgar, atau tempat tertentu. pada mulanya merupakan kegiatan *at-Ta'lim*. Dengan memberikan data dan informasi tersebut, maka dengan jelas, kata *At-Ta'lim* termasuk kata yang paling tua dan banyak digunakan dalam kegiatan nonformal dengan tekanan utama pada pemberian wawasan, pengetahuan atau informasi yang bersifat kognitif. Atas dasar ini, maka arti *At-Ta'lim* lebih pas diartikan pengajaran daripada diartikan pendidikan. Namun, karena pengajaran merupakan bagian dari kegiatan pendidikan, maka pengajaran juga termasuk pendidikan.

3. At-Ta'dib

Kata *At-Ta'dib* berasal dari kata *addaba, yuaddibu, ta'diban* yang berarti pendidikan. Kata *At-Ta'dib* berasal dari kata *adab* yang berarti beradab. Bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. (Mahmud Yunus, 2007: 37) Kata *At-Ta'dib* dalam arti pendidikan, sebagaimana disinggung diatas, ialah kata yang dipilih oleh Naquib al-Attas. Dalam hubungan ini, ia mengartikan *at-Ta'dib* sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Melalui kata *at-Ta'dib* ini, al-Ataas ingin menjadikan pendidikan sebagai sarana transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber dalam ajaran agama yang bersumber pada diri manusia, sehingga menjadi dasar bagi terjadinya proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menurutnya perlu dilakukan dalam rangka membendung pengaruh

materialisme, sekularisme, dan dikotomisme ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh barat. (Abudin Nata, 2012: 14).

4. *At-Tahdzib*

Kata *At-Tahdzib* secara harfiah berarti pendidikan akhlak, atau menyucikan diri dari perbuatan akhlak yang buruk, dan berarti pula terdidik atau terpelihara dengan baik, dan berarti pula yang beradab sopan. (Mahmud Yunus, 2007: 480). Dari pengertian tersebut, tampak bahwa secara keseluruhan kata *at-Tahdzib* terkait dengan perbaikan mental spiritual, moral dan akhlak, yaitu memperbaiki mental seseorang yang tidak sejalan dengan ajaran atau norma kehidupan menjadi sejalan dengan ajaran atau norma; memperbaiki perilakunya agar menjadi baik dan terhormat, serta memperbaiki akhlak dan budi pekertinya agar menjadi berakhlak mulia. Berbagai kegiatan tersebut termasuk bidang kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya, kata *at-Tahdzib* juga berarti pendidikan.

5. *Al- Wa'dz* atau *Al-Mau'idzoh*

Al-Wa'dz berasal dari kata *wa'adza* yang memiliki makna mengajar, kata hati, suara hati nurani, memperingatkan, atau mengingatkan, serta mendesak agar seseorang kembali pada kebenaran (Mahmud Yunus, 2007: 502). Dalam konteks pendidikan Islam, istilah ini bukan sekadar bentuk nasihat biasa, melainkan mencakup upaya menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual melalui sentuhan hati. Proses *al-Wa'dz* menekankan aspek emosional dan spiritual peserta didik agar pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga dihayati secara mendalam.

Inti dari *al-Wa'dz* atau *al-Mau'idzoh* adalah pendidikan yang berfokus pada penyadaran dan pencerahan batin, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendekatan ini tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, melainkan melalui kelembutan, kasih sayang, dan keteladanan. Dengan demikian, *al-Wa'dz* berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, karena pesan moral yang disampaikan melalui nasihat dan peringatan akan menggugah hati nurani, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih islami.

6. Ar-Riyadhah

Mahmud Yunus (2007:149) menjelaskan bahwa *ar-Riyāḍah* berasal dari kata *raudha* yang berarti penjinakan, latihan, atau melatih. Dalam konteks pendidikan, istilah ini dipahami sebagai proses mendidik jiwa anak dan membentuk akhlak mulia melalui pembiasaan dan latihan terus-menerus. *Ar-Riyāḍah* menekankan pentingnya disiplin dan pengendalian diri sebagai sarana untuk menumbuhkan karakter yang baik. Dengan latihan yang berulang, peserta didik diharapkan mampu menaklukkan hawa nafsu, membiasakan perilaku terpuji, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan para ahli tasawuf, istilah *ar-Riyāḍah* memiliki makna yang lebih mendalam dan bersifat spiritual. Mereka memaknai *ar-Riyāḍah* sebagai latihan rohaniyah yang dilakukan melalui *khalwat* (menyepi) dan *uzlah* (menjauh dari keramaian dunia), disertai dengan perenungan dan ketakwaan kepada Allah. Tujuan latihan ini adalah untuk menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai ketenangan batin. Dengan demikian, *ar-Riyāḍah* tidak hanya bermakna pendidikan moral secara lahiriah, tetapi juga merupakan proses penyucian jiwa yang menuntun manusia menuju kesempurnaan spiritual.

7. Al-Tazkiyah

Mahmud Yunus (2007: 156) menjelaskan bahwa kata *al-Tazkiyah* berasal dari kata *zakka*, *yuzakki*, *tazkiyyatan* yang berarti pemurnian atau pensucian. Kata Al-Tazkiyah atau yuzakki telah digunakan oleh para ahli dalam hubungannya dengan mensucikan atau pembersihan jiwa seseorang dari sifat-sifat yang buruk (*al-Takhali*), dan mengisinya dengan akhlak yang baik (*al-Tahali*), sehingga melahirkan manusia yang memiliki keahlian dan akhlak yang terpuji. Dalam hubungan ini, Ibnu Sina dan al Ghazali menggunakan istilah *Al-Tazkiyah Alannafs* (mensucikan diri) dalam arti membersihkan rohani dari sifat-sifat yang tercela. (Abuddin Nata, 2012: 20). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kata Al-Tazkiyah ternyata juga digunakan untuk arti pendidikan yang bersifat pembinaan mental spiritual dan akhlak mulia.

8. Al-Talqin

Mahmud Yunus (2007: 156) menjelaskan bahwa kata *al-Talqin* berasal dari *laqqana yulaqqinu talqinan* yang dapat berarti pengajaran atau mengajarkan perkataan. Abuddin Nata (2012: 20) menyebutkan bahwa kata tersebut dijumpai dalam hadits sebagai berikut: "ajarilah (orang yang hampir meninggal dunia) kalimat laa ila haillallah (tiada tuhan selain Allah)."Perintah mengajarkan kalimat tauhid (*lailaha illallah*) sebagaimana tersebut selalu dipraktikkan umat Islam pada setiap kali menyaksikan keluarga, teman, tetangga atau lainnya yang sesama muslim, pada saat mereka menjelang datangnya ajal atau sakaratul maut. Dari penjelasan tersebut terlihat, bahwa kata *al-Talqin* digunakan pula untuk arti pendidikan dan pengajaran.

9. Al-Tadris

Mahmud Yunus (2007: 126) menjelaskan bahwa kata *al-Tadris* berasal dari kata *darrasa yudarrisu tadrisan*, yang dapat berarti pengajaran atau mengajarkan. Selain itu, kata al-Tadris berarti Baqa' atsaruha wa baqa' al Atsar yaqtadli inmihauhu fi nafsih, yang artinya: sesuatu yang pengaruhnya membekas, menghendaki adanya perubahan pada diri seseorang. Abuddin Nata (2012: 21) menjelaskan bahwa kata al-Tadris berarti pengajaran, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang selanjutnya memberi pengaruh dan menimbulkan perubahan pada dirinya.

Kata *al-Tadris*, termasuk yang sudah banyak digunakan para ahli pendidikan, bahkan pada perguruan tinggi Islam. Kata *al-Tadris* digunakan untuk nomenklatur jurusan atau program studi yang mempelajari ilmu-ilmu umum, seperti matematika, biologi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu budaya dan dasar, dan fisika.

10. al-Tafaqquh

Mahmud Yunus (2007: 321) menjelaskan bahwa kata al-Tafaqquh berasal dari kata *tafaqqoha yatafaqqohu tafaqquhan*, yang berartimengerti dan memahami. Kata al-Tafaqquh selanjutnya lebih digunakan untuk menunjukan pada kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam. masyarakat yang mendalami ilmu agama di pesantren-pesantren di Indonesia misalnya, sering menyebut sedang melakukan al-Tafaqquhfi al ddiin, yakni mendalami ilmu agama, sehingga ahli ilmu

agama yang mumpuni yang selanjutnya disebut ulama, kiai, ajengan, buya, syaikh, dan sebagainya.

Kata *Tabyin* berasal dari kata *bayyana yubayyinu tabyinan*, yang mengandung arti mengemukakan, mempertunjukkan, berarti pula menyatakan atau menerangkan. (Mahmud Yunus, 2007: 75) menjelaskan bahwa Di kalangan para ahli, belum ada yang menggunakan *Al-Tabyin* sebagai salah satu arti pendidikan. Namun dengan alasan tersebut Abuddin Nata memberanikan dirinya untuk memasukkan kata *Al-Tabyin* sebagai salah satu arti pendidikan. Di dalam dalam Alquran, kosakata *at-Tabyin* dengan derivasinya disebutkan sebanyak 75 kali, diantaranya: “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa”(QS. Al-Baqarah/2: 187)

Dari penjelasan ayat tersebut terlihat, bahwa pada umumnya, kata *al-Tabyin* diartikan menerangkan atau menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Swt. sebagaimana terdapat di dalam Alquran dan kitab-kitab lainnya yang diwahyukan Tuhan. Penerangan dan penjelasan tersebut dilakukan oleh para nabi atas perintah Tuhan. Dengan demikian para nabi bertugas sebagai *al-Mubayyin*, yaitu orang yang menjelaskan atau orang yang menerangkan.

12. *Al-Tadzkirah*

Mahmud Yunus (2007: 134) menjelaskan bahwa kata *al-Tadzkirah* berasal dari kata *dzakkaraa yudzakkiru tadzkirotan*, yang berarti peringatan, mengingatkan kembali. Selain itu, juga berarti sesuatu yang perlu diperingatkan yang sifatnya lebih umum dari pada indikasi (*addilalah*) atau tanda-tanda (*al-imarah*). Dari beberapa arti kata *al-Tadzkirah* tersebut ternyata ada arti yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran, yaitu mengingatkan kembali atau memberikan peringatan, karenadidalam kegiatan pendidikan dan pengajaran terdapat kegiatan yang bertujuan mengingatkan peserta didik agar memahami sesuatu atau mengingatkan agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang keji.

13. *Al-Irsyad*

Mahmud Yunus (2007: 141) menjelaskan bahwa kata *al-Irsyad* dapat mengandung arti menunjukan, bimbingan, melakukan sesuatu, menunjukan jalan. Dari pengertian *al-Irsyad* ini, terdapat pengertian

yang berhubungan dengan pengajaran dan pendidikan, yaitu bimbingan, pengarahan, pemberian informasi, pemberitahuan, nasihat, dan bimbingan spiritual. Dengan demikian kata *al-Irsyad* layak dipertimbangkan untuk dimasukkan kedalam arti kata pendidikan dan pengajaran. (Abudddin Nata, 2012: 25-26).

Para ahli juga mengungkap beberapa definisi pendidikan Islam, diantaranya:

1. Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany (1979: 399) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
2. Muhammad Fadhil Al-Jamali (1977: 3) memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.
3. Ahmad D. Marimba (1989: 19) mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil).
4. Ahmad Tafsir (1992: 32) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah. (Rahmat Hidayat: 2016, 12).

B. Karakteristik Pendidikan Islam

Karakteristik berasal dari kata "*characteristic*" yang berarti sifat yang khas, atau dapat pula didefinisikan sebagai sifat khas yang

membedakan dengan yang lain. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri khusus dari suatu hal. Ciri yang dapat dijadikan pengenal akan suatu identitas. Satu-dua ciri sangat mungkin sama dengan hal lainnya, tapi jika semua ciri dibandingkan maka akan terlihat jelas perbedaannya. Dengan kata lain karakteristik dapat dijadikan pedoman dalam mengenali (mengidentifikasi) sebuah hal atau fenomena.

Karakteristik Pendidikan Islam adalah sifat yang khas dan berbeda dari yang lain tentang proses bimbingan jasmani, rohani yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan memindahkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Karakteristik Pendidikan Islam menggambarkan dengan jelas keunggulan Pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan lainnya. Karena pendidikan dalam Islam mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Pendidikan Islam tidak menutup mata terhadap perkembangan yang ada ditengah masyarakat, termasuk perkembangan sains dan teknologi, namun pendidikan Islam tidak larut dalam perkembangan yang nyata-nyata yang bertentangan dengan syariat-syariat Islam.

Adapun karakteristik pendidikan Islam adalah:

1. Pendidikan Berbasis Rabbaniyah/Ketuhanan

Istilah *rabbānīyah* memang merupakan bahasa Alquran, sehingga untuk memahaminya diperlukan kajian terhadap nash-nash yang berbicara tentang *rabbānī*. Kata *rabbānī* terulang sebanyak 3 kali dalam Alquran, dua kali dalam bentuk *shīghat* (ungkapan kalimat) *jama` mudzakkar sālim marfū`* (الربانيون), yaitu QS. Al-Maidah/5: 44 dan QS. Al-Maidah/5:63 serta satu dalam bentuk *shīghat jama` mudzakkar sālim manshūb* (الربانيين), yaitu QS. Ali `Imran/3: 79.

Ayat-ayat tersebut adalah; *Pertama*, Allah Swt. berfirman dalam Alquran surat Ali `Imrān/3:79:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Artinya: "Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya". (QS. Ali `Imrân/3:79)

Kedua, Allah Swt berfirman dalam Alquran surat Al-Māidah/5: 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS. Al-Māidah/5: 44).

Ketiga, Allah swt berfirman dalam Alquran surat Al-Māidah/5:63:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّاتِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu". (QS. Al-Māidah/5:63)

Al-Rāghib al-Ashfahāni (tt: 189) menjelaskan bahwa kata "al-Rab" secara etimologi adalah *al-tarbiyyah* (pendidikan). Kata *al-rab* adalah mashdar yang diambil untuk menunjukkan pelaku. Sedangkan kata *al-*

rabbānī dihubungkan kepada *al-Rab* yaitu Allah Swt. yang merupakan mashdar (sumbernya) dan Dialah yang memberikan ilmu”.

Majdī al-Hilālī (2003: 9) menjelaskan bahwa *Rabbāniyah* dalam bahasa Arab merupakan penisbatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sebagaimana orang menisbatkan dirinya kepada negeri atau marganya, seperti *Mishrī* `berkebangsaan Mesir`, *Syāmī* `berkebangsaan Syam` dan sebagainya, ada juga sekelompok orang yang disebut dengan *rabbāniyyūn*, yakni mereka yang telah merealisasikan syarat-syarat untuk menisbatkan dirinya kepada Allah Swt.

Kedua akar kata dari *rabbānī*, yaitu *al-Rab* atau *al-tarbiyyah* sebenarnya memiliki hubungan antara sumber dan sifat karakter dasarnya. Karena, di antara sifat karakter dasar dari *al-Rab* (Tuhan) yaitu *tarbiyah* (mendidik). Dalam *etimologi* bahasa Arab, kata *tarbiyah* memiliki lima makna, yaitu:

- a. *Al-ziyādah wa al-namā* yang berarti penambahan dan pertumbuhan.
 - b. *Al-nusyū wa al-tara`ra`u* yang berarti perkembangan dan pembesaran.
 - c. *Al-hifdz wa al-ishlāh* yang berarti pemeliharaan dan perbaikan.
 - d. *Al-tazkiyah wa al-irtifā`* yang berarti kesucian dan ketinggian.
 - e. Bertanggung jawab mengurus, mendukung, menjaga dan mengarahkan sesuatu untuk semua kemaslahatannya.
- (Muhammad Ibn Mandzûr, 2003 Juz I: 182 dan Juz. XIV: 197).

Menurut Māzin Ibn `Abd al-Karīm al-Frêh (2006, Jilid. III: 279-280), *rabbānī* adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus yang meliputi: 1) *Murabbīn hakīm* (pendidik yang bijaksana), 2) *Dā`iyah mushlih* (pembimbing yang reformis), 3) Mengamalkan ilmu, 4) *Taqiyyun halīm* (bertakwa lagi penyabar), 5) *faqīh bi wāqi` ummatih* (memahami realita umat). Ini berarti, *Rabbānī* adalah orang yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pandangan politik yang bijak. Diambil dari perkataan orang Arab: *rab amr al-nās yarubbuhu*, yaitu ketika dia memperbaiki dan menegakkan urusan umat, maka dialah *rabbān* dan *rabbānī* untuk menunjukkan seringnya. Abu `Ubaidah berkata: Aku mendengar seorang yang berilmu berkata: *rabbānī* adalah orang yang berilmu tentang halal, haram, perintah dan larangan serta mengetahui berbagai khabar tentang umatnya, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi.

Sedangkan menurut Salmān al-`Audah (2005: 3-17), karakter *rabbānīyah* memiliki 10 sifat, yaitu: 1) Ilmu, 2) *Ittibā`* (Pengikut setia Rasulullah saw), 3) *Ikhlas* (murni tujuan baktinya), 4) Berakhlak dan beradab keilmuan, 5) Bergaul dengan orang lain dengan baik, 6) Memiliki kebanggaan terhadap ilmu, 7) Hikmah (bijaksana), 8) Mengetahui derajat diri, 9) Beramal bakti, dan 10) Belajar.

`Abd al-`Azīz Kuhail menguraikan lebih jauh tentang jalinan antara karakter *rabbānīyah* dan jalan pembentukannya dalam satu panduan yang utuh. Menurutny *rabbānī* adalah seorang muslim yang memiliki akal yang cerdas, kalbu yang hidup dan anggota tubuh yang produktif, di mana dengan kepribadiannya yang lengkap itu dia sanggup memikul tanggung jawab khilafah dan tegar menghadapi berbagai situasi perubahan dan reformasi.

Jika ke-*rabbānīyah*-an berarti tegak lurusnya akal, kalbu dan anggota tubuh dalam tatanan dan tuntunan Ilahi, maka pembentukannya harus terorientasi dalam metode pendidikan sebagai berikut:

a. *Afkār* (Pemikiran).

Memberi bekal akal dengan wawasan paripurna tentang Allah swt, manusia, alam dan kehidupan yang diasaskan pada wahyu, ayat-ayat alam semesta dan jiwa manusia. Inilah langkah pertama dalam pembentukan yang bertolak dari didahulukannya wahyu “iqra” sebagai asas pendidikan pemikiran orisinal yang dapat memberikan keyakinan tentang pemahaman valid serta menjauhkan akal dari keruwetan filsafat dan prasangka.

b. *Āthifah* (Perasaan)

Mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang dideritanya, meninggikan cita-cita kalbu, mengikatnya dengan Allah swt serta memberinya gizi dengan berbagai hakekat *azalīyah*. Dengan demikian, seluruh perasaannya, kerinduannya dan gejolak jiwanya penuh dengan kelembutan, kasih sayang, kekuatan, kemuliaan, pengabdian dan seluruh kehormatan, tidak menampik hal-hal yang baik serta tidak bergelimang di dalamnya. Dia akan selalu memperlakukan alam dan makhluk lainnya secara positif, sehingga semuanya menjadi bekal kekal yang tidak akan lenyap saat dia menempuh perjalanan hidup dan fase-fase dakwah.

c. *Sulûk* (sikap perilaku)

Memenuhi sikap perilakunya dalam perbuatan-perbuatan yang diridhai Tuhan-nya, melakukan kebaikan, mempropagandakan reformasi kebenaran dan meluruskan penyimpangan dalam tatanan hukum alam kehidupan. Dengan demikian, kekuatan tangannya terbiasa membangun dan memberi, kedua matanya memandang nikmat-nikmat Allah swt dengan pandangan syukur serta memandang aibnya dengan pandangan mengobati, telinganya biasa mendengar suara orang-orang yang dizalimi, lisannya biasa memberikan nasehat, serta kakinya biasa melangkah ke arah produktif.

Kekhususan pendidikan Robbaniyah memiliki beberapa makna yang beragam. Di antara maknanya yang utama sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersandar pada dasar, tujuan, metodologi, prinsip, norma utama dari sumber agama Islam yang datang sebagai wahyu dari Allah Swt.
- b. Pendidikan Islam tunduk pada setiap perkara dari semua perkaranya, setiap bagian dari semua bagiannya, setiap segi dari semua seginya pada perkara yang dibawa oleh syariat Allah *Robbaniyah*, menyeluruh dan komprehensif. Di mana (syariat Allah) mengarahkan proses pendidikan dengan pengarahan yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia yang lurus, tanpa menolak kemampuan berpikir manusia, dan hasil pengetahuan manusia pada setiap zaman dan tempat. Hanya saja itu semua tunduk pada ketentuan-ketentuan dan standar Robbaniyah.
- c. Pendidikan Islam mendidik manusia dengan segala kejujuran, dan terlepas dari semua hawa nafsu, kemauan, dan lainnya dari kekuatan materi dan manusiawi, dan tidak tunduk pada selain perintah dan syariat Allah Swt.

2. Pendidikan Berbasis Keimanan

Ahmad bin Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab (1991: 12) menjelaskan bahwa kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat untuk mengetahui tiga hal pokok dalam agamanya, yaitu mengetahui Rabbnya, mengetahui agamanya dan mengetahui Nabinya. Pengetahuan terhadap ketiga hal pokok tersebut bukan hanya sekedar pengetahuan saja tapi harus dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah

yang dimaksud dengan iman. Dan keimanan yang ada pada seseorang harus senantiasa dan berkembang serta harus benar-benar dijaga kemurniaanya. Tidaklah dibenarkan jika keimanan itu dicampuradukan dengan berbagai kegiatan yang bertabur khurafat dan takhayul. Dan jika hal itu terjadi bukan lagi keimanan namanya melainkan kemusyrikan.

Pendidikan Islam berdiri tegak di atas dasar keimanan yang murni, kebenaran yang bulat, dan keyakinan yang sempurna pada setiap yang datang dari sisi Allah, baik itu membenaran yang berkaitan dengan alam *gaib* (Al-Mughibat), atau alam nyata (Materi, hal yang dilihat, hal yang dirasa). Dengan demikian, pendidikan Islam terkandung antara iman dan membenaran dengan segala sesuatu yang berkaitan dua alam (gaib dan nyata).

Tentang pentingnya pendidikan keimanan dijelaskan Allah Swt. dalam Alquran Surat Luqman ayat 13 berikut ini:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنَّ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*

Ayat di atas menjelaskan tentang pesan Lukman kepada anaknya. Tentang siapa Luqman para ulama berselisih pendapat dalam masalah penamaan ayah dan nashabnya, kenabian dan kasabnya serta sifat-sifat fisiknya. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai Luqman bin Anqa bin Sadun. Sebagian besar ulama salaf menyebutkan Luqman bukanlah Nabi dan tidak pula mendapatkan wahyu, melainkan ia seorang wali Allah yang shalih dan bijaksana, yang telah dikarunia Allah berbagai keutamaan, berupa kecerdasan akal, kedalaman pemahaman terhadap tauhidullah, pendiam dan tenang, serta setiap tutur katanya syarat dengan hikmah. Sementara dalam masalah pekerjaan beliau, ada ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang budak hitam yang bekerja sebagai tukang kayu. Ada juga yang mengatakan sebagai penjahit, ada juga yang mengatakan sebagai penggembala, dan ada juga yang menyebutnya sebagai seorang hakim (*qadhi*) pada masyarakat Bani Israil.

Terlepas dari semua perbedaan pendapat tentang profil seorang Luqman, hal yang paling penting mengenai sosok Luqman bahwa beliau adalah seorang figur orang tua pada masa lalu yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan keimanan anak-anaknya agar

senantiasa menjauhi perbuatan syirik dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Oleh sebab itu layaklah bagi Luqman diabadikan Allah dalam Alquran karena perhatiannya yang besar terhadap pendidikan keimanan dan akhlaq.

Kewajiban mengajarkan keimanan yang dicontohkan Luqman sudah sepatutnya ditiru oleh semua orang tua dan para pendidik. Orang tua dan para pendidik memiliki kewajiban untuk menumbuhkan pemahaman menyeluruh mengenai iman dan ajaran Islam sejak awal pertumbuhannya, sehingga anak-anak akan terikat dengan Islam, baik aqidah maupun ibadah. Dan dengan pendidikan iman ini diharapkan anak hanya akan mengenal Islam sebagai agamanya, Alquran sebagai imamnya dan rasulullah saw. sebagai pemimpin dan teladannya.

Abdullah Nasih Ulwan, (1990: 152-154) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang sesuai petunjuk Rasul saw dalam menyampaikan dasar-dasar keimanan dan rukun Islam, yaitu:

a. Membuka kehidupan anak dengan kalimat “لا إله إلا الله”

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda :

لا إله إلا الله افتحوا على صبيانكم أول كلمة

Artinya: Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan “*laa ilaaha illallah* (tidak ada Tuhan selain Allah).

Anjuran mengumandangkan Adzan di telinga sebelah kanan dan Iqamah di telinga sebelah kiri saat kelahiran anak adalah sebuah upaya yang diharapkan mempunyai pengaruh terhadap penanaman dasar-dasar aqidah, tauhid, dan iman bagi anak. Kita semua tahu kalau pada lafadz adzan dan iqamah itu ada kalimah thoyibah لا إله إلا الله sehingga kalimah tauhid dan syiar masuk Islam menjadi yang pertama masuk ke dalam pendengaran mereka, kalimat yang pertama kali diucapkan lisannya, dan menjadi lafal pertama yang difahaminya.

b. Mengenalkan hukum halal dan haram kepada anak

Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata :

اعلموا بطاعة الله واتقوا معاصي الله. ومروا أولادكم بامثال الأوامر, واجتناب النواهي, فذلك وقاية لهم ولكم من النار

Artinya: “Ajarkanlah mereka taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah

dan menjauhi larangan. Karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka”.

Rahasiannya adalah agar ketika anak membukakan kedua matanya dan tumbuh besar, ia telah mengenal perintah Allah, sehingga ia bersegera untuk melaksanakannya, dan ia mengerti larangan-larangan-Nya, sehingga menjauhinya. Apabila sejak anak memasuki masa baligh telah memahami hukum-hukum halal dan haram, di samping telah terikat dengan hukum-hukum syari’at maka untuk selanjutnya ia tidak akan mengenal hukum dan undang-undang lain selain Islam.

c. Mengajarkan anak untuk beribadah pada usia tujuh tahun

Al Hakim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al-‘Ash ra. Dari Rasulullah saw. Beliau bersabda :

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: Suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan shalat dan pisahkan tempat tidur mereka.

Hikmah di balik perintah ini adalah agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhan. Sehingga ketika anak tumbuh besar, ia telah terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang kepada-Nya, bersandar kepada-Nya dan berserah diri kepada-Nya. Disamping itu anak akan mendapatkan kesucian ruh, kesehatan jasmani, kebaikan akhlak, perkataan dan perbuatan didalam berbagai bentuk ibadah.

d. Mendidik Anak-anak Untuk Mencintai Rasul, Keluarganya, dan Membaca Alquran.

At-Thabrani Meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa Nabi saw. bersabda:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أدبوا أولادكم على خصال ثلاث: على حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفياه (رواه الطبراني)

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra dia berkata : Berkata Rasulullah saw : Didiklah anak-anak kamu mencinta Nabi kamu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al Qur’an. Sebab, orang-orang yang memelihara Al Qur’an

itu berada dalam lindungan singgasana Allah pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan-Nya beserta para Nabi dan orang-orang suci. (HR. Thabrani)

Saat mengajarkan anak didik kita mencintai Nabi beritahukanlah kepada mereka tentang cara-cara berperang Rasulullah, akhlak Rasulullah, perjalanan hidup para shahabat, kepribadian para pemimpin yang agung dan terhormat.

Hikmah di balik perintah itu adalah agar anak-anak mampu meneladani perjalanan hidup orang-orang terdahulu, baik mengenai gerakan, kepahlawanan dan jihad mereka. Disamping itu, agar anak-anak terikat pada sejarah, baik perasaan maupun kejayaan, termasuk keterikatan mereka pada Alquran.

3. Pendidikan yang menyeluruh dan sempurna

Makna bahwa pendidikan Islam termasuk pendidikan yang menyeluruh (*koprehensif*) dikarenakan ia mencakup sisi manusia seluruhnya, mencakup seluruh bidang kehidupan duniawi dan ukhrowi, materi dan maknawi. Allah berfirman: *“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”*. (QS. Al-Qoshoh [28]: 77)

Begitu juga, pendidikan Islam mencakup setiap masa kehidupan manusia, dan berbagai tempat yang dihuni oleh manusia, serta berbagai kondisi dan keadaan yang dilalui dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam melihat manusia dan berinteraksi denganya atas dasar bahwa ia sesuatu yang satu bukan terbagi-bagi.

Pendidikan Islam menyeluruh pada lingkungan masyarakat semuanya, maka tidak terbatas satu lingkungan saja. Pada waktu yang sama, ia mencakup pada pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu semuanya selama itu lazim dan dibutuhkan manusia. Ia juga mencakup tahapan-tahapan perkembangan manusia semuanya, mulai dari janin sampai kehidupannya berakhir.

Said bin Ismail al-Qodhi (2002: 213) menyatakan bahwa selain disifati dengan *‘Syumul’* (menyeluruh), pendidikan Islam juga berkarakteristik *‘mutakamil’* (sempurna), dalam hal; poin-poinnya, sisi-sisinya, dasar-dasarnya, dan bagian-bagiannya yang beragam. Dengan arti, bahwa pendidikan Islam memperhatikan pertumbuhan seseorang

secara keseluruhan dari semua segi kepribadian, tidak berinteraksi dengan satu sisi dengan tanpa mengisolasi sisi-sisi lainnya. Sebagaimana juga ia memperhatikan pertumbuhan masyarakat secara eseluruhan dari semua segi-seginya.”

Diantara makna utama dari ‘*Syumul*’ dan ‘*Takamul*’ dalam pendidikan Islam adalah perhatiannya yang sempurna pada semua bagian dari kehidupan manusia, dan penjagaannya pada semua yang dibutuhkannya di dunia dan akheratnya dengan bentuk yang *integratif*, bukan *fragmented*. Satu contoh yang terbaik dan kesempurnaan itu, adalah kondisi seorang muslim saat melaksanakan ibadah (sholat), walaupun keberadaannya sebagai ibadah murni dengan niat (ibadah untuk Allah), sesungguhnya ia nampak ada keterkaitan yang kuat dan kesempurnaan yang menyeluruh antara semua segi psikologis manusia.

Sholat mencakup entitas manusia semuanya dalam satu wadah; badannya, akalnya, dan ruhaninya. Bagiannya badan adalah gerakan, dari berdiri, rukuk, sujud, gerak dan diam. Bagiannya akal adalah berpikir mengenai hal yang dibaca oleh orang sholat dari doa-doa dan ayat-ayat. Bagiannya ruhani adalah khusyu’, takwa, dan merasakan rahmat Allah . Semua itu ada dalam satu *wadah* (sholat).”

4. Pendidikan pertengahan dan seimbang

Makna pertengahan dan keseimbangan pendidikan Islam adalah keselamatannya dari berlebih-lebihan dan pengabaian, penolakannya pada hiperbola dan kekurangan. Ia berdiri tegak di asas utama dalam keadilan yang tidak berlebihan dalam perhatian satu sisi dari sisi lainnya.

Adapun dalil dan petunjuk yang paling benar atas realisasi pendidikan Islam pada karakteristik ‘*wasathiyah*’ (pertengahan), ‘*tawazun*’ (keseimbangan), dan keadilan dalam kehidupan seorang muslim tergambarkan dalam makna dari firman Allah: “*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi*”. (QS. Al-Qoshoh [28]: 77).

Begitu juga, hal itu makna dalam hadits nabawi yang shahih dari Abdullah bin Amr bin al-Ash , dia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: “*apakah aku tidak mendengar bahwa kamu sholat malam dan puasa siang harinya’ aku berkata, sungguh aku senantiasa melakukannya, beliau bersabda” jika sungguh kamu demikian telah melakukan itu, telah*

cekung matamu, dan telah letih badanmu, sesungguhnya untuk badanmu adakah, dan untuk keluargamu ada hak, maka berpuasa lah dan berbukalah, dan berdirilah (sholat) dan tidurlah” (HR. Bukhori).

Oleh karena itu, karakteristik ini dalam pendidikan Islam berarti interaksinya dengan manusia sebagai usaha untuk merealisasikan prinsip keseimbangan, keadilan dan pertengahan pada setiap perkara dari urusan kehidupan, antara berbagai segi kepribadian (ruhani, badan dan intelektual) dari satu sisi, antara ruang lingkup pemikiran dari satu sisi, dan aplikasi dari sisi lainnya, antara tujuan agama dan dunia.

Begitu juga semangat untuk merealisasikan prinsip keseimbangan, pertengahan, dan keadilan antara kebutuhan-kebutuhan individu dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, antara hak Allah dan hak hamba, antara hak pribadi dan hak keluarga, dan lainnya dari hak, kewajiban, dan kebutuhan lain. Singkatnya, pendidikan Islam selalu memberikan hak bagi setiap pemilik haknya tanpa tambahan atau kurang, tanpa berlebihan atau pengabaian.

5. Pendidikan yang berlanjut dan pembaharuan

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berkelanjutan dari mahdi (kelahiran) sampai *lahdi* (liang lahat) sebagaimana dikatakan (pepatah). Ia tidak terbatas pada batasan zaman tertentu, atau terhenti pada periode usia tertentu. Hal ini bertolak dari firman Allah: *“Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”* (QS. Thoha [20]: 114).

Bahkan ada yang memandang bahwa makna keberlangsungan pendidikan Islam itu dimulai sebelum dilahirkan, dan terus berlangsung bersama manusia hingga wafatnya. Penjelasan hal itu, bahwa pendidikan Islam bermula dengan perhatian dan keseriusannya pada seorang muslim sebelum ia dilahirkan di dunia ini. Yakni tatkala semangat pada lingkungan keluarga memilihkan pendidikannya melalui pemilih kedua orang tua yang baik, dan semangat dalam agamanya, akhlaknya, kesehatannya dari penyakit dan lainnya.

Apabila ia telah diciptakan dan berada di dunia, perhatian pendidikan terus berlangsung pada seorang ini dalam kondisi janin, lalu dilahirkan, menyusu, balita, masa anak-anak, masa remaja, masa muda,

masa dewasa, masa setengah baya, masa tua dan lansia, hingga selesai kehidupannya.

Keberlangsungan pendidikan membutuhkan pembaharuan yang terus menerus sesuai perubahan kondisi zaman, tempat, masyarakat, peradaban, dan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berkembang, dan perubahan sosial, serta konsekuensinya. Sesungguhnya pendidikan Islam sangat istimewa, bahwa ia selalu aktual, dikarenakan sejalan dengan perkembangan peradaban, dan beradaptasi dengan realita yang berubah-ubah, serta sejalan dengan kondisi zaman sesuai kemashlahatan manusia, kebutuhannya yang beragam dan selalu baru, dengan syarat hal itu tidak bertentangan dengan ketetapan agama, rambu-rambunya, dasar-dasarnya, dan prinsip-prinsipnya.

Urgensi keistimewaan pada pendidikan Islam merupakan pengertian dan pengetahuan bahwa kondisi kehidupan dan perjalanannya pada setiap zaman, atau tempat tidak mungkin berjalan pada satu metode. Ia berubah dan berkembang sesuai perubahan kondisi dan keadaan. Maka seorang manusia pada hal ini seharusnya sejalan dengan perkembangan ini yang sesuai akidahnya, prinsipnya, normanya, dan begitu pula dalam beradaptasi dengan itu. Jika tidak, ia akan terbelakang dalam kafilah dan perjalanannya.

Makna bahwa pendidikan Islam sangat istimewa kemampuannya untuk sejalan dengan perkembangan peradaban yang selalu aktual dalam setiap segi kehidupan. Dikarenakan ia bersandar pada kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Dan dikarenakan ia sejalan dengan setiap masa dan tempat, layak bagi setiap zaman dan tempat.

Oleh karena itu, ia mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan waktu. Serta semangat dalam menyambut kemashlahatan manusia, kebutuhan mereka yang bermacam dan berubah-ubah pada setiap waktu, serta perealisasiannya. Oleh karena itu dapat dikatakan: sesungguhnya pendidikan muslim terus berlangsung dalam perjalanan kehidupannya semuanya, dari lahir sampai liang lahat. Yakni keberlangsungannya tidak beku pada satu urusan dari urusanurusannya.

Akan tetapi, ia adalah pendidikan selalu terbarukan dan menerima perkembangan positif dengan keberlangsungan, dikarenakan di dalamnya terdapat kelenturan, dan kemampuan untuk penyesuaian

kondisi yang menjadikannya dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman, tempat dan situasi. Serta memahami konsekuensi perkembangan dan perubahan. Hal itu akan dijelaskan lebih banyak dalam kekhususan berikutnya.

6. Pendidikan yang Stabil dan fleksibel

Sebagian orang beranggapan dua sifat (Stabil dan fleksibel) ini bertentangan secara garis besarnya. Sesungguhnya kedua sifat itu berada dalam pendidikan Islam. Makna *tsabat* (tetap) dalam pendidikan Islam, bahwa ia muncul dari sumber agama Islam yang tetap dalam kitab Allah (Alquran), dan sunnah Rasulullah. Sumber-sumber utama ini mencakup banyak *tsawabi* (ketetapan) yang tidak mungkin diedit, diganti, atau dirubah, seperti tauhid yang murni, iman yang sempurna, kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, melarang kedzoliman, ketidakadilan, dan melukai orang lain, pelarangan dalam merusak bumi dengan bentuk apapun, pengharaman riba, dusta dan khianat, tebusan untuk tidak menipu, curang, berakhlak buruk, dan semacamnya yang tidak layak diketahui oleh seorang muslim dan dilakukannya.

Begitu juga dalam waktu yang sama, pendidikan Islam termasuk *fleksibel* dan tidak kaku, dikarenakan ia mampu menjawab pada semua zaman dan tempat mengenai kebutuhan manusia (individu dan sosial) dalam kehidupan mereka, dari perkara yang baru muncul, pembaruan zaman, melalui metode penelitian mengenai hal itu, berusaha untuk menyusun dan *intimbat* (penentuan) bagi orang yang berhak melakukan itu dari kalangan ahli ilmu yang handal dalam ragam kehidupan.

Hal itu tidak lain karena gambar kehidupan – sebagaimana yang dilihat oleh Islam selalu berubah, dan pasti berubah dan berkembang. Akan tetapi, seyogyanya – dalam perubahan dan perkembangannya dipanyungi peraturan dengan manhaj Allah yang telah diturunkan agar mendampingi selalu pertumbuhan kehidupan, dan menentukan arahnya sehingga tidak tersesat di jalan.

7. Pendidikan yang ideal dan realistis

Pendidikan Islam berusaha menggapai tujuan besar, yaitu mewujudkan manusia ideal dalam kehidupan, membentuk akhlak, membantu tatacara berinteraksi dengan orang yang disekitarnya, dan makhluk yang di sekitarnya, mendorong manusia untuk naik pada derajat

yang sempurna yang mungkin diraih. Akan tetapi dalam waktu yang sama, ia realistis dan mudah. Dikarenakan ia melihat manusia dan berinteraksi dengannya sesuai realita manusia.

Oleh karena itu, ia sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia, dan sesuai dengan kemampuan, dan karakteristik manusia. Ia memperhatikan kelemahan dan emosional manusia, banyak bebannya, dan beragam kesibukannya. Hal yang dapat menggabungkan antara sifat realistis dan idealitas, bahwa pendidikan Islam memperhatikan keinginan, syahwat, kebutuhan manusia yang berbeda-beda yang menjadi fitrah. Kemudian hal itu dilakukan proses penguatannya, pengaturannya, dan mencerdaskannya sedikit demi sedikit sampai derajat ideal yang mungkin diraih.

Pendidikan Islamiyah adalah pendidikan yang ideal (مثالية) dalam harapan, dan tujuan-tujuannya, dan pendidikan yang realistis (واقعية) dan mudah dalam praktik, dan prosesnya. Pendidikan Islam tidak memberi tanggung jawab kepada manusia dengan hal yang tidak disanggupinya, dan tidak mewajibkan pada perkara yang tidak disanggupinya. Akan tetapi pendidikan Islam mengerti batas kemampuannya, kebutuhan dan keperluannya.

Kemudian memperhatikannya saat melaksanakan beban kewajiban dan hal itu dilihat dengan cara pandang yang adil saat perhitungan amal kewajibannya. Hal yang menggambarkan idealitas lagi realistis ini dalam pendidikan Islamiyah adalah firman Allah dalam Alquran al-Karim:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqoroh [02]: 286)

Ada isyarat utama yang menegaskan sifat realistis pada pendidikan Islam, yaitu berdirinya di atas ilmu dan pengetahuan, jauh dari *khurofat*,

dan perkiraan yang naif lagi tidak bersandar pada asas ilmu. Islam telah menganjurkan manusia untuk mempekerjakan akal mereka untuk berpikir, merenung mengenai keagungan ciptaan Allah.

8. Pendidikan individu dan masyarakat

Pendidikan Islam dimulai pertama kali pergerakannya dari dalam seseorang, yakni dari hatinya, dan jiwanya, agar menjadikan seseorang berinteraksi dengan Allah di atas asas 'baik dalam beramal' yaitu beribadah kepada Allah seakan dia melihat-Nya. Dari sini, ia tidak membutuhkan seorang pengawas yang mengawasinya.

Pendidikan Islam sebagai penanggung jawab manusia semuanya, dari perkataannya, perbuatannya, niatnya, dan apa yang dihasilkan dari perbuatannya. Hal itu bertolak dari firman Allah *"Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."* (QS. Ath-Thur [52]: 21).

Memperhatikan pendidikan masyarakat (sosial) di atas tanggung jawab individu. Di mana (pendidikan individu) membentuk pilar-pilar dan bangunan, kemudian itu mempengaruhi sosial masyarakat. Apabila setiap orang mengetahui hal dalam masyarakat dari kewajiban, dan tanggung jawab, maka ia akan berdiri dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki masyarakat dan mengaturnya.

Sebaliknya, apabila seorang tidak melaksanakan kewajibannya, dan tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka hal itu akan merusak bangunan masyarakat dan berpengaruh negatif kepadanya. Makna ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam menekankan keterkaitan yang erat antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial. Di mana, salah satunya saling membutuhkan yang lainnya.

Oleh karena itu, pendidikan Islam semangat untuk mengkaitkan tanggung jawab individu dengan tanggung jawab kelompok (sosial) dan penyempurnaan keduanya. Hal itu dikarenakan manusia walaupun memiliki entitas tersendiri- adalah anggota dalam kelompok (masyarakat), dan bertanggung jawab terhadapnya. Kelompok (masyarakat) bertanggung jawab pada semua anggotanya yang terdiri dari bagianbagian. Di mana kelompok dapat memberi pengaruh kepada mereka, dan terpengaruh dari mereka.

9. Pendidikan Manusiawi dan Global

Pendidikan Islam adalah pendidikan untuk manusia semuanya. Pendidikan Islam membawa kemashlahatan dan kesesuaian bagi seluruh

manusia. Tidak terbatas pada satu aitem dari periode-periodenya pada kelompok tertentu dari manusia, atau bangsa tertentu dari bangsa-bangsa. Akan tetapi, ia adalah pendidikan manusiawi yang global untuk manusia semuanya.

Hal ini bertolak dari makna firman Allah Swt.,: *“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”* (QS. Saba’ [34]: 28).

Diantara gambaran yang jelas mengenai kemanusiawian dan globalisasi pendidikan Islam, bahwa ia menolak hal yang disebut dengan perpecahan unsur, dikarenakan ia adalah pendidikan tidak mengutamakan (satu bagian) di dalamnya, tidak membedakan individu atas individu lain, satu bangsa atas bangsa lain, satu jenis atas jenis lain melainkan dengan ketakwaan.

Hal ini bertolak dari firman Allah Swt.,: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujurot [49]: 13).

Diantara perkara yang menekankan kemanusiawian dan globalisasi pendidikan Islam, bahwa ia berdiri di atas pondasi dasar yang berkaitan dengan ukhuwah Imaniah. Muslimun di timur dan di Barat belahan bumi, dari semua jenis dan warna (kulit) adalah anggota dalam keluarga (besar) Islam. Islam mempersatukan hati-hati mereka, mengumpulkan mereka pada satu hati dan satu jasad. Ia adalah pendidikan global, dan Islam adalah risalah global untuk semua manusia.

Globalisasi risalah Islam berarti juga globalisasi pendidikan Islam. Di antara petunjuk globalisasi dan manusiawi pendidikan Islam, bahwa ia berusaha membentuk (Manusia yang Sholih), bukan sekedar membentuk (Tempat yang Sholih/baik). Perbedaan antara keduanya sangat besar dan jelas. Tempat yang shalih berusaha memuliakan peraturan-peraturan dalam masyarakatnya, dan daerahnya yang ia hidup di dalamnya dengan dengan segala kemampuannya tanpa melampaui batas dan menyelisihinya, terkhusus lagi dalam batasan-batasan di masyarakat dan tempat itu.

Adapun Muslim yang Sholih, penghormatannya pada dirinya, orang lain, masyarakatnya, daerahnya, dan keteguhannya dengan rambu-rambu, dan peraturan yang muncul dari antusiasnya untuk teguh dengan rambu-rambu Robbnya, yang selalu melihatnya, mengawasinya dalam hal rahasia dan nyata, dalam perkataan dan perbuatannya, baik hal itu dalam masyarakatnya dan daerahnya atau diluar (masyarakatnya dan daerahnya).

Hal ini berarti bahwa tempat yang baik berkaitan dengan kebaikan yang terbatas pada batasan-batasan daerahnya yang ia hidup di dalamnya, atau masyarakatnya yang ada disekitarnya. Adapun manusia yang sholih (baik), maka kemaslahatannya terus berlangsung sampai kapanpun, dan di mana pun. Bukan sekedar ini saja, di antara petunjuk globalisasi dan manusiawi pendidikan Islam, bahwa ia adalah pendidikan menetapkan pentingnya kehormatan manusia, menekankan untuk memuliakannya, menjaga semua hak-hak yang mejaga manusia, dan berinteraksi di atas asas-asasnya pada setiap waktu dan tempat, tanpa melihat hal lain yang terdapat ketimpangan dan perbedaan diantara kalangan manusia, seperti warna, bahasa, jenis, kedudukan sosial, kredibilitas, nasab, kaya, miskin, dan semacamnya dari hal-halyang tidak memiliki nilai dan kebaikan dalam pandangan Islam selama tidak diiringi dengan ketakwaan dan keimanan.

C. Doktrin Akidah dalam Pendidikan Islam

Akidah merupakan suatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, apakah berwujud agama atau lainnya. Akidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. Akidah bagaikan pondasi bangunan. Akidah merupakan misi dakwah yang dibawa oleh Rasul Allah swt. yang pertama sampai dengan yang terakhir. Akidah tidak berubah-ubah karena pergantian zaman dan tempat, atau karena perbedaan golongan atau masyarakat.

Abdul Azzam (tt: 20) menyatakan bahwa akidah adalah ikatan perjanjian dan buhul tali yang sangat kuat yang terpatri (berurat akar) serta tertanam di lembah hati yang paling dalam. Syeikh Ali Tanthawi (1977: 32) menjelaskan bahwa akidah adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai *Rabban Wahidin* (Pemelihara Tunggal), *Malikan Mukhtaran Mutasharrifan* (Raja dan Penguasa yang Tiada Tertandingi), *Ilahan Mufradan* (Tuhan Yang Esa) dengan jalan beribadah

dan meyakini segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw.

Hasan al-Bana (tt: 465), di dalam bukunya *Al-Aqaid* menyatakan bahwa akidah adalah beberapa perkara yang wajib di yakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan". Jadi, akidah itu bukan berisi konsep sistem teologi semata, tetapi berisi segala macam persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan. Akidah merupakan sejumlah nilai yang diyakini, dengan kekuatan pokok terletak pada tauhid atau dalam istilah lain disebut teologi.

Disisi lain, Sayid Sabiq (1985: 11) menyatakan bahwa akidah merupakan ruh (semangat, jiwa) bagi setiap orang. Dengan berpegang teguh kepada akidah itu, seseorang akan menghayati kehidupan yang baik (hayatan thaiyibah). Tanpa akidah, mati pulalah semangat dan ruh manusia. Akidah itu laksana cahaya, apabila tidak memancar, maka manusia akan tersesat dalam liku-liku kehidupan ini dan kemudian akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang dalam. Selain dari itu, akidah tersebut menjadi sumber dari sifat-sifat yang lembut dan kasih saying, tempat menyemaikan perasaan-perasaan yang halus dan indah, juga menjadi tempat tumbuhnya budipekerti (akhlak) yang mulia dan utama.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aqidah merupakan ajaran agama tentang keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang dibenarkan oleh hati terpatri kuat ke dalam lubuk jiwa dan dapat menimbulkan rasa tentram dan tenang serta keyakinan dalam hati. Kepercayaan dan keyakinan itu nantinya akan menjadi landasan dan pegangan dalam melakukan aktifitas yang lain, sehingga dalam melaksanakan aktifitas tidak bertentangan dengan kepercayaan dan keyakinannya.

Seyyed Hossein Nasr (2013: 69) menyatakan term Allah menunjukkan Tuhan yang dalam intern umat Islam menjadikan pondasi tauhid, *La ilaha illa Allah* (tidak ada Tuhan selain Allah) sebagai doktrin akidah yang sempurna tentang sifat Tuhan. Kalimat *La ilaha illa Allah* memang singkat tetapi terkandung doktrin akidah sekaligus menjadi rukun pertama dan utama iman dan Islam, sehingga rukun-rukun Islam yang lain dijiwai oleh kalimat tersebut. Dengan kata lain bahwa semua rukun iman dan Islam, bahkan semua kebajikan dan amal saleh akan

menjadi sia-sia dan tidak bernilai, bila doktrin akidah ini tidak diyakini dan diamalkan.

Harun Nasution (2012: 934-935) dalam Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa antara akidah merupakan kosideran tauhid Rububiyah dan Uluhiyah yang harus sama-sama diyakini dan diamalkan. Tauhid Rububiyah harus diyakini dengan pengakuan bahwa hanya satu Tuhan yang menciptakan dan memelihara. Selain itu, dalam hal tauhid Uluhiyah/Ubudiyah adalah harus taat dan konsekuen menjalankan syariat. Tauhid Rububiyah ialah suatu keyakinan seorang muslim bahwa alam semesta ini beserta isinya telah diciptakan Allah swt. Tauhid Rububiyah akan rusak manakala seseorang masih mengakui atau meyakini adanya pihak-pihak lain yang ikut andil bersama Tuhan dalam mencipta, mengatur, memelihara, dan menguasai alam semesta ini. Sedangkan tauhid Uluhiyah ialah percaya atau meyakini sepenuhnya bahwa Allah swt. yang berhak menerima peribadahan makhluk, dan hanya Allah swt. yang sebenarnya harus disembah. Tauhid Uluhiyah ini sering diidentikkan dengan tauhid Ubudiyah, karena sesungguhnya adanya pengabdian yang hanya ditujukan kepada Allah swt. merupakan konsekuensi dari keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. Kata uluhiyah dinisbatkan kepada kata al-Ilah, sedangkan ubudiyah dinisbatkan kepada abada, atau abdun (hamba), *Abdullah* (hamba Allah).

Pendidikan Islam diajarkan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam yang berdasar pada akidah murni melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan nasional.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dipelajari sejak di sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi umum, memiliki manfaat untuk memberi pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam yang berbasis akidah. Kegunaan itulah maka Pendidikan Agama Islam akan memberikan kemampuan kepada peserta didik tentang agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga Negara. Berkenaan dengan itulah, dipahami bahwa dengan Pendidikan Agama Islam, peserta didik baik siwa maupun mahasiswa

akan dapat memiliki kepribadian ideal yang diharapkan sesuai tuntunan akidah.

D. Manusia sebagai Subjek dan Objek Pendidikan

Objek ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang merupakan bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Inti pembahasan atau pokok persoalan dan sasaran material dalam ilmu pengetahuan sering disebut sebagai objek material ilmu pengetahuan. Sedangkan cara pandang atau pendekatan-pendekatan terhadap objek material ilmu pengetahuan biasa disebut sebagai objek formal. Dari berbeda-bedanya objek ilmu pengetahuan ini timbullah ragam dan corak ilmu pengetahuan.

Pengetahuan tentang objek material dan objek formal ilmu pengetahuan, dapat mengetahui bidang keilmuan apakah yang dimungkinkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang ada. Namun yang jelas, ilmu pengetahuan harus ada objeknya, baik objek material maupun objek formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu jiwa dan ilmu manusia yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material sama (manusia), akan tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama, sedangkan objek formalnya berbeda.

John Dewey (1966) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan semesta manusia. Berdasarkan pendapatnya, maka mendidik ialah membantu anak dengan sengaja (dengan jalan membimbing) menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, baik biologis, psikologis, paedagogis maupun sosiologis.

Sejatinya, manusia merupakan subjek pendidikan, selain menjadi objek pendidikan. Sebagai objek pendidikan, manusia menjadi sasaran untuk melaksanakan proses pendidikan, sedangkan sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Setiap manusia harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Melalui pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai nilai moral mulia. Mendidik manusia

bermaksud mendidik insaniah manusianya. Insaniah manusia terdiri dari empat elemen, yaitu akal, roh atau hati, nafsu dan fisik atau jasmani. Keempat-empat elemen inilah yang perlu dididik dan dibangun. Demikianlah proses pendidikan itu seharusnya dilakukan.

Hasil dari pendidikan insaniah, lahirlah kemajuan insaniah ataupun apa yang kita namakan pembangunan insani. Apabila insan telah terbangun, lahirlah akhlak yang baik, manusia yang jujur, berkasih sayang, pemurah, takut akan Tuhan, bertakwa, mengutamakan orang lain, yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya, dan berbagai sifat mulia lainnya. Sementara dari pendidikan material atau kebendaan maka terhasillanlah kemajuan lahiriah dan kemajuan fisik.

E. Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Istilah *Global Village* pertama kali diperkenalkan oleh Marshall McLuhan, seorang pakar komunikasi asal Kanada. Ia menggambarkan dunia modern sebagai “desa global” di mana batas-batas geografis, budaya, dan sosial menjadi kabur karena kemajuan teknologi komunikasi. (McLuhan, M., & Powers, B. R.: 2011; Logan, R. K.: 2010; Grosswiler, P. (Ed.): 2010). Dalam konsep ini, seluruh umat manusia dapat saling terhubung secara cepat dan langsung melalui media digital, seperti internet, televisi, dan media sosial. Akibatnya, dunia terasa semakin kecil dan interaksi antarindividu dari berbagai belahan bumi menjadi sangat mudah dilakukan. (Ratti, C., & Claudel, M.: 2016; Croteau, D., & Hoynes, W.: 2019).

Fenomena *Global Village* muncul sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi yang melanda seluruh sektor kehidupan. Kecepatan arus informasi dan kemudahan akses data membuat masyarakat dunia seolah hidup dalam satu komunitas besar yang saling berhubungan. Setiap peristiwa yang terjadi di satu tempat dengan cepat diketahui oleh masyarakat di tempat lain, bahkan dalam hitungan detik. Hal ini menciptakan keterikatan dan ketergantungan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.

Dalam konteks sosial budaya, *Global Village* memunculkan bentuk baru interaksi antarbangsa yang didasarkan pada pertukaran informasi, budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Tradisi lokal mulai berbaur dengan budaya global melalui berbagai platform digital. Hal ini melahirkan

tantangan besar dalam menjaga identitas dan nilai-nilai asli suatu bangsa, termasuk nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus globalisasi budaya.

Secara ekonomi dan pendidikan, Global Village membuka ruang kerja sama lintas negara, memperluas peluang belajar, dan menghadirkan berbagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Dunia pendidikan tidak lagi terikat ruang dan waktu karena setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dari sumber manapun. Dengan demikian, konsep Global Village menandai era baru dalam transformasi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar.

Namun, di balik peluang yang luas tersebut, Global Village juga membawa tantangan serius berupa kesenjangan digital, penetrasi budaya asing, dan penyebaran nilai-nilai yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, memahami makna dan dampak Global Village menjadi sangat penting bagi pendidikan Islam, agar mampu merespons perubahan global tanpa kehilangan jati dirinya.

Era digital yang melahirkan Global Village memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Melalui teknologi internet, peserta didik dan pendidik dapat memperoleh sumber belajar dari seluruh dunia secara instan dan interaktif. Hal ini memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sebelumnya terbatas pada ruang kelas konvensional.

Selain itu, era digital juga memfasilitasi inovasi dalam metode pembelajaran. Teknologi seperti e-learning, video conference, simulasi digital, dan platform pembelajaran daring memungkinkan proses belajar yang lebih fleksibel, menarik, dan efisien. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Pendidik pun memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menyajikan materi ajar yang relevan dan kontekstual.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kolaborasi dan konektivitas global antarpendidik dan pelajar. Melalui media digital, mereka dapat saling bertukar ide, penelitian, dan pengalaman lintas negara. Hal ini mendorong terbentuknya jejaring keilmuan internasional yang memperkaya wawasan dan mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk dalam studi keislaman.

Dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam, era digital membuka peluang besar untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas dan cepat. Platform seperti YouTube, podcast, dan media sosial menjadi sarana efektif bagi para ulama dan pendidik Muslim untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada masyarakat dunia. Dakwah Islam kini dapat menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Namun demikian, semua kemudahan ini perlu diimbangi dengan kecerdasan digital (*digital literacy*) dan kesadaran etis dalam penggunaannya. Tanpa bimbingan moral dan kontrol nilai, kemajuan teknologi justru dapat menimbulkan penyimpangan, seperti penyalahgunaan informasi, hoaks, dan degradasi moral. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai etis agar kemajuan teknologi benar-benar menjadi sarana menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.

Pendidikan Islam di era *Global Village* menghadapi realitas baru yang penuh dinamika. Transformasi teknologi dan komunikasi menuntut lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Hal ini mencakup perubahan paradigma pendidikan dari sistem tradisional ke model pembelajaran yang berbasis digital, interaktif, dan kolaboratif. Pendidikan Islam kini tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, guru dan lembaga pendidikan Islam perlu menjadi agen transformasi yang mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran dan dakwah. Penggunaan media sosial, platform e-learning, dan konten digital Islami menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat global yang semakin terbuka. Kurikulum pendidikan Islam juga perlu disesuaikan agar mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Era *Global Village* juga menuntut peserta didik Muslim untuk memiliki literasi global dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh arus budaya luar yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam harus menanamkan kesadaran identitas keislaman yang kuat sekaligus sikap terbuka terhadap kemajuan ilmu

dan perbedaan. Dengan demikian, Islam dapat tampil sebagai agama yang dinamis, universal, dan relevan dengan tantangan masa kini.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Qur'ani. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan toleransi menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi Muslim yang unggul dan berakhlak mulia. Dalam dunia global yang kompetitif, keunggulan moral dan spiritual menjadi pembeda utama bagi lulusan pendidikan Islam.

Akhirnya, pendidikan Islam di era Global Village tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus globalisasi, melainkan harus menjadi pelaku aktif yang memberikan warna positif bagi peradaban dunia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kecanggihan teknologi, pendidikan Islam berpeluang besar menjadi pionir pembaruan peradaban global yang berkeadaban, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan universal.

Tantangan pendidikan Islam saat ini jauh berbeda dengan tantangan pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat pada zaman klasik dan pertengahan. Baik secara internal maupun eksternal tantangan pendidikan Islam di zaman klasik dan pertengahan cukup berat, namun secara psikologis dan ideologis lebih mudah diatasi. Secara internal ummat Islam pada masa masa klasik masih fresh (segar). Masa kehidupan mereka dengan sumber ajaran Islam, yakni Alquran dan al-Sunnah masih dekat, dan semangat militansi dalam berjuang memajukan Islam juga masih amat kuat. Sedangkan secara eksternal, ummat Islam belum menghadapi ancaman yang serius dari negara-negara lain, mengingat keadaan negara-negara lain (Eropa dan Barat) masih belum bangkit dan maju seperti sekarang.

Tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang selain menghadapi pertarungan ideologi-ideologi besar dunia sebagaimana tersebut di atas, juga menghadapi berbagai kecenderungan yang tak ubahnya seperti badai besar (*turbulence*) atau tsunami. Menurut Daniel Bell (1973), di era globalisasi saat ini keadaan dunia ditandai oleh lima kecenderungan sebagai berikut.

Pertama, kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Karena, dunia pendidikan menurut mereka juga termasuk yang dipergangkan, maka dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada logika bisnis. Munculnya

konsep pendidikan yang berbasis pada sistem dan infra-struktur, manajemen berbasis mutu terpadu (TQM), entrepreneur university dan lahirnya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak lain, karena menempatkan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Penyelenggaraan pendidikan saat ini tidak hanya ditujukan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan manusia atau mencetak manusia yang salih, melainkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang economic minded, dan penyelenggaraannya untuk mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya.

Kedua, kecenderungan fragmentasi politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Mereka semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, egaliter, transparan, akuntabel, cepat, tepat dan profesional. Mereka ingin dilayani dengan baik dan memuaskan. Kecenderungan ini terlihat dari adanya pengelolaan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (shool based manajemen), pemberian peluang kepada komite atau majelis sekolah/madrasah untuk ikut dalam perumusan kebijakan dan program pendidikan, pelayanan proses belajar mengajar yang lebih memberikan peluang dan kebebasan kepada peserta didik, yaitu model belajar mengajar yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (Paikem).

Ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi tinggi (high technologie) khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TKI) seperti komputer. Kehadiran TKI ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, tidak dibatasi waktu dan tempat. Teknologi tinggi ini juga telah masuk ke dalam dunia pendidikan, seperti dalam pelayanan administrasi pendidikan, keuangan, proses belajar mengajar. Melalui TIK ini para peserta didik atau mahasiswa dapat melakukan pendaftaran kuliah atau mengikuti kegiatan belajar dari jarak jauh (distance learning). Sementara itu peran dan fungsi tenaga pendidik juga bergeser menjadi semacam fasilitator, katalisator, motivator, dan dinamisator. Peran pendidik saat ini tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan (agen of knowledge). Keadaan ini pada gilirannya mengharuskan adanya model pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan teknologi (TIK).

Keempat, kecenderungan interdependensi (kesaling-tergantungan), yaitu suatu keadaan di mana seseorang baru dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Berbagai siasat dan strategi yang dilakukan negara-negara maju untuk membuat negara-negara berkembang bergantung kepadanya demikian terjadi secara intensif. Berbagai kebijakan hegemoni politik seperti yang dilakukan Amerika Serikat misalnya, tidak terlepas dari upaya menciptakan ketergantungan negara sekutunya. Ketergantungan ini juga terjadi di dunia pendidikan. Adanya badan akreditasi pendidikan baik pada tingkat nasional maupun internasional, selain dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga menunjukkan ketergantungan lembaga pendidikan terhadap pengakuan dari pihak eksternal. Demikian pula munculnya tuntutan dari masyarakat agar peserta didik memiliki keterampilan dan pengalaman praktis, menyebabkan dunia pendidikan membutuhkan atau tergantung pada peralatan praktikum dan magang. Selanjutnya kebutuhan lulusan pendidikan terhadap lapangan pekerjaannya, menyebabkan ia bergantung kepada kalangan pengguna lulusan.

Kelima, kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in culture*) yang mengakibatkan terjadinya pola pikir (*mindset*) masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Saat ini sebelum seseorang belajar atau masuk kuliah misalnya, terlebih dahulu bertanya: nanti setelah lulus bisa jadi apa? Dan berapa gajinya?. program-program studi yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sendirinya akan terpinggirkan atau tidak diminati. Sedangkan program-program studi yang menawarkan pekerjaan dan penghasilan yang baik bagi lulusannya akan sangat diminati. Tidak hanya itu, kecenderungan penjajahan baru dalam bidang kebudayaan juga telah menyebabkan munculnya budaya pop atau budaya urban, yaitu budaya yang serba hedonistik, materialistik, rasional, ingin serba cepat, praktis, pragmatis dan instan. Kecenderungan budaya yang demikian itu menyebabkan ajaran agama yang bersifat normatif dan menjanjikan masa depan yang baik (di akhirat) kurang diminati. Mereka menuntut ajaran agama yang sesuai

dengan budaya pop dan budaya urban. Dalam keadaan demikian, tidaklah mengherankan jika mata pelajaran agama yang disajikan secara normatif dan konvensional menjadi tidak menarik dan ketinggalan zaman. Keadaan ini mengharuskan para guru atau ahli agama untuk melakukan reformulasi, reaktulisasi, dan kontekstualisasi terhadap ajaran agama, sehingga ajaran agama tersebut akan terasa efektif dan transformatif.

Disisi lain peluang pendidikan Islam seharusnya bisa ditangkap, diraih dan dimanfaatkan oleh para pemerhati pendidikan dalam rangka pelaksanaan dan implementasi nilai dan tujuan untuk menyongsong masa depan yang penuh kompetisi ditandai dengan munculnya era Masyarakat Ekonomi Asean. Adapun peluang pendidikan Islam bisa dideskripsikan di antaranya:

1. Peningkatan fungsi dan peranan. Seperti diketahui beberapa tahun belakangan fungsi dan peran pendidikan Islam sangat terbatas, dan kadang-kadang terjadi diskriminasi. Outputnya tidak dapat diterima pada jenjang tertentu atau kemampuannya diragukan pada lapangan kerja tertentu. Namun sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan berbagai peraturan penjabarannya, fungsi dan peran lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sudah diperluas bahkan sudah terbuka lebar. Karena itu, peluang ini harus diraih dan didayagunakan oleh segenap potensi penyelenggara pendidikan Islam.
2. Peningkatan persaingan dan antisipasi agama. Selaras dengan era globalisasi, di mana pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, perlu adanya pendekatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama. Namun persoalannya, dalam kondisi yang serba rasionalis, orang menjadi tidak mudah mengambil konsep agama secara komprehensif, baik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat luas.
3. Pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat seharusnya mendorong umat Islam bisa mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini ada dua sasaran utama, yaitu perluasan bidang garapan dan peningkatan kualitas proses serta

output hasil pendidikan. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab bila tidak maka lembaga pendidikan Islam tidak akan mampu berkompetisi yang akhirnya akan ditinggalkan umat.

4. Kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, sangat sulit bagi suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dan berkembang sendiri tanpa mau terlibat dan melibatkan pihak lain. Ini berarti solusi utamanya adalah harus mampu menciptakan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan.

F. Demokratisasi Pendidikan dalam Perspektif Islam

Demokrasi pendidikan merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menempatkan peserta didik, pendidik, dan seluruh unsur pendidikan dalam posisi yang setara, saling menghargai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap praktik pendidikan yang otoriter, tertutup, dan tidak memberi ruang bagi partisipasi aktif peserta didik. Demokrasi pendidikan menekankan pentingnya kebebasan berpikir, penghargaan terhadap keberagaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses belajar mengajar.

Dalam konteks teori pendidikan modern, demokrasi pendidikan berakar dari pandangan John Dewey yang menilai bahwa sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis. Dewey menegaskan bahwa pendidikan yang baik harus memberi pengalaman langsung bagi siswa untuk belajar berpartisipasi, berdialog, dan mengambil keputusan bersama. Dengan demikian, demokrasi pendidikan tidak hanya menjadi sistem pengajaran, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Selain itu, demokrasi pendidikan berorientasi pada pemberdayaan peserta didik agar mampu berpikir mandiri, berpendapat, serta menghargai pandangan orang lain. Guru bukanlah satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator yang mendorong peserta didik untuk menemukan makna pengetahuan secara reflektif. Dalam kerangka ini, hubungan guru dan murid lebih bersifat dialogis, bukan vertikal atau otoritatif.

Lebih jauh, demokrasi pendidikan menghendaki agar setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, gender, maupun agama.

Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang demokratis. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang demokratis harus menjamin inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, demokrasi pendidikan bukan sekadar konsep politik yang diterapkan dalam bidang pendidikan, tetapi merupakan pendekatan etis dan filosofis dalam menciptakan manusia yang merdeka, berilmu, dan bermoral. Ia menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial agar pendidikan benar-benar menjadi wahana pembentukan kepribadian manusia seutuhnya.

Pengertian Demokrasi Pendidikan Islam adalah suatu sistem dan paradigma pendidikan yang menempatkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, dan musyawarah sebagai dasar dalam proses pendidikan, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip tauhid, akhlak, dan syariat Islam. Demokrasi pendidikan Islam memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara aktif, kritis, dan kreatif dalam suasana yang menghargai perbedaan, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan dan moral yang diatur dalam ajaran Islam (Nata, 2012; Syamsuddin, 2018).

Pandangan para ahli pendidikan Islam, demokrasi pendidikan bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab di bawah bimbingan nilai-nilai ilahiah. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensinya secara maksimal, sebagaimana prinsip Islam yang menjunjung tinggi ilmu dan persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Dengan demikian, demokrasi pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk insan kamil—manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia—serta mampu hidup bermasyarakat secara adil, toleran, dan berkeadaban sesuai nilai-nilai Qur’ani (Muhaimin, 2011; Syamsuddin, 2018).

Demokrasi pendidikan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip dasar demokrasi dalam Islam tidak sama dengan konsep Barat yang sepenuhnya bersumber dari rasionalitas manusia, melainkan berakar pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan musyawarah. Dalam pandangan Islam, setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah,

kecuali dibedakan oleh tingkat ketakwaan. Kesenjangan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan yang adil dan partisipatif.

Pendidikan Islam pada dasarnya telah mengandung nilai-nilai demokratis sejak masa Rasulullah SAW. Dalam majelis ilmu Nabi, siapa pun boleh bertanya, berpendapat, dan berdialog secara terbuka. Nabi tidak membedakan antara kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, Arab maupun non-Arab. Semua mendapat hak yang sama untuk memperoleh ilmu. Praktik inilah yang menjadi contoh konkret demokrasi pendidikan dalam Islam.

Lebih jauh, demokrasi pendidikan Islam tidak hanya menekankan kebebasan berpikir, tetapi juga mengikatnya dengan nilai-nilai moral dan akhlak. Kebebasan dalam Islam bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab di bawah aturan Allah. Hal ini mencegah terjadinya penyimpangan moral atau anarki intelektual dalam pendidikan.

Dalam konteks modern, demokrasi pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan sistem pendidikan yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar, mengembangkan potensi spiritual dan intelektual, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Guru dan murid berinteraksi dalam suasana ukhuwah (persaudaraan) dan saling menghormati.

Dengan demikian, demokrasi pendidikan Islam bukan sekadar peniruan terhadap konsep demokrasi Barat, tetapi merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam ranah pendidikan. Ia bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran tauhid yang kuat.

Adapun Prinsip-Prinsip Demokrasi Pendidikan dalam Pandangan Islam adalah: *Prinsip pertama* demokrasi pendidikan dalam Islam adalah musyawarah (syura). Dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38), Allah memuji orang-orang yang bermusyawarah dalam urusan mereka. Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan dalam proses pendidikan sebaiknya diambil melalui dialog dan pertimbangan bersama, baik antara guru dan murid maupun antaranggota lembaga pendidikan. Musyawarah melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara bijaksana.

Prinsip kedua adalah keadilan ('adl). Dalam pendidikan Islam, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi. Keadilan bukan berarti menyeragamkan semua hal, tetapi memberikan hak sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Dengan prinsip ini, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan setiap individu secara optimal.

Prinsip ketiga adalah kebebasan bertanggung jawab (*hurriyyah mas'ulah*). Islam menjunjung tinggi kebebasan berpikir, namun tetap dalam koridor kebenaran dan etika Islam. Peserta didik didorong untuk bertanya, berpendapat, dan berkreasi, tetapi tidak boleh melanggar norma syariat dan akhlak. Kebebasan dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.

Prinsip keempat adalah persamaan (musawah). Semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, "*Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan.*" Prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau gender dalam pendidikan.

Sedangkan *Prinsip kelima* adalah amanah dan tanggung jawab. Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga amanah untuk membentuk akhlak dan karakter. Guru, murid, dan lembaga pendidikan harus menyadari tanggung jawab moral dalam melaksanakan proses pendidikan agar tujuan pembentukan insan kamil (manusia paripurna) dapat terwujud.

Selanjutnya pelaksanaan demokrasi pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang partisipatif dan dialogis. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan mendominasi. Proses belajar mengajar hendaknya mendorong siswa untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan secara bebas namun sopan. Suasana kelas yang terbuka dan inklusif mencerminkan nilai syura dalam pendidikan.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam harus memberi ruang bagi semua pihak—guru, siswa, orang tua, dan masyarakat—untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Misalnya, melalui komite sekolah atau forum musyawarah yang membahas kurikulum, metode pengajaran, dan kegiatan keagamaan. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan.

Pelaksanaan demokrasi juga tercermin dalam penerapan disiplin yang berkeadilan. Hukuman dan penghargaan harus diberikan secara proporsional dan mendidik, bukan bersifat otoriter. Guru hendaknya memberi teladan sikap adil, jujur, dan terbuka. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi tidak hanya diajarkan, tetapi juga diteladankan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Pendidikan Islam yang demokratis juga menekankan pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya. Hal ini sesuai dengan semangat Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Melalui dialog dan toleransi, siswa dapat belajar menghargai perbedaan dan membangun sikap terbuka terhadap keragaman sosial.

Dengan penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut, lembaga pendidikan Islam akan menjadi wadah pembentukan generasi berilmu, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam masyarakat global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Nilai-nilai Al-Qur'an merupakan fondasi utama dalam demokratisasi pendidikan Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu (*'ilm*), keadilan (*'adl*), kebebasan berpikir (*tafakkur*), dan tanggung jawab moral (*taqwa*) sebagai pedoman hidup manusia. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk sistem yang menghargai kebebasan berpikir peserta didik, menumbuhkan tanggung jawab, serta menegakkan keadilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya berorientasi pada pengetahuan kognitif semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual, etika, dan sosial untuk mencapai keseimbangan hidup yang hakiki (Nata, 2012).

Salah satu nilai penting Al-Qur'an adalah pencarian ilmu sepanjang hayat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-'Alaq*: 1-5. Ayat ini menegaskan bahwa belajar merupakan kewajiban bagi setiap Muslim tanpa batas usia, jenis kelamin, atau status sosial. Nilai tersebut mengandung makna bahwa pendidikan dalam Islam bersifat inklusif, terbuka, dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Semangat *iqra'* dalam ayat tersebut juga menjadi simbol kebebasan berpikir dan dorongan untuk menggali pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia (Syamsuddin, 2018).

Selain itu, nilai keadilan (*'adl*) yang diajarkan Al-Qur'an memiliki posisi penting dalam demokrasi pendidikan Islam. Keadilan dalam

pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, tanpa diskriminasi apa pun. Prinsip ini sejalan dengan konsep *egalitarianisme Islam* yang mengakui kesetaraan semua manusia di hadapan Allah. Dengan menegakkan keadilan dalam pendidikan, masyarakat akan terbentuk menjadi komunitas yang harmonis, saling menghargai, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Muhaimin, 2011).

Nilai-nilai Qur'ani juga menekankan pentingnya taqwa dan akhlak sebagai orientasi utama dalam pendidikan. Demokratisasi pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan berpikir, tetapi juga kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan spiritual. Peserta didik diarahkan untuk menggunakan kebebasannya secara bijak dalam koridor nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, demokrasi dalam pendidikan Islam melahirkan manusia berkarakter *insan kamil*—yaitu individu yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif terhadap peradaban global (Syamsuddin, 2018; Nata, 2010).

Nilai berikutnya adalah keadilan dan kesetaraan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa: 135. Pendidikan Islam harus menjamin keadilan dalam akses, kurikulum, dan evaluasi. Tidak boleh ada diskriminasi antara siswa kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan. Prinsip ini menjadi dasar moral bagi penyelenggara pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Selain itu, nilai musyawarah (syura) dalam QS. Ali Imran: 159 mendorong penerapan pendidikan yang partisipatif. Guru dan siswa berinteraksi dalam suasana saling menghormati, mendengar pendapat, dan bersama-sama mencari kebenaran. Musyawarah dalam pendidikan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas.

Akhirnya, pendidikan Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an akan menghasilkan *insan kamil*—manusia yang berilmu luas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan Allah. Demokrasi pendidikan dalam Islam pada hakikatnya adalah perwujudan nilai-nilai Al-Qur'an yang hidup dalam sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Beberapa strategi kunci dapat diterapkan untuk penguatan demokratisasi dalam pendidikan Islam di Indonesia, yaitu:

1. Penguatan Paradigma Inklusif dan Dialogis, dapat dilakukan melalui: (a) Menanamkan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan prinsip Islam seperti *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Dan (b) Mengubah pola pembelajaran dari otoriter menjadi partisipatif dan berbasis dialog.
2. Reformasi Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam, dapat dilakukan melalui: (a) Mendorong sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dan (b) Melibatkan seluruh warga sekolah/madrasah baik guru, siswa, komite, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, dapat dilakukan melalui: (a) Melatih guru agar mampu menerapkan pembelajaran demokratis dan kolaboratif. Dan (b) Menanamkan kemampuan komunikasi empatik, berpikir kritis, serta kemampuan membimbing diskusi dan musyawarah.
4. Penguatan Kurikulum yang Demokratis dan Kontekstual, dapat dilakukan melalui: (a) Menyusun kurikulum yang menanamkan nilai-nilai toleransi, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab sosial. Dan (b) Mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan etika Islam dalam setiap mata pelajaran.
5. Kolaborasi antara Lembaga Pendidikan dan Masyarakat, dapat dilakukan melalui: (a) Membangun kemitraan dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah. Dan (b) Melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis pesantren, masjid, dan madrasah.
6. Pemberdayaan Peserta Didik sebagai Subjek Pendidikan, dapat dilakukan melalui: (a) Memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan organisasi siswa. Dan (b) Menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis melalui OSIS, rohis, dan kegiatan sosial.
7. Penguatan Budaya Musyawarah dan Anti-Kekerasan di Sekolah, dapat dilakukan melalui: (a) Mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog. Dan (b) Menumbuhkan empati, gotong royong, dan saling menghormati antarwarga sekolah.
8. Integrasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PAI, dapat dilakukan melalui: (a) Mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung

- jawab sosial dalam konteks Islam. Dan (b) Menanamkan kesadaran bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan spiritual.
9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah terhadap Otonomi Lembaga Pendidikan, dapat dilakukan melalui: (a) Memberikan ruang inovasi dan kemandirian bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan model demokratis sesuai konteks lokal. Dan (b) Menetapkan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal agar partisipasi pendidikan lebih merata.
 10. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital untuk Demokratisasi Pendidikan, dapat dilakukan melalui: (a) Mendorong penggunaan platform digital untuk menyalurkan aspirasi, kolaborasi, dan inovasi pendidikan. Dan (b) Mengembangkan literasi digital yang etis dan berkeadaban di lingkungan pendidikan Islam.

Daftar Bacaan

- Ahmad bin Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, (1991). *Majmu'atuttawhid*, Beirut : Daar el Fikr.
- Al Banna, Hasan. tt. *Majmu 'at al-Rasail*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-'Audah, Salmān. (2005). *Wa Lākin Kūnū Rabbāniyyīn*, Riyad: Dār al-Thayyibah.
- Al-Ashfahāni, Al-Rāghib. Tt. *Mu'jam Mufradāt Alfādz al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Hilālī, Majdī. (2003). *al-Tharīq Ilā al-Rabbāniyyah Minhājān wa Sulūkān*, Mesir: Dār al-Tauzī wa al-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Al-Jamaly, Muhammad Fadhil, *Nahwa Tarbiyat Mukminat*, (1977). al-syirkat al-Tunisiyat li al-Tauzi'.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Thoumy. (1979). *Falasafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azzam, Abdul, tt. *al-Aqidah wa Atsaruha Fi Bina' al-Jail*. Maktabah ar-Risalah.
- Bell, D. (1973). *The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting*. New York, NY: Basic Books.
- Croteau, D., & Hoynes, W. (2019). *Media/society: Technology, industries, content, and users* (7th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Grosswiler, P. (Ed.). (2010). *Transforming McLuhan: Cultural, critical, and postmodern perspectives*. New York, NY: Peter Lang.
- Hidayat, Rahmat. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam "Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Medan: LPPPI.

- Logan, R. K. (2010). *Understanding new media: Extending Marshall McLuhan*. New York, NY: Peter Lang.
- Mannā` al-Qaththān, (2004). *Mabāhits Fī `Ulûm al-Qur`ān*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Marimba, Ahmad D., (1989) *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung Al-Ma'arif.
- Māzin bin `Abd al-Karīm al-Frêh. (2006). *al-Rāid Durūs Fi al-Tarbiyyah wa al-Da`wah*, Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadrā.
- McLuhan, M., & Powers, B. R. (2011). *The global village: Transformations in world life and media in the 21st century*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Muhammad Ibn Mandzûr. (2003). *Lisān al-`Arab*, Juz I, Kairo: Darul Hadits.
- Muhaimin. (2011). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nasr, Seyyed Hossein. (2013). *Islam; Religion, History and Civilization* diterjemahkan oleh Koes Adiwdjajanto dengan judul *Islam; Agama, Sejarah dan Peradaban*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Harun, et. All,. (2012). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Djambatan.
- Nata, Abudddin. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ratti, C., & Claudel, M. (2016). *The city of tomorrow: Sensors, networks, hackers, and the future of urban life*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sabiq, Sayyid. (1985). *Al-Aqidat al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Abdai Rathomi dengan Judul "Aqidah Islam". Bandung: Diponegoro.
- Said bin Ismail al-Qodhi. (1422 H/2002). *Ushul Tarbiyah al-Islamiyah*, Kairo: Alam al-Kutub.
- Syamsuddin, S. (2018). *Demokrasi pendidikan Islam: Konsep dan implementasi dalam pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tafsir, Ahmad. (1992). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Ramaja Rosdakarya.
- Tanthawi, Syeikh Ali. (1977). *Ta`rif `Amm bi Dinil Islam*. Dar ar-Ra'di.
- Ulwan, Abdullah Nasih. (1990). *Pedoman pendidikan anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Yunus, Mahmud. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah.

Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah

A. Pendidikan Islam dari Masa Ke Masa

1. Pendidikan Islam di Masa Rasul dan Khulafaurrasyidin

Pendidikan Islam memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Pada periode awal Islam, pendidikan berlangsung secara sederhana dan berpusat di Masjid Nabawi, di mana Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pendidik utama bagi para sahabat. Sistem pendidikan kala itu menekankan pada pengajaran Al-Qur'an, hadis, akhlak, serta pembentukan kepribadian Islam. Pembelajaran dilakukan secara langsung dalam bentuk majelis taklim, yaitu forum keilmuan yang bersifat terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun suku bangsa (Nata, 2012; Azra, 2012).

Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW merupakan fondasi utama bagi lahirnya sistem pendidikan Islam di seluruh dunia. Pada masa ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan kepribadian yang utuh berlandaskan wahyu. Rasulullah berperan sebagai pendidik utama (mu'allim) yang menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ilmu pengetahuan secara menyeluruh melalui pendekatan keteladanan, dialog, dan pembiasaan.

Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, yang didirikan di Makkah. Tempat ini menjadi pusat

pembelajaran Islam secara sembunyi-sembunyi pada masa dakwah awal. Di sana Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an, dasar-dasar iman, dan prinsip moral Islam kepada para sahabat terpilih. Model pembelajaran yang digunakan menekankan keterlibatan aktif peserta didik, pengulangan hafalan, dan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam berkembang lebih terbuka dengan berdirinya Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan dan aktivitas sosial. Di masjid ini, Rasulullah mengajarkan berbagai bidang ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, hingga strategi sosial dan pemerintahan. Masjid menjadi simbol integrasi antara pendidikan, ibadah, dan sosial-politik dalam Islam.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, administrasi, dan pembinaan umat, mencerminkan integrasi antara ilmu, amal, dan spiritualitas. Di sinilah lahir tradisi ilmiah Islam yang berbasis pada nilai-nilai wahyu dan moralitas. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan teks keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pendidikan semacam ini menjadi cikal bakal lahirnya sistem pendidikan Islam yang holistik dan humanis, yang kemudian berkembang pada masa sahabat dan tabi'in (Azra, 2012; Muhaimin, 2011). Di Masjid Nabawi pula dikenal Suffah, yaitu tempat tinggal bagi para sahabat miskin yang berfungsi sebagai asrama pendidikan Islam. Para sahabat di Suffah memperoleh pendidikan langsung dari Rasulullah dan sahabat senior. Mereka inilah yang kemudian menjadi guru-guru dan penyebar Islam ke berbagai wilayah setelah wafatnya Rasulullah.

Kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah mencakup tiga aspek utama: keimanan (aqidah), ibadah, dan akhlak. Pengajaran dilakukan dengan metode kontekstual, yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan umat. Rasulullah juga menggunakan berbagai metode pengajaran seperti tanya jawab, kisah, dan demonstrasi amal perbuatan yang menanamkan nilai keteladanan.

Setelah wafatnya Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin melanjutkan sistem pendidikan yang telah diletakkan dasar-dasarnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menekankan pentingnya pembinaan umat melalui pendidikan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka juga mendorong penyebaran ilmu dengan mengutus para sahabat ke berbagai

daerah. Pada masa Khulafaur Rasyidin (632–661 M), sistem pendidikan mulai berkembang dengan munculnya lembaga-lembaga pengajaran seperti kuttab (tempat belajar anak-anak) dan halaqah di masjid. Selain mengajarkan baca tulis dan hafalan Al-Qur'an, pendidikan mulai mencakup bidang ilmu hukum Islam, sejarah, dan bahasa Arab. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penyebaran guru ke berbagai wilayah Islam.

Pada masa Abu Bakar As-Shiddiq, kegiatan pendidikan berfokus pada pengumpulan dan pelestarian Al-Qur'an. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi kehilangan hafalan seiring wafatnya para penghafal. Di sinilah pentingnya lembaga formal mulai tampak, yaitu tim pengumpul wahyu yang berfungsi seperti institusi pendidikan teks suci.

Umar bin Khattab kemudian memperluas wilayah Islam dan mengirim guru-guru ke daerah-daerah baru seperti Syam, Irak, dan Mesir. Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan pemerintahan Islam, serta mendorong pembentukan lembaga keilmuan di pusat-pusat kota. Pendidikan menjadi instrumen strategis dalam menjaga keutuhan masyarakat Islam.

Pada masa Utsman bin Affan, penyeragaman mushaf Al-Qur'an dilakukan agar pendidikan Islam memiliki standar bacaan yang seragam di seluruh wilayah Islam. Langkah ini menunjukkan pentingnya standardisasi materi dalam pendidikan, sekaligus menandai lahirnya sistem pendidikan terorganisir.

Ali bin Abi Thalib menekankan pendidikan rasional dan moral, dengan membuka ruang bagi pemikiran filosofis dalam memahami ajaran Islam. Masa ini menjadi jembatan menuju berkembangnya tradisi intelektual Islam di kemudian hari. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga pengembangan akal dan budaya ilmu.

Pendidikan Islam di masa Rasul dan Khulafaurasyidin menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sarana intelektual, tetapi juga spiritual dan sosial. Ia berfungsi membentuk manusia kamil — insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia — sesuai dengan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta.

Dengan demikian, sistem pendidikan Islam yang berakar dari masa Rasulullah SAW menjadi model ideal pendidikan sepanjang zaman. Keteladanan guru, keutuhan kurikulum antara iman dan amal, serta

orientasi spiritual menjadi ciri utama pendidikan Islam klasik yang tetap relevan bagi dunia pendidikan modern.

2. Pendidikan pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Setelah masa Khulafaurrasyidin, pendidikan Islam memasuki fase kelembagaan yang lebih mapan pada era Dinasti Umayyah (661–750 M). Pendidikan mulai diorganisir oleh negara dan memiliki struktur yang lebih sistematis. Pengajaran tidak lagi hanya berpusat di masjid, tetapi juga di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Ilmu pengetahuan duniawi seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi mulai diperkenalkan. Khalifah mengirimkan sarjana ke luar negeri dan mendirikan perpustakaan untuk mendukung pengembangan ilmu. Masa ini menjadi titik awal lahirnya pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Pada masa Umayyah, pendidikan berorientasi pada dua bidang besar: agama dan administrasi pemerintahan. Hal ini karena kebutuhan untuk mengelola wilayah kekuasaan yang luas memerlukan tenaga terdidik dalam bidang bahasa Arab, tata pemerintahan, dan pengetahuan umum. Guru-guru (*mu'allim*) diberi penghargaan yang tinggi karena berperan penting dalam membentuk aparatur negara.

Pendidikan dasar dikenal dengan istilah *kuttab*, yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Lembaga ini tersebar di berbagai kota Islam dan menjadi pondasi awal pendidikan formal. Selain Al-Qur'an, diajarkan pula dasar bahasa Arab, tata bahasa, dan akhlak. Sementara itu, pendidikan menengah dan tinggi berkembang di masjid besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus, di mana ulama mengajar berbagai disiplin ilmu. Di sini lahir para ilmuwan dan pemikir besar yang menjadi pelopor peradaban Islam klasik.

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Islam ke arah yang lebih ilmiah dan multidisipliner. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia dengan berdirinya Bait al-Hikmah (*House of Wisdom*), tempat para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Periode Abbasiyah (750–1258 M) menjadi masa keemasan pendidikan Islam. Lembaga *Bayt al-Hikmah* di Baghdad menjadi pusat studi dan penerjemahan karya ilmuwan Yunani ke bahasa Arab. Pendidikan berkembang pesat dengan sistem kurikulum yang mencakup berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun rasional. Ilmuwan seperti Al-

Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali lahir dari sistem pendidikan yang progresif dan kosmopolit ini.

Masa Abbasiyah, pendidikan tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga rasional dan eksperimental. Ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki karakter terbuka terhadap pengetahuan universal selama selaras dengan nilai-nilai tauhid.

Peran ulama, cendekiawan, dan penerjemah sangat besar dalam membentuk tradisi intelektual Islam. Tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa Islam tidak anti terhadap ilmu rasional, tetapi justru menjadikannya sarana memahami kebesaran Allah.

Kurikulum pendidikan Abbasiyah bersifat komprehensif dan terbagi menjadi dua jenis ilmu: *'ulum al-naqliyyah* (ilmu keagamaan) dan *'ulum al-'aqliyyah* (ilmu rasional). Keseimbangan antara keduanya menunjukkan paradigma integratif dalam pendidikan Islam yang menolak dikotomi ilmu.

Metode pendidikan di masa ini mulai beragam: halaqah, debat ilmiah (munazharah), dan penulisan kitab. Tradisi ilmiah seperti isnad (rantai periwayatan) dan ijazah (sertifikat pengajaran) memperlihatkan sistem akademik yang canggih pada zamannya. Lembaga pendidikan seperti madrasah mulai berdiri, salah satunya Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam formal yang menggabungkan pelajaran agama dan umum, serta memberikan gaji bagi guru.

Masa Abbasiyah menjadi puncak keemasan peradaban Islam, di mana ilmu dan pendidikan menjadi motor utama kemajuan masyarakat. Hubungan antara negara dan ulama berlangsung dinamis, dengan dukungan finansial bagi para ilmuwan dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, masa Umayyah dan Abbasiyah menandai transformasi besar pendidikan Islam dari sistem tradisional menuju sistem institusional. Pendidikan menjadi kekuatan peradaban yang menegaskan keunggulan umat Islam dalam ilmu, budaya, dan spiritualitas.

3. Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil

Setelah kejatuhan Baghdad pada tahun 1258 M akibat serangan bangsa Mongol, pusat pendidikan Islam mengalami pergeseran ke

wilayah Mesir, Andalusia, dan dunia Timur. Di Mesir, berdirilah Universitas Al-Azhar pada tahun 970 M yang didirikan pada masa Dinasti Fatimiyah. Lembaga ini berkembang menjadi pusat keilmuan Islam terpenting dan tertua di dunia, yang hingga kini tetap menjadi rujukan global dalam studi keislaman, fiqih, tafsir, dan teologi (Nata, 2012; Azra, 2012).

Sementara itu, di Andalusia (Spanyol), pendidikan Islam tumbuh dalam suasana toleransi, keterbukaan, dan dialog antarperadaban. Lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan yang memadukan sains, filsafat, dan teologi. Dari lingkungan intelektual inilah lahir para ilmuwan besar seperti Ibn Rushd (Averroes) dan Ibn Tufail, yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap perkembangan filsafat Islam maupun pemikiran Barat modern (Daudy, 2011; Azra, 2012).

Wilayah Timur Tengah, muncul kerajaan-kerajaan seperti Mamluk di Mesir dan Syam, serta Kesultanan Utsmani di Anatolia. Masing-masing kerajaan ini mengembangkan lembaga pendidikan Islam sesuai dengan karakter dan kebijakan politiknya. Masjid dan madrasah tetap menjadi pusat utama pengajaran agama dan ilmu pengetahuan.

Kesultanan Mamluk dikenal karena mendirikan banyak madrasah dan perpustakaan, serta memberikan perlindungan kepada para ulama. Mereka menjadikan pendidikan sebagai sarana membangun legitimasi politik dan memperkuat moral bangsa. Di wilayah Turki, Kesultanan Utsmani mengembangkan sistem pendidikan yang terorganisir dengan baik. Mereka membentuk hierarki pendidikan mulai dari sekolah dasar (maktab), menengah (madrasah), hingga perguruan tinggi (dar al-uloom). Utsmani juga memperkenalkan sistem beasiswa bagi pelajar berbakat.

Kurikulum pendidikan Utsmani mencakup ilmu agama, logika, matematika, dan ilmu bahasa. Guru-guru dilatih secara profesional, dan sistem ujian diterapkan untuk memastikan kualitas lulusan. Hal ini menunjukkan modernisasi pendidikan Islam sebelum munculnya model pendidikan Barat.

Sementara itu, di wilayah Afrika Utara dan Andalusia (Spanyol Islam), pendidikan berkembang pesat di kota-kota seperti Kordoba, Granada, dan Fez. Di sini berdiri universitas tertua di dunia, seperti Universitas Al-Qarawiyyin (Maroko) dan Al-Azhar (Mesir), yang tetap

eksis hingga kini. Andalusia menjadi simbol harmoni antara ilmu dan budaya, di mana pendidikan Islam melahirkan ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Zuhri, dan Al-Zahrawi. Pendidikan di sana juga terbuka bagi non-Muslim, menunjukkan inklusivitas Islam terhadap perbedaan budaya dan agama.

Kawasan Asia Selatan dan Timur, pendidikan Islam mulai berkembang melalui peran dakwah para ulama dan sufi yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan spiritualitas. Melalui metode dakwah yang damai, Islam diterima secara luas di wilayah seperti India, Melayu, dan Nusantara. Para sufi tidak hanya mengajarkan ajaran tauhid dan akhlak, tetapi juga memperkenalkan sistem pendidikan berbasis zikir, majelis ilmu, dan tarekat sebagai sarana pembinaan moral dan sosial masyarakat (Azra, 2012; Daudy, 2011). Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tengah dan India, seperti Delhi dan Mughal, turut berperan dalam pengembangan madrasah dan pusat keilmuan. Pengajaran hadis, tafsir, dan tasawuf berkembang bersama seni, arsitektur, dan sastra Islam.

Pendidikan Islam pada masa kerajaan kecil tidak hanya berfungsi keagamaan, tetapi juga menjadi alat diplomasi dan pembentukan identitas sosial. Madrasah sering berfungsi sebagai tempat melatih birokrat, ulama, dan penulis istana. Meskipun masing-masing kerajaan memiliki sistem sendiri, esensi pendidikan Islam tetap sama: menanamkan nilai iman, akhlak, dan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan tetap menjadi kekuatan perekat umat di tengah keragaman politik.

Tradisi keilmuan Islam terus berlanjut melalui jaringan ulama antarwilayah yang saling bertukar pengetahuan dan sanad keilmuan. Hal ini memastikan kesinambungan ilmu Islam meskipun pusat-pusat kekuasaan berpindah. Dengan demikian, masa kerajaan-kerajaan kecil menunjukkan daya tahan dan fleksibilitas pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan politik. Selama ilmu dan akhlak dijaga, pendidikan Islam tetap menjadi cahaya peradaban di tengah kegelapan sejarah.

4. Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Masuknya Islam

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan dinamis. Sejak abad ke-13 M, ajaran Islam dibawa oleh para pedagang Arab, Gujarat, dan ulama Nusantara yang tidak hanya berfokus

pada aktivitas perdagangan, tetapi juga pada dakwah dan pendidikan. Mereka mendirikan komunitas Muslim di berbagai pesisir Nusantara, terutama di daerah seperti Samudera Pasai, Aceh, dan Gresik, yang menjadi pusat awal penyebaran Islam. Melalui pendekatan sosial dan kultural, Islam diterima secara damai dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal (Azra, 2012).

Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, surau, dan meunasah memainkan peranan penting dalam membumikan nilai-nilai Islam. Pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tempat santri mendalami ilmu Al-Qur'an, hadis, fiqih, tasawuf, serta bahasa Arab. Selain itu, pesantren juga berperan dalam pembentukan akhlak dan karakter santri melalui kehidupan komunal yang disiplin dan beretika. Tradisi keilmuan di pesantren kemudian melahirkan jaringan ulama yang berkontribusi besar terhadap perkembangan Islam dan pendidikan di Indonesia (Bruinessen, 2015).

Model pendidikan Islam tradisional tersebut membentuk fondasi bagi sistem pendidikan Islam yang mandiri dan berorientasi moral-spiritual. Pesantren menjadi lembaga kaderisasi ulama yang menjaga kesinambungan ajaran Islam sekaligus berperan sebagai agen sosial yang berpengaruh dalam masyarakat. Dalam konteks historis, pesantren juga menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme, karena di dalamnya ditanamkan semangat jihad dan cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya membina aspek keagamaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan kemandirian intelektual (Nata, 2012).

Hingga masa kini, warisan pendidikan Islam tradisional tetap memiliki relevansi yang kuat dan menjadi ciri khas perkembangan Islam di Indonesia. Meskipun mengalami proses modernisasi dan transformasi kelembagaan, pesantren tetap mempertahankan nilai-nilai dasar seperti keteladanan, keikhlasan, kemandirian, dan pencarian ilmu untuk kemaslahatan umat. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi etika pendidikan yang membedakan sistem pendidikan Islam dari sistem sekuler. Pesantren juga beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi kurikulum, penerapan teknologi pembelajaran, dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan identitas keislamannya (Azra, 2012; Zarkasyi, 2015).

Pesantren kini telah berkembang menjadi lembaga pendidikan formal yang diakui negara dan berperan penting dalam mencetak generasi yang religius, cerdas, serta berwawasan kebangsaan. Peran ulama sebagai pendidik, pemimpin moral, dan penggerak sosial tetap menjadi elemen sentral dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan modernitas. Melalui pesantren dan madrasah, pendidikan Islam di Indonesia terus meneguhkan perannya sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan universal (Nata, 2012; Rahardjo, 2019).

5. Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan

Masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi tantangan berat akibat kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial yang lebih mengutamakan pendidikan Barat. Namun, sistem pendidikan Islam bertahan melalui lembaga nonformal seperti pesantren dan madrasah.

Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan memiliki sejarah panjang dan penuh perjuangan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, sistem pendidikan Islam telah berkembang melalui pesantren, surau, dan meunasah yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat pembinaan keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat.

Kedatangan Portugis, Belanda, dan kemudian Inggris membawa dampak besar terhadap arah pendidikan di Indonesia. Kolonialisme tidak hanya menguasai aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berupaya mengendalikan pendidikan demi kepentingan penjajahan. Pendidikan Islam dianggap ancaman karena dapat membangkitkan semangat keagamaan dan perlawanan rakyat.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan dibagi secara diskriminatif. Sekolah-sekolah pemerintah hanya diperuntukkan bagi kalangan elite pribumi atau keluarga yang loyal terhadap kolonial. Sementara itu, pendidikan Islam di pesantren tidak mendapat dukungan, bahkan sering diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial.

Meskipun demikian, pesantren tetap bertahan dan menjadi benteng utama identitas umat Islam. Para kiai mendidik santri dengan semangat keikhlasan dan kemandirian, menanamkan nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Di sinilah terbentuk karakter perlawanan terhadap kolonialisme melalui jalur pendidikan.

Di Sumatra Barat, muncul sistem surau, sedangkan di Aceh dikenal meunasah dan dayah. Ketiganya berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan politik masyarakat. Pendidikan Islam di daerah-daerah tersebut melahirkan tokoh-tokoh pejuang seperti Tuanku Imam Bonjol, Teungku Cik Di Tiro, dan Cut Nyak Dien.

Pada awal abad ke-20, pendidikan Islam mengalami transformasi dengan munculnya organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad, dan Persatuan Islam (Persis). Mereka mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan sistem klasikal dan kurikulum modern yang menggabungkan pelajaran agama dan umum.

Organisasi Muhammadiyah, misalnya, memperkenalkan sistem pendidikan modern dengan pembagian kelas, jadwal tetap, dan buku pelajaran. Tujuannya untuk membentuk umat Islam yang berilmu dan mampu bersaing dengan sistem pendidikan Barat tanpa kehilangan nilai spiritualitas Islam. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri tahun 1926 mempertahankan sistem pesantren tradisional namun mulai memperbarui metode pembelajarannya. Perpaduan antara pendidikan modern dan tradisional ini memperkaya khasanah pendidikan Islam di Indonesia.

Pemerintah kolonial akhirnya menyadari pengaruh besar pendidikan Islam terhadap kesadaran nasional. Maka, lahirlah kebijakan yang lebih ketat seperti pemberlakuan izin mendirikan madrasah dan pengawasan terhadap materi pengajaran. Namun, hal ini justru memperkuat semangat kemandirian lembaga-lembaga Islam. Pendidikan Islam pada masa penjajahan menjadi medan perjuangan ideologis. Di satu sisi, pendidikan Barat menanamkan nilai kolonialisme; di sisi lain, pendidikan Islam menanamkan nilai kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan. Para ulama menjadi tokoh penting dalam mengobarkan semangat nasionalisme melalui pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekadar sarana pengajaran agama, tetapi juga alat perlawanan kultural dan politik terhadap penjajahan. Nilai-nilai keislaman menjadi dasar pembentukan semangat kebangsaan yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Warisan pendidikan Islam masa penjajahan sangat besar bagi bangsa Indonesia. Pesantren dan madrasah menjadi lembaga pendidikan rakyat yang mencetak generasi pejuang. Sistem nilai dan

karakter yang dibangun pada masa ini kemudian menjadi fondasi moral bangsa setelah merdeka.

6. Pendidikan Islam di Awal Kemerdekaan dan Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan Islam memasuki babak baru. Negara yang baru berdiri menghadapi tantangan besar dalam menyatukan berbagai sistem pendidikan yang telah ada, termasuk pendidikan Islam yang telah lama berjalan secara mandiri di bawah tekanan kolonial. Pada masa awal kemerdekaan, para tokoh Islam berjuang agar pendidikan Islam memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional. Hasilnya tampak dalam UUD 1945 Pasal 29, yang menegaskan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan ajaran agama.

Pemerintah mulai memperhatikan pendidikan agama dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah umum. Pada tahun 1946, Kementerian Agama (yang dibentuk pada Januari 1946) secara resmi menangani urusan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pengelolaan madrasah dan pesantren.

Tantangan besar pada masa ini adalah bagaimana menyatukan pendidikan Islam yang tradisional dengan pendidikan nasional yang bercorak sekuler. Upaya integrasi dilakukan melalui pembinaan kurikulum, penyamaan status lembaga, serta pengakuan ijazah madrasah agar setara dengan sekolah umum. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pendidikan Islam berada dalam arus politik nasional yang dinamis. Pemerintah berusaha menanamkan ideologi nasionalisme dan sosialisme Indonesia ke dalam sistem pendidikan, sementara lembaga-lembaga Islam berupaya mempertahankan nilai keagamaannya.

Tahun 1950-an menjadi masa konsolidasi pendidikan Islam. Banyak madrasah berdiri dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam sering kali diwarnai ketegangan ideologis, terutama terkait hubungan agama dan negara. Dalam konteks kurikulum, pendidikan Islam mulai diperluas dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu sosial. Hal ini dimaksudkan agar lulusan madrasah

dapat bersaing di dunia kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tingkat perguruan tinggi, berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta pada tahun 1950 menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. PTAIN merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Lembaga ini didirikan dengan tujuan melahirkan cendekiawan Muslim yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nata, 2012; Zuhdi, 2019).

Seiring perjalanan waktu, PTAIN kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan selanjutnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) di berbagai daerah di Indonesia. Transformasi ini menandai proses integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, sebagai bentuk respons terhadap tuntutan zaman global yang semakin kompleks. UIN kini menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan peradaban. Melalui lembaga-lembaga ini, pendidikan tinggi Islam di Indonesia berhasil menampilkan wajah Islam yang rasional, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Azra, 2015; Abdullah, 2020).

Tokoh-tokoh seperti Prof. Mahmud Yunus, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Wahid Hasyim memiliki peran besar dalam membangun sistem pendidikan Islam nasional. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum sebagai bentuk integrasi keilmuan dalam Islam.

Meskipun berbagai tantangan muncul, masa awal kemerdekaan merupakan periode penting dalam meletakkan dasar legal dan institusional bagi pendidikan Islam. Kementerian Agama menjadi lembaga strategis dalam membina dan mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di masa Orde Lama membentuk karakter bangsa yang religius dan nasionalis. Semangat kemandirian pesantren tetap hidup, sementara madrasah terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pendidikan Islam menghadapi dinamika zaman.

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama menandai proses integrasi antara agama dan negara dalam dunia pendidikan. Perpaduan antara idealisme keislaman dan nasionalisme menjadi kekuatan moral bangsa dalam membangun pendidikan yang berakar pada nilai-nilai ilahi dan kebangsaan.

7. Pendidikan Islam di Zaman Pembangunan

Masa Pembangunan, yang dimulai sejak era Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menandai fase penting modernisasi sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah berorientasi pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, yang turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mulai mendapatkan perhatian sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Salah satu langkah besar pemerintah Orde Baru adalah upaya penyeragaman dan standarisasi pendidikan melalui kebijakan nasional. Pendidikan Islam, terutama madrasah dan pesantren, mulai diintegrasikan ke dalam struktur pendidikan nasional melalui regulasi dan kurikulum yang diatur oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun 1975 menjadi tonggak penting dengan lahirnya SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri). SKB ini mengatur penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa hambatan administratif. Kebijakan ini memperluas akses pendidikan Islam ke ranah publik.

Kurikulum madrasah mengalami modernisasi dengan memasukkan 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama, yang menunjukkan upaya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Langkah ini menandai arah baru pendidikan Islam yang lebih terbuka terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.

Di sisi lain, pesantren juga mengalami revitalisasi. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pesantren melalui program bantuan, pengakuan legalitas, dan pemberdayaan ekonomi. Muncul istilah Pesantren Pembangunan, yaitu pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup (*life skills*) seperti pertanian, perdagangan, dan teknologi tepat guna.

Pada dekade 1980-an, pendidikan Islam di perguruan tinggi juga mengalami perkembangan pesat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) didirikan di berbagai provinsi, menjadi pusat pembinaan calon guru agama, peneliti, dan ulama intelektual. Perkembangan ini turut melahirkan generasi baru akademisi Islam yang berpikir kritis dan kontekstual.

Pemerintah Orde Baru melihat pendidikan Islam sebagai sarana efektif membentuk moral bangsa. Karena itu, pelajaran agama Islam diwajibkan di seluruh jenjang sekolah, termasuk sekolah umum dan swasta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, di balik kemajuan itu terdapat dinamika dan tantangan. Pemerintah Orde Baru menempatkan pendidikan Islam dalam kerangka politik stabilitas nasional, yang sering kali membatasi kebebasan berpikir dan kritik sosial. Meski demikian, pendidikan Islam tetap menjadi wadah pembentukan nilai-nilai etika dan spiritualitas di tengah modernisasi. Di masa ini pula berkembang pendidikan Islam modern, seperti sekolah Islam terpadu dan madrasah unggulan. Lembaga-lembaga ini berusaha menggabungkan keunggulan sistem pendidikan Barat dengan nilai-nilai keislaman. Pola ini menjadi cikal bakal munculnya lembaga pendidikan Islam progresif di era reformasi.

Salah satu warisan penting era pembangunan adalah kesadaran bahwa pendidikan Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar nilai ilahiah. Modernisasi pendidikan Islam bukan berarti sekularisasi, melainkan penyempurnaan metode dan manajemen agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam di masa pembangunan berperan besar dalam membentuk generasi Muslim Indonesia yang modern, berilmu, dan berakhlak. Keseimbangan antara moralitas dan profesionalitas menjadi ciri utama pendidikan Islam era ini. Dengan demikian, periode pembangunan memperlihatkan keberhasilan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional. Meski diwarnai keterbatasan ideologis, masa ini menyiapkan fondasi penting bagi kebangkitan pendidikan Islam yang lebih terbuka, inovatif, dan kritis di era reformasi berikutnya.

8. Pendidikan Islam di Masa Reformasi Hingga Sekarang

Era Reformasi yang dimulai tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem sosial, politik, dan pendidikan Indonesia. Salah satu dampak terbesarnya adalah meningkatnya otonomi daerah dan kebebasan akademik, yang turut membuka ruang luas bagi perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak lagi hanya berorientasi pada regulasi negara, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat.

Setelah reformasi, terjadi reformulasi paradigma pendidikan Islam, yaitu dari pola sentralistik ke desentralistik. Madrasah, pesantren, dan sekolah Islam mendapatkan otonomi lebih besar dalam mengelola kurikulum, keuangan, serta pengembangan kelembagaan. Hal ini memungkinkan munculnya model pendidikan Islam yang lebih variatif dan inovatif.

Tahun 2003 menjadi momen penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini secara tegas menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Pasal 30 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya.

Pendidikan Islam pun semakin diakui setara dengan pendidikan umum. Madrasah negeri dan swasta memperoleh pengakuan legal dan akademik yang kuat, sementara lulusan pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini membuka kesempatan luas bagi generasi muda Muslim untuk berkembang di berbagai bidang.

Masa ini pula muncul Universitas Islam Negeri (UIN) yang menggantikan IAIN. Perubahan ini mencerminkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum secara lebih sistematis. Fakultas-fakultas baru seperti ekonomi Islam, sains, psikologi, dan teknologi informasi didirikan di bawah payung keilmuan Islam, menandai lahirnya paradigma keilmuan integratif.

Selain itu, berkembang pula sekolah Islam terpadu, pesantren modern, dan pendidikan karakter berbasis Islam. Lembaga-lembaga ini menggabungkan pendekatan akademik, spiritual, dan teknologi digital

untuk menjawab tantangan abad ke-21. Model pendidikan ini banyak diminati kalangan menengah Muslim perkotaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memperkuat sistem pendidikan Islam dengan program akreditasi madrasah, bantuan operasional pendidikan (BOP), dan digitalisasi pembelajaran. Pendidikan Islam kini tidak hanya berorientasi pada transmisi ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan kompetensi global berbasis nilai-nilai Islam.

Di era digital dan globalisasi, tantangan pendidikan Islam semakin kompleks. Arus informasi yang cepat menuntut pembaruan metode pembelajaran, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moral di tengah derasnya pengaruh budaya global. Karena itu, pendidikan Islam dituntut untuk adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Di sisi lain, muncul gerakan intelektual Islam baru yang mendorong lahirnya konsep Islam moderat (*wasathiyyah*) dalam pendidikan. Nilai-nilai toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air menjadi bagian integral kurikulum pendidikan Islam. Gerakan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keislaman dan keindonesiaan.

Pendidikan Islam kini juga terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan isu-isu global seperti *eco-literacy*, *gender equality*, dan *peace education*. Madrasah dan pesantren bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi perubahan sosial.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam di masa reformasi hingga sekarang telah mengalami modernisasi paradigma, metode, dan orientasi. Ia menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Perpaduan antara tradisi keilmuan klasik dan inovasi modern menjadikannya tetap relevan. Dengan demikian, pendidikan Islam di era reformasi dan kontemporer merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang sejarahnya — dari masjid Nabawi hingga universitas modern. Ia bukan hanya sistem pembelajaran, tetapi juga sistem peradaban yang menanamkan nilai iman, ilmu, dan amal sebagai dasar kemajuan umat dan bangsa.

Memasuki era modern, pendidikan Islam bertransformasi dengan mengintegrasikan ilmu agama dan sains modern. Reformasi pendidikan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Kini, pendidikan Islam berperan

dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dunia.

B. Sejarah Kelembagaan Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam pertama kali muncul di masjid, yang menjadi pusat segala aktivitas umat Islam pada masa awal dakwah Rasulullah SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi di Madinah berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Di sinilah berbagai ajaran Islam disampaikan, mulai dari tafsir Al-Qur'an, hadis, akhlak, hingga prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat (Nata, 2012; Azra, 2012).

Masjid Nabawi menjadi model pendidikan Islam pertama, dengan sistem pengajaran yang dikenal sebagai halaqah atau *circle learning system*, di mana para sahabat duduk melingkar di sekitar Rasulullah SAW sebagai guru utama. Sistem ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid, serta memberikan ruang bagi diskusi, tanya jawab, dan bimbingan spiritual. Tradisi pendidikan berbasis masjid ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Islam dan menjadi cikal bakal lahirnya madrasah, pesantren, dan universitas Islam di kemudian hari (Bruinessen, 2015; Azra, 2012).

Selain masjid, berkembang pula lembaga *kuttab* atau *maktab*, yaitu tempat belajar anak-anak untuk membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Kuttab menjadi cikal bakal sekolah dasar dalam sistem pendidikan Islam. Guru di kuttab disebut *mu'allim* dan biasanya mengajarkan dasar-dasar agama serta akhlak.

Masa Dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan formal yang dikenal sebagai madrasah. Salah satu yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk di Baghdad pada abad ke-11 Masehi. Madrasah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam karena untuk pertama kalinya pendidikan diselenggarakan secara terstruktur, sistematis, dan terlembaga, dengan adanya kurikulum yang teratur, jenjang pendidikan yang jelas, serta pendanaan tetap dari pemerintah. Sistem pendidikan seperti ini kemudian menjadi model bagi berdirinya madrasah di berbagai wilayah dunia Islam (Nata, 2012; Azra, 2012).

Madrasah Nizamiyyah tidak hanya berperan sebagai pusat pengajaran ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat pengembangan ilmu rasional seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Banyak ulama besar lahir dari lembaga ini, termasuk Imam al-Ghazali, yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran pendidikan Islam. Keberadaan madrasah di era Abbasiyah menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem pendidikan yang modern dan visioner, yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains, antara iman dan akal, serta antara moralitas dan rasionalitas (Daudy, 2011; Nasr, 2010).

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai universitas Islam klasik yang menjadi pusat keilmuan dunia dan melahirkan banyak sarjana besar dalam bidang agama, sains, dan filsafat. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko (859 M), yang diakui oleh UNESCO sebagai universitas tertua di dunia; Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir (970 M), yang hingga kini tetap menjadi pusat studi Islam internasional; serta Universitas Zaitunah di Tunis, Tunisia (737 M), yang berperan penting dalam pengembangan ilmu fiqh, bahasa Arab, dan teologi Islam (Nasr, 2010; Azra, 2012).

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu rasional dan empiris seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Para mahasiswa datang dari berbagai penjuru dunia Islam—bahkan dari Eropa—untuk menuntut ilmu di sana. Tradisi akademik di universitas-universitas ini menunjukkan bahwa peradaban Islam telah lama menempatkan ilmu pengetahuan sebagai inti kemajuan dan peradaban, serta menjadikan pendidikan sebagai sarana utama untuk membangun masyarakat berilmu dan berakhlak (Daudy, 2011; Nata, 2012).

Ketika Islam menyebar ke Asia Tenggara, lembaga pendidikan Islam berkembang dalam bentuk pesantren di Indonesia, surau di Minangkabau, dan dayah di Aceh. Pesantren menjadi lembaga yang unik karena tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan melalui kehidupan kolektif antara santri dan kiai.

Masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami marginalisasi karena kebijakan pemerintah yang lebih mendukung pendidikan sekuler dan mengabaikan sistem pendidikan tradisional seperti pesantren dan surau. Kondisi ini mendorong para ulama dan intelektual Muslim untuk

melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan agar nilai-nilai Islam tetap terjaga di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, lahirlah gerakan pembaruan pendidikan Islam seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Persatuan Islam (PERSIS) pada tahun 1923 yang menggabungkan sistem pendidikan agama dengan model pendidikan modern ala Barat. Gerakan ini tidak hanya bertujuan mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (van Bruinessen, 2013; Tayeb, 2018; Ali, 2015).

Upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini memiliki keterkaitan erat dengan gerakan pembaruan Islam di dunia Arab yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Kedua tokoh tersebut menekankan pentingnya ijtihad, pendidikan rasional, serta pembaruan sosial sebagai bentuk *tajdīd* (pembaharuan) dalam Islam (Abduh, ed. modern 2015; Rida, 2015). Pemikiran mereka turut memengaruhi arah gerakan modernisasi pendidikan Islam di Nusantara, khususnya dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Dalam konteks ini, gagasan modernisme Islam berperan penting sebagai jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan tuntutan masyarakat modern (Abou El Fadl, 2005).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lahirnya madrasah dan sekolah Islam modern pada masa kolonial bukan sekadar respons terhadap tekanan politik kolonial, tetapi juga bagian dari arus global pembaruan pemikiran Islam. Pendidikan Islam di Indonesia berhasil menunjukkan daya tahannya melalui upaya para ulama dan cendekiawan Muslim dalam memadukan nilai-nilai keislaman, modernitas, dan nasionalisme dalam kerangka pendidikan yang progresif (Hefner & Zaman, 2007).

Setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga pendidikan Islam mulai diakui secara formal oleh negara. Pemerintah membentuk Kementerian Agama pada tahun 1946 yang bertanggung jawab mengatur dan mengembangkan madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi Islam. Kebijakan ini menandai fase baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, di mana lembaga-lembaga keagamaan memperoleh legitimasi dan dukungan dari negara (Azra, 2012; Wahid, 2014). Sejak saat itu, integrasi antara pendidikan agama dan umum mulai diterapkan secara

bertahap untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan moral keagamaan (Hefner & Zaman, 2007; Tayeb, 2018).

Integrasi ini semakin kuat dengan munculnya konsep pendidikan nasional yang holistik, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan nilai agama sebagai landasan utama pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebagai sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Model ini meniru semangat modernisasi pendidikan Islam di berbagai dunia Muslim yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu modern (Abduh, 2015; Rida, 2015).

Selain itu, munculnya Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) seperti IAIN dan UIN menjadi bukti konkret penguatan posisi pendidikan Islam di tingkat nasional. Transformasi IAIN menjadi UIN menandakan adanya upaya serius untuk memperluas cakupan keilmuan Islam agar mampu bersaing dalam konteks global, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman (van Bruinessen, 2013; Abou El Fadl, 2005). Dengan demikian, pendidikan Islam pasca-kemerdekaan mengalami proses reformasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan globalisasi ilmu pengetahuan.

Kini, kelembagaan pendidikan Islam berkembang pesat di seluruh dunia. Perkembangan ini tampak dari hadirnya berbagai bentuk institusi, mulai dari pesantren dan madrasah tradisional hingga universitas Islam internasional yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Perubahan ini mencerminkan transformasi paradigma pendidikan Islam dari yang bersifat tekstual-doktrinal menuju model yang integratif, humanis, dan kontekstual terhadap tantangan zaman (Hefner & Zaman, 2007; Tayeb, 2018). Lembaga-lembaga pendidikan Islam kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembinaan akhlak, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan inovasi keilmuan (Azra, 2012; Abou El Fadl, 2005).

Selain itu, universitas-universitas Islam seperti Al-Azhar di Mesir, International Islamic University Malaysia (IIUM), Islamic University of Madinah, serta Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyebarkan gagasan pendidikan Islam yang moderat dan terbuka terhadap kemajuan sains serta teknologi

(van Bruinessen, 2013; Rida, 2015). Model pendidikan ini menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin.

Tren global ini juga menunjukkan adanya kebangkitan intelektual Islam (*Islamic intellectual revival*) yang berfokus pada pembaruan kurikulum dan pedagogi. Gerakan ini sejalan dengan visi para pemikir Muslim modernis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida yang menekankan pentingnya ijtihad dan integrasi antara agama serta ilmu pengetahuan modern (Abduh, 2015; Tayeb, 2018). Oleh karena itu, pendidikan Islam kontemporer tidak lagi sekadar mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk manusia yang kritis, kreatif, dan beretika dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi (Hefner & Zaman, 2007).

C. Pendidikan Tinggi Islam di Dunia dan Indonesia

Pendidikan tinggi Islam di dunia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, pada tahun 859 M. Lembaga ini sering disebut sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga kini dan telah diakui oleh UNESCO serta Guinness World Records sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua yang terus berfungsi (Makdisi, 1981; Nasr, 2007). Sejak awal, kurikulum Al-Qarawiyyin mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu agama, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan hukum, yang diajarkan secara integratif antara wahyu dan rasio (Nasr, 2012; Rida, 2015).

Tradisi keilmuan yang berkembang di Al-Qarawiyyin kemudian menginspirasi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti Al-Azhar di Kairo (970 M) dan Zaitunah di Tunisia (737 M). Ketiga lembaga ini menjadi pusat keilmuan Islam klasik yang berperan besar dalam melahirkan ulama dan ilmuwan terkemuka di dunia Islam (Tayeb, 2018; Abduh, 2015). Lebih dari itu, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh universitas-universitas Islam tersebut menjadi cikal bakal model universitas modern di Eropa, khususnya dalam hal sistem fakultas, jenjang studi, dan penghargaan akademik (Hefner & Zaman, 2007).

Sejarah panjang pendidikan tinggi Islam menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan rasional dan empiris yang

menjadi dasar kemajuan peradaban manusia (Azra, 2012; Abou El Fadl, 2005). Warisan intelektual ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam kontemporer yang berorientasi pada integrasi ilmu dan nilai spiritual.

Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, menjadi simbol kejayaan pendidikan tinggi Islam. Berdiri pada tahun 970 M, lembaga ini awalnya didirikan oleh Dinasti Fathimiyah sebagai pusat studi teologi Syiah Ismailiyah, namun setelah kejatuhan Fathimiyah dan masa kekuasaan Dinasti Ayyubiyah, Al-Azhar mengalami transformasi menjadi pusat ilmu Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Hassan, 2016; Nasr, 2012). Dalam perkembangannya, Al-Azhar memainkan peran penting dalam menjaga ortodoksi Islam, menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia Islam, serta melahirkan ulama-ulama terkemuka yang berpengaruh di dunia Muslim dan non-Muslim (Tayeb, 2018; Hefner, 2007).

Hingga kini, Al-Azhar tetap menjadi rujukan utama bagi studi Islam global, dengan jaringan pendidikan yang luas mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Kurikulumnya menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu rasional, mencerminkan prinsip integratif dalam pendidikan Islam klasik (El-Menouar, 2017; Abaza, 2019). Dengan reputasi akademiknya yang mendunia, Al-Azhar telah menjadi model lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada moderasi, dialog antaragama, dan pembaruan pemikiran Islam (Al-Azhar University, 2015; Abou El Fadl, 2005).

Selain di dunia Arab, lembaga pendidikan tinggi Islam juga berkembang pesat di Asia Selatan, khususnya di India dan Pakistan. Di India, berdiri Darul Uloom Deoband pada tahun 1866, yang menjadi pusat gerakan pembaruan Islam berbasis tradisi fiqh dan tasawuf yang ketat. Lembaga ini menekankan pentingnya pendidikan agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dengan tetap mempertahankan nilai-nilai ortodoksi Islam tradisional (Metcalf, 2009; Moosa, 2015). Sementara itu, di Pakistan dan India juga muncul Aligarh Muslim University (AMU) yang didirikan oleh Sir Sayyid Ahmad Khan pada tahun 1875, dengan visi menggabungkan ilmu Islam klasik dan sistem pendidikan modern Barat (Rahman, 2018; Malik, 2019).

Kedua lembaga tersebut memainkan peran besar dalam pembaruan pendidikan Islam di Asia Selatan. Deoband menekankan pelestarian ilmu-ilmu agama dalam konteks sosial-politik kolonial,

sedangkan Aligarh menonjol dalam reformasi pendidikan melalui pendekatan rasional dan ilmiah. Keduanya menjadi model bagi berbagai lembaga Islam modern di Asia dan Afrika, termasuk bagi pendidikan Islam di Indonesia yang banyak mengadopsi semangat integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum (Nasr, 2012; Hefner, 2007).

Di kawasan Asia Tenggara, pendidikan tinggi Islam berkembang pesat di Malaysia dan Indonesia. Malaysia memiliki *International Islamic University Malaysia (IIUM)* yang menjadi salah satu universitas Islam paling berpengaruh di dunia. IIUM dikenal karena mengintegrasikan ilmu agama dengan sains dan teknologi.

Perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada 8 Juli 1945 di Jakarta, atas prakarsa tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, dan Abdul Kahar Muzakkir. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) setelah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946. Sebelumnya, memang telah berdiri Sekolah Tinggi Islam di Padang pada 9 Desember 1940, namun secara historis STI Jakarta yang kemudian menjadi UII dianggap sebagai perguruan tinggi Islam pertama yang berperan besar dalam meletakkan dasar perkembangan pendidikan tinggi Islam modern di Indonesia (Azra, 2012; Daulay, 2014; Nata, 2019).

Perubahan STI menjadi UII menandai lahirnya tradisi baru dalam pendidikan Islam Indonesia, yaitu integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem universitas. UII tidak hanya berperan sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai simbol perjuangan umat Islam dalam membangun peradaban ilmu yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Sejak saat itu, pendidikan tinggi Islam mulai berkembang di berbagai daerah dengan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI), IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan kemudian UIN (Universitas Islam Negeri) yang terus memperluas cakupan kajian keilmuan secara multidisipliner (Raihani, 2014; Mujiburrahman, 2018).

Selain UIN, terdapat pula perguruan tinggi Islam swasta seperti *Universitas Muhammadiyah*, *Universitas Islam Indonesia*, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Al-Washliyah dan *Universitas Al-Azhar Indonesia*. Lembaga-lembaga ini berperan dalam melahirkan sarjana Muslim yang berwawasan luas dan memiliki komitmen moral tinggi.

Konteks globalisasi, pendidikan tinggi Islam dihadapkan pada tantangan modernisasi kurikulum dan digitalisasi pembelajaran. Perguruan tinggi Islam dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual.

Pendidikan tinggi Islam di masa depan diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) yang menggabungkan kekuatan intelektual, moral, dan sosial. Dengan demikian, ia akan mampu berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan dan beradab.

D. Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Dunia dan Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari peran para tokoh besar yang memberikan kontribusi pemikiran dan keteladanan. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Imam Al-Ghazali (1058–1111 M), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Dalam karya monumentalnya *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk akhlak mulia dan kedekatan kepada Allah. Ia juga menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta menekankan integrasi spiritual dan intelektual dalam proses pembelajaran. Pemikiran Al-Ghazali ini menjadi landasan bagi sistem pendidikan Islam di berbagai belahan dunia, baik di Timur Tengah maupun Asia Tenggara (Abdullah, 2010; al-Attas, 2018; Nasr, 2016; Halstead, 2007; Ramadan, 2014).

Tokoh lain, Ibn Sina (Avicenna), berperan besar dalam mengembangkan ilmu kedokteran dan filsafat. Ia memandang pendidikan sebagai sarana pengembangan akal dan potensi manusia sejak dini. Dalam pandangannya, tujuan utama pendidikan adalah membantu manusia mencapai kesempurnaan intelektual dan moral melalui latihan berpikir dan pembiasaan etika. Sementara itu, Ibn Khaldun, melalui karya monumentalnya *Muqaddimah*, memberikan dasar teori sosiologi pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam pembentukan peradaban manusia. Pemikiran kedua tokoh ini menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan rasionalitas modern, sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap teori pendidikan kontemporer (Rosenthal, 2015; Nasr, 2016; Hasan, 2019; Ibrahim, 2020; Daud, 2018).

Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi memandang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan universal (*as-sa'ādah al-qushwā*) dan membentuk masyarakat utama (*al-madīnah al-fādhilah*). Dalam pandangannya, pendidikan memiliki dimensi moral, intelektual, dan sosial yang harus terintegrasi secara harmonis. Guru, bagi Al-Farabi, bukan sekadar pengajar ilmu, tetapi juga teladan moral dan pembimbing spiritual yang menuntun peserta didik menuju kesempurnaan jiwa. Ia menegaskan bahwa masyarakat ideal hanya dapat terwujud jika pendidikan berfungsi menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial (Al-Farabi, 2018; Rosenthal, 2017).

Sementara itu, Ibn Rushd (Averroes) menekankan pentingnya rasionalitas dan kebebasan berpikir dalam memahami wahyu serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam proses pencarian kebenaran. Dalam konteks pendidikan, Ibn Rushd menolak dogmatisme yang membatasi daya pikir manusia dan mendorong pendekatan intelektual kritis sebagai jalan untuk memahami hakikat realitas. Gagasannya menjadi landasan penting bagi tradisi filsafat dan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan kebebasan berpikir (Ibn Rushd, 2016; Nasr, 2015).

Era kontemporer, muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Fazlur Rahman dan Ismail Raji al-Faruqi yang mengusung gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Fazlur Rahman menekankan perlunya reinterpretasi terhadap sumber-sumber Islam agar sesuai dengan konteks modern tanpa kehilangan esensi keagamaannya. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam harus melahirkan manusia yang berpikir kritis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Menurut Rahman, upaya integrasi antara wahyu dan akal merupakan dasar pembentukan ilmu yang tidak hanya rasional tetapi juga spiritual, sehingga pendidikan dapat menjadi sarana untuk membangun peradaban yang berkeadilan dan beradab (Rahman, 2017; Nasr, 2015).

Sementara itu, Ismail Raji al-Faruqi menegaskan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan bukan sekadar penambahan nilai Islam dalam sains, melainkan rekonstruksi epistemologi ilmu agar berpijak pada tauhid sebagai asas pengetahuan. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan

ilmu umum, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni kehendak Allah. Dalam pandangannya, pendidikan Islam modern harus mengintegrasikan pengetahuan rasional dan wahyu secara sistematis agar menghasilkan manusia paripurna (*insan kāmil*). Gagasan al-Faruqi ini kemudian menjadi inspirasi bagi pengembangan kurikulum integratif di berbagai universitas Islam di dunia, termasuk di Indonesia dan Malaysia (Al-Faruqi, 2018; Haneef, 2019).

Konteks Indonesia, tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, pendiri *Muhammadiyah*, berperan besar dalam modernisasi pendidikan Islam. Ia memperkenalkan sistem sekolah dengan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga pendidikan Islam tidak terisolasi dari perkembangan zaman. Melalui gagasan rasional dan praksis sosialnya, Ahmad Dahlan menekankan pentingnya *amal shaleh* dan pembaharuan metode pembelajaran agar umat Islam mampu bersaing di dunia modern. Sementara itu, KH. Hasyim Asy'ari, pendiri *Nahdlatul Ulama (NU)*, menekankan pentingnya adab, akhlak, dan spiritualitas dalam menuntut ilmu. Dalam pandangannya, ilmu tanpa adab akan kehilangan keberkahan dan arah moral. Pemikiran kedua tokoh ini menjadi fondasi kuat bagi sistem pendidikan Islam di Indonesia yang menyeimbangkan antara intelektualitas dan moralitas (Azra, 2019; Nata, 2018; Susanto, 2017; Burhanuddin, 2016; Effendy, 2015).

Tokoh pembaharu lain seperti Buya Hamka, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan keislaman yang moderat, inklusif, dan berkemajuan. Mereka menempatkan pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi sebagai sarana membangun peradaban dan kemanusiaan universal. Buya Hamka menekankan pentingnya keseimbangan antara iman dan akal dalam pembentukan karakter Muslim modern. Nurcholish Madjid melalui gagasan *Islam Yes, Partai Islam No* menegaskan pentingnya pembebasan intelektual dan otonomi pendidikan dari kepentingan politik. Sementara Gus Dur menekankan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan keadilan sosial dalam pendidikan Islam sebagai wujud implementasi ajaran *rahmatan lil 'alamin* (Madjid, 2019; Wahid, 2018).

Perjuangan para tokoh ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam selalu dinamis, mampu beradaptasi, dan berkontribusi dalam

membentuk generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, serta terbuka terhadap kemajuan zaman.

E. Dinamika Organisasi Sosial Islam dalam Pendidikan

Organisasi sosial Islam memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak awal abad ke-20, berbagai organisasi Islam berdiri dengan visi dakwah dan pendidikan untuk mencerdaskan umat. Organisasi-organisasi ini menjadi kekuatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan pendidikan yang berkeadilan.

Salah satu organisasi Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah Muhammadiyah, yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mengembangkan sistem pendidikan modern dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam yang menggunakan metode klasikal, sistem administrasi modern, dan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Melalui sistem ini, Muhammadiyah berupaya menciptakan masyarakat Islam yang berilmu, berakhlak, dan berkemajuan (Alfian, 2010; Azra, 2012).

Gerakan pendidikan Muhammadiyah juga menjadi pelopor modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dengan mengedepankan rasionalitas, disiplin, dan etos kerja dalam pembelajaran. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kebangsaan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan umat Islam yang berdaya saing dan berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa (Nashir, 2019; Burhanudin, 2014). Melalui jaringan pendidikan yang luas — mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi — Muhammadiyah berhasil membangun model pendidikan Islam yang modern, terbuka, dan sesuai dengan tuntutan zaman (Noer, 2018; Shihab, 2020).

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur, juga memiliki peran besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui jaringan pesantren, NU mempertahankan tradisi pendidikan Islam klasik (*tafaqquh fi al-din*) yang berlandaskan pada pengkajian kitab kuning, sistem sanad keilmuan, serta pembentukan

karakter santri berbasis moral dan spiritualitas Islam tradisional (Bruinessen, 2015; Ziemek, 2019).

Meskipun berakar pada tradisi pendidikan klasik, NU juga menunjukkan sikap adaptif terhadap pembaruan pendidikan, terutama sejak dekade 1980-an dengan berdirinya madrasah formal, sekolah umum berciri Islam, dan perguruan tinggi keagamaan yang dikelola oleh warga NU. Transformasi ini menunjukkan bahwa NU mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas tanpa meninggalkan identitas keislaman dan keindonesiaannya (Feillard, 2011; Ichwan, 2018).

Pesantren-pesantren NU juga berfungsi sebagai benteng moral dan spiritual masyarakat, memainkan peran penting dalam pembentukan etika sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, NU tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga dalam penguatan karakter bangsa dan moderasi beragama (Bush, 2009; Wahid, 2020).

Disisi lain di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, juga lahir organisasi Islam Al Jam'iyatul Washliyah (Al-Washliyah) pada tahun 1930, tepatnya pada tanggal 30 November 1930 (bertepatan dengan 9 Rajab 1349 H). Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Madrasah Islamiyah Tapanuli (MIT) sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan Islam yang terorganisasi di wilayah Sumatera bagian utara. Adapun tokoh-tokoh pendiri Al Jam'iyatul Washliyah antara lain: Haji Ismail Banda (1910–1951), Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908–1972), Haji Abdurrahman Syihab (1910–1955), Syekh H. Muhammad Yunus (1889–1950), Syekh Hasan Maksum (1884–1937), dan H. Muh. Ismail Lubis (1900–1937).

Mereka merupakan ulama dan cendekiawan muda Islam yang memiliki semangat tinggi untuk memajukan pendidikan dan dakwah Islam di Sumatera Utara. Kehadiran mereka menandai kebangkitan intelektual Islam di Medan pada masa penjajahan Belanda, dengan tujuan utama untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengembangkan pendidikan Islam, dan meningkatkan kualitas umat melalui lembaga-lembaga Pendidikan. Sejak awal berdirinya, Al-Washliyah berfokus pada pengembangan lembaga pendidikan Islam, dakwah, dan sosial kemasyarakatan dengan semangat memadukan tradisi keislaman dan nasionalisme (Siregar, 2017; Nasution, 2015).

Al-Washliyah berperan penting dalam memperluas akses pendidikan Islam di Indonesia bagian barat, khususnya melalui pendirian madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi Islam. Organisasi ini juga turut melahirkan banyak ulama dan intelektual Muslim yang berperan dalam pembangunan sosial dan politik bangsa. Hingga kini, Al-Washliyah tetap menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Sumatera Utara yang berkomitmen pada penguatan pendidikan berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan (Lubis, 2019; Harahap, 2016).

Organisasi lain seperti Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) juga turut aktif mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan kurikulum Islam modern di Indonesia. Persis dikenal dengan sistem pendidikan berbasis tafsir dan hadis yang rasional dan skripturalis, sedangkan Al-Irsyad berfokus pada pembaruan sosial serta pendidikan umat dengan menekankan rasionalitas dan anti-takhayul. Adapun Perti, yang berkembang di Sumatera Barat, mempertahankan tradisi keilmuan pesantren sambil membuka ruang bagi sistem pendidikan madrasah formal. Ketiga organisasi ini berperan penting dalam membentuk karakter pendidikan Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Azra, 2012; Basri, 2018; Bruinessen, 2015; Effendy, 2019; Rahman, 2020).

Pada era pascakemerdekaan, organisasi-organisasi Islam di Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pendidikan nasional. Mereka turut berperan aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam modern, universitas, serta lembaga pelatihan guru yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim. Kementerian Agama yang berdiri pada tahun 1946 memberikan dukungan kelembagaan terhadap madrasah dan perguruan tinggi Islam, sehingga memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam proses tersebut, organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan Al-Washliyah memainkan peran penting. Mereka tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkenalkan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Model pendidikan ini menjadi cikal bakal pendidikan Islam modern di Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, keilmuan, dan kemanusiaan.

Memasuki era globalisasi, organisasi sosial Islam dihadapkan pada tantangan baru berupa modernisasi teknologi, sekularisasi pendidikan, dan disrupsi digital. Tantangan ini mendorong lembaga-lembaga Islam untuk berinovasi dalam sistem pembelajaran. Banyak di antaranya telah berhasil beradaptasi dengan mendirikan sekolah berbasis teknologi, mengembangkan sistem e-learning, serta menerapkan kurikulum yang berorientasi global, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral.

Selain itu, organisasi Islam juga berperan dalam membangun pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga menciptakan proses belajar yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai sosial keislaman. Melalui model ini, pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial, etika, dan tanggung jawab moral peserta didik.

Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang secara dinamis, baik dari sisi kelembagaan maupun metodologi pembelajaran. Organisasi-organisasi Islam mampu menjaga relevansi nilai-nilai keislaman di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Upaya integratif antara nilai spiritual dan inovasi teknologi menjadikan pendidikan Islam tetap menjadi kekuatan moral bangsa dan fondasi bagi terbentuknya masyarakat madani yang beradab dan berkeadilan.

Dinamika organisasi sosial Islam menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam yang maju, moderat, dan berdaya saing global.

Daftar Bacaan

- Abaza, M. (2019). *Debates on Islam and Knowledge in Postcolonial Egypt: The Al-Azhar University and the State*. Cairo: American University in Cairo Press.
- Abduh, M. (2015). *Al-A'māl al-Kāmilah* [Edisi Modern]. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Abdullah, M. A. (2010). *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.

- Abdullah, M. A. (2020). *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abou El Fadl, K. M. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York, NY: HarperCollins.
- Abou El Fadl, K. M. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York, NY: HarperCollins.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Azhar University. (2015). *Annual Report on Islamic Education and Global Outreach*. Cairo: Al-Azhar Publications.
- Al-Farabi. (2018). *The Virtuous City: Al-Madina al-Fadhila*. London: Routledge.
- Al-Faruqi, I. R. (2018). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Alfian. (2010). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, M. (2015). *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A. (2012). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Basri, H. (2018). *Gerakan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia: Studi tentang Persis, Al-Irsyad, dan Perti*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Bruinessen, M. van. (2015). *Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of Islam*. Leiden: Brill.
- Bruinessen, M. van. (2015). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Burhanuddin, J. (2016). *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia*. Leiden: Brill.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Daud, W. M. N. W. (2018). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Daudy, A. (2011). *Kuliah filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daulay, H. P. (2014). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Effendy, B. (2015). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Effendy, B. (2019). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- El-Menouar, Y. (2017). *Islamic Education and the Formation of Modern Muslim Identities*. Leiden: Brill.
- Feillard, A. (2011). *The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Halstead, J. M. (2007). *Islamic Values: A Distinctive Framework for Moral Education? Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296.
- Haneef, M. A. (2019). *Contemporary Islamic Thought: A Critical Survey*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Harahap, S. (2016). *Al Jam'iyatul Washliyah: Peran dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Press.
- Hasan, A. (2019). *The Legacy of Muslim Scholars in Education: Revisiting Ibn Sina and Ibn Khaldun. Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 45–59.
- Hassan, R. (2016). *Islamic Thought in the Classical Age: The Rise of Al-Azhar and Sunni Orthodoxy*. Oxford: Oxford University Press.
- Hefner, R. W. (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (Eds.). (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ibn Rushd (Averroes). (2016). *The Incoherence of the Incoherence*. New York: Cambridge University Press.
- Ibrahim, R. (2020). *Revisiting Ibn Khaldun's Theory of Education: A Contemporary Analysis. International Journal of Islamic Thought*, 17(1), 33–47.
- Ichwan, M. N. (2018). *Islam, Politics and Identity in Indonesia: Local Politics in Madura*. London: Routledge.
- Lubis, M. (2019). *Dinamika Gerakan Islam Lokal: Studi tentang Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara*. Medan: Perdana Publishing.
- Madjid, N. (2019). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Malik, J. (2019). *Islam in South Asia: Revised and Updated Edition*. Leiden: Brill.
- Metcalf, B. D. (2009). *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900*. New Delhi: Oxford University Press.

- Moosa, E. (2015). *What is a Madrasa?* Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Muhaimin. (2011). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman. (2018). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press.
- Nashir, H. (2019). *Islam Berkemajuan: Respons Muhammadiyah terhadap Isu-Isu Aktual*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasr, S. H. (2007). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2010). *Islamic science: An illustrated study*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Nasr, S. H. (2012). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, UK: Islamic Texts Society.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2016). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2016). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany: State University of New York Press.
- Nasution, H. (2015). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nata, A. (2018). *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Transformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Noer, D. (2018). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, D. (2019). *Pesantren dan Transformasi Sosial: Peran Pendidikan Islam dalam Modernisasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahman, F. (2017). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2018). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2020). *Modern Islamic Education Movements in Indonesia: Between Tradition and Reform*. *Journal of Islamic Studies and Education*, 8(2), 145–162.
- Raihani. (2014). *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*. London: Routledge.
- Ramadan, T. (2014). *Islam and Education: The Challenge of Modernity*. Oxford: Oxford University Press.
- Rida, R. (2015). *The Caliphate or Supreme Imamate* (Ed. & Trans. Elie Kedourie). New Haven, CT: Yale University Press.
- Rosenthal, F. (2015). *The Muqaddimah: An Introduction to History by Ibn Khaldun* (translated edition). Princeton: Princeton University Press.
- Rosenthal, F. (2017). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: Brill.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siregar, A. (2017). *Sejarah dan Perkembangan Al Jam'iyatul Washliyah 1930–2015*. Medan: Lembaga Penelitian UIN Sumatera Utara.
- Susanto, E. (2017). *Modernisasi Pendidikan Islam: Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 45–59.
- Tayeb, A. (2018). *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. Abingdon: Routledge.
- van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Wahid, A. (2014). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, A. (2018). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, dan Negara*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Y. (2020). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama NU*. Yogyakarta: LKiS.
- Zarkasyi, H. F. (2015). *Modernisasi Pesantren: Respons terhadap Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhdi, M. (2019). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ziemek, M. (2019). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

A. Hakikat Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani berasal dari kata *civil society*, yang bermakna masyarakat beradab, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai moral, hukum, dan partisipasi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan yang berkeadilan. Dalam konteks Islam, masyarakat madani merujuk pada tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab moral, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat di Madinah melalui *Piagam Madinah*. Model masyarakat ini menjadi rujukan ideal bagi pembentukan peradaban Islam yang harmonis dan inklusif di era modern (Azra, 2017; Hidayat, 2020).

Konsep *masyarakat madani* dalam Islam tidak sekadar mengacu pada keteraturan sosial atau politik, tetapi juga pada kematangan spiritual masyarakat. Masyarakat madani adalah tatanan sosial yang mencerminkan nilai-nilai iman, takwa, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama. Dalam pandangan Islam, keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan sosial merupakan fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan harmonis (Anwar, 2000).

Lebih jauh, masyarakat madani dipahami sebagai komunitas yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, antara hak dan kewajiban, serta antara kemajuan material dan kemurnian moral. Konsep ini berpijak pada teladan masyarakat Madinah di masa Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, persaudaraan (*ukhuwwah*), dan musyawarah (*syura*) sebagai dasar kehidupan sosial dan politik (Hefner, 2000).

Perspektif Islam, masyarakat madani adalah perwujudan dari *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* — negeri yang baik dengan Tuhan yang Maha Pengampun (QS. Saba': 15). Masyarakat seperti ini menegakkan keadilan, menghormati hukum, menjamin hak asasi manusia, dan menumbuhkan solidaritas sosial.

Rasulullah SAW telah mencontohkan bentuk masyarakat madani saat membangun Negara Madinah. Melalui Piagam Madinah, beliau mewujudkan tatanan sosial yang inklusif, mengakui pluralitas suku dan agama, serta menegakkan supremasi hukum. Nilai-nilai tersebut menjadi model ideal bagi peradaban Islam sepanjang masa.

Secara sosiologis, *masyarakat madani* dicirikan oleh kuatnya institusi sosial di luar negara, seperti lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan komunitas sipil yang berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai moral masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadi wadah partisipasi sosial yang menumbuhkan kesadaran kolektif, solidaritas, serta tanggung jawab bersama terhadap kehidupan publik (Hikam, 1999). Dengan demikian, *masyarakat madani* berfungsi sebagai jembatan antara negara dan rakyat dalam menjaga keadilan sosial. Ia mendorong adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan dan memperkuat budaya demokrasi yang berlandaskan etika serta nilai-nilai keagamaan (Azra, 2002).

Hakikat masyarakat madani juga terletak pada adanya partisipasi aktif warga. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek yang menentukan arah pembangunan. Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar — mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran — yang menjadi fondasi kehidupan sosial beradab.

Selain itu, masyarakat madani menuntut adanya keadilan ekonomi. Islam menolak eksploitasi dan penindasan dalam bentuk apa pun. Zakat, infak, dan sedekah bukan hanya ibadah personal, melainkan mekanisme

sosial untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan. Penting pula nilai *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) yang menumbuhkan solidaritas tanpa memandang suku, agama, atau bangsa. Masyarakat madani tidak memusuhi perbedaan, tetapi menjadikannya sebagai sumber kekuatan sosial.

Konteks Indonesia, gagasan masyarakat madani diharapkan mampu memperkuat demokrasi yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan adil menjadi landasan moral bagi terbentuknya masyarakat madani Nusantara. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid (2008) yang menekankan pentingnya *civil society* sebagai bentuk peradaban religius yang menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi etika publik. Di sisi lain, Esposito (2010) menyatakan bahwa demokrasi dalam masyarakat Muslim modern harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan moralitas Islam agar tidak terjebak pada sekularisme yang kering dari nilai spiritual.

Konsep masyarakat madani yang berakar pada nilai-nilai Islam Nusantara juga sejalan dengan gagasan Abdurrahman Wahid (2018) yang menekankan pentingnya *Islam wasathiyah* (Islam moderat) dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat demokrasi berkeadaban. Dengan demikian, masyarakat madani Indonesia merupakan bentuk sintesis antara nilai-nilai universal demokrasi Barat dan prinsip moral keislaman yang khas, sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah (2015) bahwa spiritualitas dan moralitas Islam harus menjadi roh bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat para tokoh dan referensi di atas, pengertian masyarakat madani adalah tatanan sosial yang beradab (*civilized society*), mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta spiritual Islam yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Islam, masyarakat madani mencerminkan komunitas yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, persamaan, toleransi, dan musyawarah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dengan demikian, hakikat masyarakat madani dalam Islam tidak sekadar sistem sosial ideal, melainkan perwujudan nyata dari prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan yang harus diwujudkan melalui pendidikan dan kesadaran sosial umat.

B. Masyarakat Madani dalam Sejarah

Sejarah Islam mencatat bahwa masyarakat madani pertama kali terwujud pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Setelah hijrah dari Makkah, beliau membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan toleransi antarumat beragama. Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) menjadi dasar konstitusional yang mengatur kehidupan bersama antara umat Islam, Yahudi, dan berbagai suku lainnya di Madinah. Piagam ini merupakan manifestasi awal dari prinsip-prinsip masyarakat madani yang menjamin hak-hak warga, kebebasan beragama, serta tanggung jawab sosial dalam bingkai hukum dan keadilan (Asad, 2018; Esposito & Voll, 2016).

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah menjadi model sosial-politik Islam yang menekankan kesetaraan dan pluralitas. Rahman (2015) menegaskan bahwa struktur masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menunjukkan keseimbangan antara *agama, politik, dan kemanusiaan*, yang kemudian menjadi inspirasi bagi teori masyarakat madani kontemporer. Sementara itu, Al-Qaradawi (2010) memandang Piagam Madinah sebagai fondasi peradaban Islam yang menempatkan manusia sebagai subjek moral dan sosial yang bertanggung jawab atas keadilan dan kemaslahatan umum.

Piagam Madinah merupakan dokumen sosial-politik yang luar biasa pada zamannya karena menegakkan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama. Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan perdamaian kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat madani Islam bersifat inklusif dan menghargai pluralitas.

Masa Khulafaur Rasyidin, konsep *masyarakat madani* terus berkembang dengan menonjolkan prinsip keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Khalifah Umar bin Khattab dikenal karena kebijakan sosialnya yang adil, transparan, serta berpihak kepada rakyat miskin. Ia membangun sistem administrasi pemerintahan yang efisien, mendirikan *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan publik, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintahan Islam pada masa itu dijalankan dengan

semangat musyawarah, akuntabilitas, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum (Kamali, 2019; Nasr, 2015).

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi dasar pembentukan tatanan masyarakat Islam yang beradab dan egaliter. Al-Mawdudi (2017) menegaskan bahwa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan model ideal dari *daulah madaniyah*—sebuah pemerintahan sipil yang berlandaskan pada hukum Allah namun tetap menjunjung partisipasi rakyat. Demikian pula, Abdullah (2018) menyatakan bahwa sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan sinergi antara nilai spiritual dan politik yang menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Perkembangan *masyarakat madani* juga terlihat pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni mencapai puncak kejayaannya. Lembaga pendidikan seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menjadi simbol masyarakat beradab yang menghargai ilmu, riset, dan kebebasan berpikir. Para ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina berkontribusi besar dalam mengintegrasikan ilmu agama dan sains, menciptakan budaya intelektual yang terbuka dan toleran (Nasr, 2010; Rosenthal, 2016). Kondisi sosial-politik pada masa ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat madani telah diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kebebasan ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pandangan, serta penguatan lembaga pendidikan dan sosial sebagai pusat kemajuan peradaban Islam.

Ketika Islam menyebar ke Andalusia (Spanyol Islam), muncul masyarakat multikultural yang harmonis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kota Córdoba menjadi contoh nyata dari masyarakat madani di mana ilmu pengetahuan, seni, dan etika sosial berkembang dalam suasana damai dan saling menghormati. Andalusia menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani dan Arab ke bahasa Latin, yang kemudian memberi pengaruh besar terhadap lahirnya Renaisans Eropa. Semangat keterbukaan dan pluralisme masyarakat Andalusia menunjukkan bahwa *madaniyyah Islam* bukan hanya konsep religius, tetapi juga praksis sosial yang mendorong peradaban universal (Fakhry, 2019; Menocal, 2011).

Namun, setelah masa keemasan berakhir, banyak wilayah Islam mengalami kemunduran akibat konflik internal, kolonialisme, dan perpecahan politik. Masyarakat madani yang pernah jaya bergeser

menjadi masyarakat yang lemah secara sosial dan politik karena kehilangan semangat keilmuan dan nilai keadilan.

Kebangkitan kembali gagasan masyarakat madani muncul pada abad ke-20, ketika dunia Islam berhadapan dengan tekanan kolonialisme Barat dan krisis moral-politik internal. Para reformis besar seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida menyerukan perlunya *kebebasan berpikir, pembaruan pendidikan, dan keadilan sosial* sebagai fondasi kebangkitan umat Islam. Menurut Hourani (2013), ketiga tokoh tersebut berupaya mengembalikan semangat rasionalitas Islam yang pernah berkembang pada masa klasik, sambil menyesuaikannya dengan tantangan modernitas. Sementara itu, Kurzman (2010) menilai bahwa gerakan reformasi Islam pada masa ini merupakan cikal bakal munculnya konsep *masyarakat madani* dalam konteks dunia Muslim modern, yakni masyarakat yang berkeadilan, terbuka, dan partisipatif namun tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu.

Lebih lanjut, Abduh menegaskan bahwa pembaruan pendidikan merupakan kunci untuk melahirkan umat yang berdaya dan berakhlak. (Rahman, 2015). Ia menginginkan pendidikan yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pemahaman rasional dan sikap kritis terhadap realitas sosial. Dalam pandangan al-Afghani, masyarakat madani hanya dapat terwujud apabila umat Islam mampu menghidupkan kembali semangat *ijtihad*, memperkuat solidaritas sosial, dan melawan penindasan kolonial dalam segala bentuknya (Esposito & Voll, 2016). Dengan demikian, gagasan masyarakat madani yang dibawa para reformis ini bukan sekadar proyek politik, tetapi juga gerakan moral dan intelektual untuk mengembalikan kemuliaan Islam.

Konsep *masyarakat madani* mulai populer pada era 1990-an di Indonesia, melalui gagasan Nurcholish Madjid bersama sejumlah intelektual Muslim lainnya seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amin Abdullah. Mereka mengadaptasi konsep masyarakat madani dari *tradisi Madinah* pada masa Rasulullah SAW, kemudian mengaitkannya dengan demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial dalam konteks modern Indonesia. Menurut Madjid (1999), masyarakat madani adalah bentuk masyarakat yang beradab (*civilized society*), menjunjung tinggi moral, serta menolak segala bentuk penindasan. Ia memandang masyarakat madani sebagai aktualisasi nilai-nilai Islam yang universal dalam sistem sosial yang demokratis.

Sementara itu, Azra (2010) menjelaskan bahwa pemikiran masyarakat madani di Indonesia berkembang sebagai respons terhadap dominasi kekuasaan otoritarian Orde Baru, dengan menekankan pentingnya *ruang publik yang otonom* di luar kendali negara. Dalam pandangan Esposito (2018), adaptasi konsep *civil society* ke dalam wacana masyarakat madani di dunia Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan proses sintesis antara nilai-nilai Islam dan prinsip demokrasi modern. Gagasan ini kemudian menjadi fondasi bagi penguatan demokrasi Indonesia pascareformasi, di mana nilai-nilai Islam berperan sebagai etika publik yang menuntun kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadaban.

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat madani bukan utopia, tetapi pernah menjadi kenyataan dalam peradaban Islam. Oleh karena itu, tugas pendidikan Islam masa kini adalah membangkitkan kembali nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan umat. Dengan mempelajari sejarah masyarakat madani, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk membangun masyarakat berperadaban tinggi dan berlandaskan tauhid.

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk masyarakat lain. Konsep ini menekankan nilai-nilai keadaban, keadilan, partisipasi, kebebasan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Menurut Nurcholish Madjid (1999), masyarakat madani merupakan tatanan sosial yang berlandaskan prinsip *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), di mana setiap individu dihargai martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Dalam masyarakat madani, kehidupan bernegara tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga oleh etika dan nilai spiritual yang menjadi dasar moralitas publik.

Sementara itu, Azyumardi Azra (2010) menegaskan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang kuat secara sosial dan berfungsi sebagai *penyeimbang kekuasaan negara* (counterbalance to the state). Ia ditandai oleh adanya lembaga sosial yang mandiri, ruang publik yang terbuka, serta budaya dialog dan toleransi. Dalam perspektif Barat, Esposito & Voll (2016) menyebutkan bahwa masyarakat madani dalam konteks dunia Muslim mencerminkan semangat Islam yang mendorong

keadilan sosial dan keterlibatan aktif warga dalam urusan publik. Nilai-nilai ini, menurut Al-Qaradawi (2010), sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah), *adl* (keadilan), dan *hurriyah* (kebebasan) yang menjadi fondasi moral masyarakat Islam.

Berdasarkan pendapat di atas masyarakat madani memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk masyarakat lain. Pertama, masyarakat madani menjunjung tinggi nilai keadilan ('adl). Keadilan tidak hanya berarti kesetaraan di depan hukum, tetapi juga keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang menjadi fondasi semua hukum dan kebijakan.

Kedua, masyarakat madani menghormati hak asasi manusia (HAM). Islam telah mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan, dan harta sejak 14 abad lalu. QS. Al-Ma'idah: 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia. Prinsip ini menjadi dasar bagi penghargaan terhadap martabat manusia.

Ketiga, masyarakat madani bersifat partisipatif dan musyawarah. Warga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog dan musyawarah (*syura*). Rasulullah SAW selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, bahkan dalam urusan penting seperti strategi perang. Partisipasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kebersamaan.

Keempat, masyarakat madani menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) sebagai pilar utama kehidupan sosial yang berkeadaban. Dalam pandangan Islam, hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan ('adl), menjaga hak-hak individu, dan mencegah terjadinya kezaliman. Tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *An-Nisā'* [4]:58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Dengan demikian, supremasi hukum dalam Islam memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan adil.

Dalam konteks masyarakat madani, pemimpin yang zalim dianggap sebagai ancaman terhadap keadilan sosial dan moral publik. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan. Menurut Al-Mawardi (2000) dalam *Al-Ahkam al-*

Sulthaniyyah, seorang pemimpin wajib menegakkan hukum dengan adil serta menjamin kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi. Sementara Abdul Karim Soroush (2010) menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat madani tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial warga negara. Prinsip inilah yang membedakan masyarakat madani dari sistem otoriter yang menempatkan kekuasaan di atas kebenaran hukum.

Kelima, masyarakat madani ditandai dengan toleransi dan pluralisme sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Dalam Islam, keberagaman dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* yang tidak dapat diingkari. Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Hujurat* [49]:13, *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."* Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan kehendak Ilahi untuk memperkaya kemanusiaan, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Prinsip ini menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat madani yang menghargai keragaman serta menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.

Selain itu, toleransi dalam masyarakat madani Islam mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Islam menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pemaksaan keyakinan. Menurut Nurcholish Madjid (1999), pluralisme dalam Islam bukan sekadar hidup berdampingan secara damai, tetapi juga membangun kesadaran saling memahami dan bekerja sama dalam kebaikan. Hal senada ditegaskan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) yang berpendapat bahwa masyarakat madani yang ideal adalah masyarakat yang menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, toleransi dan pluralisme menjadi pilar moral dan spiritual dalam membangun masyarakat madani yang inklusif dan berkeadaban.

Keenam, masyarakat madani memiliki etos ilmu dan kerja yang tinggi. Islam sangat menghargai orang berilmu dan pekerja keras. Dalam masyarakat madani, ilmu dijadikan dasar pengambilan keputusan, bukan hawa nafsu atau kepentingan sempit. Pendidikan menjadi sarana utama membangun budaya ilmu ini.

Ketujuh, masyarakat madani mengembangkan solidaritas sosial (ukhuwah). Rasa empati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama menjadi kekuatan sosial yang menjaga harmoni. Prinsip ini sesuai dengan sabda Nabi, *“Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.”*

Kedelapan, masyarakat madani memiliki kemandirian dan tanggung jawab moral. Mereka tidak tergantung sepenuhnya pada negara, tetapi mampu mengelola kehidupan sosial secara mandiri melalui lembaga masyarakat sipil. Ini menunjukkan kedewasaan politik dan sosial.

Kesembilan, masyarakat madani bersifat transparan dan akuntabel. Segala bentuk kebijakan publik dijalankan secara terbuka untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi merupakan cerminan dari kejujuran yang diajarkan Islam.

Kesepuluh, masyarakat madani bercirikan spiritualitas yang kuat. Mereka bukan sekadar masyarakat rasional, tetapi juga religius dan berakhlak. Dengan fondasi spiritual ini, masyarakat madani Islam bukan hanya beradab secara sosial, tetapi juga berorientasi pada keridaan Allah SWT.

D. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat madani karena berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan kesadaran sosial. Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan toleransi dapat ditanamkan sejak dini. Pendidikan Islam bukan sekadar proses transfer pengetahuan (*ta’līm*), tetapi juga pembinaan kepribadian (*tarbiyah*) dan penginternalisasian nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial. Menurut Hassan Hanafi (2011), pendidikan Islam harus berfungsi sebagai instrumen pembebasan umat dari kebodohan dan ketidakadilan sosial, sehingga menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang beradab.

Azyumardi Azra (2012) menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi sentral dalam membangun masyarakat madani karena mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial (*al-’adl al-ijtima’i*), partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, Ramayulis (2018) menambahkan bahwa pendidikan Islam berperan sebagai jembatan antara idealisme ajaran Islam dan realitas kehidupan

modern, dengan menyeimbangkan dimensi spiritual dan rasionalitas. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya melahirkan insan berilmu, tetapi juga warga negara yang beretika, berkeadaban, dan memiliki kesadaran sosial tinggi.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli maka peran pendidikan Islam dalam upaya mewujudkan masyarakat madani diantaranya: *Pertama*, pendidikan Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam masyarakat madani, moralitas adalah pilar utama yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pendidikan Islam membentuk generasi yang jujur, disiplin, dan berakhlak mulia.

Kedua, pendidikan Islam berfungsi sebagai media pemberdayaan umat. Melalui peningkatan literasi, keterampilan, dan kesadaran sosial, pendidikan Islam membekali umat agar mandiri secara ekonomi dan intelektual. Ini sejalan dengan prinsip *iqra'* dalam Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan kreatif.

Ketiga, pendidikan Islam menumbuhkan etos keilmuan dan dialog. Dalam masyarakat madani, perbedaan pendapat harus dikelola melalui diskusi yang rasional dan santun. Sistem pendidikan Islam yang demokratis mendorong peserta didik untuk berdialog, menghargai pandangan orang lain, dan mengambil keputusan berdasarkan hikmah.

Keempat, pendidikan Islam berperan dalam membangun kesadaran sosial. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dijadikan dasar etika sosial yang mendorong umat untuk peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan Islam melahirkan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Kelima, pendidikan Islam menjadi agen perubahan budaya. Melalui kurikulum yang integratif antara ilmu agama dan sains modern, pendidikan Islam membentuk masyarakat yang rasional namun tetap spiritual. Hal ini penting agar kemajuan teknologi tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan.

Keenam, pendidikan Islam turut berperan dalam memperkuat lembaga masyarakat sipil. Lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan universitas Islam menjadi ruang sosial bagi pembentukan kepemimpinan yang amanah dan berpihak pada umat.

Ketujuh, pendidikan Islam dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dengan menanamkan nilai keadilan dan tanggung

jawab publik, pendidikan melahirkan warga yang kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai Islam dan kemanusiaan.

Kedelapan, pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun toleransi dan harmoni sosial. Melalui pembelajaran multikultural, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama lintas agama dan budaya.

Kesembilan, pendidikan Islam berperan dalam pemberantasan kemiskinan dan kebodohan, dua faktor utama penghambat masyarakat madani. Dengan memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan, Islam mendorong terwujudnya kesetaraan sosial.

Sedangkan *kesepuluh*, pendidikan Islam menjadi pilar utama pembangunan peradaban Islam modern. Ia tidak hanya membentuk manusia berilmu, tetapi juga berakhlak, kreatif, dan cinta damai. Dengan pendidikan Islam yang kuat, masyarakat madani yang berkeadilan dan beradab dapat benar-benar diwujudkan.

Daftar Bacaan

- Abdullah, M. A. (2015). *Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia: Relevansi dan Tantangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawdudi, A. A. (2017). *Political Theory of Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Anwar, M. S. (2000). *Masyarakat Madani: Agenda dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Asad, M. (2018). *The Principles of State and Government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Azra, A. (2002). *Civil Society dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Azra, A. (2010). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2017). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Jakarta: Mizan.
- Abdullah, A. (2018). *Islamic Governance and the Concept of Civil Society in Early Caliphate*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Esposito, J. L. (2010). *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2016). *Islam and Democracy after the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.
- Fakhry, M. (2019). *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Hanafi, H. (2011). *Min al-'Aqidah ila al-Thawrah: Al-Ma'rifah wa al-Tarbiyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hidayat, K. (2020). *Masyarakat Madani: Konsep dan Aktualisasi dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hourani, A. (2013). *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2019). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kurzman, C. (2010). *Modernist Islam, 1840–1940: A Sourcebook*. New York: Oxford University Press.
- Madjid, N. (1999). *Masyarakat Religius dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (1999). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Menocal, M. R. (2011). *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*. Boston: Little, Brown and Company.
- Nasr, S. H. (2010). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: The Islamic Texts Society.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Governance and Ethics: Historical Perspectives*. New York: Routledge.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press.

- Nata, A. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (2015). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramayulis. (2018). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosenthal, F. (2016). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: Brill.
- Soroush, A. K. (2010). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. New York: Oxford University Press.
- Wahid, A. (2018). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Indonesia

A. Sejarah Kelembagaan Pendidikan Islam

Sejarah kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Islam ke nusantara pada abad ke-13 M, yang membawa misi dakwah sekaligus transformasi sosial dan kultural. Islam disebarkan tidak hanya melalui perdagangan dan perkawinan, tetapi juga melalui pendidikan informal di surau, langgar, dan rumah ulama. Lembaga-lembaga sederhana ini menjadi cikal bakal lahirnya tradisi pendidikan Islam yang kuat di kemudian hari.

Pada masa awal penyebaran Islam, pendidikan diselenggarakan secara tradisional dengan pola hubungan personal antara guru (ulama) dan murid (santri). Pendidikan berorientasi pada pengajaran Al-Qur'an, akidah, fiqh, dan akhlak. Materi pelajaran disampaikan secara lisan, dengan metode talaqqi dan bandongan, di mana santri duduk mengelilingi guru sambil mencatat pelajaran. Tradisi ini menjadi model awal bagi sistem kelembagaan pesantren di masa selanjutnya.

Pada abad ke-16 hingga ke-17, pendidikan Islam mulai memiliki bentuk yang lebih mapan seiring munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Mataram Islam. Sultan-sultan mendukung penuh kegiatan pendidikan agama dengan membangun masjid, surau, dan tempat belajar. Peran ulama istana pun semakin besar,

karena selain mendidik masyarakat, mereka juga menjadi penasihat keagamaan bagi raja.

Lahirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah kelembagaan pendidikan Islam. Pesantren menjadi wadah pembentukan karakter, transmisi ilmu agama, serta pusat dakwah yang membentuk jaringan ulama nusantara. Kiai sebagai tokoh sentral berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga pemimpin moral dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Sistem pendidikan pesantren bersifat otonom dan tidak terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Hal ini membuat pesantren menjadi benteng pertahanan moral sekaligus pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Para ulama seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan lainnya berangkat dari tradisi pesantren yang kokoh, yang kemudian melahirkan gerakan pembaruan pendidikan Islam di abad ke-20.

Memasuki abad ke-19, pengaruh modernisasi mulai merambah lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Belanda yang sekuler mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan intelektual Muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam agar tidak tertinggal. Lembaga seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) menjadi pelopor integrasi antara pendidikan agama dan ilmu umum.

Pada masa pergerakan nasional, lembaga pendidikan Islam menjadi arena pembentukan kesadaran kebangsaan. Madrasah, pesantren, dan organisasi keagamaan mencetak tokoh-tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat religius dan nasionalis. Di sinilah pendidikan Islam menunjukkan peran strategisnya sebagai pendorong perubahan sosial dan politik bangsa.

Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai mendapatkan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meskipun pada awalnya statusnya masih semi-formal. Perkembangan ini menandai awal era kelembagaan pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan modern.

Seiring perjalanan waktu, pendidikan Islam di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya lembaga-lembaga baru seperti madrasah negeri, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam.

Kelembagaan ini tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berupaya menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan dunia kerja modern.

Pada dekade 1980–1990-an, reformasi kelembagaan pendidikan Islam semakin terlihat melalui pembentukan Departemen Agama yang secara khusus menangani pendidikan agama di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Langkah ini memperkuat posisi kelembagaan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Reformasi pendidikan Islam terus berlanjut di era modern dengan munculnya lembaga-lembaga akreditasi, standardisasi kurikulum, dan integrasi ilmu. Pendidikan Islam kini diarahkan untuk membangun generasi yang religius, moderat, dan berdaya saing tinggi. Lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan.

Dengan demikian, sejarah kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia adalah sejarah dinamis yang terus mengalami adaptasi dan pembaruan. Dari surau hingga universitas Islam modern, semua menunjukkan kesinambungan antara nilai tradisi dan semangat inovasi dalam menjawab tantangan zaman.

B. Eksistensi Tradisi Pesantren di Era Globalisasi

1. Pengertian dan Latar Belakang Lahirnya Pesantren di Indonesia

Istilah *pesantren* berasal dari kata “*pe-santri-an*”, yaitu tempat tinggal para *santri*. Kata *santri* sendiri dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai *cantrik*, yaitu murid yang mengikuti seorang guru atau pandita dalam padepokan untuk menimba ilmu dan pengalaman spiritual (Dhofier, 2011). Sementara istilah *pondok* yang sering disandingkan dengan pesantren berasal dari kata Arab *funduq* (فندق) yang berarti penginapan, menggambarkan fungsi pesantren sebagai tempat tinggal para santri selama menuntut ilmu (Nizar, 2019). Di Aceh, lembaga serupa dikenal dengan sebutan *dayah*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang *kyai* yang berperan sebagai guru sekaligus figur spiritual. Untuk mengatur kehidupan santri di pondok, *kyai* menunjuk seorang santri senior yang disebut *lurah pondok* sebagai penanggung jawab kedisiplinan dan kegiatan harian (Zuhdi, 2017). Sistem asrama ini bertujuan membentuk kemandirian,

kedisiplinan, dan hubungan spiritual yang lebih dekat antara santri, kyai, dan Tuhan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah *pesantren* berasal dari kata *santri* yang berarti tempat santri belajar agama. Menurut pendapat filologis, kata *santri* mungkin berasal dari bahasa Sanskerta *cantrika*, yang berarti seseorang yang mengikuti guru secara intensif (Azra, 2015). Sementara C. C. Berg berpendapat istilah tersebut berasal dari kata *shastri* dalam bahasa India, yang berarti orang yang memahami kitab suci atau ahli sastra keagamaan Hindu (Ricklefs, 2012). Ada pula teori populer yang mengaitkan kata *santri* dengan istilah dalam bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”, serta interpretasi etimologis yang menggabungkan kata *saint* (orang saleh) dan *tra* (suka menolong), sehingga *pesantren* dapat dimaknai sebagai tempat mendidik manusia baik-baik (Nata, 2021). Dengan beragam akar etimologis ini, dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Nusantara yang mengandung perpaduan unsur lokal, spiritual, dan universal dalam sistem pendidikannya.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki akar sejarah kuat dalam perkembangan peradaban Islam Nusantara. Istilah “pesantren” berasal dari kata *santri*, yang berarti murid atau pelajar agama, dan awalan *pe-* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren berarti tempat para santri menuntut ilmu agama di bawah bimbingan seorang *kyai* (Nata, 2012). Pesantren menjadi simbol kemandirian dan keotentikan pendidikan Islam di Indonesia karena lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim untuk belajar agama di luar sistem kolonial Barat.

Latar belakang lahirnya pesantren tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-13 M. Para ulama dan pedagang Arab serta Gujarat menyebarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah kultural. Mereka mendirikan lembaga pendidikan sederhana di sekitar masjid, surau, dan rumah ulama untuk mengajarkan Al-Qur’an, fikih, dan akhlak. Bentuk inilah yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam dan pembentukan karakter (Azra, 2015; Dhofier, 2011).

Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga menjadi pusat pengaderan ulama dan pemimpin umat. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian menjadi fondasi

pembentukan karakter santri. Sistem pengajaran berbasis *halaqah* atau *bandongan* memungkinkan interaksi langsung antara guru dan murid dalam atmosfer spiritual dan intelektual yang mendalam (Bruinessen, 2015).

Pesantren juga berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh nasional lahir dari tradisi pesantren, seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan, yang menjadikan lembaga ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pergerakan sosial dan kebangsaan (Abdullah, 2020). Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga agen perubahan sosial.

Keberadaan pesantren hingga kini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Meski awalnya bersifat tradisional, pesantren berhasil mempertahankan nilai-nilai inti Islam sekaligus membuka diri terhadap modernisasi pendidikan. Hal ini menjadikan pesantren sebagai model pendidikan Islam yang berakar pada budaya lokal, namun tetap relevan dalam konteks global (Fauzi, 2022).

2. Tradisi-Tradisi Pesantren

Tradisi pesantren merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang telah terinternalisasi dalam kehidupan santri dan kyai. Tradisi pesantren memiliki akar kuat dalam sistem pendidikan Islam klasik (*tafaqquh fi al-din*), di mana tujuan utama pendidikan adalah membentuk pribadi berilmu, berakhlak, dan berorientasi pengabdian kepada Allah. Salah satu tradisi utama pesantren adalah pembelajaran kitab kuning (*kutub al-turats*), yaitu teks-teks klasik berbahasa Arab yang mencakup tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, nahwu, dan balaghah. Pembelajaran dilakukan dengan metode *bandongan* (kiai membaca dan menjelaskan, santri menyimak) serta *sorogan* (santri membaca di hadapan kiai untuk dikoreksi). Metode ini menumbuhkan kedisiplinan intelektual dan spiritual yang khas di kalangan santri (Dhofier, 2011; Madjid, 1997).

Selain pembelajaran kitab, tradisi keikhlasan dan pengabdian santri kepada kiai menjadi ciri khas pesantren. Santri tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga adab (etika) melalui interaksi langsung dengan kiai. Dalam pandangan pesantren, keberkahan ilmu diperoleh bukan hanya melalui pemahaman teks, tetapi juga melalui *tabarruk* (mengharap

berkah) dari guru yang saleh. Hubungan kiai dan santri bersifat paternalistik tetapi penuh kasih, mencerminkan nilai-nilai sufistik yang menekankan keikhlasan, kesabaran, dan ketawadhuan (Nata, 2012; Rahardjo, 2019). Tradisi ini membentuk karakter santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

Tradisi berikutnya adalah pola kehidupan berasrama (*boarding system*). Santri hidup dalam lingkungan yang sederhana, disiplin, dan penuh kebersamaan. Kehidupan di pondok melatih kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini juga memungkinkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah, belajar, hingga kegiatan sosial (Bruinessen, 2015). Dalam banyak pesantren, kegiatan harian seperti salat berjamaah, tadarus, dan pengajian menjadi bagian dari kurikulum nonformal yang berfungsi membentuk watak religius santri secara menyeluruh.

Selain itu, pesantren juga mengembangkan tradisi musyawarah dan gotong royong. Musyawarah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan internal pondok, baik di antara santri maupun antara pengurus dan kiai. Tradisi ini menanamkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab kolektif, dan etika kepemimpinan (Fadeli & Subhan, 2012). Sementara gotong royong terlihat dalam kegiatan seperti *ro'an* (kerja bakti), pengelolaan dapur umum, hingga pembangunan fasilitas pesantren. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai laboratorium sosial tempat pembentukan masyarakat Islam yang inklusif dan partisipatif.

Tradisi terakhir yang masih terjaga hingga kini adalah penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Dalam tradisi pesantren, ilmu dianggap suci dan harus dijaga dengan adab. Santri diajarkan untuk menghormati guru, kitab, dan sesama pencari ilmu. Nilai-nilai ini diwariskan turun-temurun dan menjadi pondasi etika keilmuan Islam di Indonesia (Nizar, 2019; Zuhdi, 2017). Melalui perpaduan antara intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas, tradisi pesantren berhasil mencetak banyak tokoh bangsa yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, serta pembinaan moral masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pesantren di Indonesia

Pesantren di Indonesia memiliki keragaman bentuk dan karakteristik yang berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya,

dan kebutuhan zaman. Secara umum, pesantren dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sistem pendidikan, kurikulum, dan tingkat integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Klasifikasi ini menunjukkan dinamika adaptasi pesantren dalam merespons perubahan sosial dan tuntutan global, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan tradisi keilmuan klasiknya (Dhofier, 2011; Bruinessen, 2015).

Jenis pertama adalah pesantren salafiyah (tradisional), yaitu pesantren yang tetap mempertahankan sistem pengajaran klasik berbasis *kitab kuning* tanpa mengikuti sistem pendidikan formal pemerintah. Pembelajaran dilakukan dengan metode *bandongan*, *sorogan*, dan *halaqah*. Fokus utamanya adalah pendalaman ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, hadis, fiqh, tauhid, dan tasawuf. Pesantren jenis ini menekankan aspek moral, spiritual, dan pembentukan karakter santri agar memiliki kepribadian yang ikhlas, tawadhu', dan berakhlak mulia (Nizar, 2019). Contoh pesantren salafiyah antara lain Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri dan Pesantren Langitan di Tuban.

Jenis kedua adalah pesantren khalafiyah (modern). Pesantren ini memadukan sistem pendidikan tradisional dengan kurikulum pendidikan umum. Di dalamnya terdapat madrasah atau sekolah formal dengan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi. Pesantren modern memperkenalkan metode pengajaran klasikal, penggunaan bahasa Arab dan Inggris aktif, serta penanaman semangat kepemimpinan dan disiplin. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan contoh pesantren modern yang menjadi model bagi banyak pesantren lain di Indonesia (Madjid, 1997; Fadeli & Subhan, 2012).

Jenis ketiga adalah pesantren kombinasi (integratif), yaitu pesantren yang menggabungkan sistem salaf dan khalaf. Pesantren tipe ini tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal yang diakui pemerintah. Dengan demikian, santri memperoleh dua jenis ijazah: dari lembaga pesantren dan dari pendidikan formal. Model integratif ini dinilai paling adaptif terhadap perkembangan zaman karena mampu menjaga tradisi sambil mempersiapkan santri menghadapi tantangan modernitas (Nata, 2012; Zuhdi, 2017).

Selain itu, terdapat pula pesantren vokasional dan pesantren tahfidz. Pesantren vokasional berorientasi pada keterampilan praktis seperti pertanian, perbengkelan, teknologi, dan kewirausahaan, sehingga

mencetak santri yang mandiri secara ekonomi. Sementara pesantren tahfidz fokus pada hafalan Al-Qur'an dan pembinaan akhlak. Kedua jenis pesantren ini menjadi bentuk inovasi pendidikan Islam yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai religius (Rahardjo, 2019; Syamsuddin, 2020).

4. Tantangan Pesantren di Tengah Arus Globalisasi

Era globalisasi membawa dampak besar terhadap dunia pendidikan, termasuk pesantren. Tantangan utama yang dihadapi pesantren adalah menjaga nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman. Globalisasi menuntut pesantren untuk mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kompetensi global dan literasi digital (Hidayat, 2020).

Selain itu, munculnya arus sekularisasi dan liberalisasi pemikiran menjadi tantangan bagi pesantren dalam menjaga kemurnian nilai-nilai Islam. Pesantren dituntut untuk tetap kritis terhadap pengaruh budaya luar yang dapat menggerus moralitas dan spiritualitas santri (Rahman, 2021).

Tantangan lainnya adalah persoalan manajemen dan profesionalisme pendidikan. Banyak pesantren menghadapi keterbatasan dalam hal sarana prasarana, pendanaan, dan sistem administrasi modern. Hal ini menuntut inovasi kelembagaan agar pesantren tidak tertinggal dalam persaingan global (Fauzan, 2018).

Selain faktor internal, pesantren juga dihadapkan pada isu radikalisme yang seringkali dikaitkan secara tidak adil dengan lembaga keagamaan tradisional. Untuk menghadapinya, pesantren perlu memperkuat narasi Islam moderat, toleran, dan cinta tanah air (Abdullah, 2020).

Dengan demikian, pesantren berada pada titik krusial: menjaga warisan tradisi di satu sisi, dan merespons tantangan modernitas di sisi lain. Kemampuan pesantren beradaptasi terhadap dinamika global akan menentukan eksistensinya di masa depan (Hasan, 2020).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pesantren juga memiliki peluang besar di era globalisasi. Salah satu peluang utama adalah kemampuan pesantren untuk menjadi pusat pembentukan karakter dan moralitas di tengah krisis nilai global. Ketika dunia modern

cenderung menekankan aspek material, pesantren menawarkan pendidikan berbasis spiritual dan etika (Azra, 2015).

5. Peluang Pesantren di Tengah Arus Globalisasi

Pesantren memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi umat melalui konsep *entrepreneurial pesantren* atau kewirausahaan berbasis pesantren. Model ini bertujuan agar santri tidak hanya menjadi pribadi saleh secara spiritual, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Beberapa pesantren telah sukses mengembangkan koperasi santri, unit usaha pertanian, peternakan, dan industri kecil yang dikelola secara profesional. Melalui kegiatan ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (Hidayat, 2020).

Selain itu, munculnya pendidikan vokasi di lingkungan pesantren menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan santri menghadapi tantangan dunia kerja modern. Pesantren mulai membuka program pelatihan berbasis industri kreatif, seperti desain grafis, teknologi informasi, kuliner halal, dan ekonomi syariah. Model ini membantu santri memperoleh keterampilan praktis tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Sinergi antara pendidikan agama dan pelatihan vokasional menciptakan keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan kompetensi profesional, yang menjadi modal penting bagi kemandirian umat Islam (Mulyono, 2022).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru bagi pesantren untuk memperluas peran dakwah dan pendidikan. Melalui e-learning, media sosial, dan platform digital, pesantren dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam moderat kepada masyarakat global secara efektif. Dakwah digital membuka ruang bagi para kiai dan santri untuk menyampaikan pesan keislaman yang damai, inklusif, dan kontekstual dengan kehidupan modern. Dengan demikian, pesantren mampu bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan karakter khasnya sebagai pusat keilmuan dan spiritualitas Islam (Rahman, 2021).

Lebih jauh, pesantren juga dapat berfungsi sebagai pusat riset keislaman dan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Banyak pesantren kini telah mendirikan perguruan tinggi, pusat studi Islam, dan lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu kontemporer

seperti radikalisme, kemiskinan, ekologi Islam, dan ekonomi syariah. Langkah ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan tradisional, tetapi juga berperan aktif dalam menyelesaikan problem sosial masyarakat modern. Dengan mengembangkan riset berbasis nilai-nilai Islam, pesantren dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan karakter bangsa dan pembangunan nasional (Nata, 2021).

Pada akhirnya, keberlanjutan dan eksistensi pesantren di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan klasik dengan inovasi modern akan menjadi model pendidikan Islam unggul yang berdaya saing global. Dengan semangat kemandirian, inovasi, dan moderasi, pesantren berpeluang besar menjadi episentrum peradaban Islam modern di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan, kolaborasi antar-pesantren, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memastikan pesantren tetap relevan dan kontributif di tengah arus globalisasi yang dinamis (Syamsuddin, 2020).

C. Kiprah Madrasah Dulu, Kini, dan Mendatang

1. Pengertian Madrasah

Secara etimologis, kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab “darasa-yadrusu-madrasatan” yang berarti tempat belajar atau tempat untuk memperoleh pelajaran. Dengan demikian, madrasah secara harfiah berarti lembaga pendidikan atau tempat belajar ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam, madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan proses pembelajaran ilmu agama Islam secara sistematis, baik yang berdiri secara mandiri maupun yang terintegrasi dengan pendidikan umum (Nata, 2012).

Secara terminologis, madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam seperti Al-Qur'an, hadis, fiqh, akidah, dan akhlak, disertai dengan pengajaran ilmu-ilmu umum. Madrasah bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Madrasah berperan penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena menjadi wadah

integrasi antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan perkembangan zaman (Azra, 2012).

Madrasah berbeda dari pesantren dalam hal sistem dan struktur kelembagaan. Jika pesantren lebih menekankan pendidikan berbasis komunitas dan pengasuhan (asrama) dengan tradisi keilmuan klasik, maka madrasah mengadopsi sistem persekolahan modern dengan jenjang dan kurikulum yang lebih terstruktur. Namun demikian, keduanya memiliki visi yang sama, yaitu mencetak generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak mulia (Bruinessen, 2015).

Dalam konteks Indonesia, madrasah juga berfungsi sebagai sarana pendidikan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Setelah kemerdekaan, madrasah dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memperluas akses pendidikan Islam yang bermutu. Madrasah kini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dengan berbagai jenjang mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA) yang mengajarkan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum (Depag RI, 2019).

Dengan demikian, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Ia tidak hanya menekankan aspek kognitif dan spiritual, tetapi juga sosial dan moral, sehingga peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.

2. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Madrasah di Indonesia

Lahirnya madrasah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan keagamaan pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan kolonial hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu dan tidak mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Hal ini mendorong para ulama dan tokoh Islam untuk mendirikan lembaga pendidikan alternatif yang dapat menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dari sinilah madrasah muncul sebagai bentuk resistensi terhadap sistem pendidikan kolonial yang sekuler dan diskriminatif (Azra, 2012).

Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia berbentuk pesantren, surau, dan dayah, yang berfokus pada pengajaran kitab kuning dan ilmu agama. Namun, seiring masuknya sistem sekolah modern, para tokoh Islam mulai memodifikasi pola pendidikan tradisional tersebut dengan

menambahkan mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, aritmetika, dan ilmu pengetahuan alam. Madrasah pun menjadi simbol modernisasi pendidikan Islam tanpa meninggalkan akar tradisi keilmuan Islam (Nata, 2012).

Perkembangan madrasah semakin pesat dengan lahirnya organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Persis (1923), dan Al-Washliyah (1930) yang mendirikan jaringan madrasah di berbagai daerah. Lembaga-lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, nasionalisme, dan semangat kebangsaan di tengah penjajahan (Yunus, 2018).

Pada masa kemerdekaan, madrasah memperoleh pengakuan formal dari pemerintah melalui pendirian Departemen Agama (1946) yang bertugas mengatur pendidikan keagamaan. Sejak saat itu, madrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional dengan pengakuan ijazah, kurikulum, dan standar mutu pendidikan (Depag RI, 2019).

Selanjutnya, melalui kebijakan seperti SKB Tiga Menteri tahun 1975 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah secara resmi diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum. Hal ini menandai pergeseran besar dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia menuju integrasi sistemik dan peningkatan kualitas (Suharto, 2017).

Dengan demikian, lahirnya madrasah merupakan respons intelektual dan spiritual umat Islam terhadap kolonialisme, sekaligus upaya untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Islam dalam arus modernisasi pendidikan. Madrasah lahir dari semangat pembaruan, kemandirian, dan perjuangan umat Islam dalam membangun peradaban bangsa.

3. Peran dan Kiprah Madrasah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional

Madrasah memiliki peran sentral dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang berkarakter religius dan berkeadaban. Sebagai lembaga pendidikan Islam formal, madrasah tidak hanya berfungsi mentransmisikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Melalui kurikulum integratif,

madrasah berkontribusi dalam membangun manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing global (Nata, 2018).

Madrasah turut membantu pemerintah memperluas akses pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil. Dalam banyak kasus, madrasah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Fungsi sosial inilah yang menjadikan madrasah bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat (Azra, 2012).

Selain itu, madrasah berperan penting dalam membentuk karakter kebangsaan dan moderasi beragama. Nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat pendidikan karakter melalui pendidikan agama yang moderat (Kemenag RI, 2020).

Madrasah juga berkontribusi besar terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) Muslim. Banyak alumni madrasah yang kemudian menjadi tokoh bangsa, ulama, birokrat, akademisi, dan pemimpin masyarakat. Peran strategis ini menjadikan madrasah bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai dan etika (Suharto, 2017).

Seiring dengan kebijakan pendidikan nasional, madrasah kini menjadi pionir dalam pengembangan kurikulum terpadu (*integrated curriculum*) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Konsep ini menjadi model ideal dalam mewujudkan pendidikan yang seimbang antara spiritualitas dan rasionalitas (Nizar, 2021).

Dengan demikian, kiprah madrasah dalam pembangunan pendidikan nasional bukan hanya historis, tetapi juga ideologis dan strategis. Madrasah telah menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi berilmu, berakhlak, dan berkarakter Islam Indonesia yang moderat.

4. Transformasi dan Dinamika Madrasah di Era Modern

Madrasah di era modern mengalami transformasi besar-besaran baik dalam aspek kurikulum, manajemen, maupun teknologi pembelajaran. Reformasi pendidikan nasional mendorong madrasah untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Hal ini tampak pada pengembangan kurikulum integratif,

penggunaan teknologi digital, dan peningkatan kompetensi guru (Fauzi, 2020).

Transformasi madrasah juga terjadi dalam aspek kelembagaan. Banyak madrasah yang kini berstatus Madrasah Negeri dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik secara administratif maupun finansial. Selain itu, muncul madrasah unggulan dan madrasah berbasis riset yang berorientasi pada kualitas akademik dan inovasi (Suryadi, 2019).

Bidang pedagogi, madrasah mulai mengadopsi pendekatan *student-centered learning* dan metode pembelajaran aktif. Paradigma lama yang berorientasi pada hafalan mulai bergeser menuju pembelajaran berbasis proyek, riset, dan pengembangan karakter. Transformasi ini menjadikan madrasah semakin adaptif terhadap perkembangan pendidikan global (Rahman, 2021).

Di sisi lain, madrasah menghadapi tantangan modernisasi yang kompleks, seperti keterbatasan sarana, kesenjangan mutu antar lembaga, serta kebutuhan digitalisasi administrasi pendidikan. Namun demikian, madrasah tetap menunjukkan ketahanan institusional dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat jaringan antar lembaga Islam (Zuhdi, 2020).

Transformasi madrasah juga ditandai dengan meningkatnya peran perempuan dalam dunia pendidikan Islam. Banyak madrasah yang kini dikelola atau dipimpin oleh perempuan, menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan umat (Mansur, 2021).

Secara keseluruhan, dinamika madrasah di era modern mencerminkan upaya rekonstruksi sistem pendidikan Islam agar tetap relevan dengan zaman, sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia.

5. Karakteristik Madrasah Masa Depan

Madrasah masa depan ditandai dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan akar spiritual dan moral Islam. Madrasah bukan lagi sekadar lembaga yang mengajarkan ilmu agama, tetapi menjadi institusi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis. Dalam konteks ini, madrasah diharapkan mampu melahirkan generasi Muslim yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu bersaing dalam era global. Menurut Nata

(2021), madrasah ideal masa depan adalah lembaga yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan kecakapan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi.

Ciri utama madrasah masa depan adalah penerapan pendidikan berbasis teknologi dan inovasi. Pembelajaran digital, sistem manajemen berbasis data, dan e-learning menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Madrasah perlu memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai bagian integral dari ekosistem pembelajaran. Menurut Rahman (2020), transformasi digital di madrasah harus disertai dengan peningkatan kapasitas guru dan pembentukan budaya literasi digital yang islami, agar teknologi menjadi sarana dakwah dan pemberdayaan umat, bukan sekadar hiburan.

Selain itu, madrasah masa depan memiliki karakteristik inklusif dan kolaboratif. Madrasah tidak lagi eksklusif bagi satu golongan, tetapi terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi dengan sekolah umum, universitas, lembaga penelitian, serta dunia industri menjadi keharusan agar madrasah dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Azra (2019), madrasah modern harus mengembangkan jejaring keilmuan dan sosial yang luas agar dapat beradaptasi dengan tuntutan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai moral Islam.

Ciri lain dari madrasah masa depan adalah berorientasi pada penguatan karakter dan kepemimpinan moral. Madrasah diharapkan melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Menurut Hidayat (2020), madrasah berperan strategis dalam membangun karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah, disiplin, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas pendidikan.

Terakhir, madrasah masa depan harus berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat. Madrasah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat inovasi dan pengembangan masyarakat. Dengan menjadikan penelitian dan pengabdian sebagai bagian integral dari kurikulum, madrasah akan melahirkan solusi terhadap problem sosial, ekonomi, dan keagamaan di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mujiburrahman (2022), madrasah berpotensi menjadi motor peradaban

Islam modern apabila mampu menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan pendekatan ilmiah yang adaptif dan solutif.

6. Prospek dan Tantangan Madrasah di Masa Depan

Madrasah memiliki prospek cerah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berdaya saing global. Dengan potensi integrasi antara nilai spiritual dan ilmu pengetahuan modern, madrasah dapat menjadi model pendidikan humanistik yang menekankan keseimbangan antara akal, iman, dan amal (Nata, 2021).

Namun, madrasah juga menghadapi tantangan serius, seperti modernisasi teknologi, globalisasi budaya, dan kompetisi lembaga pendidikan internasional. Kualitas guru, manajemen lembaga, serta inovasi kurikulum menjadi faktor penentu eksistensi madrasah di masa depan (Azra, 2012).

Salah satu prospek strategis adalah penguatan digitalisasi pendidikan Islam. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, madrasah dapat memperluas akses pembelajaran, memperkaya metode pendidikan, dan memperkuat jejaring akademik antarnegara Muslim (Rahman, 2021). Tantangan lain yang dihadapi madrasah adalah menjaga moderasi beragama di tengah polarisasi ideologi global. Madrasah perlu memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan agar tetap menjadi benteng moral bangsa (Kemenag RI, 2020).

Selain itu, keberlanjutan pendanaan dan otonomi kelembagaan juga menjadi isu penting. Madrasah harus mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berinovasi dalam pembiayaan agar tetap bertahan dalam kompetisi pendidikan (Suharto, 2017). Dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan SDM, digitalisasi, dan kolaborasi internasional, madrasah berpeluang besar menjadi pusat keunggulan pendidikan Islam dunia yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan Islam.

D. Sekolah Islam Terpadu: Tren Baru Pendidikan Islam

1. Pengertian Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan modern. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah lama menjadi tantangan dalam sistem

pendidikan Islam di Indonesia. SIT berupaya menyatukan keduanya secara harmonis sehingga menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia paripurna (*insan kamil*) yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi (Azra, 2019).

SIT menekankan pendekatan pendidikan yang holistik dengan menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai pusat pengembangan seluruh aspek pembelajaran. Artinya, setiap kegiatan belajar diarahkan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Selain itu, SIT menanamkan semangat kemandirian, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, SIT berperan penting dalam menjawab tantangan zaman yang menuntut generasi Muslim berilmu sekaligus berakhlak.

Ciri khas SIT juga terletak pada integrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum khas Islam, termasuk pendidikan Al-Qur'an, tahfiz, fiqih, dan akhlak. Model ini menjadikan SIT tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan budaya belajar yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan kontekstual yang menghubungkan ilmu dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Selain aspek kurikulum, SIT memiliki sistem pembinaan intensif terhadap peserta didik melalui kegiatan mentoring, halaqah, dan pembiasaan ibadah. Dengan pembinaan yang berkesinambungan ini, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya juang tinggi. Karakter yang dihasilkan bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial.

Secara kelembagaan, SIT banyak berafiliasi dengan *Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT)* yang menjadi wadah koordinasi dan pengembangan kualitas. Keberadaan JSIT memperkuat eksistensi SIT di seluruh Indonesia, baik dari sisi manajemen, kurikulum, maupun pembinaan guru. SIT kemudian menjadi tren baru dalam pendidikan Islam kontemporer yang menawarkan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal (Hidayat, 2020).

2. Konsep dan Filosofi Sekolah Islam Terpadu

Filosofi dasar SIT berakar pada konsep *tauhid* sebagai asas pendidikan. Semua proses pembelajaran diarahkan untuk meneguhkan hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan antarsesama manusia (hablun minannas). Dengan demikian, SIT menempatkan pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan sebagai proses penyempurnaan diri untuk mencapai keridhaan Allah. Konsep ini sejalan dengan gagasan Syed Naquib al-Attas (1993) yang menekankan pendidikan Islam sebagai proses *ta'dib*—pembentukan adab dan moral spiritual.

SIT juga memandang ilmu pengetahuan secara integral. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu dan akal. Dengan paradigma ini, SIT berupaya membangun keseimbangan antara kemampuan intelektual dan spiritual peserta didik. Mereka dididik agar memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sekaligus memiliki kesadaran moral dan sosial yang tinggi.

Filosofi pendidikan SIT menggabungkan tiga aspek utama: iman, ilmu, dan amal. Ketiganya menjadi fondasi dalam merancang kurikulum dan metode pembelajaran. Pendidikan bukan hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan (*uswah hasanah*) bagi peserta didik.

Selain itu, SIT menerapkan pendekatan *integratif-holistik* di mana seluruh kegiatan sekolah, baik akademik maupun nonakademik, diorientasikan untuk membentuk insan yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Filosofi ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar penguasaan kompetensi duniawi semata.

Dengan dasar filosofi tersebut, SIT hadir sebagai alternatif model pendidikan yang menawarkan solusi atas krisis moral dan nilai yang dihadapi masyarakat modern. SIT berupaya menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan berperilaku Islami.

3. Perkembangan dan Eksistensi Sekolah Islam Terpadu di Indonesia

Perkembangan SIT di Indonesia dimulai pada akhir 1990-an, beriringan dengan munculnya gerakan pembaruan pendidikan Islam. Kelahiran *Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia* tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam penyebaran konsep SIT ke berbagai daerah. JSIT mendorong standar mutu, kurikulum, dan sistem pembinaan guru agar memiliki keseragaman nilai dan visi (Rahman, 2021). SIT kemudian berkembang pesat terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan terhadap pendidikan Islam modern.

SIT mendapat sambutan luas dari kalangan masyarakat menengah Muslim yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan dasar nilai-nilai Islam yang kuat. Sekolah ini menawarkan pendekatan pembelajaran modern dengan tetap mempertahankan nuansa religius dan moralitas tinggi. SIT berhasil memadukan antara disiplin akademik dan pembinaan spiritual yang selama ini dianggap terpisah.

Perkembangan SIT juga terlihat dari meningkatnya jumlah sekolah di berbagai jenjang, mulai dari TK hingga SMA. Banyak SIT yang berhasil meraih prestasi nasional bahkan internasional, baik dalam bidang akademik maupun keagamaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan model SIT dalam menghasilkan peserta didik yang unggul, berdaya saing, sekaligus berakhlak mulia.

Selain itu, SIT turut berperan dalam mencetak generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan dakwah. Melalui kegiatan *outbound*, *leadership training*, dan *community service*, peserta didik dilatih untuk menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. SIT menjadi wadah pembinaan karakter Islami yang kontekstual dengan kebutuhan abad ke-21.

Eksistensi SIT kini tidak hanya sebatas pada ranah nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan Islam di negara lain. Dengan manajemen profesional, visi global, dan basis nilai Islam yang kuat, SIT menjadi bukti nyata keberhasilan integrasi antara tradisi dan modernitas dalam sistem pendidikan Islam (Azra, 2019; Hidayat, 2020).

4. Model Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Sekolah Islam Terpadu

Kurikulum SIT dirancang berdasarkan prinsip integrasi antara kurikulum nasional dan kurikulum khas Islam. Integrasi ini mencakup penggabungan antara ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan agama yang aplikatif. Proses pembelajaran mengutamakan pendekatan aktif, kolaboratif, dan kontekstual agar siswa mampu mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Model pembelajaran *active learning* dan *project-based learning* diterapkan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Selain aspek akademik, SIT menekankan pembiasaan ibadah dan pembinaan akhlak dalam setiap kegiatan belajar. Setiap pagi dimulai dengan tilawah, doa bersama, dan kajian singkat. Hal ini bertujuan menanamkan kesadaran spiritual sejak dini dan membentuk karakter disiplin serta tanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, dan empati diajarkan melalui praktik keseharian, bukan sekadar teori.

Guru dalam SIT berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus teladan moral bagi siswa. Mereka dituntut memiliki kompetensi pedagogik sekaligus spiritualitas tinggi agar mampu menanamkan nilai Islam dalam pembelajaran. Program pelatihan guru SIT juga difokuskan pada penguatan kompetensi integratif antara ilmu dan iman.

Inovasi teknologi juga menjadi bagian dari sistem pembelajaran SIT. Penggunaan media digital, *e-learning*, dan platform interaktif membantu memperluas akses pembelajaran dan memperkaya sumber belajar. SIT memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan internalisasi nilai-nilai Islam modern.

Secara keseluruhan, model kurikulum SIT mencerminkan visi pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dengan pendekatan integratif, SIT berhasil menciptakan generasi muda yang cerdas, berakarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

5. Tantangan dan Prospek Sekolah Islam Terpadu di Masa Depan

Menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, SIT menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah menjaga

keseimbangan antara idealisme nilai Islam dan tuntutan modernisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan dan kompetisi antar sekolah seringkali membuat orientasi spiritual terpinggirkan. SIT harus mampu mempertahankan identitas keislamannya di tengah arus pragmatisme pendidikan (Hidayat, 2020).

Tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas guru dan sumber daya manusia. SIT memerlukan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen dakwah. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru menjadi agenda utama bagi keberlanjutan SIT di masa depan.

Perkembangan teknologi digital juga membawa peluang besar bagi SIT untuk berinovasi dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan *artificial intelligence*, *learning management system*, dan media sosial, SIT dapat memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan Islam ke level global. Namun, integrasi teknologi ini harus dibarengi dengan penguatan literasi digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

SIT memiliki prospek cerah sebagai model pendidikan Islam masa depan yang unggul dan berdaya saing. Dengan sistem manajemen yang profesional, kurikulum integratif, dan pembinaan karakter yang kuat, SIT dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dan spiritual generasi muda. Pendidikan berbasis nilai Islam terbukti mampu mencetak manusia yang berilmu dan berakhlak mulia.

Apabila SIT terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan zaman, ia akan menjadi pionir dalam membentuk peradaban Islam modern yang berkeadaban dan berkemajuan. Integrasi antara iman, ilmu, dan amal yang menjadi ruh SIT akan menjadi fondasi kokoh bagi pendidikan Islam abad ke-21 (Azra, 2019).

E. Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

1. Pengertian Problematika PAI

Problematika Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum merujuk pada berbagai permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran agama Islam di lembaga pendidikan non-keagamaan. Permasalahan tersebut meliputi aspek kurikulum, tenaga pendidik, metode pembelajaran, hingga minat dan motivasi peserta didik terhadap materi PAI. Secara umum, problematika ini berkaitan erat dengan upaya menanamkan nilai-nilai

keislaman di lingkungan pendidikan yang bercorak sekuler atau plural (Nata, 2020).

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum memiliki tantangan tersendiri karena harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam sistem pendidikan yang lebih menekankan aspek akademik dan rasionalitas. Dalam konteks ini, guru PAI dituntut memiliki kreativitas dan strategi pedagogis yang relevan dengan kebutuhan peserta didik yang heterogen. Tujuannya bukan hanya transfer pengetahuan agama, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas.

Selain itu, problematika PAI juga mencakup persoalan relevansi antara ajaran Islam dan konteks kehidupan modern. Banyak peserta didik yang kesulitan mengaitkan ajaran PAI dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Akibatnya, pembelajaran agama sering dipersepsikan sebagai kegiatan ritual semata, bukan kebutuhan hidup yang aplikatif.

Secara konseptual, problematika PAI dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika sistem pendidikan nasional. Dalam sistem ini, pendidikan agama berfungsi memperkuat nilai spiritual peserta didik agar tidak terjebak pada materialisme dan pragmatisme. Oleh karena itu, pembahasan tentang problematika PAI penting dilakukan untuk mencari strategi penguatan pendidikan agama dalam konteks modern.

Dengan memahami pengertian problematika PAI secara menyeluruh, maka dapat dilakukan upaya reformasi dan inovasi pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi terhadap krisis moral generasi muda.

2. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Landasan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Pasal 12 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan, termasuk sekolah umum (Departemen Agama RI, 2006).

Selain itu, pelaksanaan PAI juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, PAI memiliki posisi strategis sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Secara normatif, kurikulum PAI disusun oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan agama di sekolah umum berjalan sesuai standar kompetensi nasional, namun tetap fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. PAI tidak hanya mengajarkan dogma keagamaan, tetapi juga nilai-nilai universal seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Pelaksanaan PAI juga didukung oleh berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. PMA ini menegaskan peran guru PAI sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk membimbing peserta didik menjadi insan berkarakter Islami.

Dengan dasar hukum yang kuat, PAI diharapkan mampu berfungsi bukan hanya sebagai pelajaran formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual dan moral di tengah masyarakat yang semakin plural dan kompleks. Pelaksanaan yang efektif menuntut keterlibatan semua pihak, mulai dari guru, sekolah, hingga keluarga (Nata, 2020).

3. Berbagai Problematika PAI di Sekolah Umum

Salah satu problematika utama PAI di sekolah umum adalah rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap materi agama. Banyak siswa yang menganggap PAI sebagai mata pelajaran tambahan yang tidak berpengaruh besar terhadap prestasi akademik. Akibatnya, pembelajaran agama seringkali tidak mendapat perhatian serius, baik dari peserta didik maupun pihak sekolah (Muhaimin, 2019).

Selain itu, keterbatasan jumlah guru PAI menjadi kendala signifikan. Di beberapa daerah, satu guru harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak optimal. Masalah ini juga diperburuk oleh kurangnya pelatihan profesional bagi

guru PAI, terutama dalam hal penggunaan teknologi pendidikan dan pendekatan pedagogis modern.

Dari sisi kurikulum, materi PAI seringkali dianggap terlalu normatif dan kurang kontekstual. Kurikulum lebih banyak berfokus pada hafalan ayat atau teori keagamaan tanpa mengaitkannya dengan isu-isu kehidupan sehari-hari seperti lingkungan, teknologi, atau sosial media. Akibatnya, peserta didik sulit memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern (Nata, 2020).

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya sinergi antara pendidikan agama di sekolah dan lingkungan keluarga. Banyak orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada guru di sekolah, padahal pembentukan karakter Islami membutuhkan keteladanan dan penguatan nilai di rumah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan perilaku nyata siswa.

Selain itu, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga menimbulkan problem baru bagi PAI. Arus informasi yang bebas seringkali membawa pengaruh negatif terhadap moral dan akhlak siswa. Guru PAI dituntut mampu menjadi pembimbing digital yang mengarahkan peserta didik agar bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli terdapat 5 problematika PAI di Sekolah Umum yaitu: (1) Kurikulum yang Normatif dan Kurang Kontekstual; (2) Kompetensi dan Profesionalisme Guru PAI; (3) Rendahnya Minat dan Motivasi Siswa terhadap PAI; (4) Lemahnya Sinergi antara Sekolah, Keluarga, dan Lingkungan; dan (5) antangan Globalisasi dan Pengaruh Teknologi Digital.

4. Solusi Alternatif Problematika PAI di Sekolah Umum

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, partisipatif, dan kontekstual. Guru PAI perlu memanfaatkan metode aktif seperti *project-based learning*, *contextual teaching and learning (CTL)*, dan diskusi nilai agar siswa lebih terlibat secara emosional dan intelektual dalam proses pembelajaran. PAI harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, bukan sekadar hafalan dogmatis

Selain itu, peningkatan kualitas guru menjadi langkah strategis. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pelatihan

pedagogik dan kompetensi digital bagi guru PAI agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Guru yang kreatif dapat menjadikan media sosial, video interaktif, dan platform e-learning sebagai sarana dakwah edukatif bagi generasi muda (Hidayat, 2020).

Kurikulum PAI juga perlu direformulasi agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan modern. Nilai-nilai Islam harus diintegrasikan ke dalam berbagai bidang ilmu, seperti sains, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, siswa dapat melihat bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh (*kaffah*) dan aplikatif dalam setiap aspek kehidupan.

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam memperkuat pendidikan agama. Pembiasaan ibadah, kegiatan sosial, dan keteladanan guru serta orang tua perlu berjalan seiring agar pembentukan karakter Islam lebih efektif. Lingkungan sekolah harus diciptakan sebagai ekosistem religius yang mendukung perilaku berakhlak mulia.

Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas, beriman, dan berintegritas di tengah tantangan zaman global. PAI tidak hanya berfungsi mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi masyarakat madani.

F. Tantangan dan Peluang Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Tengah Perubahan Zaman

1. Pengertian dan Lahirnya Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang fokus pada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, fiqh, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Secara etimologis, kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab *darasa* (درس) yang berarti tempat belajar, sedangkan *diniyah* berarti keagamaan. Dengan demikian, *Madrasah Diniyah* berarti tempat pembelajaran agama Islam yang berorientasi pada pendalaman pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam (al-Syaibānī, 1979). Dalam konteks Islam klasik, madrasah memiliki peranan penting sebagai pusat pembentukan ulama dan kader

keilmuan Islam yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memahami realitas sosial dan budaya umat.

Madrasah Diniyah berkembang dari tradisi pendidikan Islam yang telah lama hidup di dunia Islam, khususnya di dunia Arab dan Persia sejak abad ke-10 M. Menurut *Makdisi* (1981) dalam karyanya *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*, madrasah merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama dalam peradaban Islam yang kemudian menginspirasi munculnya universitas di Barat seperti *University of Bologna* dan *University of Oxford*. Madrasah pada masa itu berfungsi sebagai lembaga penyebaran ilmu syariah, tafsir, dan hadis, serta tempat mencetak cendekiawan Islam yang memiliki kemampuan analisis hukum dan teologi.

Di Indonesia, madrasah diniyah muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim untuk mempelajari agama secara lebih mendalam di luar sistem pendidikan kolonial. Lembaga ini menjadi wadah bagi umat Islam dalam menjaga tradisi keilmuan Islam di tengah perubahan sosial dan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh *Azra* (2002), madrasah diniyah merupakan bentuk adaptasi pendidikan Islam terhadap modernitas tanpa kehilangan substansi spiritual dan kulturalnya. Dengan demikian, madrasah diniyah tidak hanya sekadar tempat belajar agama, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan identitas keislaman masyarakat.

Secara konseptual, keberadaan madrasah diniyah menegaskan pentingnya dimensi *tarbiyah* (pendidikan) dan *ta'dib* (pembentukan adab) dalam pendidikan Islam. Al-Attas (1991) dalam *The Concept of Education in Islam* menekankan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada proses penyucian jiwa dan pembentukan insan kamil yang beradab. Madrasah diniyah menjadi implementasi nyata dari konsep tersebut dengan menekankan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak.

Dalam perspektif pendidikan modern, madrasah diniyah juga dapat dipahami sebagai bentuk *community-based education*, yaitu pendidikan berbasis komunitas yang tumbuh dari kebutuhan sosial masyarakat. Menurut *John Dewey* (1938) dalam *Experience and Education*, pendidikan seharusnya lahir dari pengalaman dan kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semangat madrasah diniyah

yang tumbuh secara organik di tengah masyarakat muslim untuk menjawab kebutuhan spiritual, moral, dan intelektual mereka.

Dengan demikian, madrasah diniyah memiliki nilai historis, teologis, dan pedagogis yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan Islam. Ia menjadi simbol kesinambungan tradisi keilmuan Islam klasik dan juga bukti kemampuan umat Islam untuk mengadaptasi sistem pendidikan terhadap konteks lokal tanpa kehilangan ruh keagamaannya. Dalam era modern, revitalisasi madrasah diniyah diperlukan agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam sistem pendidikan nasional maupun global

Kemunculan Madrasah Diniyah tidak dapat dilepaskan dari tradisi pendidikan Islam di Nusantara yang telah dimulai sejak masa pesantren dan surau. Lembaga ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama secara terstruktur dan terjadwal. Berbeda dengan pesantren yang berbasis asrama, Madrasah Diniyah lebih fleksibel karena dapat diikuti oleh siswa setelah mereka menempuh pendidikan formal di sekolah umum.

Secara historis, Madrasah Diniyah mulai tumbuh pada awal abad ke-20 bersamaan dengan munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, dan KH. Abdul Halim mendorong lahirnya pendidikan agama yang lebih sistematis dan modern. Madrasah Diniyah kemudian menjadi wadah penting bagi pendidikan Islam di luar pesantren tradisional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mulai memberikan perhatian terhadap Madrasah Diniyah sejak awal kemerdekaan. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 misalnya, mengatur penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai pendidikan keagamaan Islam jalur nonformal. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga tersebut dalam sistem pendidikan nasional.

Madrasah Diniyah memiliki tujuan utama membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berpengetahuan agama yang baik, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, madrasah ini menjadi sarana penting bagi pembinaan keimanan, ibadah, dan moral generasi muda Muslim di tengah tantangan modernitas.

Secara sosiologis, Madrasah Diniyah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan masyarakat Muslim di Indonesia. Keberadaannya memperkuat jaringan pendidikan Islam berbasis masyarakat dan menjadi bentuk kesinambungan antara pendidikan tradisional dan sistem pendidikan nasional modern (Nata, 2020).

2. Ciri-Ciri Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan Islam lainnya. Ciri utama adalah fokusnya pada pendidikan agama murni, tanpa mengajarkan mata pelajaran umum seperti matematika atau sains. Materi pembelajaran lebih menekankan pada aspek ibadah, akhlak, dan pemahaman kitab klasik.

Kedua, Madrasah Diniyah biasanya diselenggarakan pada sore atau malam hari, setelah jam belajar sekolah umum selesai. Hal ini memberi kesempatan kepada siswa sekolah umum untuk memperdalam ilmu agama tanpa harus meninggalkan pendidikan formal. Sistem waktu yang fleksibel menjadikan madrasah ini mudah diakses oleh masyarakat luas.

Ketiga, lembaga ini umumnya didirikan dan dikelola oleh masyarakat, organisasi keagamaan, atau masjid setempat. Dengan demikian, Madrasah Diniyah mencerminkan semangat partisipasi sosial dan pemberdayaan umat dalam bidang pendidikan. Keberadaannya sering menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, seperti pengajian, tadarus, dan kegiatan sosial.

Keempat, metode pengajaran di Madrasah Diniyah masih mempertahankan unsur tradisional seperti *sorogan* (membaca kitab secara individual kepada guru) dan *bandongan* (pembelajaran klasikal). Namun, kini banyak lembaga yang mulai mengintegrasikan pendekatan modern seperti diskusi, presentasi, dan penggunaan media digital.

Kelima, hubungan antara guru dan santri di Madrasah Diniyah sangat dekat dan bersifat kekeluargaan. Para guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan spiritual yang membimbing karakter dan akhlak peserta didik.

Keenam, Madrasah Diniyah berperan penting sebagai pelengkap pendidikan agama di sekolah formal. Ia menjadi tempat pembentukan identitas keislaman generasi muda dan benteng moral dari pengaruh negatif modernisasi (Azra, 2012; Hidayat, 2020).

3. Klasifikasi Madrasah Diniyah dan Syarat Penerimaan

Madrasah Diniyah di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan jenjang usia dan tingkat kemampuan peserta didik. Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2014, terdapat empat jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah, yaitu: Ula (dasar), Wustha (menengah), Ulya (lanjutan), dan Jenjang Takmiliyah Awaliyah untuk usia dini. Setiap tingkat memiliki kurikulum dan capaian kompetensi yang berbeda.

Pada tingkat Ula, peserta didik diajarkan dasar-dasar agama seperti membaca Al-Qur'an, praktik ibadah, dan akhlak. Tingkat Wustha mulai mempelajari tafsir, hadis, fiqh, dan bahasa Arab dasar. Sementara tingkat Ulya menekankan pada pendalaman kitab klasik (*kutub al-turats*) dan penguatan argumentasi keagamaan.

Syarat penerimaan siswa pada umumnya sederhana dan inklusif. Peserta didik cukup memiliki kemampuan baca-tulis Arab dasar dan komitmen mengikuti pembelajaran secara rutin. Madrasah Diniyah biasanya tidak mensyaratkan ijazah formal, karena tujuan utamanya adalah pendidikan agama dan pembinaan moral.

Selain klasifikasi berdasarkan jenjang, Madrasah Diniyah juga dapat dibedakan menurut pengelolaannya: (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Swasta, yang dikelola masyarakat; dan (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah Negeri, yang berada di bawah pembinaan langsung Kementerian Agama.

Madrasah Diniyah sering pula dikategorikan menurut orientasinya: *salafiyah* (tradisional, fokus pada kitab kuning) dan *ashriyah* (modern, menggunakan metode dan kurikulum kontekstual). Kedua model ini sering berkolaborasi untuk menjawab kebutuhan zaman.

Dengan klasifikasi yang fleksibel, Madrasah Diniyah mampu melayani beragam lapisan masyarakat. Keberagaman ini memperlihatkan kekayaan sistem pendidikan Islam di Indonesia yang adaptif dan dinamis (Muhaimin, 2019; Nata, 2020).

4. Kurikulum yang Digunakan Madrasah Diniyah

Kurikulum Madrasah Diniyah dirancang untuk memperdalam pemahaman ajaran Islam. Materinya mencakup Al-Qur'an, hadis, fiqh, akidah, akhlak, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Kurikulum ini tidak hanya

berorientasi pada kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas.

Pada jenjang dasar, kurikulum lebih menekankan pengenalan dan hafalan, sedangkan pada jenjang lanjutan fokus pada pemahaman makna dan penerapan ajaran Islam. Metode *tafaqquh fi al-din* (pendalaman agama) menjadi ruh utama pembelajaran di Madrasah Diniyah.

Kementerian Agama telah menerbitkan pedoman kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliah yang bersifat nasional. Namun, madrasah juga diberi otonomi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Hal ini mencerminkan prinsip *local wisdom* dalam pendidikan Islam.

Selain pelajaran agama, beberapa madrasah juga menambahkan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni Islami, kaligrafi, tahfidz, dan kewirausahaan syariah. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang religius sekaligus kreatif dan produktif.

Evaluasi pembelajaran di Madrasah Diniyah tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik. Proses evaluasi dilakukan melalui ujian semester, praktik ibadah, hafalan Al-Qur'an, serta penilaian sikap dan adab santri dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini mencerminkan tujuan pendidikan Islam yang menempatkan akhlak sebagai inti dari keberhasilan pembelajaran, bukan semata hasil akademik. Dalam pandangan *al-Ghazālī* (Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn), ilmu harus berbuah amal dan akhlak mulia, karena pendidikan sejati adalah yang mampu membentuk kesalehan pribadi dan sosial.

Selain itu, penilaian moral dan adab menjadi komponen utama dalam sistem evaluasi madrasah diniyah. Santri dinilai dari kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap hormat terhadap guru dan sesama. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'dīb* yang dikemukakan oleh *al-Attas* (1991), yakni pendidikan yang menanamkan adab sebagai dasar pembentukan kepribadian muslim sejati. Dengan demikian, sistem evaluasi madrasah diniyah tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga memantau perkembangan karakter dan keimanan peserta didik secara berkelanjutan.

Kurikulum madrasah diniyah berfungsi sebagai sarana menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam, sekaligus adaptif terhadap kebutuhan zaman modern (Nizar, 2019). Kurikulum tersebut umumnya mencakup

kajian *ulum al-din* seperti tafsir, hadis, fiqih, tauhid, serta bahasa Arab klasik. Namun, beberapa madrasah diniyah kini juga mengintegrasikan materi kontekstual seperti literasi digital, kewirausahaan, dan isu-isu sosial keagamaan. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjembatani antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan realitas kehidupan kontemporer yang menekankan pentingnya sintesis antara turats (warisan klasik) dan tajdid (pembaruan).

Dengan model evaluasi dan kurikulum yang demikian, madrasah diniyah memainkan peran penting dalam menjaga orisinalitas pendidikan Islam sambil tetap relevan dengan dinamika zaman. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak sebagai satu kesatuan utuh yang mencerminkan visi pendidikan Islam holistik. Evaluasi yang berorientasi pada nilai moral dan spiritual menjadi keunggulan madrasah diniyah dalam membentuk insan kamil yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia

5. Administrasi Madrasah Diniyah

Administrasi Madrasah Diniyah meliputi pengelolaan kelembagaan, keuangan, tenaga pendidik, peserta didik, dan kegiatan pembelajaran. Secara umum, madrasah ini berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, meskipun sebagian besar dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Kepala madrasah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Mereka juga berperan dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, ormas Islam, dan lembaga sosial.

Administrasi keuangan sering kali menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar madrasah tidak menarik biaya tinggi. Pendanaan biasanya berasal dari infaq, donatur, dan dukungan masyarakat. Beberapa madrasah mulai mengembangkan unit usaha kecil untuk menopang operasionalnya. Sistem administrasi modern mulai diadopsi oleh banyak madrasah, seperti penggunaan aplikasi pencatatan kehadiran, nilai, dan data santri. Digitalisasi administrasi meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan lembaga.

Tenaga pengajar di Madrasah Diniyah umumnya berasal dari kalangan kiai, ustaz, dan alumni pesantren yang memiliki dasar keilmuan Islam yang kuat. Mereka berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan pembimbing spiritual bagi para santri.

Keberadaan mereka menjadi faktor sentral dalam menjaga otentisitas tradisi pendidikan Islam yang menekankan *transfer of knowledge* sekaligus *transfer of value*. Dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zarnūjī dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga penuntun ruhani yang membimbing murid menuju kemuliaan akhlak dan kedekatan dengan Allah.

Walaupun sebagian tenaga pengajar di madrasah diniyah belum memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi, mereka memiliki otoritas keilmuan tradisional yang diakui masyarakat. Hal ini mencerminkan sistem pendidikan Islam yang berbasis *sanad al-'ilm* (rantai transmisi keilmuan) di mana legitimasi seorang guru diperoleh melalui penguasaan ilmu dan hubungan spiritual dengan guru-guru sebelumnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Makdisi (1981) dalam *The Rise of Colleges*, yang menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik seperti madrasah didasarkan pada otoritas keilmuan personal, bukan pada sertifikasi administratif.

Namun demikian, di era modern, tantangan profesionalisme tenaga pengajar menjadi perhatian penting. Peningkatan kapasitas pedagogik dan manajerial perlu dilakukan agar madrasah diniyah dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Pelatihan metodologi pengajaran, literasi digital, serta penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan mendesak agar tenaga pendidik mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini, Hidayat (2020) menegaskan bahwa kualitas pengajar menjadi salah satu indikator utama keberhasilan transformasi madrasah diniyah di tengah perubahan sosial yang cepat.

Selain tenaga pengajar, penguatan manajemen dan administrasi lembaga juga merupakan faktor kunci bagi keberlanjutan madrasah diniyah. Administrasi yang baik memungkinkan pengelolaan sumber daya, kurikulum, dan evaluasi berjalan efektif dan transparan. Dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat Islam diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui akreditasi, sertifikasi guru, dan bantuan sarana prasarana. Dengan demikian, madrasah diniyah dapat terus eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan, tanpa kehilangan identitas spiritualnya.

6. Problematika dan Solusi Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah menghadapi berbagai problematika, mulai dari keterbatasan dana, sarana prasarana, hingga profesionalisme tenaga pendidik. Banyak madrasah yang masih beroperasi di bawah standar fasilitas pendidikan nasional. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan manajemen lembaga.

Selain itu, masih ada tantangan dalam pengakuan formal terhadap lulusan Madrasah Diniyah. Karena berada di jalur nonformal, ijazahnya sering kali tidak memiliki kekuatan administratif setara dengan sekolah umum.

Keterbatasan tenaga pengajar profesional juga menjadi hambatan. Banyak guru mengajar secara sukarela, dengan insentif minim. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara semangat dakwah dan profesionalisme pendidikan.

Namun demikian, berbagai solusi telah diupayakan. Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan program bantuan operasional, pelatihan guru, serta sertifikasi lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Selain itu, digitalisasi pendidikan menjadi peluang besar bagi Madrasah Diniyah untuk memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran. Melalui platform daring, nilai-nilai Islam dapat disebarkan lebih luas dan adaptif terhadap generasi muda.

Dengan penguatan regulasi, manajemen, dan inovasi pembelajaran, Madrasah Diniyah akan tetap eksis sebagai benteng moral dan pusat pendidikan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia (Nata, 2020; Muhaimin, 2019; Hidayat, 2020).

G. Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village

1. Karakteristik Era Global Village

Era *Global Village* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Marshall McLuhan (1964) dalam bukunya *Understanding Media: The Extensions of Man*. Istilah ini menggambarkan dunia modern yang semakin terhubung karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Melalui jaringan digital, batas geografis, sosial, bahkan budaya semakin kabur. Dunia seakan menjadi satu desa besar di mana setiap individu dapat berinteraksi dan bertukar informasi secara

instan. Fenomena ini menciptakan realitas baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan keagamaan.

Dalam konteks pendidikan, *Global Village* ditandai oleh akses pengetahuan tanpa batas, kolaborasi lintas negara, dan persaingan global di bidang akademik. Perguruan tinggi tidak lagi hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga dalam arena internasional. Perkembangan teknologi digital seperti *Artificial Intelligence*, *Big Data*, dan *E-learning* telah mengubah cara belajar dan mengajar. Mahasiswa kini dapat belajar dari universitas manapun di dunia melalui kursus daring terbuka (MOOCs).

Selain itu, era ini juga memunculkan globalisasi nilai dan budaya. Arus informasi yang deras membawa pengaruh besar terhadap pandangan hidup masyarakat, termasuk umat Islam. Nilai-nilai sekularisme, liberalisme, dan pragmatisme menyebar dengan cepat, sehingga menuntut lembaga pendidikan Islam untuk lebih waspada dan adaptif dalam menjaga identitas keagamaannya. Dalam perspektif Islam, hal ini dapat dipahami sebagai ujian terhadap keteguhan umat dalam menjaga *al-thawābit* (prinsip-prinsip dasar Islam) sambil berinteraksi dengan *al-mutaghayyirāt* (perubahan sosial).

Era *Global Village* juga ditandai oleh munculnya masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*). Dalam pandangan *Peter Drucker* (1993), masyarakat modern tidak lagi bertumpu pada tenaga fisik, tetapi pada kapasitas berpikir, kreativitas, dan inovasi. Hal ini menuntut perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam, untuk menjadi pusat produksi ilmu dan inovasi yang mampu bersaing secara global.

Dari perspektif Islam, kemajuan global ini dapat direspons dengan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn*, yaitu menjadikan ilmu dan teknologi sebagai sarana kemaslahatan umat manusia. Seperti dikatakan oleh *Yusuf al-Qaradawi* (1995) dalam *al-Islām wa al-'Ilm*, Islam mendorong umatnya untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai tauhid dan moralitas. Dengan demikian, *Global Village* bukanlah ancaman semata, melainkan peluang dakwah dan pembaruan pemikiran Islam.

Karakteristik utama era *Global Village* adalah kecepatan, keterhubungan, dan kompleksitas. Semua aspek kehidupan berlangsung serba cepat dan saling terkait. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam harus memiliki kapasitas adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar tidak tertinggal dalam arus perubahan global yang dinamis.

2. Dampak Positif dan Negatif Era Global Village

Era *Global Village* membawa banyak dampak positif bagi dunia pendidikan, terutama dalam hal akses pengetahuan. Perguruan tinggi Islam kini dapat berkolaborasi dengan universitas internasional melalui riset bersama, pertukaran mahasiswa, serta publikasi ilmiah global. Digitalisasi juga memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan Islam melalui media daring, menjadikan ilmu agama lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Al-Qardhawi, 2000).

Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Metode *blended learning* dan *e-learning* membuat proses pendidikan lebih fleksibel dan efisien. Dosen dan mahasiswa dapat mengakses jurnal, literatur, serta forum diskusi ilmiah secara global. Hal ini sesuai dengan gagasan Castells (2000) dalam *The Rise of the Network Society* bahwa teknologi informasi telah membentuk masyarakat jaringan (*network society*) yang saling terhubung lintas budaya dan wilayah.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap nilai, moral, dan spiritualitas peserta didik. Arus informasi tanpa filter dapat menimbulkan dekadensi moral, materialisme, dan relativisme nilai. Pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam menjaga identitas keislaman di tengah dominasi budaya Barat yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Al-Attas (1993), hal ini disebut sebagai “krisis adab”, yaitu hilangnya disiplin intelektual dan spiritual akibat dominasi pandangan hidup sekuler.

Selain itu, terdapat ancaman homogenisasi budaya dan hilangnya kearifan lokal. Perguruan tinggi Islam yang terlalu mengikuti arus modernisasi tanpa basis nilai Islam dapat kehilangan jati dirinya. Fenomena ini menuntut adanya strategi Islamisasi ilmu dan integrasi nilai tauhid dalam setiap aspek kurikulum dan penelitian. Dengan demikian, pendidikan tinggi Islam harus tetap menjaga keseimbangan antara adaptasi dan konservasi nilai.

Secara sosial, *Global Village* juga memperlebar kesenjangan antara lembaga pendidikan maju dan tertinggal. Perguruan tinggi Islam di negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan akses teknologi. Jika tidak diantisipasi, kesenjangan digital ini dapat memperburuk ketimpangan global dalam dunia akademik.

Oleh karena itu, tantangan utama bagi perguruan tinggi Islam adalah bagaimana memanfaatkan peluang globalisasi tanpa terjebak dalam efek negatifnya. Hal ini menuntut kebijakan yang visioner, manajemen yang profesional, serta kurikulum yang mampu menanamkan nilai-nilai Islam sambil tetap terbuka terhadap perkembangan dunia.

3. Tantangan Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village

Salah satu tantangan terbesar bagi perguruan tinggi Islam di era *Global Village* adalah menjaga identitas keilmuan Islam di tengah arus sekularisasi pengetahuan. Dalam sistem pendidikan global, rasionalitas dan empirisme sering menjadi tolok ukur utama, sedangkan dimensi spiritual dan moral kurang diperhatikan. Akibatnya, pendidikan Islam berisiko mengalami reduksi makna menjadi sekadar transmisi pengetahuan, bukan transformasi karakter dan iman (Al-Attas, 1993).

Tantangan berikutnya adalah disrupsi teknologi dan digitalisasi pendidikan. Perguruan tinggi Islam harus beradaptasi dengan teknologi pembelajaran berbasis AI, big data, dan virtual reality. Namun, banyak lembaga masih tertinggal dalam hal infrastruktur, literasi digital dosen, dan kesiapan manajemen. Dalam pandangan *Friedman (2005)*, dunia kini datar (*The World is Flat*), tetapi tidak semua institusi memiliki kapasitas yang sama untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Dari sisi sumber daya manusia, perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan profesionalisme dosen dan peneliti. Banyak tenaga akademik belum mampu bersaing dalam publikasi ilmiah internasional karena kendala bahasa, metodologi, dan keterbatasan jejaring global. Selain itu, masih terdapat jurang antara ilmu keislaman dan ilmu umum yang belum terintegrasi secara epistemologis.

Tantangan ideologis juga muncul dalam bentuk arus pemikiran liberal dan relativistik yang dapat menggerus keyakinan keislaman mahasiswa. Perguruan tinggi Islam perlu membangun benteng intelektual melalui penguatan kurikulum akidah, filsafat Islam, dan etika akademik. Dalam konteks ini, *Syed Naquib al-Attas* menekankan pentingnya “ta’dib” yaitu pendidikan yang berfokus pada pembentukan adab dan kesadaran spiritual.

Selain itu, tantangan globalisasi ekonomi juga mempengaruhi kemandirian lembaga pendidikan Islam. Ketergantungan pada dana

pemerintah dan rendahnya daya saing lulusan menjadi masalah yang perlu diatasi. Perguruan tinggi Islam dituntut untuk mengembangkan sistem kewirausahaan dan riset terapan agar mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat.

Akhirnya, perguruan tinggi Islam harus mampu menjadi lembaga yang inklusif dan adaptif, tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Hal ini membutuhkan visi kepemimpinan yang kuat, inovasi kurikulum, dan kolaborasi internasional yang sehat. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam dapat bertahan sekaligus berperan strategis dalam masyarakat global.

4. Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village

Di balik berbagai tantangan, era *Global Village* juga menghadirkan peluang besar bagi perguruan tinggi Islam untuk berkembang. Pertama, globalisasi membuka akses terhadap kolaborasi riset internasional dan pertukaran keilmuan lintas negara. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi Islam memperkenalkan perspektif Islam dalam wacana akademik global (Esposito, 2011).

Kedua, perkembangan teknologi informasi menjadi sarana efektif untuk dakwah digital dan pendidikan daring. Platform seperti *e-learning*, *podcast dakwah*, dan *virtual symposium* dapat digunakan untuk menyebarkan nilai Islam moderat dan rahmatan lil 'ālamīn. Perguruan tinggi Islam dapat memainkan peran strategis dalam membangun literasi digital keagamaan yang beradab dan beretika.

Ketiga, era global juga membuka peluang bagi penguatan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge economy*). Perguruan tinggi Islam dapat mengembangkan pusat inovasi, *start-up*, dan program kewirausahaan sosial yang berpijak pada etika Islam. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga penggerak ekonomi umat.

Keempat, meningkatnya kesadaran global terhadap spiritualitas dan etika menjadi peluang bagi perguruan tinggi Islam untuk menawarkan paradigma pendidikan holistik. Dunia modern yang cenderung materialistik mulai mencari keseimbangan spiritual. Pemikiran Islam yang integratif antara akal, ruh, dan moralitas dapat menjadi alternatif sistem pendidikan modern (Nasr, 2007).

Kelima, perguruan tinggi Islam dapat memanfaatkan globalisasi untuk memperluas jejaring dakwah dan pengaruh budaya Islam. Melalui kerja sama internasional, publikasi ilmiah, dan pertukaran mahasiswa, Islam dapat tampil sebagai kekuatan intelektual global yang konstruktif, bukan reaktif.

Keenam, *Global Village* juga mendorong terbentuknya kesadaran ummah global (*global ummah consciousness*), di mana solidaritas antar-Muslim lintas negara semakin kuat melalui teknologi. Perguruan tinggi Islam dapat berperan sebagai pusat integrasi umat dengan menanamkan nilai ukhuwah, toleransi, dan tanggung jawab global.

5. Peran Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village

Perguruan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk peradaban global yang berkeadaban (*civilized global society*). Sebagai lembaga intelektual, ia bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada kemanusiaan universal. Hal ini sesuai dengan misi *khalifah fil-ardh* — manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab terhadap keadilan dan kesejahteraan.

Peran utama perguruan tinggi Islam adalah mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan wahyu dalam sistem pendidikan. Paradigma *integrasi-interkoneksi* (Amin Abdullah, 2003) menjadi dasar pengembangan keilmuan yang tidak memisahkan antara sains dan agama. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi Islam dapat melahirkan ilmuwan yang rasional sekaligus spiritual.

Selain itu, perguruan tinggi Islam juga berperan dalam membangun karakter dan moralitas bangsa. Di tengah krisis etika global, lembaga ini harus menjadi benteng nilai dengan menanamkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial pada mahasiswa. Pendidikan karakter berbasis akhlak Islam menjadi modal penting untuk membangun masyarakat madani global.

Perguruan tinggi Islam memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial (*agent of social transformation*) dalam masyarakat modern. Melalui kegiatan riset, pengabdian masyarakat, dan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, lembaga ini berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, berdaya, dan beretika. Prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan umat menjadi landasan dalam setiap aktivitas akademik dan sosial. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam

tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai pusat pembentukan kesadaran sosial dan moral masyarakat.

Riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Misalnya, pengembangan ekonomi berbasis syariah, pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan sosial, serta pelestarian lingkungan dengan pendekatan ekoteologi Islam. Melalui riset-riset tersebut, nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara dalam ranah spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, peran pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam perguruan tinggi Islam menjadi sarana efektif dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik sosial. Melalui program seperti *kuliah kerja nyata* (KKN), pendampingan desa, atau pelatihan ekonomi syariah, mahasiswa dan dosen turut berpartisipasi langsung dalam pembangunan masyarakat. Hal ini memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan sivitas akademika. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam berperan dalam membangun harmoni antara ilmu, iman, dan amal.

Dalam konteks global, perguruan tinggi Islam juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan daya saing internasional. Kolaborasi lintas negara melalui pertukaran akademik, *joint research*, dan *dual degree program* menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring keilmuan. Selain itu, publikasi ilmiah berstandar internasional dan akreditasi global perlu diperkuat agar karya ilmiah para dosen dan mahasiswa diakui secara luas. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi lembaga, tetapi juga memperkuat posisi Islam dalam percaturan ilmu pengetahuan dunia.

Dengan memperkuat riset, kolaborasi internasional, dan pengabdian sosial, perguruan tinggi Islam berpeluang besar menjadi pusat inovasi dan moralitas global. Kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan modern dapat menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam selaras dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, masa depan perguruan tinggi Islam sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tradisi keilmuan klasik dan tuntutan

globalisasi. Perguruan tinggi Islam di era *global village* diharapkan menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan peradaban yang berakar pada nilai-nilai Ilahiah dan kemanusiaan universal.

Akhirnya, perguruan tinggi Islam harus menjadi pusat pembentukan generasi ulul albab yaitu cendekiawan yang berilmu luas, berakhlak mulia, dan berjiwa global. Generasi inilah yang akan menjadikan Islam relevan, rasional, dan solutif di tengah kompleksitas dunia modern.

Daftar Bacaan

- Abdullah, M. A. (2020). *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. ISTAC.
- Al-Attas, S. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazālī. (t.t.). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Qaradawī, Y. (1995). *Al-Islām wa al-'Ilm*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syaibānī, O. M. (1979). *Falsafat al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*. Maktabah al-Nahdah al-Miṣriyyah.
- Al-Zarnūjī. (t.t.). *Ta'lim al-Muta'allim: Tharīq al-Ta'allum*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amin Abdullah, M. (2003). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Bruinessen, M. van. (2015). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Depag RI. (2019). *Sistem Pendidikan Nasional dan Implementasinya di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam.
- Departemen Agama RI. (2019). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Depag RI.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.

- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Drucker, P. (1993). *Post-Capitalist Society*. New York: Harper Business.
- Espósito, J. (2011). *Islam and Globalization*. Oxford University Press.
- Fadeli, S., & Subhan, A. (2012). *Jejak Pembaruan Sosial dan Pendidikan Islam di Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Fadeli, S., & Subhan, A. (2012). *Jejak Pembaruan Sosial dan Pendidikan Islam di Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, A. (2018). *Modernisasi Pesantren dan Tantangan Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, A. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam di Madrasah*. Jakarta: UIN Press.
- Fauzi, A. (2022). *Pesantren dan Modernitas Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Friedman, T. (2005). *The World is Flat*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Hasan, N. (2020). *Pesantren dan Isu Radikalisme di Era Global*. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, A. (2020). *Entrepreneurial Pesantren: Kemandirian Ekonomi Berbasis Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, M. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam di Era 4.0*. Malang: UIN Press.
- Hidayat, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.
- Mansur, M. (2021). *Perempuan dan Transformasi Madrasah di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin. (2019). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, E. (2022). *Pendidikan Vokasional di Pesantren: Strategi Penguatan Kemandirian Santri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasr, S. H. (2007). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne.
- Nata, A. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2018). *Integrasi Ilmu dan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo.

- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam: Lintasan Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-tokohnya*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Sosial dan Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nizar, S. (2021). *Madrasah dan Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, M. D. (2019). *Pesantren dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, F. (2020). *Madrasah dan Transformasi Digital Pendidikan Islam*. Bandung: UPI Press.
- Ricklefs, M. C. (2012). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press.
- Suharto, T. (2017). *Madrasah dan Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2019). *Modernisasi Madrasah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Syamsuddin, A. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, M. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Zuhdi, M. (2017). *Pesantren dan Tradisi Keilmuan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhdi, M. (2020). *Tantangan Madrasah dalam Era Digitalisasi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Pendidikan Islam dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

A. Keluarga sebagai Basis Utama Pendidikan Islam

1. Konsep Keluarga dalam Perspektif Islam

Keluarga dalam pandangan Islam merupakan institusi pertama dan utama yang membentuk manusia secara utuh. Secara etimologis, kata *keluarga* dalam bahasa Arab disebut *usrah* yang berarti ikatan atau jaringan yang saling menguatkan. Islam memandang keluarga bukan hanya sekumpulan individu, melainkan lembaga moral, sosial, dan spiritual yang memiliki peran mendasar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, Allah SWT menegaskan bahwa pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan sarana untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat.

Keluarga berfungsi sebagai wadah pembentukan akhlak, keimanan, dan kepribadian anak sejak dini. Menurut Al-Ghazali (1993), rumah tangga merupakan “madrasah pertama” tempat anak belajar mengenal Allah, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Nata (2012) yang menegaskan bahwa pendidikan Islam dimulai dari keluarga sebagai lingkungan yang paling menentukan arah perkembangan spiritual dan moral anak. Dalam konteks psikologis, Bronfenbrenner (1979) menempatkan keluarga sebagai mikrosistem

utama yang membentuk pola perilaku, keyakinan, dan karakter individu sejak masa kanak-kanak.

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat pertama anak belajar tentang tauhid, akhlak, dan adab. Orang tua menjadi teladan dalam membentuk karakter anak melalui perilaku sehari-hari. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, keluarga adalah *madrasah awal* tempat anak menyerap nilai-nilai moral dan sosial sebelum berinteraksi dengan masyarakat luas. Karena itu, fungsi keluarga dalam Islam bersifat edukatif, protektif, dan konstruktif.

Selain itu, keluarga berperan sebagai miniatur masyarakat Islam. Nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab ditanamkan di lingkungan keluarga sebelum diterapkan dalam masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual setiap anggota keluarga.

Dalam konteks modern, keluarga menjadi benteng pertahanan nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi dan sekularisasi. Ketahanan keluarga menentukan ketahanan moral bangsa. Sebagaimana ditegaskan Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, keluarga yang didasarkan pada iman dan ilmu akan melahirkan masyarakat yang adil dan berperadaban tinggi. Oleh karena itu, pembangunan keluarga Islami merupakan langkah strategis dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin.

2. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak

Orang tua dalam Islam memegang peran sebagai pendidik pertama (*murabbi*), pengajar (*mu'allim*), dan pengarah (*muwajjih*). Sejak anak lahir, tanggung jawab mendidik tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga spiritual dan moral. Al-Qur'an dalam QS. At-Tahrim [66]: 6 memerintahkan, *"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."* Ayat ini menegaskan kewajiban pendidikan iman dan amal saleh dalam keluarga.

Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang bersifat *fardhu 'ain* dalam mendidik anak-anaknya agar beriman, berilmu, dan berakhlak. Al-Nahlawi (1995) menjelaskan bahwa tanggung jawab pendidikan keluarga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Menurut Hidayat (2020), peran ini tidak hanya bersifat mengasuh secara fisik tetapi juga

membimbing rohani melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Sementara itu, Bandura (1986) melalui teori belajar sosialnya menegaskan bahwa perilaku anak banyak dipengaruhi oleh proses observasi dan imitasi terhadap figur orang tua. Oleh karena itu, keteladanan dan komunikasi religius yang baik antara orang tua dan anak menjadi kunci pendidikan Islam dalam keluarga (Shihab, 2011).

Orang tua bertugas menanamkan tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial kepada anak. Dalam pandangan Al-Ghazali (1993), hati anak ibarat permata murni yang dapat dibentuk sesuai arah pendidikan orang tua. Jika diarahkan pada kebaikan, anak akan tumbuh menjadi pribadi saleh; sebaliknya, jika dibiarkan tanpa bimbingan, ia akan terpengaruh oleh keburukan lingkungan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak dan keteladanan menjadi prioritas utama dalam keluarga Muslim.

Peran ayah dan ibu bersifat saling melengkapi. Ayah berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan pengarah, sedangkan ibu berperan sebagai pengasuh, penanam kasih sayang, dan pembentuk kepribadian anak. Rasulullah SAW menjadi teladan sempurna dalam memperlakukan anak dengan kelembutan dan kasih sayang tanpa kehilangan ketegasan. Beliau bersabda: *"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang tua."* (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks sosial modern, tanggung jawab pendidikan anak semakin kompleks karena adanya pengaruh teknologi dan perubahan gaya hidup. Oleh sebab itu, orang tua perlu menjadi *digital educator* yang mampu membimbing anak dalam penggunaan media digital secara islami. Menurut Yusuf Al-Qaradawi (2001), keluarga Muslim harus menciptakan atmosfer spiritual dan intelektual yang sehat agar anak tumbuh menjadi insan beriman, cerdas, dan berakhlak.

3. Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga

Pendidikan Qurani dalam keluarga menekankan pembentukan iman, akhlak, dan adab dalam setiap aktivitas sehari-hari. Al-Qaradawi (2001) menjelaskan bahwa pendidikan Qurani menuntun keluarga untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman moral dan sosial. Hal ini diperkuat oleh Yusuf (2017), yang menilai bahwa penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam rumah tangga modern dapat memperkuat ketahanan moral di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Daradjat (1992), penanaman nilai keagamaan di rumah perlu dilakukan melalui

pembiasaan, nasihat, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan demikian, keluarga berperan sebagai agen internalisasi nilai Qurani bagi generasi Muslim masa depan (Syamsuddin, 2019).

Metode pendidikan Islam dalam keluarga merupakan cara yang digunakan untuk menanamkan nilai, sikap, dan perilaku sesuai ajaran Islam. Beberapa metode utama yang digunakan Rasulullah SAW antara lain: keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan (*ta'dib*), nasihat (*mau'izhah*), dialog (*hiwar*), dan disiplin (*tahdhib*). Keteladanan adalah metode paling efektif, karena anak cenderung meniru perilaku orang tuanya lebih daripada mendengarkan nasihatnya.

Metode pembiasaan dilakukan dengan mengulang perilaku baik hingga menjadi karakter tetap. Misalnya, membiasakan anak untuk shalat tepat waktu, jujur, dan menghormati orang lain. Ibnu Sina dalam *As-Siyasah fi Tarbiyah Ash-Shabiyyin* menekankan pentingnya pembiasaan sejak kecil untuk membentuk karakter yang stabil dan disiplin.

Metode nasihat digunakan untuk memberikan arahan moral dan spiritual yang menyentuh hati. Sedangkan metode dialog memberikan ruang bagi anak untuk berpikir kritis dan memahami alasan di balik setiap ajaran agama. Dengan demikian, anak tidak hanya taat secara formal, tetapi juga memahami nilai-nilai yang mendasarinya.

Disiplin dalam pendidikan Islam bukan berarti kekerasan, melainkan pengendalian diri yang dibangun melalui kasih sayang dan tanggung jawab. Zakiah Daradjat (1992) menyatakan bahwa pendidikan keluarga yang ideal harus menyeimbangkan antara kasih sayang (*rahmah*) dan ketegasan (*syiddah*), agar anak tumbuh dalam suasana aman, tetapi tetap memiliki kedisiplinan moral.

4. Lingkungan Keluarga sebagai Wahana Pembentukan Akhlak dan Iman

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengalami proses sosialisasi nilai-nilai Islam. Atmosfer spiritual keluarga sangat memengaruhi pembentukan keimanan anak. Jika rumah diwarnai dengan ibadah, dzikir, dan bacaan Al-Qur'an, maka nilai-nilai iman akan tertanam kuat dalam diri anak. Sebaliknya, jika keluarga lalai dari nilai-nilai keagamaan, anak mudah terpengaruh oleh budaya materialistik dan hedonistik.

Rasulullah SAW menegaskan, *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan iman dimulai sejak dalam lingkungan keluarga. Keteladanan orang tua dalam beribadah dan berperilaku merupakan bentuk dakwah yang paling efektif.

Teori ekologi perkembangan manusia dari Urie Bronfenbrenner (1979) juga menegaskan bahwa keluarga adalah *microsystem* yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, kualitas interaksi keluarga menentukan kualitas moral anak. Suasana rumah yang penuh kasih sayang, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap nilai-nilai Islam akan membentuk karakter religius yang kuat.

Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pertama bagi anak dalam belajar hidup bermasyarakat. Bronfenbrenner (1979) menyebut keluarga sebagai sistem ekologis pertama yang menghubungkan anak dengan dunia sosial. Menurut Epstein (2018), kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap prestasi dan karakter anak. Dalam perspektif Islam, keluarga yang harmonis dan komunikatif akan menumbuhkan nilai kasih sayang (*rahmah*), tanggung jawab, dan kejujuran (Zainuddin, 2021). Oleh karena itu, pembentukan karakter Qurani perlu dimulai dari rumah melalui interaksi yang sarat nilai spiritual dan sosial (Al-Nahlawi, 1995).

Dalam konteks masyarakat modern, keluarga berfungsi sebagai filter nilai. Ketika media dan budaya luar membawa pengaruh negatif, keluarga Muslim harus memperkuat identitasnya melalui pembiasaan ibadah dan komunikasi spiritual. Dengan demikian, keluarga tetap menjadi benteng moral dan sumber ketenangan di tengah dinamika sosial yang cepat berubah.

5. Tantangan dan Strategi Penguatan Pendidikan Islam dalam Keluarga Modern

Era globalisasi dan digitalisasi, tantangan bagi keluarga Muslim semakin kompleks. Arus informasi global, perubahan nilai sosial, dan gaya hidup modern sering kali melemahkan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan akhlak. Menurut Syamsuddin (2019), keluarga Muslim harus memperkuat sistem nilai internal agar mampu menghadapi

tantangan global. Nata (2012) menegaskan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga modern perlu berbasis nilai-nilai transendental yang membentengi generasi muda dari krisis moral. Sementara itu, Hidayat (2020) menyoroti pentingnya manajemen keluarga Islami dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan spiritual dan kebutuhan duniawi. Dengan demikian, keluarga tetap menjadi basis utama pendidikan Islam yang relevan sepanjang zaman.

Keluarga Muslim masa kini menghadapi tantangan besar berupa globalisasi nilai, kemajuan teknologi, dan disorientasi moral. Kesibukan orang tua sering membuat interaksi keluarga berkurang, sehingga fungsi pendidikan bergeser ke sekolah dan media. Fenomena ini dapat mengakibatkan hilangnya kontrol nilai dan lemahnya keteladanan dalam keluarga.

Selain itu, arus informasi digital yang tidak terfilter menghadirkan tantangan baru dalam pembentukan akhlak anak. Menurut Quraish Shihab (2011), keluarga perlu menjadi institusi pembimbing moral yang adaptif terhadap zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Artinya, teknologi harus dijadikan alat dakwah, bukan ancaman bagi moralitas.

Strategi penguatan pendidikan Islam dalam keluarga dapat dilakukan dengan tiga pendekatan: spiritualisasi (menghidupkan nilai iman dalam rumah), edukasi (meningkatkan literasi keagamaan keluarga), dan komunikasi (memperkuat dialog dan keteladanan). Pendidikan berbasis keluarga harus menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qashash [28]: 77.

Yusuf Al-Qaradawi (2001) menegaskan bahwa keluarga Muslim harus mampu menciptakan *bi'ah islamiyyah* (lingkungan islami) di rumah, di mana setiap aktivitas diorientasikan pada nilai ibadah. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga pusat pembinaan iman, ilmu, dan akhlak yang menumbuhkan generasi berkarakter.

B. Pembentukan Perilaku Islami

1. Konsep Perilaku Islami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah

Perilaku Islami (*al-sulūk al-islāmī*) merupakan manifestasi konkret dari keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, perilaku bukan sekadar

tindakan lahiriah, tetapi juga cerminan dari kebersihan hati dan niat yang ikhlas. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keseimbangan antara iman dan amal saleh sebagai ukuran perilaku yang diridhai Allah, sebagaimana firman-Nya: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk*" (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 7). Dengan demikian, perilaku Islami adalah pengejawantahan nilai iman dalam tindakan nyata.

Menurut al-Ghazālī (Ihyā' 'Ulūm al-Dīn), akhlak Islami terbentuk dari hasil latihan jiwa (riyāḍah al-nafs) yang berkesinambungan, sehingga nilai-nilai kebaikan menjadi kebiasaan alami tanpa perlu dipaksakan. Dalam kerangka ini, perilaku Islami bukanlah sekadar hasil pengetahuan moral, tetapi merupakan hasil dari pembiasaan spiritual yang mendalam. Ibn Miskawayh dalam *Tahdzīb al-Akhlāq* juga menegaskan bahwa perilaku baik adalah hasil keseimbangan antara kekuatan rasio, amarah, dan syahwat yang dikendalikan oleh hikmah (kebijaksanaan).

Dari perspektif kontemporer, perilaku Islami dapat dikaitkan dengan konsep *moral development* dalam psikologi Barat. Lawrence Kohlberg (1981) menyatakan bahwa perkembangan moral individu melalui tahapan bertingkat yang berujung pada kesadaran etis universal. Namun dalam Islam, puncak moralitas bukan hanya pada rasionalitas, tetapi pada kesadaran ketuhanan (taqwā) yang menuntun perilaku. Oleh karena itu, perilaku Islami memiliki landasan teologis sekaligus psikologis.

Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi model perilaku Islami yang paling sempurna. Rasulullah dikenal sebagai *uswah ḥasanah* (teladan terbaik) dalam segala aspek kehidupan. Melalui sikap jujur, amanah, sabar, dan kasih sayang, Nabi memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai ilahi diterapkan dalam kehidupan sosial. Sejarah membuktikan bahwa kepribadian Rasulullah menjadi daya tarik utama penyebaran Islam di berbagai penjuru dunia.

Dengan demikian, konsep perilaku Islami dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ia tidak berhenti pada tataran individual, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang beradab (*madaniyah*). Kesalehan pribadi harus terhubung dengan kesalehan sosial agar Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam.

2. Faktor-Faktor Pembentukan Perilaku Islami

Pembentukan perilaku Islami dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal mencakup keimanan, niat, dan motivasi spiritual seseorang. Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya”* (H.R. Bukhari-Muslim). Dengan niat yang benar, perilaku seorang muslim akan diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk perilaku anak. Menurut Ibn Khaldūn dalam *Muqaddimah*-nya, manusia adalah makhluk sosial yang belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, perilaku orang tua, cara berkomunikasi, dan pola asuh sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter Islami anak. Dalam konteks ini, keteladanan menjadi metode pendidikan paling efektif, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ash-Shaff [61]: 3, *“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”*

Lembaga pendidikan formal dan nonformal juga memainkan peran penting. Sekolah dan pesantren menjadi sarana penanaman nilai-nilai Islam secara sistematis. Namun, tantangan era digital menuntut lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai spiritualitasnya. Pendidikan karakter berbasis Islam perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang berakhlak sekaligus berkompeten global.

Selain itu, media massa dan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Jika tidak diarahkan dengan baik, media dapat menjadi sumber degradasi moral. Oleh karena itu, literasi digital Islami sangat diperlukan untuk membentuk kesadaran kritis terhadap konten yang dikonsumsi. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya *fiqh al-waqi’*—pemahaman kontekstual terhadap realitas—agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan di dunia modern.

Kesimpulannya, pembentukan perilaku Islami adalah hasil sinergi antara kekuatan iman, lingkungan pendidikan, keteladanan sosial, dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Pendidikan Islam perlu

memperhatikan semua aspek tersebut agar nilai-nilai Islam tidak sekadar diajarkan, tetapi juga diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari.

3. Strategi Pendidikan dalam Membentuk Perilaku Islami

Strategi pendidikan dalam membentuk perilaku Islami harus berlandaskan pada prinsip integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Tujuan utamanya bukan hanya mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual. Dalam tradisi Islam klasik, pendidikan akhlak dilakukan melalui tiga tahapan: penanaman nilai (*ta'lim*), pembiasaan perilaku baik (*ta'dīb*), dan penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak adalah proses berkelanjutan yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Metode keteladanan (*uswah*) menjadi strategi paling fundamental. Guru atau pendidik harus menjadi contoh konkret dari nilai-nilai yang diajarkan. Menurut Imam al-Zarnūjī dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, keberkahan ilmu hanya akan muncul apabila guru dan murid memiliki adab yang benar dalam belajar dan mengajar. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan teori *social learning* dari Albert Bandura (1977) yang menegaskan bahwa perilaku moral banyak dipelajari melalui observasi dan imitasi terhadap figur panutan.

Selain keteladanan, metode pembiasaan dan penghargaan moral juga penting. Pembiasaan menumbuhkan stabilitas perilaku, sementara penghargaan memperkuat motivasi intrinsik untuk berbuat baik. Dalam Islam, prinsip *targhīb* (dorongan) dan *tarhīb* (peringatan) digunakan secara seimbang agar peserta didik memiliki kesadaran moral yang utuh—bukan karena takut hukuman, tetapi karena cinta kepada Allah.

Pendidikan berbasis proyek keislaman (*Islamic Project-Based Learning*) dapat diterapkan untuk mengintegrasikan nilai Islam dengan konteks sosial kontemporer. Melalui kegiatan sosial, kewirausahaan Islami, dan riset lingkungan, mahasiswa dan siswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik nyata. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mencetak manusia saleh secara ritual, tetapi juga produktif dan inovatif.

Akhirnya, strategi pembentukan perilaku Islami harus kontekstual dan partisipatif. Pendekatan pedagogis transformatif perlu digunakan agar peserta didik mampu memahami nilai Islam secara rasional dan

aplikatif. Pendidikan semacam ini melahirkan generasi yang berkarakter, kritis, dan berkomitmen pada nilai-nilai ilahi di tengah tantangan global.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh Strategi Pendidikan dalam Membentuk Perilaku Islami, yaitu:

- a. Teladan (*Uswah Hasanah*) Sebagai Inti Pembentukan Karakter. Strategi paling fundamental dalam membentuk perilaku Islami adalah melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Rasulullah SAW merupakan figur pendidikan yang membentuk akhlak melalui praktik nyata, bukan hanya pengajaran verbal. Guru dan orang tua memiliki peran utama sebagai model perilaku bagi peserta didik. Menurut al-Ghazālī, pendidikan moral tidak efektif tanpa keteladanan langsung dari pendidik (Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*). Pandangan ini diperkuat oleh Bandura (2001) dengan teori *social learning*, bahwa perilaku manusia terbentuk melalui observasi dan imitasi terhadap figur panutan.
- b. Pembiasaan (*Ta'wīd*) dalam Aktivitas Harian. Pembiasaan merupakan proses pembentukan perilaku melalui pengulangan tindakan baik, hingga menjadi karakter. Dalam pendidikan Islam, prinsip *ta'wīd* mencakup pembiasaan salat, adab, kejujuran, dan tanggung jawab sejak usia dini. Menurut Ibn Khaldūn (*Muqaddimah*), pengulangan tindakan positif menciptakan kebiasaan moral yang membentuk kepribadian. Dalam konteks modern, teori *habit formation* (Wood & Neal, 2007) juga menegaskan bahwa perilaku yang konsisten berulang menjadi bagian dari identitas diri. Dengan demikian, pembiasaan Islami dapat menjembatani teori klasik dan psikologi modern.
- c. Internalisasi Nilai (*Tarbiyah al-Qiyām*). Strategi ini menekankan penanaman nilai-nilai Islam ke dalam kesadaran batin peserta didik melalui refleksi, pemahaman, dan penghayatan makna. Pendidikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformasional. Nilai seperti ikhlas, amanah, sabar, dan tawakal harus ditanamkan melalui proses dialogis dan kontekstual. Hasan Langgulung (2003) menegaskan bahwa internalisasi nilai harus berjalan melalui tiga tahap: kognitif (pengetahuan), afektif (penghayatan), dan psikomotorik (pengamalan). Konsep ini sejalan dengan teori *moral development* dari Kohlberg (2008)

yang menempatkan kesadaran moral sebagai hasil dari refleksi rasional dan pengalaman sosial.

- d. Pendekatan Konstruktif dan Partisipatif. Pendidikan perilaku Islami perlu melibatkan peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman dan pengalaman moral. Guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, tetapi fasilitator yang membantu siswa menafsirkan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Strategi ini berakar pada prinsip *shūrā* (musyawarah) dalam Islam yang menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial (Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38). Dalam teori pendidikan modern, pendekatan konstruktivis (Vygotsky, 1978) juga menegaskan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi melalui interaksi sosial dan pengalaman kolaboratif.
- e. Integrasi Iman, Ilmu, dan Amal (*Tawhīd al-'Ilm wa al-'Amal*). Pendidikan Islam yang efektif dalam membentuk perilaku harus mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal saleh. Perilaku Islami tidak cukup diajarkan sebagai norma, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sosial dan etika profesional. Syed Naquib al-Attas (2018) menegaskan pentingnya *adab* yaitu pengenalan dan penempatan sesuatu pada tempat yang benar sebagai inti pendidikan Islam. Konsep ini paralel dengan *experiential learning* (Kolb, 2015) di Barat yang menekankan pengalaman nyata sebagai dasar pembentukan perilaku.
- f. Pendekatan Komunitas (Community-Based Education). Pembentukan perilaku Islami tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial dan keluarga. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan bentuk *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* (kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan). Pendidikan berbasis komunitas memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial nyata seperti gotong royong, keadilan, dan kepedulian (Hidayat, 2020). Prinsip ini sejalan dengan teori *social capital* (Putnam, 2000) yang menekankan peran jaringan sosial dalam membangun moralitas publik.
- g. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital Islami. Di era digital, strategi pendidikan Islami perlu memanfaatkan teknologi sebagai

sarana dakwah dan pembentukan perilaku positif. Penggunaan media sosial, aplikasi Qur'an interaktif, dan platform pembelajaran daring dapat menjadi ruang internalisasi nilai-nilai Islam secara kreatif. Tantangannya adalah mengarahkan penggunaan teknologi ke arah *digital adab*, yaitu etika berkomunikasi dan bersikap dalam ruang virtual (Rahman, 2019). Pendidikan Islam modern perlu mengembangkan literasi digital berbasis nilai Qurani agar generasi muda mampu menjadi pengguna teknologi yang beretika dan produktif.

4. Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Pembentukan Perilaku Islami

Lembaga pendidikan Islam memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai akhlak dan perilaku Islami kepada peserta didik. Madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam berfungsi sebagai *moral center* yang menyeimbangkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan penanaman nilai spiritual. Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993), pendidikan Islam sejati adalah proses "ta'dīb" yaitu pembentukan adab yang mencakup pengetahuan, tindakan, dan tata moral yang selaras dengan kehendak Allah.

Sekolah dan pesantren harus menjadi laboratorium akhlak. Melalui integrasi antara kurikulum akademik dan pembinaan spiritual, lembaga pendidikan dapat membentuk karakter Islami yang kuat. Misalnya, kegiatan seperti halaqah, mentoring, dan pelayanan sosial perlu dijadikan bagian dari kurikulum untuk memperkuat dimensi sosial dari iman. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga transformasi kepribadian.

Selain lembaga pendidikan, masyarakat juga berperan sebagai lingkungan moral. Menurut konsep *al-mujtama' al-sālih* dalam Islam, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mendukung tegaknya nilai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, lingkungan sosial harus menciptakan atmosfer yang kondusif bagi lahirnya perilaku Islami, misalnya melalui kegiatan dakwah, forum kajian, dan gerakan sosial berbasis nilai keagamaan.

Era digital, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat semakin penting. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui media kreatif dan edukatif.

Namun, pengawasan moral juga harus diperkuat agar masyarakat tidak terjerumus pada konten yang merusak etika Islam. Dalam hal ini, pendekatan *community-based education* menjadi alternatif yang efektif.

Dengan demikian, pembentukan perilaku Islami memerlukan ekosistem pendidikan yang holistik dan kolaboratif. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah fondasi bagi terciptanya peradaban Islam yang beradab dan berkeadilan.

5. Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Perilaku Islami di Era Modern

Era modern membawa tantangan besar terhadap pembentukan perilaku Islami. Globalisasi, sekularisasi, dan derasnya arus informasi sering kali melunturkan nilai moral generasi muda. Gaya hidup hedonistik, individualistik, serta krisis spiritual menjadi gejala umum dalam masyarakat modern. Menurut Bauman (2000) dalam *Liquid Modernity*, masyarakat kontemporer hidup dalam ketidakpastian nilai, di mana moralitas menjadi cair dan relatif.

Tantangan tersebut menuntut pendidikan Islam untuk melakukan reorientasi metodologis. Pendidikan tidak cukup hanya dengan ceramah normatif, tetapi perlu pendekatan yang reflektif dan aplikatif. Konsep *tarbiyah wa tazkiyah* harus diterjemahkan dalam konteks pembentukan kesadaran diri yang kritis dan spiritual. Nilai-nilai Al-Qur'an seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial harus dikontekstualisasikan dengan realitas global.

Solusi lain adalah dengan memperkuat *spiritual literacy* yaitu kemampuan memahami dan mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan modern. Pendidik harus memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah dan pendidikan karakter, bukan sekadar alat hiburan. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat riset dan inovasi yang menekankan integrasi antara sains dan etika Islam agar tidak terjadi dikotomi ilmu.

Selain itu, penting untuk menanamkan konsep *akhlaq al-karimah* sebagai inti dari keberislaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*" (H.R. Ahmad). Prinsip ini menjadi dasar bahwa pembangunan umat tidak akan berhasil tanpa pembentukan karakter moral. Pendidikan Islam

harus berfokus pada pembentukan insan kamil yaitu manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Akhirnya, di tengah perubahan zaman, perilaku Islami tetap menjadi mercusuar moral umat manusia. Tantangan modernitas justru membuka peluang baru bagi Islam untuk menunjukkan relevansi universalnya. Melalui pendidikan yang inklusif, berakar pada nilai wahyu, dan adaptif terhadap perubahan, umat Islam dapat membangun generasi yang cerdas spiritual dan bermartabat global.

C. Peran dan Fungsi Majelis Ta'lim di Tengah Masyarakat Multikultur

1. Pengertian dan Landasan Teologis Majelis Ta'lim

Secara etimologis, istilah *majelis ta'lim* berasal dari bahasa Arab: *majlis* yang berarti tempat duduk atau forum, dan *ta'lim* yang berarti pengajaran. Dengan demikian, *majelis ta'lim* dapat diartikan sebagai lembaga atau forum pengajaran agama Islam yang diselenggarakan secara nonformal di tengah masyarakat. Menurut al-Ghazālī (Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn), majelis ilmu merupakan tempat paling mulia di muka bumi karena di sanalah ilmu, hikmah, dan hidayah Allah diajarkan kepada manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pembinaan keimanan, peningkatan ilmu, dan penguatan ukhuwah Islamiyah.

Landasan teologis majelis ta'lim dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujādilah ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim juga ditegaskan bahwa majelis ilmu akan dilingkupi rahmat, ketenangan, dan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini menegaskan posisi strategis majelis ta'lim sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Islam sepanjang hayat (*lifelong Islamic education*).

Selain itu, konsep majelis ta'lim juga memiliki relevansi dengan teori pendidikan sosial modern yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis komunitas. Menurut John Dewey (1916), pendidikan harus tumbuh dari interaksi sosial dan pengalaman masyarakat. Dalam konteks Islam, hal ini sejalan dengan fungsi majelis ta'lim sebagai ruang interaksi spiritual dan sosial yang mendidik umat secara kolektif.

Majelis ta'lim tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral dan spiritual melalui keteladanan guru dan interaksi sosial yang penuh kasih sayang. Hal ini menjadikan majelis ta'lim sebagai bentuk praksis dari konsep *ta'dib* (pendidikan adab) sebagaimana dikembangkan oleh al-Attas (1980).

Dengan demikian, majelis ta'lim berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berbasis spiritual dan sosial, yang berakar kuat pada tradisi Islam namun tetap relevan dalam konteks pendidikan modern dan multikultural.

2. Sejarah dan Dinamika Majelis Ta'lim di Indonesia

Majelis ta'lim di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang sejak masa awal Islamisasi Nusantara. Para ulama dan dai yang datang dari Arab, Gujarat, dan Pasai membentuk forum pengajian sebagai sarana dakwah dan pendidikan keagamaan bagi masyarakat. Pada masa itu, majelis ta'lim dilaksanakan di surau, langgar, atau rumah-rumah tokoh masyarakat, menjadi wadah pembinaan akidah dan moral. Tradisi ini terus berlanjut hingga masa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Pada masa kolonial Belanda, majelis ta'lim berfungsi sebagai ruang perlawanan kultural terhadap sekularisasi dan pendidikan Barat. Menurut Steenbrink (1994), majelis ta'lim menjadi "benteng kebudayaan Islam" yang mempertahankan identitas religius umat. Setelah kemerdekaan, majelis ta'lim berkembang menjadi wadah pendidikan rakyat, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat urban yang tidak sempat menempuh pendidikan formal.

Era 1970–1990-an menjadi masa kebangkitan kembali majelis ta'lim di Indonesia. Pemerintah melalui Departemen Agama mulai melakukan pembinaan dan registrasi terhadap lembaga-lembaga majelis ta'lim. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis juga berperan aktif membentuk jaringan majelis ta'lim di berbagai daerah.

Memasuki abad ke-21, majelis ta'lim mengalami transformasi besar dengan masuknya teknologi informasi. Kajian agama kini dapat diakses melalui kanal YouTube, media sosial, dan aplikasi pengajian daring. Fenomena ini memperluas jangkauan dakwah Islam hingga lintas negara. Namun, dinamika ini juga menuntut literasi digital agar majelis ta'lim tetap menjadi ruang edukatif, bukan sekadar hiburan spiritual.

Dengan demikian, sejarah majelis ta'lim menunjukkan daya adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga pencerahan umat.

3. Fungsi Edukatif, Sosial, dan Kultural Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim memiliki fungsi: *Pertama*, Fungsi edukatif yaitu membentuk pengetahuan agama, akhlak, dan karakter umat. Menurut Nizar (2019), majelis ta'lim berperan dalam mendukung visi pendidikan Islam yang memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui metode ceramah, halaqah, dan diskusi kitab kuning, majelis ta'lim menjadi wadah pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Kedua, Fungsi sosial majelis ta'lim tidak kalah penting. Ia memperkuat solidaritas antarwarga dan memperluas jaringan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan. Majelis ta'lim sering menjadi pusat kegiatan sosial seperti santunan, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pandangan Habermas (1984), forum seperti ini mencerminkan "ruang publik religius" yang mendorong partisipasi warga secara etis dan komunikatif.

Serta *Ketiga*, Fungsi kultural majelis ta'lim terwujud melalui pelestarian tradisi Islam lokal seperti tahlilan, yasinan, dan maulid. Tradisi tersebut bukan sekadar ritual, tetapi juga menjadi sarana transmisi nilai-nilai sosial dan spiritual lintas generasi. Di tengah masyarakat multikultur, fungsi kultural ini berperan dalam membangun identitas kolektif umat Islam yang terbuka dan harmonis.

Majelis ta'lim juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi budaya, karena mampu menjembatani tradisi lokal dengan nilai-nilai universal Islam. Hal ini menunjukkan karakter Islam Nusantara yang toleran dan adaptif terhadap konteks sosialnya. Dengan ketiga fungsi tersebut, majelis ta'lim bukan hanya institusi keagamaan, tetapi juga agen transformasi sosial dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

4. Peran Majelis Ta'lim dalam Konteks Masyarakat Multikultur

Majelis ta'lim dalam konteks masyarakat multikultur berperan strategis sebagai wahana penanaman nilai-nilai Islam moderat (*al-Islām al-wasathī*). Melalui kajian keagamaan yang damai dan terbuka, majelis

ta'lim mampu menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa merupakan kehendak Allah agar manusia saling mengenal, bukan saling meniadakan. Prinsip ini menjadi fondasi teologis bagi majelis ta'lim untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Setidaknya terdapat lima peran majelis ta'lim dalam konteks masyarakat multikultur, yaitu:

a. Majelis Ta'lim sebagai Pusat Pendidikan Islam Nonformal

Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang berperan penting dalam peningkatan literasi keagamaan masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultur, majelis ta'lim berfungsi sebagai wadah pembelajaran yang terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial, etnis, atau tingkat pendidikan. Menurut Zuhairini (2010), majelis ta'lim tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu agama, tetapi juga sarana pembentukan moral sosial berbasis nilai-nilai Qurani.

Secara historis, majelis ta'lim telah berperan sebagai perpanjangan tangan pesantren dalam mengajarkan Al-Qur'an, hadis, fiqih, dan akhlak kepada masyarakat awam. Sistem pengajaran yang fleksibel, tematik, dan partisipatif menjadikan majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan rakyat yang adaptif terhadap kebutuhan lokal (Nizar, 2019).

Dalam masyarakat multikultur, majelis ta'lim juga berfungsi sebagai ruang dialog sosial keagamaan yang menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat. Nilai-nilai universal Islam seperti *rahmatan lil-'alamin* menjadi dasar etika pergaulan sosial di tengah keberagaman budaya (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107).

Menurut Hasan Langgulang (2003), pendidikan Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat majemuk dengan mengedepankan aspek spiritual, sosial, dan kultural secara seimbang. Oleh karena itu, majelis ta'lim menjadi wadah transformasi nilai yang berakar pada ajaran Islam tetapi terbuka terhadap dinamika zaman.

Dengan karakter nonformal dan fleksibel, majelis ta'lim memiliki potensi besar untuk memperkuat basis pendidikan masyarakat sekaligus menjadi jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan sosial modern.

b. Majelis Ta'lim sebagai Wahana Dakwah dan Transformasi Sosial

Majelis ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen dakwah yang mendorong perubahan sosial berbasis nilai Islam. Dakwah yang dilakukan melalui majelis ta'lim biasanya bersifat *bil hikmah wal mau'izhah al-hasanah* — dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik — sehingga relevan dalam konteks masyarakat multikultur (Q.S. An-Nahl [16]: 125).

Menurut Abdurrahman Wahid (2001), dakwah yang efektif dalam masyarakat majemuk harus menekankan aspek dialogis dan humanistik, bukan konfrontatif. Majelis ta'lim menjadi ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas budaya melalui pendekatan kultural.

Selain itu, majelis ta'lim juga memiliki fungsi sosial yang luas, seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan solidaritas, dan kegiatan sosial kemanusiaan. Melalui kegiatan gotong royong, pelatihan kewirausahaan, dan kajian tematik, majelis ta'lim membentuk masyarakat yang mandiri dan berdaya saing (Hidayat, 2020).

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, Durkheim (2002) menyatakan bahwa lembaga pendidikan berfungsi mempertahankan solidaritas sosial melalui internalisasi norma dan nilai. Peran ini sangat sesuai dengan karakter majelis ta'lim yang menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Dengan demikian, majelis ta'lim bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembentukan masyarakat madani yang berkeadilan, toleran, dan berempati terhadap sesama.

c. Majelis Ta'lim sebagai Sarana Penguatan Moderasi Beragama

Peran majelis ta'lim dalam masyarakat multikultur sangat penting dalam memperkuat moderasi beragama dan menekan potensi konflik sosial. Melalui pengajaran nilai-nilai Islam yang wasathiyah (moderat), majelis ta'lim menumbuhkan kesadaran untuk menghormati perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Menurut Azyumardi Azra (2012), majelis ta'lim memiliki posisi strategis sebagai benteng ideologis dalam melawan radikalisme keagamaan. Materi kajian yang seimbang antara aqidah, akhlak, dan kemanusiaan menjadi sarana efektif membangun paradigma Islam

rahmatan lil-'alamin. Dalam kajian Barat, John Esposito (2015) menekankan pentingnya pendidikan keagamaan yang berorientasi pada pluralisme dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan misi majelis ta'lim sebagai lembaga pembinaan umat yang inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial.

Melalui kegiatan diskusi lintas-majelis dan kolaborasi antarorganisasi keagamaan, majelis ta'lim berperan memperkuat kohesi sosial lintas komunitas. Dengan demikian, majelis ta'lim tidak hanya menjaga kemurnian akidah, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial bangsa. Peran ini menjadikan majelis ta'lim sebagai garda terdepan pendidikan Islam yang mempromosikan sikap moderat, toleran, dan penuh kasih sayang di tengah keberagaman budaya dan agama.

d. Majelis Ta'lim sebagai Media Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Salah satu ciri penting majelis ta'lim di Indonesia adalah dominasi peran perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai peserta aktif. Hal ini menunjukkan bahwa majelis ta'lim berfungsi sebagai ruang edukatif dan pemberdayaan sosial perempuan Muslim. Menurut Siti Musdah Mulia (2011), majelis ta'lim dapat menjadi sarana pembentukan kesadaran gender dalam Islam yang mendorong perempuan untuk aktif dalam ranah sosial, pendidikan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Majelis ta'lim perempuan juga berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pengajaran nilai-nilai moral, parenting Islami, dan manajemen rumah tangga berbasis nilai spiritual. Dengan demikian, pendidikan yang diterima di majelis ta'lim berdampak langsung pada pembentukan karakter keluarga Muslim yang harmonis.

Pandangan al-Qaradawi (2006), perempuan adalah tiang masyarakat; jika mereka baik, maka baiklah seluruh bangsa. Majelis ta'lim dengan basis perempuan menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan nilai-nilai kebaikan dalam komunitas lokal. Melalui pendidikan yang berkesinambungan, majelis ta'lim berhasil mentransformasikan peran perempuan dari objek dakwah menjadi subjek perubahan sosial yang aktif dan berdaya.

e. Majelis Ta'lim sebagai Pilar Kehidupan Multikultural dan Kebangsaan

Majelis ta'lim dalam konteks kebangsaan berperan menjaga keseimbangan antara identitas keislaman dan keindonesiaan. Melalui pembelajaran agama yang berwawasan kebangsaan, majelis ta'lim menanamkan nilai cinta tanah air (*hubbul wathan*) dan tanggung jawab sosial. Menurut Nurcholish Madjid (2000), Islam dan keindonesiaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersumber pada nilai kemanusiaan universal. Majelis ta'lim sebagai ruang keagamaan rakyat menjadi tempat strategis dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme religius.

Selain itu, majelis ta'lim juga memperkuat nilai toleransi dan gotong royong antarumat beragama melalui kegiatan sosial lintas komunitas. Nilai ini sejalan dengan konsep *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan) yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam pandangan Robert Putnam (2000), lembaga sosial seperti majelis ta'lim memiliki *social capital* yang berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik. Dengan demikian, majelis ta'lim menjadi jembatan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang harmonis.

Melalui integrasi nilai Islam, budaya lokal, dan semangat kebangsaan, majelis ta'lim mampu berkontribusi membangun masyarakat multikultural yang damai, beradab, dan berkeadilan. Dengan demikian, peran majelis ta'lim dalam masyarakat multikultur sangat vital untuk menciptakan harmoni sosial, memperkuat solidaritas lintas kelompok, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam bingkai keislaman.

5. Tantangan dan Strategi Penguatan Majelis Ta'lim di Era Globalisasi

Era globalisasi membawa tantangan besar bagi eksistensi majelis ta'lim. Pertama, terjadinya pergeseran nilai akibat modernisasi dan sekularisasi yang mengurangi minat masyarakat terhadap pengajian tradisional. Kedua, munculnya konten keagamaan ekstrem di media digital yang dapat memecah umat. Ketiga, lemahnya sistem manajemen dan kaderisasi dalam banyak majelis ta'lim.

Namun, majelis ta'lim juga memiliki peluang besar di era digital. Pemanfaatan media sosial, podcast, dan kanal streaming dapat menjadikan majelis ta'lim lebih inklusif dan menjangkau generasi muda.

Menurut Castells (2004), era jejaring global menuntut setiap lembaga sosial beradaptasi melalui transformasi digital.

Strategi penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi muballigh dalam literasi digital dan pedagogi Islam modern. Lembaga formal seperti Kementerian Agama dan ormas Islam perlu membangun sistem akreditasi dan pelatihan terpadu bagi pengelola majelis ta'lim. Selain itu, kolaborasi antar-majelis ta'lim di tingkat lokal hingga nasional dapat membentuk jaringan dakwah yang kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan pendekatan manajemen modern, majelis ta'lim dapat menjadi pusat pemberdayaan umat yang berdaya saing global.

Maka berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya strategi penguatan majelis ta'lim di era globalisasi, diantaranya:

- a. Digitalisasi Dakwah dan Pembelajaran. Menggunakan platform digital (YouTube, podcast, Zoom, media sosial) untuk memperluas jangkauan jamaah dan memperkuat literasi Islam digital.
- b. Peningkatan Kompetensi ustadz/ustadzah dan Pengelola. Melatih para ustadz/ustadzah dalam pedagogi modern, teknologi pembelajaran, dan komunikasi multikultural.
- c. Kurikulum Kontekstual dan Inklusif. Menyusun materi kajian yang relevan dengan isu sosial kontemporer: moderasi beragama, lingkungan, ekonomi syariah, dan keluarga Islami.
- d. Kemitraan dan Kolaborasi. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat program dan sumber daya majelis ta'lim.
- e. Pemberdayaan Ekonomi Jamaah. Mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis komunitas (koperasi syariah, pelatihan wirausaha, dan bazar Islami) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial jamaah.

Pada akhirnya, majelis ta'lim harus tetap berpegang pada misi utamanya, yaitu menjadi sumber ilmu, ketenangan, dan pembentuk akhlak bagi umat manusia sebagaimana diwariskan Rasulullah SAW. Majelis ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Dengan menjaga kemurnian niat dan kualitas pengajarannya, majelis ta'lim dapat terus menjadi pilar utama dalam memperkuat iman,

ukhuwah, dan karakter umat di tengah arus globalisasi yang kian kompleks.

D. Integrasi Pendidikan Islam antara Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

1. Konsep Dasar Integrasi Pendidikan Islam

Integrasi pendidikan Islam berpijak pada prinsip tauhid, yaitu kesatuan antara iman, ilmu, dan amal dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya upaya intelektual, tetapi juga spiritual dan moral yang menyeluruh. Konsep ini menekankan keterpaduan antara akal dan hati, dunia dan akhirat, individu dan sosial. Al-Attas (2011) menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia beradab (*insān ḥadāri*), yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan rasional dan nilai ilahiah.

Integrasi pendidikan Islam berakar pada pandangan bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan sosial. Menurut Al-Faruqi (2012), Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya mengembalikan ilmu ke dalam orientasi tauhid agar seluruh pengetahuan membawa manusia kepada pengenalan terhadap Tuhan. Integrasi ini bukanlah asimilasi, melainkan harmonisasi antara dimensi spiritual dan empiris dalam pendidikan.

Konsep *tripusat pendidikan* sebagaimana dikemukakan Ki Hajar Dewantara juga sejalan dengan pandangan Islam. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tiga komponen yang saling melengkapi dalam proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di rumah dan lingkungan sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan adalah keniscayaan bagi pembentukan generasi yang beriman dan berakarakter.

Konteks modern, pendekatan integratif menjadi relevan untuk menjawab fragmentasi pendidikan yang cenderung memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Azra (2019), paradigma dualistik telah menghambat lahirnya generasi Muslim yang utuh, karena pendidikan sering terjebak pada dikotomi sakral-profane. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang menyatukan nilai Islam dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dengan demikian, integrasi pendidikan Islam merupakan upaya strategis membangun peradaban yang seimbang antara rasionalitas dan spiritualitas. Pendidikan yang terintegrasi akan melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, sosial, dan produktif.

2. Keluarga sebagai Basis Utama Pendidikan Islam

Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dalam Islam, keluarga disebut *madrrasah al-ūlā* karena menjadi tempat pertama anak mengenal Allah, moral, dan kehidupan sosial. Menurut Zakaria (2017), keluarga berperan membentuk dasar keimanan, karakter, dan kepribadian anak melalui interaksi yang penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menegaskan tanggung jawab orang tua dengan sabdanya: *"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendidikan dalam keluarga berorientasi pada keteladanan, pembiasaan, dan komunikasi yang baik. Orang tua menjadi *murabbi* yang memberikan contoh dalam ibadah, kejujuran, dan etika sosial. Menurut Quraish Shihab (2019), pendidikan dalam keluarga memiliki nilai ketulusan yang tidak dapat digantikan oleh lembaga formal. Proses ini menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara anak dan orang tua.

Peran keluarga dalam era digital menghadapi tantangan besar berupa penetrasi budaya global dan media sosial. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan nilai yang kuat, anak dapat kehilangan arah moral. Karenanya, penguatan literasi digital islami dan pengawasan berbasis dialog menjadi penting dalam menjaga keseimbangan anak antara kebebasan dan tanggung jawab (Hidayat, 2020).

Pendidikan keluarga juga berfungsi sebagai penghubung antara nilai agama dan kehidupan sosial. Orang tua berperan menanamkan kesadaran bahwa ibadah tidak hanya ritual, tetapi juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai benteng utama dari dekadensi moral dan penyimpangan perilaku.

Keluarga yang harmonis, religius, dan komunikatif akan menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya masyarakat madani. Pendidikan Islam

dalam keluarga adalah pondasi dari segala bentuk pendidikan lainnya, karena dari keluargalah lahir generasi pembelajar dan berakhlak mulia.

3. Sekolah sebagai Lembaga Formal Penguat Nilai dan Pengetahuan

Sekolah berperan memperkuat nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga melalui pembelajaran terstruktur. Dalam konteks pendidikan Islam, sekolah berfungsi membentuk kepribadian ilmiah sekaligus religius. Menurut Nata (2012), pendidikan Islam di sekolah harus mengembangkan keseimbangan antara *transfer of knowledge* dan *transfer of values*. Guru tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi menjadi teladan moral (*uswah hasanah*).

Integrasi kurikulum agama dan umum merupakan langkah penting dalam membangun karakter siswa yang utuh. Menurut Rahman (2018), model kurikulum integratif menjadikan seluruh pelajaran sebagai media penanaman nilai Islam, bukan hanya mata pelajaran agama. Pendekatan ini memungkinkan siswa memahami bahwa seluruh ilmu berasal dari Allah dan berfungsi untuk kemaslahatan manusia.

Budaya religius sekolah menjadi faktor pendukung keberhasilan pendidikan Islam. Aktivitas seperti shalat berjamaah, tadarus, dan kegiatan sosial membentuk lingkungan belajar yang bernilai spiritual. Lingkungan tersebut menginternalisasi nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam keseharian siswa.

Sekolah juga menjadi wahana kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan parenting islami, pelatihan guru, dan sinergi program sosial memperkuat keterpaduan nilai antara rumah dan sekolah. Menurut Abdullah (2015), sekolah yang menjalin kerja sama dengan orang tua memiliki tingkat efektivitas moral learning yang lebih tinggi. Dengan demikian, sekolah Islam yang ideal bukan sekadar tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga pusat pembentukan insan kamil — manusia beriman, cerdas, dan berakhlak mulia.

4. Masyarakat sebagai Wahana Sosialisasi dan Aplikasi Nilai

Masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat individu menerapkan nilai-nilai Islam yang telah diperoleh dari keluarga dan sekolah. Dalam pandangan Al-Qaradawi (2007), masyarakat Islam yang ideal adalah yang menegakkan keadilan, ukhuwah, dan tanggung jawab

sosial. Pendidikan dalam masyarakat tidak selalu formal, tetapi berlangsung melalui budaya, tradisi, dan interaksi sosial.

Lembaga sosial seperti masjid, majelis ta'lim, dan organisasi Islam memainkan peran penting dalam melanjutkan proses pendidikan masyarakat. Menurut Azra (2016), lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran sosial yang membentuk solidaritas dan etika publik. Melalui dakwah kultural, masyarakat menjadi ruang untuk menanamkan kesadaran moral dan spiritual yang hidup.

Masyarakat juga menjadi arena penerapan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Dalam konteks multikultural, pendidikan masyarakat Islam harus bersifat inklusif dan dialogis. Menurut Hasan (2018), pendidikan Islam perlu menumbuhkan semangat *ta'aruf* (saling mengenal) dan kerja sama antarumat beragama dalam kehidupan sosial.

Namun, arus globalisasi membawa tantangan serius berupa individualisme, materialisme, dan dekadensi moral. Untuk itu, masyarakat harus memperkuat fungsi sosial pendidikan dengan menumbuhkan budaya gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, masyarakat bukan hanya objek pendidikan, tetapi juga subjek aktif yang berperan dalam menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang hidup dan dinamis.

5. Model Sinergi Tripusat Pendidikan Islam

Integrasi keluarga, sekolah, dan masyarakat disebut sebagai *tripusat pendidikan Islam* yang bersumber dari nilai tauhid. Menurut Dewantara (2013), pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu agar anak mendapatkan konsistensi nilai dari ketiga lingkungan tersebut. Dalam Islam, sinergi ini mencerminkan prinsip *ukhuwah* dan *ta'awun* (kerjasama dalam kebaikan).

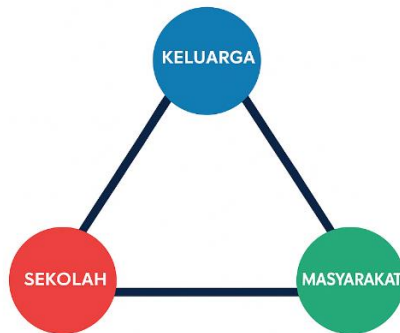
Model sinergi pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui berbagai program kolaboratif, seperti kegiatan parenting bersama, pengajian keluarga, dan pelatihan guru berbasis masyarakat. Menurut Suyatno (2019), kolaborasi ini membentuk jejaring sosial pendidikan yang memperkuat nilai moral dan spiritual peserta didik.

Sinergi pendidikan juga memerlukan dukungan kebijakan dari negara. Integrasi kurikulum dan program pendidikan berbasis karakter Islami perlu diarusutamakan dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah dapat mendorong kemitraan strategis antara pesantren,

sekolah umum, dan lembaga masyarakat dalam upaya membangun generasi unggul.

Selain itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara tiga pusat pendidikan. Melalui platform digital, komunikasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dapat dilakukan secara efektif untuk mengawal perkembangan peserta didik. Dengan demikian, sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berkontributif terhadap kemajuan peradaban manusia. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat disebut sebagai tripusat pendidikan Islam dapat diilustrasikan seperti gambar berikut:

MODEL SINERGI TRIPUSAT PENDIDIKAN ISLAM



Gambar “Model Sinergi Tripusat Pendidikan Islam” menggambarkan hubungan yang saling terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tiga pusat utama pendidikan Islam.

- Keluarga digambarkan sebagai pondasi utama, tempat pertama anak memperoleh nilai keimanan, moral, dan keteladanan. Di sini pendidikan berlangsung secara alami melalui kasih sayang, bimbingan orang tua, dan pembiasaan ibadah.
- Sekolah berperan sebagai lembaga formal yang memperkuat dasar-dasar keislaman melalui proses pembelajaran terstruktur, kurikulum berbasis nilai, dan pengembangan intelektual. Sekolah menjadi penghubung antara nilai agama dan kompetensi akademik.

- c. Masyarakat menjadi ruang praksis di mana nilai-nilai Islam yang diperoleh di keluarga dan sekolah diimplementasikan. Lingkungan sosial yang religius, kegiatan keagamaan, dan budaya gotong royong menjadi sarana pembentukan karakter sosial Islami.

Ketiga unsur tersebut dihubungkan oleh panah sinergi dua arah, menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan berinteraksi dinamis. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam membentuk generasi Muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

E. Tantangan dan Arah Pengembangan Pendidikan Islam dalam Kehidupan Sosial Modern

1. Tantangan Normatif-Kultural terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan Islam menghadapi tantangan normatif dan kultural yang muncul dari pluralitas nilai di masyarakat modern. Globalisasi budaya membawa arus nilai baru — sekularisme, konsumerisme, dan relativisme moral — yang seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip tradisional pendidikan Islam. Kondisi ini menuntut lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan ulang strategi kurikulum dan metode agar tetap relevan tanpa mengorbankan pilar dasar ajaran (Azra, 2016).

Tekanan kultural di tingkat keluarga dan komunitas juga terlihat dari perubahan pola asuh dan gaya hidup yang mengurangi waktu interaksi religius antara orang tua dan anak. Akibatnya, sejumlah nilai yang dahulu ditransmisikan secara alami dalam keluarga cenderung tergerus, sehingga sekolah dan lembaga nonformal harus mengambil peran komplementer dalam penguatan adab dan ihsan (Nata, 2012).

Selain itu, dilema antara mempertahankan tradisi lokal dan mengadopsi praktik modern sering menimbulkan resistensi internal dalam institusi-institusi Islam. Sebagian pihak menuntut pembaruan kurikulum dan metode agar sesuai tuntutan zaman; sebagian lain khawatir modernisasi akan mengikis otentisitas. Tantangan ini menuntut kepemimpinan pendidikan yang visioner dan sensitif terhadap konteks lokal (Hidayat, 2020).

Ruang publik modern juga memperlihatkan fragmentasi identitas: generasi muda sering menghadapi kontradiksi identitas agama dan

identitas global/popular. Pendidikan Islam perlu merespons dengan pendekatan yang membangun kohesi identitas — yakni identitas yang Islami sekaligus terbuka terhadap dialog global — agar lulusan mampu berpartisipasi produktif dalam masyarakat majemuk (Esposito, 2003).

Sebagai kesimpulan, tantangan normatif-kultural mendorong kebutuhan reformasi yang bersifat selektif yaitu menerima inovasi yang kompatibel dengan prinsip-prinsip tauhid dan etika Islam, sambil memperkuat ruang domestik (keluarga) dan komunitas sebagai basis pembentukan karakter religius (Azra, 2016; Nata, 2012).

2. Tantangan Institusional dan Kualitas Sumber Daya

Salah satu hambatan utama pengembangan pendidikan Islam adalah keterbatasan kapasitas institusional: sarana prasarana, kualitas guru, dan manajemen kelembagaan. Banyak lembaga pendidikan Islam di berbagai tingkatan masih menghadapi masalah pembiayaan, standar pedagogik, dan akreditasi yang belum merata, sehingga kualitas layanan pendidikan bervariasi (Nata, 2012).

Kualitas tenaga pendidik menjadi isu krusial: guru/gurubesar perlu kombinasi kompetensi akademik, keterampilan pedagogik modern, dan kedalaman keilmuan agama. Kurangnya program pelatihan berkelanjutan dan jalur sertifikasi mempengaruhi profesionalisme pengajar. Oleh karenanya, investasi pada pengembangan profesional guru merupakan prasyarat penguatan pendidikan Islam yang berkelanjutan (Hidayat, 2020).

Di tingkat perguruan tinggi, tantangan riset dan publikasi akademik juga nyata: keterbatasan akses jurnal internasional, bahasa, dan jejaring akademik menghambat kontribusi intelektual Islam pada wacana global. Penguatan kultur riset, bilingual publikasi, dan kerja sama internasional adalah arah pengembangan yang perlu ditempuh (Esposito, 2003).

Manajemen kelembagaan yang lemah — mis. perencanaan strategis, tata kelola keuangan, dan tata kelola kurikulum — juga menghambat respons terhadap dinamika sosial. Reformasi manajerial yang berbasis data dan akuntabilitas akan meningkatkan daya adaptasi lembaga terhadap tantangan modern (Azra, 2016).

Secara ringkas, tantangan institusional harus ditangani lewat kebijakan terpadu (pemerintah-ormas-lembaga), program peningkatan

kapasitas pendidik, dan penguatan kultur riset agar pendidikan Islam mampu bersaing secara kualitatif di era modern (Nata, 2012; Hidayat, 2020).

3. Tantangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Kurikulum yang terfragmentasi antara ilmu agama dan ilmu umum merupakan masalah klasik yang terus berpengaruh. Dikotomi ini mengakibatkan lulusan yang unggul di salah satu sisi, tetapi lemah pada sisi lain (mis. cerdas akademik namun rendah jiwa etis, atau sebaliknya). Maka arah pengembangan harus menuju kurikulum integratif yang menyinergikan nilai-nilai Qurani dengan kompetensi abad 21 (kreativitas, literasi digital, berpikir kritis) (Rahman, 2004; Azra, 2019).

Metode pembelajaran tradisional yang dominan ceramah dan hafalan perlu dilengkapi dengan pendekatan aktif (project-based learning, problem-based learning, dan pembelajaran berbasis komunitas). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi kognitif, tetapi juga keterampilan sosial dan etika aplikatif. Integrasi praktik layanan masyarakat (service learning) dengan materi kajian agama dapat menjembatani teori dan praktik moral (Nata, 2012).

Pembelajaran berbasis digital menjadi kebutuhan, namun juga tantangan: bagaimana memanfaatkan e-learning, MOOC, dan media sosial untuk memperluas akses tanpa kehilangan kualitas pengajaran Islam yang mendalam. Literasi digital bagi guru dan murid harus menjadi prioritas agar teknologi menjadi alat pendidikan, bukan sumber distraksi moral (Hidayat, 2020).

Evaluasi pembelajaran juga perlu direorientasi: tidak semata mengukur penguasaan kognitif tetapi juga kompetensi karakter, etika, dan pengamalan sosial. Instrumen asesmen perlu mengakomodasi penilaian sikap, adab, dan kontribusi sosial sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Hal ini menuntut kapasitas asesmen baru dan budaya penilaian yang holistik (Azra, 2016).

Oleh karena itu, arah pengembangan kurikulum dan metode harus bersifat integratif, kontekstual, dan teknologi-aware yang menjaga keseimbangan antara penguatan spiritual dan kompetensi profesional yang relevan di dunia kerja dan masyarakat modern (Rahman, 2004; Hidayat, 2020).

4. Tantangan Sosial: Keterkaitan dengan Isu Keadilan, Ekonomi, dan Ruang Publik

Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial: kemiskinan, ketimpangan, dan akses pendidikan yang tidak merata mempengaruhi efektivitas pembelajaran agama. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan umat, pemberdayaan ekonomi berbasis etika Islam, dan advokasi keadilan sosial (Esposito, 2003).

Peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kritis terhadap isu-isu publik (korupsi, lingkungan, hak asasi) menjadi penting agar lulusan tidak hanya taat ritual tetapi juga responsif terhadap problematika sosial. Kurikulum kewargaan dan etika publik yang bernuansa Islami perlu diintegrasikan agar generasi muda menjadi agen perubahan yang beretika (Azra, 2016).

Selain itu, arus informasi dan politik identitas menimbulkan polarisasi di ruang publik. Pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab mengembangkan kapasitas dialog, toleransi, dan kemampuan berargumentasi rasional. Pendidikan yang mempromosikan keterampilan lintas-kultural dan pemahaman pluralitas akan memperkuat kohesi sosial (Nata, 2012).

Aspek ekonomi juga menjadi tantangan: pendidikan Islam harus relevan dengan dunia kerja dan kewirausahaan. Pengembangan program vokasi bernilai syariah, kewirausahaan sosial, dan inkubasi usaha di kampus/kampus pesantren dapat membantu mengatasi pengangguran sekaligus menerapkan nilai etika ekonomi Islam (Hidayat, 2020).

Singkatnya, pendidikan Islam masa depan harus terintegrasi dengan pembangunan sosial-ekonomi dan kehidupan publik. Hal ini berarti lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dan moral, tetapi juga turut serta dalam mendorong kemajuan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta keadilan sosial. Pendidikan Islam perlu membangun generasi yang berilmu, produktif, dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sosial di lingkungannya. Selain itu, nilai keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan harus menjadi bagian utama dalam kurikulum sosialnya (Esposito, 2003; Azra, 2016). Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat beradab yang menempatkan kemanusiaan dan keseimbangan lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya

membentuk individu yang saleh secara pribadi, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun peradaban yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Arah Pengembangan: Strategi Integratif dan Reformasi Sistemik

Menjawab tantangan-tantangan pendidikan Islam di era modern memerlukan strategi yang sistemik dan terencana. Reformasi kurikulum menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa materi pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pendidik maupun tenaga kependidikan, menjadi aspek penting agar pendidikan Islam mampu bersaing secara global. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme juga harus dilakukan agar institusi pendidikan Islam memiliki tata kelola yang efektif dan berdaya saing tinggi.

Arah pengembangan pendidikan Islam ke depan harus menekankan model integratif yang menyinergikan tiga pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sinergi multipihak antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan masyarakat luas diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang utuh dan berkesinambungan. Melalui pendekatan tripusat pendidikan ini, diharapkan dapat terbentuk insan kamil — manusia yang berilmu, beriman, berakhlak, dan mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan peradaban global (Azra, 2016; Nata, 2012).

Pembangunan kapasitas guru dan dai modern (training pedagogi, literasi digital, riset terapan) harus menjadi prioritas. Skema insentif, beasiswa, dan jalur karier yang jelas akan meningkatkan profesionalisme pendidik Islam. Di tingkat tinggi, institusi harus meningkatkan kultur riset dan publikasi internasional guna memperbesar pengaruh intelektual Islam di kancah global (Hidayat, 2020).

Pemanfaatan teknologi secara strategis — e-learning yang berkualitas, platform pembelajaran daring, serta modul-modul digital Qurani dan akhlak — dapat memperluas akses sekaligus menjaga kualitas pembelajaran. Namun, penerapan teknologi harus disertai kebijakan literasi digital dan etika penggunaan sehingga hasilnya konstruktif (Rahman, 2004; Hidayat, 2020).

Reformasi kebijakan publik juga diperlukan: pengakuan jalur nonformal (pesantren, madrasah diniyah), penjaminan mutu, dan

dukungan pendanaan untuk lembaga pendidikan Islam menengah ke bawah. Kolaborasi antarstakeholder (pemerintah, LSM, sektor swasta, ormas) akan memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Azra, 2016).

Berdasarkan pandangan di atas, terdapat empat strategi integratif dan reformasi sistemik dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu: (1) Reformasi Kurikulum. Menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan moralitas universal. (2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan agar profesional, inovatif, serta memiliki wawasan global yang Islami. (3) Penataan Kelembagaan Pendidikan Islam. Melakukan modernisasi manajemen, tata kelola, dan akreditasi lembaga pendidikan agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi mutu. Dan (4) Sinergi Multipihak dalam Tripusat Pendidikan. Mengintegrasikan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan dukungan pemerintah dan ormas Islam untuk membentuk sistem pendidikan yang kolaboratif menuju terwujudnya *insan kamil*

Daftar Bacaan

- Abdullah, M. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (2012). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: IIIT.
- Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Nahlawi, A. (1995). *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-Wāqī'*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Tarbiyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Dirasat fi Fiqh al-Maqasid: Bayna al-Maqasid al-'Ammah wa al-Maqasid al-Khassah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Zarnūjī, B. (n.d.). *Ta'lim al-Muta'allim Ṭarīq al-Ta'allum*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. *Annual Review of Psychology*, 52, 1–26.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bhikhu Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Castells, M. (2004). *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Daradjat, Z. (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewantara, K. H. (2013). *Pendidikan: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Durkheim, E. (2002). *Education and Sociology*. New York: Free Press.
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. New York: Routledge.
- Esposito, J. L. (2015). *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Hasan, N. (2018). *Islamic Education and Multicultural Society*. Leiden: Brill.
- Hidayat, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, M. (2020). *Pendidikan Islam di Era Digital dan Masyarakat Multikultur*. Bandung: Alfabeta.
- Ibn Khaldūn. (n.d.). *Al-Muqaddimah*. Cairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Ibn Miskawayh. (1966). *Tahdzīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A‘rāq*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development: Vol. I. The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row.
- Kohlberg, L. (2008). *The Philosophy of Moral Development*. New York: Harper & Row.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Pearson Education.

- Langgulung, H. (2003). *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (2000). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mulia, S. M. (2011). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Nata, A. (2012). *Integrasi Ilmu dan Agama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nizar, S. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rahman, F. (2004). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. (ed./paper collection). Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahman, F. (2018). *Contemporary Approaches to Islamic Education*. Oxford: Routledge.
- Rahman, F. (2019). *Islamic Education and Digital Ethics in the 21st Century*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Shihab, M. Q. (2011). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suyatno. (2019). *Sinergi Pendidikan Islam dalam Tripusat Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, A. (2019). *Ketahanan Keluarga Muslim di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wood, W., & Neal, D. T. (2007). *A New Look at Habits and the Habit-Goal Interface*. *Psychological Review*, 114(4), 843–863.
- Yusuf, M. (2017). *Pendidikan Islam dalam Keluarga Modern*. Malang: UIN Press.
- Zainuddin, A. R. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam dan Implementasinya dalam Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zakaria, A. (2017). *Parenting Islami di Era Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhairini. (2010). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ragam Bentuk Pendidikan Islam

A. Pendidikan Islam Anak Usia Dini

1. Pengertian Pendidik Islam Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah individu yang berada pada rentang usia 0 hingga 6 tahun, atau sering disebut sebagai masa keemasan (*golden age*) karena pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan anak. Masa ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan kepribadian, kecerdasan, dan moral di masa depan. Dalam pandangan Al-Ghazali, anak usia dini adalah amanah dari Allah yang hatinya masih suci bagaikan permata yang bisa dibentuk sesuai arah pendidikan. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik wajib menanamkan akhlak mulia dan nilai tauhid sejak dini, karena pendidikan awal akan membentuk kepribadian dan nasibnya di masa depan (Al-Ghazali, 2005).

Menurut Ibn Khaldun, anak usia dini merupakan fase penting pembentukan *fitrah insaniyah* — potensi dasar manusia yang perlu diarahkan melalui pembiasaan dan keteladanan. Pendidikan pada masa ini harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual agar anak tumbuh sebagai insan yang seimbang antara akal dan iman (Ibn Khaldun, 2004).

Menurut Montessori, anak usia dini adalah individu yang memiliki *absorbent mind* — pikiran yang sangat mudah menyerap segala pengalaman di sekitarnya. Pada masa ini, anak belajar secara alami melalui eksplorasi, aktivitas sensorik, dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang untuk menstimulasi semua aspek perkembangan anak (Montessori, 1949). Disisi lain Piaget memandang anak usia dini (0–6 tahun) sebagai individu yang berada pada tahap *preoperational*. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, imajinasi, dan simbolisasi, tetapi masih berpikir secara egosentris. Pengalaman konkret sangat penting untuk membangun dasar berpikir logis di masa berikutnya (Piaget, 1969).

Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan anak usia dini terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Anak belajar melalui *zone of proximal development* (ZPD) — yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan melalui bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Dengan demikian, pendidikan anak harus menekankan pada pembelajaran kolaboratif dan komunikasi sosial (Vygotsky, 1978).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah individu yang berada pada masa awal kehidupan (0–6 tahun) yang ditandai dengan perkembangan pesat pada aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Pada fase ini, anak memiliki potensi luar biasa untuk belajar melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan pembiasaan nilai. Masa ini juga merupakan fondasi utama pembentukan kepribadian, karakter, serta fitrah keimanan, sehingga pendidikan anak usia dini harus dirancang secara holistik — mengintegrasikan aspek intelektual, emosional, dan spiritual dalam bimbingan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pada tahap ini, stimulasi pendidikan yang tepat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, maupun bahasa. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini harus dirancang secara holistik, menyenangkan, dan berpusat pada kebutuhan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia (Papalia & Feldman, 2012; Nata, 2012; Rahman, 2018).

Ciri-ciri anak usia dini (sekitar 0-6 tahun) yang perlu dipahami orang tua antara lain unik dan egosentris, aktif dan penuh energi, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi tinggi, bersifat spontan, serta

mudah frustrasi, ceroboh, dan kurang perhitungan karena perkembangan emosi dan kognitifnya belum stabil. Diantara ciri khas anak usia dini yaitu:

a. **Rasa Ingin Tahu yang Tinggi.**

Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Mereka senang bereksperimen, bertanya, dan mengamati hal-hal baru yang menarik minatnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki potensi belajar yang sangat kuat melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Montessori (2004) menyebut periode ini sebagai *the absorbent mind*, di mana anak menyerap segala informasi dengan cepat dari lingkungannya. Dalam pandangan Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *fitrah* anak yang secara alami cenderung pada kebaikan dan pengetahuan (QS. Al-Rūm: 30).

b. **Belajar Melalui Bermain (Learning by Playing).**

Bermain merupakan metode belajar paling efektif bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, serta kemampuan bahasa. Vygotsky (1978) menyatakan bahwa permainan adalah konteks sosial tempat anak belajar berinteraksi dan membangun makna terhadap dunia. Dalam perspektif Islam, bermain yang terarah juga menjadi bagian dari *tarbiyah al-nafs*, yakni pengembangan potensi jiwa dan kreativitas anak (al-Abrāshī, 2003).

c. **Egosentris namun Penuh Imajinasi.**

Anak usia dini cenderung egosentris, artinya mereka memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki imajinasi yang tinggi yang membantu dalam pembelajaran simbolik dan berpikir kreatif. Menurut Piaget (2001), tahap pra-operasional ini ditandai oleh kemampuan berpikir simbolik, tetapi belum mampu berpikir logis secara penuh. Dalam pendidikan Islam, imajinasi ini perlu diarahkan dengan nilai tauhid dan akhlak agar membentuk kepribadian yang seimbang (Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*).

d. **Meniru Perilaku Orang Dewasa (Imitative Learning).**

Anak belajar dengan cara meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan *fitrah*, dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhari). Pernyataan ini menunjukkan pentingnya

keteladanan dalam pendidikan anak usia dini. Bandura (1986) melalui *Social Learning Theory* juga menekankan bahwa anak belajar melalui pengamatan (observational learning) terhadap model sosial seperti orang tua dan guru.

e. **Rentang Konsentrasi Pendek dan Kebutuhan Aktivitas Variatif.**

Anak usia dini umumnya memiliki rentang konsentrasi yang pendek dan mudah bosan. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus bersifat interaktif, multisensori, dan menyenangkan. Menurut Bredekamp dan Copple (2019), guru perlu menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak. Dalam Islam, konsep *ta'dib* menekankan pentingnya pembiasaan yang lembut, bertahap, dan menyenangkan sesuai tingkat perkembangan anak (al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*).

Sedangkan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) adalah suatu upaya yang secara sadar dan terencana untuk membantu anak usia dini (0–6 tahun) mengembangkan potensi dirinya secara utuh sesuai dengan fitrahnya, berlandaskan nilai-nilai dan ajaran Islam untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Proses ini mencakup kegiatan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, dan pengajaran, yang diarahkan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh serta bahagia di dunia dan akhirat. Menurut Nata (2012), pendidikan Islam pada anak usia dini merupakan fondasi utama pembentukan kepribadian Islami, karena pada masa ini anak memiliki kepekaan spiritual dan moral yang tinggi sehingga nilai-nilai keimanan mudah ditanamkan.

Pandangan ini sejalan dengan konsep *fitrah* dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rūm: 30), bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan berpotensi untuk tumbuh menjadi manusia yang beriman apabila dibimbing dengan pendidikan yang benar. Al-Ghazālī (2005) menegaskan bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk menumbuhkan akhlak dan keimanan sejak dini, karena hati anak masih bersih dan mudah menerima nilai-nilai kebaikan. Dalam perspektif modern, Bredekamp dan Copple (2019) menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini harus mempertimbangkan aspek perkembangan biologis, kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan dalam membentuk kepribadian anak secara utuh.

Sementara itu, Montessori (2004) menekankan pentingnya lingkungan belajar yang penuh kasih dan mendukung kebebasan eksplorasi anak agar potensi alaminya dapat berkembang optimal. Pendidikan Islam anak usia dini yang terintegrasi dengan prinsip *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* memungkinkan terbentuknya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Dengan demikian, PIAUD bukan hanya bertujuan mencerdaskan anak secara akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ilahiyah yang menjadi dasar pembentukan karakter Islami dan moralitas sosial (Abdullah, 2015).

Karakteristik Utama PIAUD diantaranya: *Pertama*, Berbasis Islam. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber nilai dan pedoman utama. Kurikulum dan metode pembelajarannya dirancang untuk menanamkan tauhid, akhlak mulia, serta pembiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazālī (2005) menegaskan bahwa pendidikan anak harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai moral dan spiritual agar terbentuk pribadi yang *muttaqīn* (bertakwa). Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah (2015) yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah proses spiritual dan moral yang membentuk manusia berakhlak ilahiyah.

Kedua, Terpadu. PIAUD menekankan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak secara menyeluruh — jasmani, rohani, psikomotorik, kognitif, emosional, dan sosial — sesuai dengan prinsip *integrative education*. Menurut Bredekamp dan Copple (2019), pendekatan holistik merupakan landasan penting dalam pendidikan anak usia dini karena seluruh aspek perkembangan saling memengaruhi. Dalam konteks Islam, prinsip keterpaduan ini sejalan dengan konsep *insan kāmil*, yakni manusia yang berkembang secara seimbang antara akal, hati, dan tindakan (Nata, 2012).

Ketiga, Fokus pada Usia Dini. PIAUD menaruh perhatian utama pada masa usia 0–6 tahun, yang dikenal sebagai *golden age*. Pada periode ini, perkembangan kepribadian, moralitas, dan spiritual anak sangat pesat. Menurut Montessori (2004), usia dini adalah fase sensitif di mana anak sangat mudah menyerap nilai-nilai yang diberikan. Dalam Islam, masa ini disebut sebagai fase *fitrah* (QS. Ar-Rūm: 30), di mana anak perlu dibimbing dengan kasih sayang dan teladan agar potensi ilahiyahnya berkembang secara optimal.

Tujuan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, diantaranya:

- a. Membentuk Kepribadian Muslim. PIAUD bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menurut Hasan (2010), pendidikan Islam tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual tetapi juga kesadaran spiritual dan sosial anak agar ia mampu menjadi manusia yang berkarakter Qurani.
- b. Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Pendidikan anak usia dini dalam Islam diarahkan untuk membimbing anak menuju kebahagiaan sejati — yang bersumber dari keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Attas (2010) menjelaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah *ta'dīb*, yaitu pembentukan adab yang menuntun manusia kepada kebahagiaan hakiki (*sa'ādah*).
- c. Mengembangkan Potensi Anak Secara Utuh. PIAUD membantu anak mengembangkan potensi dasar baik fisik maupun mental, melalui pembiasaan, pengasuhan, dan pembelajaran yang menyenangkan. Pandangan Piaget (1973) dan Vygotsky (1978) menegaskan pentingnya stimulasi lingkungan sosial dan spiritual untuk menumbuhkan daya pikir serta empati anak sejak dini.
- d. Menyiapkan Generasi Penerus Bangsa yang Saleh dan Produktif. Pendidikan Islam anak usia dini berfungsi menyiapkan generasi yang saleh, cerdas, dan berdaya guna bagi umat dan bangsa. Nata (2012) menyatakan bahwa generasi Muslim masa depan harus memiliki *moral-spiritual intelligence* yang menjadi fondasi bagi pembangunan peradaban Islam modern.

Anak Usia Dini memerlukan seorang pendidik yang dapat menghantarkannya menjadi generasi emas. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dari lahir hingga usia enam tahun dengan berlandaskan ajaran Islam, mencakup aspek keimanan, akhlak, intelektual, dan psikologi. Mereka bertugas untuk membantu mengembangkan seluruh potensi anak (fisik, rohani, kognitif, dan emosional) serta menjadi teladan dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak mulia.

Menurut Nata (2012), pendidik Islam harus memiliki integritas moral dan spiritual yang tinggi karena proses pendidikan dalam Islam bukan hanya transfer pengetahuan (*ta'līm*), tetapi juga pembentukan

karakter dan kepribadian (*tarbiyah*). Dalam pandangan al-Ghazālī (2005), pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak menuju kesempurnaan akhlak dan kedekatan kepada Allah. Ia menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan yang baik karena anak belajar lebih banyak melalui contoh nyata daripada kata-kata. Di sisi lain, Bredekamp dan Copple (2019) menekankan bahwa pendidik anak usia dini perlu memahami tahapan perkembangan anak agar pendekatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan psikologis dan emosional mereka.

Montessori (2004) menambahkan bahwa pendidik harus berperan sebagai *guide*, bukan hanya pengajar, yang menciptakan lingkungan belajar kondusif agar anak dapat berkembang secara alami sesuai potensinya. Pandangan ini sejalan dengan konsep *fitrah* dalam Islam, di mana setiap anak lahir membawa potensi kebaikan yang perlu diarahkan melalui pendidikan yang penuh kasih dan keteladanan (QS. Al-Rūm: 30). Oleh karena itu, pendidik PIAUD memiliki peran strategis sebagai fasilitator perkembangan fitrah, penanam nilai spiritual, dan penguat karakter anak dalam bingkai ajaran Islam.

2. Landasan Filosofis Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Pendidikan Islam anak usia dini berakar pada pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk fitri yang memiliki potensi keimanan dan akal sejak awal kehidupan. Dalam perspektif ontologis, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan dengan struktur jasmani dan rohani yang saling berinteraksi. Anak bukanlah tabula rasa yang kosong, melainkan membawa potensi bawaan untuk mengenal Tuhannya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]: 172 tentang perjanjian primordial manusia dengan Allah.

Secara epistemologis, pengetahuan dalam pendidikan Islam tidak hanya bersumber dari empirisme dan rasionalisme, tetapi juga dari wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Dalam pandangan Islam, ilmu ('ilm) merupakan hasil perpaduan antara akal, pengalaman, dan petunjuk ilahi (Al-Attas, 2010). Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini harus berorientasi pada pembentukan pengetahuan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan pengalaman konkrit kehidupan sehari-hari. Anak tidak hanya belajar melalui pengamatan dan

penalaran, tetapi juga melalui penanaman nilai spiritual yang membentuk kesadaran moral sejak dini (Nata, 2012).

Lebih lanjut, Al-Faruqi (1982) menekankan bahwa proses pendidikan Islam harus memadukan wahyu dengan akal agar terbentuk manusia yang seimbang antara aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, integrasi ini diwujudkan melalui pembelajaran berbasis pengalaman yang menanamkan makna tauhid dalam setiap aktivitas anak (Abdullah, 2015). Anak perlu dikenalkan pada realitas alam dan sosial melalui pendekatan saintifik yang bernuansa religius — misalnya dengan mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Imran [3]: 190–191.

Pendekatan integratif ini juga sejalan dengan pandangan Piaget (1973) dan Vygotsky (1978), yang menekankan bahwa anak belajar paling efektif melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman langsung. Dalam kerangka Islam, interaksi tersebut tidak hanya berfungsi mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk *spiritual awareness* dan rasa syukur terhadap ciptaan Allah (Azra, 2016). Dengan demikian, epistemologi pendidikan Islam anak usia dini tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dan nilai, tetapi memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi demi pembentukan insan kamil sejak usia dini.

Secara aksiologis, pendidikan Islam menekankan bahwa seluruh proses pendidikan bertujuan untuk mengantarkan anak kepada pengenalan (*ma'rifah*) dan pengabdian (*'ubūdiyyah*) kepada Allah SWT. Nilai tertinggi dari pendidikan bukan hanya pada pencapaian intelektual, tetapi pada terbentuknya kesadaran spiritual dan moral yang menuntun manusia untuk beribadah dan berakhlak mulia (Al-Attas, 2010). Pendidikan dalam pandangan Islam dipahami sebagai sarana untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang mampu mengintegrasikan potensi akal, hati, dan jasmani dalam bingkai pengabdian kepada Sang Pencipta (Nata, 2012).

Aksiologi ini menempatkan tujuan akhir pendidikan pada dimensi transendental, yakni *ta'abbud ilā Allāh* — beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan (Al-Faruqi, 1982). Oleh karena itu, dalam pendidikan anak usia dini, setiap aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan rasa syukur kepada Allah

melalui kegiatan bermain, pembiasaan, dan peneladanan yang bernilai ibadah (Abdullah, 2015). Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali (dalam Daud, 2013) yang menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) agar anak tumbuh menjadi hamba yang mengenal dan mencintai Allah sejak dini.

Dengan demikian, aksiologi pendidikan Islam memberikan orientasi nilai yang berbeda dari sistem pendidikan sekuler, karena tujuannya tidak hanya untuk mencetak manusia cerdas dan produktif, tetapi juga manusia yang beriman, berakhlak, dan berorientasi ibadah dalam setiap aspek kehidupannya (Azra, 2016). Dalam konteks anak usia dini, pengenalan ini tidak melalui doktrinasi kognitif, melainkan melalui pengalaman emosional, estetika, dan keteladanan moral yang konkret. Nilai ibadah, akhlak, dan kasih sayang menjadi orientasi utama aksiologis.

Pendidikan Islam anak usia dini juga berlandaskan pada teori fitrah yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan berpotensi untuk tumbuh menjadi manusia beriman. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Pandangan ini menegaskan pentingnya lingkungan pendidikan yang Islami sejak masa awal pertumbuhan.

Perspektif filsafat pendidikan Islam, anak dipandang sebagai amanah dan investasi spiritual. Pendidikan bukan semata transmisi ilmu, tetapi juga transformasi kepribadian. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan anak usia dini harus diarahkan pada pembentukan pribadi yang harmonis antara akal, hati, dan perilaku.

Implikasi ontologis dari pandangan ini ialah bahwa anak harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Ia memiliki kehendak, rasa ingin tahu, dan potensi kreatif yang harus dihargai. Pendidikan yang mengekang dan memaksa bertentangan dengan prinsip fitrah manusia yang merdeka dalam bereksplorasi.

Epistemologi pendidikan Islam menghendaki pendekatan integratif antara ilmu agama dan ilmu umum bahkan sejak masa anak-anak. Anak usia dini perlu diperkenalkan pada fenomena alam, warna, suara, dan bentuk dengan orientasi tauhidik, yakni menyadari keindahan dan keteraturan ciptaan Allah.

Secara aksiologis, setiap kegiatan belajar anak usia dini bernilai ibadah apabila diorientasikan pada kebaikan, ketulusan, dan niat karena

Allah SWT. Dalam pandangan pendidikan Islam, semua aktivitas yang membawa kemaslahatan dan dilakukan dengan niat yang benar termasuk bagian dari ibadah (*'amal ṣāliḥ*) (Al-Attas, 2010). Oleh karena itu, kegiatan belajar seperti bermain, menolong teman, mendengarkan guru, dan menjaga kebersihan dapat bernilai ibadah apabila diarahkan untuk menumbuhkan rasa syukur, tanggung jawab, dan kasih sayang (Nata, 2012).

Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan niat dan orientasi spiritual anak sejak dini (Abdullah, 2015). Dengan demikian, setiap kegiatan belajar menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentuk karakter saleh, serta menanamkan nilai-nilai ihsan dalam kehidupan sehari-hari (Azra, 2016). Bermain, bernyanyi, dan berinteraksi sosial merupakan media untuk menanamkan nilai spiritual seperti kejujuran, tolong-menolong, dan kasih sayang.

Filosofi pendidikan anak usia dini dalam Islam juga menolak dikotomi antara pendidikan duniawi dan ukhrawi. Kedua aspek tersebut harus dipadukan agar anak tumbuh menjadi insan yang seimbang antara kemampuan intelektual dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam anak usia dini merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya melalui pendekatan yang menumbuhkan fitrah keimanan, mengembangkan potensi akal, dan menanamkan nilai-nilai moral sejak usia paling dini. Dalam konteks lembaga pendidikan, prinsip-prinsip filosofis ini harus menjadi dasar perumusan visi, kurikulum, serta pendekatan pembelajaran agar kegiatan pendidikan tidak terlepas dari nilai-nilai tauhid.

Akhirnya, landasan filosofis pendidikan Islam anak usia dini menjadi fondasi bagi seluruh komponen pendidikan berikutnya, baik dalam aspek tujuan, kurikulum, maupun metode. Filsafat inilah yang membedakan sistem pendidikan Islam dari sistem sekuler yang cenderung berorientasi pada utilitarianisme.

3. Tujuan dan Orientasi Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini

Tujuan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) adalah membentuk kepribadian anak yang beriman, berakhlak, dan berilmu

sebagai manifestasi dari nilai-nilai tauhid yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali (dalam Al-Attas, 2010) yang menekankan bahwa pendidikan harus mengantarkan manusia kepada pengenalan terhadap Allah dan pembentukan akhlak yang mulia. Hal ini juga ditegaskan oleh Nata (2012), bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi pada penanaman nilai-nilai iman dan akhlak melalui proses pembiasaan dan keteladanan.

Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan anak menurut Bronfenbrenner (2005) yang menekankan pentingnya lingkungan spiritual dan sosial dalam membentuk perilaku dan karakter anak sejak usia dini. Pendidikan Islam yang berlandaskan tauhid memberikan dasar moral yang kokoh untuk mengarahkan seluruh potensi anak agar berkembang secara seimbang antara aspek jasmani dan rohani (Abdullah, 2015). Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam anak usia dini adalah melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kesadaran ketuhanan yang mendalam.

Pembentukan karakter Islami tidak hanya difokuskan pada ranah kognitif, tetapi lebih pada pembiasaan moral dan spiritual yang menanamkan kesadaran ilahiah sejak dini. Dalam konteks ini, orientasi utama pendidikan adalah menumbuhkan potensi iman (*'aqidah*), ibadah (*'ubudiyah*), dan akhlak (*'amaliyyah*). Anak dikenalkan kepada konsep ketuhanan melalui aktivitas yang menyenangkan, seperti doa sebelum belajar, bersyukur, dan berbagi.

Pembentukan karakter Islami juga mencakup pengembangan aspek sosial, emosional, dan spiritual anak. Islam menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan hati. Anak tidak hanya diajarkan apa yang benar, tetapi juga mengapa sesuatu itu benar dalam konteks etika dan moral Islam.

Tujuan pendidikan anak usia dini menurut Al-Ghazali adalah mempersiapkan anak agar memiliki jiwa yang bersih dan akhlak yang luhur. Ia menegaskan pentingnya pendidikan moral sejak kecil karena akhlak yang tertanam sejak dini akan lebih mudah menjadi karakter permanen.

Orientasi pendidikan karakter Islami juga dihubungkan dengan pembentukan identitas diri anak sebagai hamba Allah dan khalifah di

muka bumi. Kesadaran ini mendorong anak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungannya, dan terhadap Allah SWT. Dalam konteks kurikulum, tujuan pembentukan karakter harus terintegrasi dalam setiap aktivitas belajar. Kegiatan bermain, bernyanyi, atau menggambar harus mengandung nilai-nilai kebaikan seperti kesabaran, kejujuran, dan saling menghargai.

Anak usia dini belajar melalui pengamatan dan imitasi. Oleh karena itu, keteladanan pendidik menjadi kunci utama. Rasulullah SAW adalah model utama pendidikan karakter, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Ahzab [33]: 21.

Tujuan pendidikan karakter Islami tidak hanya untuk membentuk perilaku individual, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial. Anak diajak memahami pentingnya keadilan, tolong-menolong, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dalam jangka panjang, pendidikan anak usia dini menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi yang berakhlakul karimah dan mampu menghadapi tantangan modernitas dengan nilai-nilai Islam yang kokoh.

Orientasi pendidikan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-dīn (menjaga agama) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa), yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan kepada penguatan iman dan pembentukan pribadi yang baik. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini tidak boleh sekadar menjadi sarana persiapan akademik menuju sekolah dasar, melainkan juga wahana pembentukan kepribadian Islami yang integral dan menyeluruh.

Secara konseptual, pembentukan karakter Islami anak usia dini menjadi titik awal pembangunan peradaban Islam, karena dari generasi inilah nilai-nilai iman dan akhlak akan diwariskan dan diperkuat dalam masyarakat di masa mendatang.

4. Kurikulum Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Kurikulum pendidikan Islam anak usia dini merupakan rancangan sistematis yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak secara seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dalam kerangka epistemologi Islam, kurikulum harus berpijak pada prinsip *tauhid*, yaitu mengintegrasikan seluruh pengetahuan dengan kesadaran akan keesaan Allah sebagai sumber kebenaran dan tujuan akhir pendidikan (Al-Attas, 2010; Nata, 2012). Kurikulum semacam ini tidak

hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai iman, akhlak, dan kesalehan sosial melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan.

Menurut Hidayat (2018), kurikulum PIAUD harus mencerminkan keseimbangan antara ilmu agama dan pengetahuan umum agar anak dapat memahami hubungan harmonis antara wahyu dan akal. Sementara itu, Saada dan Al-Faraj (2017) menegaskan bahwa pendidikan Islam pada usia dini seharusnya menumbuhkan kesadaran spiritual anak melalui pengalaman langsung, pembiasaan ibadah, serta hubungan emosional dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam anak usia dini tidak hanya menjadi alat pengajaran, tetapi juga instrumen pembentukan karakter dan kesadaran tauhid yang holistik.

Konsep kurikulum ini berbeda dengan pendekatan sekuler yang hanya menekankan aspek kognitif. Dalam pendidikan Islam, kurikulum berfungsi sebagai wahana pembentukan iman dan akhlak melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Dengan demikian, setiap materi harus memiliki nilai edukatif, moral, dan spiritual yang selaras dengan fitrah anak.

Penyusunan kurikulum anak usia dini dalam Islam mengacu pada tahapan perkembangan anak. Aspek keimanan diajarkan melalui pengenalan Tuhan, doa, dan rasa syukur; aspek ibadah melalui praktik sederhana seperti berdoa dan mengucapkan salam; sedangkan aspek akhlak melalui pembiasaan perilaku sopan dan empati.

Kurikulum anak usia dini juga harus memperhatikan prinsip *learning by doing* dalam Islam, di mana anak belajar melalui aktivitas nyata yang melibatkan seluruh pancaindra. Rasulullah SAW sendiri dalam mendidik sahabat sering menggunakan pendekatan praktik langsung yang sesuai dengan karakter manusia belajar melalui pengalaman.

Secara struktural, kurikulum pendidikan Islam anak usia dini dapat dibagi ke dalam empat bidang utama: pengembangan nilai-nilai keagamaan dan moral, pengembangan sosial-emosional, pengembangan kognitif, dan pengembangan fisik-motorik. Keempatnya harus berorientasi pada nilai-nilai Qur'ani.

Kurikulum tersebut perlu dilengkapi dengan kegiatan tematik yang berpusat pada kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, tema "ciptaan

Allah” dapat dikembangkan menjadi kegiatan mengenal alam, hewan, dan tumbuhan sambil menanamkan rasa syukur atas keindahan ciptaan-Nya.

Salah satu ciri khas kurikulum Islam adalah keterpaduan antara ilmu dan amal. Setiap pengetahuan yang diperoleh anak harus diiringi dengan pembiasaan perilaku sesuai nilai yang diajarkan. Misalnya, setelah mengenal konsep “kebersihan sebagian dari iman,” anak dibiasakan untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan mainan.

Kurikulum juga harus fleksibel dan kontekstual dengan budaya lokal. Islam menghargai keberagaman selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, nilai-nilai lokal seperti gotong royong atau sopan santun dapat menjadi sarana efektif internalisasi ajaran Islam. Dalam perspektif filosofis, kurikulum berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik pendidikan Islam. Ia menjadi panduan bagi guru dan orang tua dalam mengarahkan pertumbuhan anak secara holistik menuju insan kamil, manusia ideal dalam pandangan Islam.

Peran lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum juga sangat penting. Lembaga harus mengadopsi pendekatan integratif antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai wahyu, sehingga anak tidak terjebak dalam dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, kurikulum harus memberi ruang bagi pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan harian. Rutinitas seperti doa bersama, berbagi makanan, dan menghormati guru menjadi bagian integral dari proses kurikulum Islam anak usia dini.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam anak usia dini harus menjadi sistem yang menyatukan aspek pengetahuan, nilai, dan keterampilan, sehingga membentuk fondasi keislaman yang kokoh dan berkelanjutan dalam diri anak.

5. Peran Guru dan Orang Tua sebagai Pendidik Utama

Guru dan orang tua dalam perspektif pendidikan Islam menempati posisi sentral sebagai pendidik utama bagi anak usia dini. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahih: *“Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi”* — setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829). Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan bersifat moral dan spiritual, bukan sekadar administratif. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan

pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai moral, serta spiritualitas anak (Al-Ghazali, 2005; Nata, 2012).

Guru sebagai perpanjangan tangan orang tua di lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak melalui keteladanan (*uswah hasanah*). Al-Attas (2010) menekankan bahwa tugas pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing jiwa anak agar mengenal kebenaran dan keindahan Ilahi. Di sisi lain, Bronfenbrenner (2005) melalui teori ekologi perkembangan manusia menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara utuh. Dengan demikian, kolaborasi guru dan orang tua dalam pendidikan Islam bukan hanya aspek sosial, melainkan merupakan amanah ilahiah untuk membentuk generasi yang saleh dan berakhlak mulia.

Guru berperan sebagai *murabbi*, yakni pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan spiritualitas peserta didik. Seorang guru dalam pendidikan Islam anak usia dini harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam perilaku, tutur kata, dan kesabaran. Orang tua, di sisi lain, adalah pendidik pertama dan utama. Rumah menjadi madrasah awal bagi anak. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial pertama kali dipelajari anak melalui perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga menjadi prasyarat keberhasilan pendidikan anak usia dini.

Keterpaduan antara pendidikan di rumah dan di lembaga pendidikan sangat penting agar anak memperoleh konsistensi nilai. Perbedaan prinsip antara rumah dan sekolah dapat menyebabkan disonansi moral yang membingungkan anak. Guru dan orang tua harus memiliki visi pendidikan yang sama, yaitu pembentukan karakter Islami yang berakar pada tauhid dan akhlak mulia. Komunikasi intensif antara keduanya diperlukan untuk memastikan kesinambungan pendidikan.

Secara epistemologis, peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak usia dini bersifat kolaboratif. Guru menjadi fasilitator pembelajaran formal, sementara orang tua memperkuatnya melalui praktik dan pembiasaan di rumah. Guru yang efektif dalam konteks pendidikan Islam anak usia dini adalah mereka yang mampu mengajarkan nilai dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pendidik yang

lembut dan penuh perhatian, suatu model pedagogis yang harus diteladani dalam pendidikan modern.

Selain memberikan keteladanan, guru dan orang tua juga berfungsi sebagai pengarah moral. Mereka harus mampu mengoreksi perilaku anak dengan cara yang bijak dan mendidik, tanpa kekerasan atau ancaman yang dapat menimbulkan trauma. Dalam konteks kelembagaan, sekolah perlu menyediakan wadah bagi keterlibatan orang tua melalui kegiatan parenting education, sehingga mereka memahami prinsip dan metode pendidikan Islam anak usia dini secara komprehensif.

Kedua figur ini juga menjadi agen spiritual yang menanamkan nilai religius melalui rutinitas sederhana seperti doa, dzikir, dan membaca kisah nabi. Hal ini menumbuhkan suasana religius dalam keseharian anak. Dari sudut pandang aksiologi, guru dan orang tua adalah representasi nyata dari nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan pada anak. Ketika mereka menunjukkan perilaku adil, sabar, dan jujur, maka anak akan menirunya secara alami.

Dengan demikian, sinergi antara guru dan orang tua merupakan fondasi utama keberhasilan pendidikan Islam anak usia dini. Mereka berdua tidak hanya bertanggung jawab pada aspek intelektual anak, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan moralitas Islami yang akan melekat seumur hidup.

6. Metode dan Pendekatan dalam Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Metode pendidikan Islam anak usia dini berorientasi pada prinsip fitrah, kasih sayang, dan keteladanan. Dalam Islam, metode bukan hanya cara teknis, melainkan juga cerminan nilai-nilai etis dan spiritual yang menuntun pendidik dalam membimbing anak. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam penerapan metode pendidikan yang humanis, komunikatif, dan berorientasi pada perkembangan individu.

Salah satu metode utama dalam pendidikan Islam adalah *uswah hasanah* (keteladanan). Anak usia dini belajar melalui imitasi, sehingga perilaku guru dan orang tua menjadi media pembelajaran paling efektif. Sikap santun, disiplin, dan jujur yang dicontohkan pendidik lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan instruksi verbal.

Metode kedua adalah pembiasaan (*ta'wīd*). Islam menekankan pentingnya kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus agar menjadi karakter. Misalnya, mengucapkan salam, berdoa sebelum makan, atau

membantu teman. Pembiasaan harus dilakukan dalam suasana gembira agar nilai-nilai itu tertanam dengan sukarela.

Selain itu, metode kisah (*qaṣaṣ*) memiliki peran penting. Anak-anak sangat menyukai cerita, dan Islam memiliki kekayaan kisah edukatif dalam Al-Qur'an dan hadis. Cerita tentang kejujuran Nabi Muhammad kecil, kesabaran Nabi Ayyub, atau kasih sayang Nabi Ibrahim dapat menjadi media internalisasi nilai moral yang mendalam.

Metode bermain edukatif (*learning through play*) juga sejalan dengan prinsip Islam yang menghargai masa kanak-kanak sebagai masa eksplorasi. Permainan yang dirancang dengan nilai Islami dapat menumbuhkan kerjasama, empati, dan rasa tanggung jawab sosial.

Pendekatan tematik integratif dapat digunakan untuk mengaitkan pengetahuan agama dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, tema "air" digunakan untuk mengenalkan konsep bersuci dan kebersihan dalam Islam. Pendekatan ini membantu anak memahami keterhubungan antara ilmu dan agama. Dalam konteks modern, pendekatan multi-sensori dan kontekstual diperlukan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakter anak. Islam mengakui peran pancaindra sebagai sarana memperoleh ilmu. Oleh karena itu, kegiatan seperti menggambar, mendengar lagu islami, dan bereksperimen sederhana dapat menjadi sarana efektif pembelajaran Islami.

Metode reward and reinforcement dalam Islam juga dikenal, namun harus diorientasikan pada pembentukan motivasi intrinsik, bukan sekadar imbalan materi. Anak diajak memahami bahwa berbuat baik adalah bagian dari ibadah yang dicintai Allah. Selanjutnya Metode dialog (*hiwār*) juga dapat diterapkan secara sederhana. Anak diajak bertanya dan berdiskusi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Islam yang menumbuhkan akal kritis sejak dini.

Pendidik Islam harus menghindari metode represif seperti ancaman atau hukuman fisik. Islam mendorong pendekatan yang lemah lembut dan bijaksana, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang tidak pernah mencela anak-anak, melainkan memberi arahan dengan kasih sayang. Keseluruhan metode tersebut mencerminkan bahwa pendidikan Islam anak usia dini harus bersifat holistik, menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dengan demikian, metode pendidikan Islam anak usia dini bukan hanya sekumpulan

strategi pedagogis, tetapi sistem nilai yang menanamkan tauhid, membangun karakter, dan mengembangkan potensi anak sesuai fitrah penciptaannya.

7. Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Indonesia

Lembaga pendidikan Islam anak usia dini di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk seperti Raudhatul Athfal (RA), Taman Kanak-kanak (TK) Islam, PAUD berbasis masjid, dan kelompok bermain Islami. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai sarana pembentukan fondasi keimanan, moralitas, dan kemandirian anak sejak usia dini. Menurut Azra (2012), keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan formal anak usia dini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual umat Islam terhadap generasi penerus.

Dalam perspektif pendidikan Islam klasik, pembinaan anak sejak dini merupakan tahapan penting dalam menjaga *fitrah* manusia agar tetap lurus dan sesuai dengan nilai tauhid (Al-Ghazali, 2005). Sementara itu, pendekatan modern menekankan pentingnya lingkungan pendidikan yang holistik dan kontekstual. Menurut Noddings (2013), pendidikan anak usia dini harus memadukan kasih sayang (*caring education*) dengan pembentukan karakter moral. Dengan demikian, lembaga-lembaga seperti RA dan TK Islam tidak hanya berperan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membentuk identitas spiritual dan sosial anak sebagai generasi Muslim yang berakhlak dan berdaya saing global (Nizar, 2019; Hasanah, 2020).

Secara historis, lembaga semacam ini telah ada sejak masa awal Islam di Nusantara, di mana surau dan langgar berperan sebagai pusat pendidikan informal bagi anak-anak. Tradisi tersebut menjadi cikal bakal pendidikan Islam anak usia dini modern.

RA dan TK Islam berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, sedangkan PAUD Islam banyak diinisiasi oleh masyarakat dan lembaga keagamaan. Pola ini menunjukkan karakter pendidikan Islam di Indonesia yang berbasis komunitas dan partisipatif. Ciri khas lembaga ini adalah integrasi kurikulum nasional dengan nilai-nilai Islam. Anak tidak hanya belajar membaca, berhitung, dan berbahasa, tetapi juga mengenal doa-doa harian, huruf hijaiyah, serta nilai akhlak mulia.

Selain fungsi edukatif, lembaga-lembaga ini juga memiliki peran sosial. Mereka menjadi wadah bagi orang tua untuk memperkuat solidaritas keluarga muslim dan membentuk jaringan sosial berbasis nilai Islam. Dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam anak usia dini menerapkan sistem pembelajaran yang ramah anak, interaktif, dan kontekstual. Guru dituntut kreatif dalam mengaitkan aktivitas bermain dengan nilai-nilai keislaman.

Beberapa lembaga juga mulai menerapkan pendekatan Montessori Islami, yang menekankan kebebasan anak dalam belajar sambil tetap berlandaskan nilai spiritual. Pendekatan ini terbukti efektif mengembangkan kemandirian dan disiplin anak. Kelembagaan pendidikan Islam anak usia dini turut memperkuat visi nasional pembangunan karakter bangsa. Melalui pembentukan kepribadian Islami sejak dini, lembaga ini berkontribusi dalam mencetak generasi berakhlak dan berdaya saing.

Namun demikian, lembaga pendidikan Islam anak usia dini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga pendidik profesional, sarana prasarana, dan kualitas manajemen. Upaya peningkatan mutu lembaga dapat dilakukan melalui pelatihan guru, penguatan kurikulum berbasis riset, serta kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Lembaga ini dalam konteks globalisasi perlu mengadopsi inovasi teknologi tanpa kehilangan identitas keislaman. Digitalisasi pembelajaran dapat memperluas akses, namun tetap harus dikendalikan dengan prinsip etika Islam. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam anak usia dini di Indonesia berperan strategis sebagai fondasi sistem pendidikan nasional yang religius, humanis, dan berkarakter.

8. Tantangan dan Prospek Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Era Modern

Pendidikan Islam anak usia dini menghadapi tantangan besar di era modern yang ditandai dengan percepatan teknologi, perubahan sosial, dan penetrasi budaya global. Tantangan utama terletak pada upaya mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah arus sekularisasi dan komersialisasi pendidikan.

Perubahan gaya hidup digital memengaruhi pola asuh dan kebiasaan belajar anak. Anak-anak kini lebih banyak berinteraksi dengan layar dibanding dengan guru dan orang tua. Kondisi ini menuntut inovasi

pendidikan Islam yang mampu mengimbangi pengaruh media dengan pembelajaran berbasis nilai. Selain itu, globalisasi budaya membawa tantangan dalam mempertahankan identitas keislaman. Anak-anak mudah terpapar nilai-nilai hedonisme dan individualisme yang bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.

Tantangan lain adalah komersialisasi lembaga pendidikan anak usia dini yang cenderung menekankan aspek prestise sosial dibanding pembentukan karakter Islami. Hal ini dapat menggeser esensi pendidikan Islam menjadi sekadar layanan jasa. Dari sisi kurikulum, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara pendekatan tradisional dan inovatif. Kurikulum Islam anak usia dini harus adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip tauhid dan moralitas.

Pendidikan Islam anak usia dini juga menghadapi tantangan profesionalisme pendidik. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi pedagogik Islami yang memadai. Penguatan kapasitas guru menjadi prioritas utama untuk menjaga kualitas pembelajaran. Meskipun demikian, prospek pendidikan Islam anak usia dini di Indonesia tetap cerah. Kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya pendidikan dini berbasis Islam semakin meningkat.

Kemajuan teknologi juga dapat menjadi peluang besar. Platform digital dapat digunakan untuk memperkaya media pembelajaran Islami interaktif yang menarik bagi anak-anak. Selain itu, kerja sama antara lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan organisasi internasional dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di tingkat global.

Paradigma pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan spiritual dan intelektual menjadikannya relevan di tengah krisis nilai global. Model pendidikan ini menawarkan solusi bagi pembentukan generasi yang berakhlak, cerdas, dan adaptif. Prospek masa depan pendidikan Islam anak usia dini bergantung pada kemampuannya berinovasi tanpa kehilangan ruh keislaman. Dengan fondasi tauhid dan moralitas, pendidikan Islam dapat memimpin transformasi pendidikan manusia di abad digital.

Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan kompleks, pendidikan Islam anak usia dini memiliki peluang besar untuk menjadi

pilar utama pembentukan peradaban Islam yang berkeadaban, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

B. Pendidikan Anak Islami

1. Hakikat Pendidikan Anak dalam Islam

Anak-anak adalah individu yang berada pada fase perkembangan setelah masa usia dini hingga menjelang remaja. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kematangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral, namun masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa dalam proses pertumbuhannya. Dalam perspektif psikologi perkembangan, Piaget (2001) menjelaskan bahwa anak pada usia ini memasuki tahap *operasional konkret*, di mana mereka mulai berpikir logis terhadap hal-hal yang nyata, tetapi belum mampu berpikir abstrak secara mendalam.

Masa anak-anak dalam pandangan Islam merupakan periode penanaman nilai dan pembentukan karakter dasar yang akan menjadi pondasi keimanan di masa remaja dan dewasa. Ibn Khaldun (2005) menegaskan bahwa pendidikan pada usia anak harus dimulai dengan pembiasaan moral dan disiplin spiritual sebelum diberikan ilmu rasional. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Nata (2016) dan al-Abrasyi (2013) bahwa anak merupakan amanah Allah yang perlu dibimbing dengan kasih sayang dan keteladanan agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia.

Selanjutnya pendidikan anak dalam Islam merupakan proses integral yang bertujuan membentuk kepribadian Muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Hakikat pendidikan ini tidak hanya terbatas pada *transfer of knowledge*, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, moral, sosial, dan emosional anak sesuai dengan *fitrah ilahiah* yang dibawanya sejak lahir. Menurut Al-Attas (2018), pendidikan Islam (*ta'dib*) harus menanamkan adab dan kebijaksanaan, karena inti dari pendidikan bukan sekadar mencerdaskan akal, tetapi menuntun jiwa menuju pengenalan terhadap Allah.

Pendidikan anak dalam konteks pedagogi modern sejalan dengan pandangan Montessori (2017) yang menekankan pentingnya perkembangan holistik anak dalam lingkungan yang mendukung spiritualitas dan moralitas. Hal ini diperkuat oleh Nata (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam harus diarahkan untuk membentuk

manusia seutuhnya—yang memiliki keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, pendidikan anak dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademik, tetapi lebih jauh pada pencapaian kepribadian yang harmonis antara iman, ilmu, dan amal saleh (Hashim & Langgulung, 2008).

Anak dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan agar tumbuh sesuai dengan potensi kebaikan yang telah dianugerahkan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

Konsep pendidikan anak Islami tidak bisa dipisahkan dari nilai tauhid, karena seluruh aspek pembelajaran diarahkan untuk menanamkan kesadaran akan keesaan Allah sebagai sumber nilai dan kebenaran. Tanpa pondasi tauhid, pendidikan akan kehilangan arah dan makna spiritualnya. Islam memandang anak sebagai subjek pendidikan, bukan objek semata. Artinya, anak memiliki hak untuk berkembang secara utuh dan diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menegaskan penghormatan Islam terhadap harkat dan martabat anak.

Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak, dengan mencontohkan interaksi yang penuh kasih, kelembutan, dan penghargaan terhadap potensi anak. Keteladanan beliau menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat formal, melainkan juga berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Hakikat pendidikan anak dalam Islam juga mencakup keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Anak tidak hanya disiapkan menjadi insan yang sukses secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di muka bumi.

Selain itu, pendidikan anak dalam Islam bersifat preventif dan kuratif. Preventif dalam arti mencegah anak dari pengaruh negatif, dan kuratif dalam arti memperbaiki perilaku yang menyimpang melalui bimbingan dan kasih sayang.

Tujuan akhir pendidikan anak Islami adalah terbentuknya insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara akal, hati, dan amal. Ini berbeda dengan konsep pendidikan sekuler yang hanya menekankan kecerdasan intelektual tanpa menumbuhkan kesadaran

spiritual. Pendidikan anak dalam Islam juga bersifat berkelanjutan. Prosesnya dimulai sejak masa kandungan, sebagaimana disarankan dalam hadis agar orang tua memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada janin, hingga masa remaja di mana penanaman nilai diperkuat melalui tanggung jawab moral.

Hakikat pendidikan anak Islami menempatkan keluarga sebagai basis utama, sementara sekolah dan masyarakat menjadi pendukung. Ketiganya harus bersinergi agar nilai-nilai Islam tertanam secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hakikat pendidikan anak Islami menjadi semakin penting untuk menangkal arus globalisasi yang sering mengikis nilai spiritual dan moral anak. Pendidikan Islami hadir sebagai sistem nilai yang menegaskan identitas dan integritas kepribadian anak. Dengan demikian, pendidikan anak Islami bukan sekadar kegiatan akademis, tetapi merupakan ibadah yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan moral yang mendalam. Ia adalah jalan menuju terbentuknya generasi Qur'ani yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan iman dan ilmu.

2. Nilai-Nilai Dasar dalam Pendidikan Anak Islami

Nilai-nilai dasar pendidikan anak Islami berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral yang membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi insan bertakwa, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Nilai *pertama* adalah tauhid, yakni pengakuan akan keesaan Allah SWT. Tauhid menjadi dasar seluruh dimensi kehidupan anak, karena mengajarkan makna ketaatan, penghambaan, dan ketundukan kepada Allah dalam setiap aktivitas. Nilai *kedua* adalah akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*). Akhlak dalam Islam mencakup hubungan dengan Allah (hablun minallah), sesama manusia (hablun minannas), dan lingkungan. Anak diajarkan untuk berbuat baik, menghormati orang tua, dan menjaga alam sekitar.

Ketiga, Nilai ilmu ('ilm) juga menjadi unsur penting dalam pendidikan anak Islami. Islam menempatkan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Anak harus didorong untuk mencintai proses belajar sebagai bagian dari ibadah. *Keempat*, Nilai amanah dan tanggung jawab merupakan bagian integral dari pendidikan anak Islami. Anak dilatih untuk jujur, disiplin, dan dapat

dipercaya sejak dini agar tumbuh menjadi individu yang berintegritas dalam kehidupan sosialnya.

Selain itu, *kelima*, nilai ukhuwah Islamiyah perlu ditanamkan untuk membentuk karakter sosial yang peduli dan inklusif. Anak diajak berempati terhadap teman, menghormati perbedaan, dan menjalin kerja sama dalam kebaikan. *Keenam*, Nilai sabar dan syukur juga penting untuk mengajarkan anak bagaimana menghadapi keberhasilan maupun kegagalan dengan sikap positif. Dua nilai ini membentuk ketangguhan spiritual yang menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika kehidupan.

Ketujuh, Nilai adil dan *tawazun* (keseimbangan) mengajarkan anak untuk bersikap proporsional dalam mengambil keputusan. Anak dididik untuk tidak berlebihan dan selalu menempatkan segala sesuatu sesuai kadarnya. Pendidikan anak Islami juga menanamkan *kedelapan*, nilai kemandirian (*istiqlal*), agar anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mampu bertanggung jawab atas pilihannya. Nilai ini menjadi penting di tengah budaya instan dan ketergantungan teknologi modern.

Semua nilai dasar ini tidak dapat diajarkan melalui teori semata, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan orang tua, guru, dan lingkungan. Nilai yang diinternalisasikan melalui praktik nyata akan lebih efektif membentuk karakter anak. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, nilai-nilai pendidikan anak Islami menjadi filter moral dan spiritual yang menjaga anak dari degradasi moral akibat budaya global yang materialistik. Dengan demikian, nilai-nilai dasar pendidikan anak Islami adalah sistem yang menyeluruh dan saling melengkapi, yang berfungsi sebagai kompas moral bagi anak dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

3. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Islami

Orang tua memiliki peran sentral dalam pendidikan anak Islami karena mereka merupakan pendidik pertama dan utama. Rumah tangga merupakan *madrasah pertama* bagi anak, tempat di mana nilai, moral, dan kebiasaan dasar terbentuk sejak usia dini. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga berperan sebagai lingkungan utama yang menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab pendidikan anak dalam keluarga bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan kewajiban agama yang bersumber dari perintah Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829).

Hadis ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam pendidikan bersifat moral dan spiritual. Mereka bertanggung jawab tidak hanya atas kesejahteraan fisik anak, tetapi juga atas pembentukan iman dan akhlakunya. Menurut al-Ghazali (2005), keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar mengenal baik dan buruk melalui keteladanan orang tua. Pandangan ini diperkuat oleh Hasan (2018) dan Jalaluddin (2019), yang menyatakan bahwa pola pendidikan dalam rumah tangga menentukan arah kepribadian anak di masa depan.

Peran pertama orang tua adalah memberikan keteladanan (*uswah hasanah*). Anak-anak meniru perilaku orang tuanya lebih daripada mendengarkan nasihatnya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi model akhlak mulia dalam tutur kata, sikap, dan ibadah. Kedua, orang tua berperan dalam menanamkan aqidah sejak dini. Anak harus diajarkan mengenal Allah, Rasul, dan dasar-dasar keimanan dengan cara yang lembut dan sesuai tingkat pemahamannya.

Peran ketiga adalah membangun kebiasaan ibadah, seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Pembiasaan yang konsisten akan membentuk kesadaran spiritual yang kuat. Selain itu, orang tua harus berperan keempat sebagai pendamping emosional. Anak memerlukan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk tumbuh secara psikologis sehat. Islam menekankan pentingnya kelembutan dalam mendidik anak.

Orang tua juga berfungsi sebagai pengontrol lingkungan anak, baik fisik maupun digital. Dalam era teknologi, pengawasan terhadap konten yang dikonsumsi anak menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Pendidikan akhlak tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi yang terbuka dan dialogis mendorong anak untuk berani bertanya dan berpikir kritis tanpa kehilangan adab.

Selain itu, orang tua harus memberikan pendidikan ekonomi Islami, seperti menanamkan nilai qana'ah, sedekah, dan amanah dalam harta. Nilai-nilai ini menumbuhkan kesadaran sosial dan menghindarkan anak dari sifat materialistis. Dalam konteks sosial modern, peran orang tua juga meluas sebagai agen moderasi beragama. Mereka bertugas

menanamkan nilai Islam yang toleran, menghargai perbedaan, dan menolak ekstremisme.

Pendidikan anak Islami menuntut sinergi antara ayah dan ibu. Keduanya memiliki peran saling melengkapi: ayah sebagai figur otoritas dan perlindungan, ibu sebagai sumber kasih sayang dan pembentuk karakter awal. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan anak Islami sangat ditentukan oleh kualitas peran orang tua dalam menanamkan nilai, membimbing akhlak, dan menciptakan lingkungan rumah yang Qur'ani dan penuh cinta.

4. Strategi Pembentukan Karakter Islami pada Anak

Pembentukan karakter Islami pada anak merupakan inti dari pendidikan Islam, karena karakter menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai keimanan. Strategi pendidikan Islam menekankan pentingnya membangun kepribadian yang berakhlak, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran moral tinggi sejak dini.

Langkah pertama dalam strategi pembentukan karakter adalah penanaman nilai (internalisasi) melalui keteladanan. Anak meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, sehingga teladan dari guru dan orang tua menjadi kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai Islami. Langkah kedua adalah pembiasaan (*habituation*). Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab tidak dapat tertanam hanya melalui nasihat, tetapi harus dilatih secara terus-menerus melalui rutinitas harian.

Langkah ketiga adalah pemberian nasihat (*mau'izhah*) yang lembut dan persuasif. Rasulullah SAW sering menggunakan nasihat dengan bahasa yang penuh hikmah, sehingga mampu menyentuh hati dan menggugah kesadaran moral anak. Strategi berikutnya adalah penguatan motivasi religius (*targhīb wa tarhīb*), yaitu dorongan melakukan kebaikan dengan mengingat pahala dan peringatan terhadap akibat keburukan. Prinsip ini membentuk kesadaran spiritual yang mendorong anak untuk berbuat baik karena Allah, bukan karena tekanan eksternal.

Metode kisah dan teladan para nabi juga sangat efektif dalam pembentukan karakter. Kisah Nabi Yusuf tentang kesabaran, Nabi Ibrahim tentang ketaatan, dan Nabi Muhammad tentang kejujuran memberikan model konkret bagi anak untuk diikuti. Selain itu, penting diterapkan strategi partisipatif, di mana anak dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan aksi lingkungan.

Pengalaman langsung membentuk sikap tanggung jawab sosial dan empati.

Pembentukan karakter dalam konteks sekolah Islam dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum dengan nilai-nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, pelajaran matematika bisa dikaitkan dengan kejujuran dalam perhitungan dan tanggung jawab terhadap tugas. Evaluasi karakter tidak boleh dilakukan hanya melalui tes kognitif, tetapi juga melalui observasi perilaku sehari-hari. Guru dan orang tua perlu berkolaborasi dalam menilai perkembangan moral anak secara menyeluruh.

Strategi pembentukan karakter juga harus memperhatikan aspek psikologis anak. Pendidikan Islam menekankan kelembutan dan pendekatan empatik agar nilai-nilai moral tidak dipaksakan, tetapi tumbuh secara alami dari kesadaran diri. Dalam era globalisasi, strategi pembentukan karakter Islami menjadi lebih menantang karena anak dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya dan media. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus berbasis pada spiritualitas dan pemahaman kontekstual agar tetap relevan. Dengan demikian, pembentukan karakter Islami bukan sekadar proses moralistik, melainkan proses spiritual yang membentuk manusia berakhlak mulia, beriman kokoh, dan siap berkontribusi bagi masyarakat dan peradaban.

5. Kurikulum dan Materi Pendidikan Anak Islami

Kurikulum pendidikan anak Islami harus disusun secara komprehensif dan kontekstual, agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan perkembangan anak. Kurikulum dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar daftar mata pelajaran, tetapi merupakan rancangan nilai, tujuan, dan pengalaman belajar yang diarahkan untuk membentuk kepribadian Islami secara menyeluruh. Menurut Al-Attas (1980), pendidikan Islam harus menanamkan adab dan kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah, alam, dan sesama. Sementara itu, Ramayulis (2018) menegaskan bahwa kurikulum anak hendaknya mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak—spiritual, moral, sosial, kognitif, dan emosional—berdasarkan nilai-nilai tauhid. Dalam konteks kontemporer, Hasan (2020) menambahkan bahwa kurikulum Islami perlu dirancang secara kontekstual agar relevan

dengan tantangan zaman tanpa kehilangan landasan wahyu dan tradisi keilmuan Islam.

Prinsip utama penyusunan kurikulum pendidikan anak Islami adalah integrasi antara ilmu dunia dan agama. Anak diajarkan bahwa semua pengetahuan bersumber dari Allah SWT dan harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Struktur kurikulum pendidikan anak Islami biasanya mencakup tiga komponen utama: pembelajaran tauhid, ibadah, dan akhlak. Ketiga aspek ini menjadi pondasi spiritual yang mengarahkan seluruh kegiatan belajar anak.

Selain itu, kurikulum juga harus mencakup aspek kognitif, sosial, dan emosional agar perkembangan anak berlangsung seimbang. Misalnya, kegiatan belajar bisa dirancang untuk menumbuhkan kerja sama, kreativitas, dan rasa ingin tahu. Materi pendidikan anak Islami mencakup pengenalan Allah dan ciptaan-Nya, kisah para nabi, adab harian, dan doa-doa pendek. Materi ini disampaikan dengan metode yang sesuai dengan tahap usia anak agar mudah dipahami dan diinternalisasi.

Kurikulum juga perlu menanamkan nilai-nilai literasi Islami seperti membaca Al-Qur'an, mengenal huruf hijaiyah, serta hafalan surat-surat pendek yang diintegrasikan dalam kegiatan bermain. Pendidikan sains dan sosial pun dapat dimasukkan dalam kurikulum Islami, dengan pendekatan teosentris. Misalnya, pembelajaran tentang alam dikaitkan dengan konsep penciptaan dan kebesaran Allah.

Aspek penting lainnya adalah kurikulum harus responsif terhadap perkembangan zaman. Anak perlu dikenalkan pada teknologi digital dan literasi media, tetapi diarahkan agar menggunakan teknologi secara islami dan etis. Kurikulum pendidikan anak Islami juga harus fleksibel agar bisa disesuaikan dengan kondisi lokal dan budaya masyarakat. Nilai Islam bersifat universal, namun penerapannya harus kontekstual agar tetap relevan dan diterima anak. Dalam penyusunan kurikulum, kolaborasi antara pendidik, ulama, dan ahli psikologi anak diperlukan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang seimbang antara aspek spiritual dan pedagogik.

Kurikulum pendidikan anak Islami bukan sekadar alat pendidikan formal, melainkan instrumen untuk menumbuhkan kesadaran religius sejak dini. Ia harus mampu menuntun anak memahami makna ibadah, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kurikulum pendidikan anak Islami berfungsi sebagai sistem nilai yang menuntun

anak menuju kepribadian yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu menjadi generasi penerus peradaban Islam.

6. Inovasi Metodologi Pendidikan Anak Islami di Era Digital

Era digital membawa perubahan signifikan terhadap pola pembelajaran anak, baik dalam cara memperoleh informasi maupun dalam interaksi sosialnya. Oleh karena itu, inovasi metodologi dalam pendidikan anak Islami menjadi keniscayaan agar nilai-nilai Islam tetap dapat ditanamkan secara efektif di tengah perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi.

Pendidikan Islam harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu membentuk karakter anak tanpa kehilangan ruh spiritualnya. Dalam konteks ini, metodologi pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi digital seperti media interaktif, aplikasi Islami, dan video edukatif sebagai sarana penguatan pembelajaran nilai dan moral (Anwar, 2020). Selain itu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam harus diarahkan untuk mendukung internalisasi nilai-nilai tauhid dan akhlak, bukan sekadar hiburan. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital secara bijak dapat memperkaya pengalaman belajar anak sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek intelektual dan spiritual.

Inovasi pertama adalah penerapan pembelajaran berbasis teknologi nilai (*value-based learning*), yaitu pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pesan moral dan keislaman, bukan sekadar hiburan. Inovasi kedua adalah gamifikasi Islami, yaitu pengemasan pembelajaran dalam bentuk permainan edukatif yang menanamkan nilai ibadah, doa, dan akhlak dengan cara yang menyenangkan dan interaktif.

Selain itu, augmented reality (AR) dapat digunakan untuk mengenalkan kisah para nabi atau sejarah Islam dalam bentuk visual yang menarik. Hal ini membantu anak memahami nilai-nilai spiritual melalui pengalaman multisensori. Metode flipped learning Islami juga mulai dikembangkan, di mana anak belajar materi di rumah melalui video Islami dan memperdalam pemahaman melalui diskusi di kelas bersama guru dan teman-teman. Selanjutnya penggunaan podcast dan storytelling digital dengan konten Islami dapat memperkaya pendidikan karakter anak. Cerita-cerita Nabi atau hikmah dari hadis bisa disampaikan dalam format audio yang mudah diakses.

Namun, inovasi metodologi digital harus disertai pengawasan ketat. Guru dan orang tua perlu memastikan bahwa konten yang digunakan bebas dari pengaruh nilai sekuler atau ideologi yang bertentangan dengan Islam. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi mengarahkan penggunaannya agar membawa manfaat dan keberkahan. Inovasi metodologi harus tetap berlandaskan nilai tauhid dan akhlak.

Inovasi digital juga dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Melalui aplikasi daring, guru dapat melaporkan perkembangan spiritual dan akademik anak secara real-time. Dengan demikian, era digital justru membuka peluang besar untuk memperkuat pendidikan anak Islami jika dikelola dengan bijak dan berlandaskan nilai Qur'ani. Pendidikan anak Islami di era digital harus menjadi harmoni antara teknologi dan spiritualitas, antara kemajuan dan nilai, agar melahirkan generasi muslim cerdas digital sekaligus berakhlak mulia.

7. Tantangan dan Prospek Pendidikan Anak Islami di Masa Depan

Pendidikan anak Islami menghadapi tantangan besar di masa depan yang ditandai dengan krisis moral global, percepatan perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat modern. Menurut Al-Attas (2018), krisis moral yang melanda dunia modern berakar dari hilangnya adab (loss of adab), sehingga pendidikan Islam harus berperan dalam mengembalikan kesadaran etis dan spiritual manusia. Selain itu, Hidayatullah (2020) menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut pembaruan paradigma pendidikan anak agar tetap relevan tanpa kehilangan prinsip tauhid dan akhlak. Sementara itu, menurut Nata (2019), perubahan sosial yang cepat dapat menggeser sistem nilai keluarga dan masyarakat, sehingga pendidikan Islam harus menjadi benteng moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan global tersebut.

Tantangan pertama adalah sekularisasi nilai, di mana pendidikan cenderung memisahkan antara ilmu dan moral, antara dunia dan akhirat. Hal ini mengancam integritas pendidikan Islam yang bersifat holistik. Tantangan kedua adalah pengaruh budaya global yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hedonisme, individualisme,

dan relativisme moral. Anak perlu dibentengi dengan nilai Islam agar tidak kehilangan jati diri.

Tantangan berikutnya adalah komersialisasi pendidikan yang menggeser orientasi pendidikan dari ibadah menjadi industri. Hal ini dapat menurunkan nilai keikhlasan dan semangat pengabdian dalam mendidik anak. Selain itu, krisis keteladanan di lingkungan keluarga dan masyarakat turut memperburuk moralitas anak. Pendidikan Islami perlu memperkuat kembali peran teladan sebagai model utama pembentukan karakter.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi pendidikan anak Islami untuk menjadi solusi atas krisis moral global melalui pendekatan spiritual yang menyejukkan. Prospek pendidikan anak Islami di masa depan terletak pada kemampuannya untuk berinovasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Integrasi ilmu, iman, dan amal akan membuat pendidikan Islam tetap relevan sepanjang zaman.

Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan Islam berkualitas, bahkan hingga ke daerah terpencil, melalui platform digital berbasis Qur'ani. Pendidikan anak Islami berpotensi menjadi model pendidikan global yang menyeimbangkan rasionalitas dan spiritualitas. Dunia membutuhkan paradigma pendidikan yang menumbuhkan empati, etika, dan keberlanjutan.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan anak Islami yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan strategi yang tepat, pendidikan anak Islami dapat melahirkan generasi muslim yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan anak Islami di masa depan diharapkan menjadi fondasi peradaban Islam modern — peradaban yang mengedepankan ilmu, iman, dan akhlak sebagai kekuatan utama membangun kemanusiaan.

C. Pendidikan Remaja Islami

1. Karakteristik Psikologis Remaja dalam Perspektif Islam

Remaja adalah fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, masa remaja disebut sebagai *fase taklif*, yakni ketika

seseorang mulai dibebani tanggung jawab syariat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya masa ini dengan perintah untuk menjaga pandangan, menahan hawa nafsu, dan memperkuat keimanan (QS. An-Nur [24]: 30–31). Fase ini menjadi titik krusial pembentukan karakter dan orientasi hidup.

Secara psikologis, remaja mengalami konflik identitas sebagaimana dijelaskan oleh Erik Erikson dalam teori *identity vs. role confusion*. Dalam konteks Islam, pencarian jati diri ini diarahkan agar menemukan identitas spiritual yang berlandaskan iman dan takwa. Ketika proses ini gagal dibimbing, remaja dapat kehilangan arah dan mudah terpengaruh nilai-nilai hedonistik (Santrock, 2018).

Pendidikan Islam berperan penting untuk menyeimbangkan perkembangan intelektual dan emosional remaja. Nilai-nilai Qurani dan teladan Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam membentuk ketenangan jiwa, empati, dan kontrol diri. Menurut Al-Ghazali (2005), keseimbangan antara akal dan nafsu merupakan kunci kebahagiaan jiwa bagi manusia, termasuk remaja.

Guru, orang tua, dan lembaga pendidikan perlu memahami psikologi remaja secara komprehensif agar pendekatan yang digunakan tidak bersifat indoktrinatif, tetapi dialogis dan inspiratif. Remaja perlu diajak untuk berpikir kritis dan merefleksikan nilai iman dalam konteks realitas sosial mereka (Hurlock, 2015).

Dengan demikian, karakteristik psikologis remaja dalam Islam mencakup pencarian makna hidup, tanggung jawab moral, dan penguatan spiritualitas. Pemahaman ini menjadi dasar bagi strategi pendidikan yang relevan dan kontekstual.

2. Pendidikan Akidah dan Ibadah bagi Remaja

Pendidikan akidah merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian remaja Muslim. Pada usia ini, penguatan keimanan harus diarahkan pada kesadaran rasional dan spiritual, bukan sekadar dogmatis. Rasulullah SAW membina akidah para sahabat muda seperti Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan kasih sayang, argumentatif, dan keteladanan.

Remaja menghadapi berbagai tantangan ideologis akibat arus globalisasi, seperti relativisme moral dan sekularisasi nilai. Pendidikan akidah berfungsi sebagai filter agar mereka memiliki *worldview* Islam

yang kokoh (Al-Attas, 2018). Penguatan iman harus diiringi dengan pembiasaan ibadah, seperti shalat, puasa, dan dzikir, yang berperan sebagai terapi spiritual dan pengendali perilaku.

Kegiatan keagamaan seperti *halaqah*, mentoring, dan *pesantren kilat* menjadi wadah efektif untuk menanamkan nilai akidah dan ibadah secara kontekstual. Menurut Hasan (2017), remaja yang aktif dalam kegiatan keislaman menunjukkan tingkat spiritualitas dan kontrol diri yang lebih baik dibandingkan yang tidak.

Selain itu, penting untuk menghubungkan ibadah dengan relevansi sosial. Shalat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sarana membangun disiplin dan kejujuran. Puasa menjadi latihan spiritual sekaligus empati terhadap sesama.

Dengan demikian, pendidikan akidah dan ibadah bagi remaja harus menekankan aspek kesadaran, keteladanan, dan relevansi sosial agar menghasilkan generasi yang beriman dan berkomitmen moral.

3. Pendidikan Seksualitas Islami bagi Remaja

Pendidikan seksualitas dalam Islam bukan sekadar membahas aspek biologis, tetapi juga moral, spiritual, dan sosial. Islam mengenalkan konsep *iffah* (menjaga kehormatan diri) sebagai prinsip dasar dalam etika seksualitas. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menundukkan pandangan dan menjaga aurat sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri (HR. Bukhari dan Muslim).

Remaja berada dalam masa meningkatnya dorongan biologis dan emosional, sehingga pendidikan seksualitas Islami harus diberikan secara terbuka, santun, dan berbasis nilai. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2001), pendidikan seks yang Islami bertujuan menumbuhkan tanggung jawab moral dan kesadaran akan kehormatan diri, bukan sekadar membatasi perilaku.

Era digital, remaja dihadapkan pada paparan pornografi dan budaya permisif. Pendidikan seks Islami harus mampu memanfaatkan pendekatan *preventif* dan *kuratif* melalui bimbingan agama, konseling, dan pembiasaan perilaku sopan dalam pergaulan (Zakiyah, 2018).

Keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan seks Islami. Orang tua harus menjadi sumber informasi pertama bagi anak, sementara sekolah menyediakan

lingkungan yang mendukung etika pergaulan sehat. Pendekatan berbasis dialog dan kasih sayang akan lebih efektif daripada larangan yang kaku.

Dengan demikian, pendidikan seksualitas Islami bagi remaja menjadi sarana membangun kesadaran diri, pengendalian nafsu, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

4. Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Moral Remaja

Moralitas remaja merupakan refleksi dari keberhasilan pendidikan Islam dalam menginternalisasi nilai-nilai Qurani dan akhlakul karimah. Islam menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan, sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Ahmad).

Pendidikan Islam harus menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan empati sejak dini. Menurut Nata (2019), pembentukan moral remaja tidak dapat dilakukan hanya melalui pengajaran teori, tetapi harus melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman sosial. Sekolah dan keluarga harus bersinergi dalam memberikan teladan nyata.

Remaja perlu diarahkan untuk memahami moral bukan sekadar aturan, tetapi kesadaran batin (*moral consciousness*) yang tumbuh dari iman. Dalam konteks sosial, moral Islami juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan solidaritas kemanusiaan (Al-Attas, 2018).

Media sosial dapat menjadi sarana pendidikan moral jika digunakan dengan bijak. Konten dakwah digital, film Islami, dan komunitas daring dapat memperkuat internalisasi nilai moral secara modern dan menyenangkan (Hidayatullah, 2020).

Dengan demikian, pendidikan Islam harus memadukan pendekatan spiritual, sosial, dan digital untuk membentuk moral remaja yang berkarakter dan berdaya saing.

5. Remaja dan Tantangan Budaya Populer

Budaya populer memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan identitas remaja. Musik, fashion, dan media sosial sering kali membentuk gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus berperan sebagai sistem nilai yang kritis terhadap budaya modern, bukan menolaknya secara total (Esposito, 2003).

Menurut Al-Ghazali (2005), manusia cenderung meniru apa yang dilihat dan dikaguminya. Oleh karena itu, keteladanan dan model peran Islami perlu dihadirkan melalui figur publik, influencer Muslim, dan konten yang bernilai dakwah. Budaya populer dapat dijadikan sarana dakwah kreatif yang membumikan ajaran Islam dengan bahasa dan media yang disukai remaja.

Pendidikan Islam perlu membekali remaja dengan kemampuan literasi budaya agar mampu memilah nilai yang sejalan dengan ajaran Islam dan menghindari yang merusak moralitas (Heryanto, 2018). Literasi ini meliputi pemahaman kritis terhadap simbol, gaya hidup, dan media hiburan.

Sekolah dan komunitas remaja Islam dapat menjadi ruang alternatif budaya, di mana kreativitas dan spiritualitas disinergikan. Musik nasyid, film dakwah, dan komunitas digital Islami adalah contoh nyata dari strategi ini. Dengan demikian, pendidikan Islam di era budaya populer harus bersifat adaptif, kreatif, dan dialogis agar remaja tetap memiliki jati diri Islami di tengah modernitas.

D. Pendidikan Islam Orang Dewasa

1. Konsep Tarbiyah bagi Muslim Dewasa

Pendidikan Islam tidak berhenti pada masa anak-anak atau remaja, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Konsep *tarbiyah* dalam Islam menekankan pentingnya proses pembinaan diri yang berkesinambungan (*lifelong learning*) agar manusia terus tumbuh dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tanpa batasan usia. Dengan demikian, pendidikan orang dewasa bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses penyadaran diri untuk menjadi insan kamil.

Dalam konteks modern, konsep *lifelong learning* selaras dengan pandangan Islam tentang *thalabul 'ilmi* yang berkelanjutan. Pendidikan bagi orang dewasa diarahkan untuk memperkuat kemampuan reflektif, etis, dan sosial. Proses pembelajaran ini menjadi sarana untuk memperbaharui pemahaman keagamaan sekaligus menyesuaikannya dengan tantangan zaman (Nata, 2019).

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa belajar merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Ia menilai bahwa

ilmu bagi orang dewasa berfungsi sebagai penuntun hati untuk semakin dekat kepada Allah SWT. Tarbiyah dewasa menuntut keseimbangan antara pengetahuan rasional dan pencerahan spiritual (Al-Ghazali, 2005).

Oleh karena itu, pendidikan Islam orang dewasa memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tidak sekadar meniru sistem formal, tetapi memfasilitasi pembelajaran yang relevan dengan pengalaman hidup peserta didik. Islam menegaskan bahwa manusia yang terus belajar akan diangkat derajatnya (Q.S. Al-Mujadalah: 11).

Dengan demikian, tarbiyah dewasa bukan sekadar pendidikan agama, melainkan pembinaan nilai, pemaknaan pengalaman hidup, dan penguatan iman dalam menghadapi dinamika kehidupan modern (Rahman, 2017).

2. Tujuan Pendidikan Islam bagi Orang Dewasa

Tujuan utama pendidikan Islam bagi orang dewasa adalah untuk memperkuat keimanan, memperbaiki amal, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh pengetahuan keagamaan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial (As-Syaibani, 2000).

Pendidikan orang dewasa berperan penting dalam membentuk *self-improvement* berlandaskan tauhid. Dalam pandangan Islam, ilmu harus membawa perubahan perilaku, bukan sekadar menambah wawasan. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan yang menghasilkan *insan berilmu dan beramal shalih* (Nasr, 2010).

Dari perspektif sosial, pendidikan Islam bagi orang dewasa bertujuan memperkuat solidaritas dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pembelajaran diarahkan agar individu mampu menjadi teladan dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja (Hidayatullah, 2020).

Selain itu, tujuan pendidikan ini mencakup pembentukan *moral consciousness* — kesadaran moral yang mendorong seseorang untuk berbuat baik tanpa paksaan eksternal. Kesadaran ini lahir dari pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan realitas kehidupan modern (Rahman, 2017).

Dengan demikian, pendidikan Islam bagi orang dewasa berorientasi pada penguatan iman dan amal, serta pembentukan masyarakat madani yang berkeadaban dan beretika Islami.

3. Metode Pembelajaran bagi Peserta Didik Dewasa

Metode pembelajaran orang dewasa menekankan prinsip *andragogi*, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi. Dalam Islam, hal ini sesuai dengan pendekatan *hikmah* dan *mau'izhah hasanah* sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nahl: 125). Pembelajaran diarahkan agar peserta didik dewasa mampu memahami, merenungkan, dan mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Menurut Knowles (2015), pembelajaran orang dewasa efektif bila melibatkan pengalaman dan otonomi. Prinsip ini sejalan dengan konsep *tazkiyah an-nafs* dalam Islam yang menuntut keterlibatan aktif individu dalam proses penyucian diri. Oleh karena itu, dialog, diskusi tematik, dan studi kasus menjadi metode ideal bagi tarbiyah dewasa.

Hidayatullah (2020) menambahkan bahwa pembelajaran berbasis refleksi spiritual dapat memperkuat kesadaran diri. Melalui kegiatan seperti *halaqah*, mentoring, atau pembelajaran daring berbasis nilai Islam, peserta didik dapat menghubungkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, prinsip *niyyah* (niat) dan *ikhlas* menjadi fondasi pedagogis yang membedakan pembelajaran Islam dari sistem sekuler. Guru dan peserta didik sama-sama berperan sebagai penuntut ilmu dan pencari kebenaran (Nata, 2019). Dengan demikian, metode pembelajaran bagi orang dewasa dalam Islam harus integratif: menggabungkan pengalaman, spiritualitas, dan refleksi untuk menghasilkan transformasi moral dan sosial.

4. Peran Majelis Ta'lim sebagai Pusat Pendidikan Dewasa

Majelis ta'lim merupakan institusi pendidikan nonformal yang memainkan peran strategis dalam pendidikan orang dewasa. Di Indonesia, majelis ta'lim berfungsi sebagai wadah dakwah, pendidikan spiritual, dan penguatan sosial keagamaan (Hasan, 2017).

Kegiatan dalam majelis ta'lim tidak hanya berorientasi pada pengajaran ritual, tetapi juga pada pengembangan wawasan Islam yang moderat dan aplikatif. Hal ini menjadikan majelis ta'lim sebagai sarana

social learning yang efektif untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat.

Menurut Kettani (2019), majelis ta'lim juga menjadi ruang sosial yang menghubungkan ilmu, spiritualitas, dan solidaritas umat. Di era digital, banyak majelis ta'lim memanfaatkan media daring untuk memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran.

Majelis ta'lim berperan pula dalam membangun ketahanan moral masyarakat. Melalui kegiatan rutin seperti kajian tafsir, tadarus, dan pengajian tematik, peserta didik dewasa dapat memperdalam pemahaman agama secara berkelanjutan (Syukri, 2020). Dengan demikian, majelis ta'lim menjadi model pendidikan Islam kontekstual yang menggabungkan dimensi *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* dalam membina umat dewasa menuju kesalehan sosial.

5. Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Dunia Kerja

Pendidikan orang dewasa juga mencakup peran individu sebagai anggota keluarga dan profesional di dunia kerja. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas, termasuk bekerja, dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar dan etika yang baik (Al-Attas, 2018).

Dalam keluarga, pendidikan Islam diwujudkan melalui teladan, komunikasi, dan tanggung jawab spiritual antaranggota keluarga. Orang dewasa menjadi pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga (Nata, 2019).

Di dunia kerja, nilai-nilai seperti *amanah*, *adil*, dan *ihsan* menjadi fondasi etika profesional Islami. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kesuksesan material dan spiritual (Syukri, 2020).

Selain itu, pendidikan Islam membantu pekerja profesional untuk menjaga integritas, menghindari korupsi, serta menjadikan pekerjaan sebagai sarana dakwah dan pelayanan sosial (Rahman, 2017). Dengan demikian, pendidikan Islam orang dewasa berperan dalam membentuk karakter produktif dan berakhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan.

6. Transformasi Spiritualitas Dewasa dalam Perspektif Tasawuf

Tasawuf memiliki peran penting dalam pendidikan Islam bagi orang dewasa karena berfokus pada pembinaan jiwa dan pembersihan hati. Melalui praktik *dzikir*, *muhasabah*, dan *riyadhah*, seseorang dilatih

untuk mengendalikan hawa nafsu dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT (Al-Ghazali, 2005).

Ibn Khaldun (2005) menjelaskan bahwa spiritualitas dalam Islam adalah dimensi mendalam dari pendidikan yang menuntun manusia untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendidikan tasawuf mendorong refleksi diri dan keikhlasan dalam setiap tindakan.

Dalam konteks modern, pendekatan tasawuf menjadi sarana terapi spiritual bagi individu yang mengalami tekanan hidup akibat modernitas dan sekularisasi (Nasr, 2010). Spiritualitas dewasa bukan sekadar ritual, tetapi proses internalisasi nilai ilahiah dalam kehidupan profesional dan sosial.

Program pendidikan tasawuf bagi orang dewasa dapat dikembangkan dalam bentuk *retreat ruhani*, halaqah dzikir, atau bimbingan spiritual berbasis komunitas. Proses ini membantu membentuk karakter yang sabar, rendah hati, dan istiqamah (Hidayatullah, 2020). Dengan demikian, pendidikan tasawuf adalah inti dari transformasi spiritual dewasa yang menghubungkan ilmu, amal, dan ihsan.

7. Tantangan Pendidikan Islam bagi Orang Dewasa di Era Modern

Era modern ditandai dengan gaya hidup sekuler, kemajuan teknologi, dan tekanan budaya global yang menantang nilai-nilai spiritual Islam. Banyak orang dewasa terjebak dalam rutinitas dunia kerja dan kehilangan waktu untuk pengembangan diri spiritual (Nata, 2019).

Krisis moral global menuntut pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan berbasis dakwah kultural. Pendekatan ini menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya modern (Heryanto, 2018).

Pendidik dewasa harus mampu menggunakan media digital sebagai sarana dakwah kreatif, seperti podcast, webinar, dan media sosial dakwah (Zed, 2016). Teknologi bukan ancaman, tetapi peluang bagi penyebaran nilai Islam bila dikelola dengan bijak.

Tantangan lainnya adalah munculnya paham relativisme moral yang mengikis prinsip tauhid. Oleh karena itu, pendidikan Islam dewasa harus menanamkan *worldview Islam* yang kokoh dan rasional (Al-Attas, 2018). Dengan pendekatan integratif dan kontekstual, pendidikan Islam

bagi orang dewasa dapat menjadi benteng moral dan sumber inspirasi di tengah derasny arus sekularisasi global.

E. Pendidikan Islam Lanjut Usia

1. Konsep Lansia dalam Perspektif Islam dan Psikologi

Lanjut usia (*syuyukh*) dalam Islam dipandang sebagai fase kehidupan yang penuh kemuliaan dan harus dihormati. Rasulullah SAW bersabda, *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua”* (H.R. Abu Dawud). Ajaran ini menegaskan bahwa lansia memiliki hak moral, sosial, dan spiritual yang wajib dijaga. Mereka dipandang sebagai penjaga nilai dan sumber hikmah bagi generasi muda (Nata, 2019).

Masa lanjut usia dari sudut pandang psikologi perkembangan merupakan periode refleksi diri, evaluasi kehidupan, dan pencarian makna spiritual (Erikson, 1982). Dalam tahap ini, individu berhadapan dengan tantangan emosional seperti kesepian, kehilangan, dan keterbatasan fisik. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam memberikan makna dan arah hidup yang menenangkan bagi mereka (Hurlock, 2012).

Islam memandang lansia sebagai kelompok yang membutuhkan kasih sayang dan pendampingan, bukan sekadar bantuan fisik. Dalam Q.S. Al-Isra’ (17): 23–24, Allah SWT memerintahkan agar anak menghormati orang tua, tidak membentak, dan selalu mendoakan mereka dengan penuh kasih. Ayat ini menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lansia.

Konsep pendidikan untuk lansia dalam Islam bukan semata-mata pengajaran, melainkan pembinaan ruhani dan moral untuk menjaga martabat kemanusiaan. Pembinaan tersebut menekankan nilai kasih, empati, dan penghargaan terhadap kebijaksanaan hidup yang telah mereka jalani (Qardhawi, 2018). Dengan demikian, Islam memberikan kerangka pendidikan yang humanistik dan transendental bagi lansia—menempatkan mereka bukan sebagai beban sosial, tetapi sebagai sumber nilai dan teladan moral bagi masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan Islam bagi Lanjut Usia

Tujuan pendidikan Islam bagi lansia adalah membimbing mereka mencapai ketenangan spiritual, memperkuat iman, dan mempersiapkan

diri menghadapi akhir hayat dengan husn al-khatimah. Pendidikan ini bukan sekadar untuk menambah pengetahuan agama, tetapi untuk memperdalam kesadaran diri terhadap makna hidup (Al-Ghazali, 2005).

Menurut pandangan tasawuf, fase lanjut usia adalah masa *tazkiyah an-nafs*, yaitu penyucian hati melalui dzikir, muhasabah, dan ibadah yang konsisten. Pendidikan diarahkan agar lansia memperoleh ketenangan batin serta kesiapan menghadapi pertemuan dengan Sang Pencipta (Nasr, 2010).

Selain aspek spiritual, pendidikan Islam bagi lansia juga berfungsi menjaga keseimbangan mental dan sosial. Kegiatan seperti pengajian, majelis dzikir, dan dialog keagamaan dapat memperkuat rasa memiliki dan mengurangi isolasi sosial (Zainuddin, 2020).

Tujuan lain adalah menumbuhkan optimisme dan semangat beramal saleh meskipun fisik mulai melemah. Islam menegaskan bahwa amal yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai kemampuan tetap bernilai besar di sisi Allah SWT (Q.S. At-Taghabun: 16).

Dengan demikian, pendidikan Islam bagi lansia berorientasi pada kebahagiaan akhirat yang disertai kedamaian hidup di dunia melalui ketenangan spiritual dan keikhlasan ibadah.

3. Metode Dakwah dan Pembinaan Lansia

Pendekatan dakwah bagi lansia memerlukan kelembutan, hikmah, dan empati. Allah SWT berfirman, "*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik*" (Q.S. An-Nahl: 125). Metode ini menekankan bahwa pembinaan spiritual harus memperhatikan kondisi emosional dan fisik peserta didik (Hidayatullah, 2020).

Pendekatan komunikasi yang menenangkan dan penuh kasih sayang lebih efektif bagi lansia dibanding metode kognitif formal. Dakwah harus berorientasi pada hati dan pengalaman, bukan sekadar hafalan (Assegaf, 2018).

Aktivitas dakwah seperti bimbingan doa, tadarus Al-Qur'an bersama, dan penguatan iman dapat menjadi terapi spiritual yang menenangkan jiwa. Kegiatan tersebut membantu lansia merasa tetap bernilai dan dibutuhkan (Zed, 2016).

Metode *ta'lim bil hal*—pengajaran melalui teladan dan pengalaman hidup—juga penting untuk diterapkan. Lansia lebih mudah menerima

pesan keagamaan melalui pengalaman konkret daripada ceramah panjang yang abstrak (Nata, 2019).

Dengan demikian, metode dakwah bagi lansia harus berlandaskan kasih sayang dan penghargaan terhadap perjalanan hidup mereka, sehingga dakwah menjadi sarana pembinaan ruhani yang menumbuhkan kedamaian.

4. Pendidikan Ibadah dan Amal Saleh bagi Lansia

Pendidikan Islam bagi lansia menekankan pembiasaan ibadah ringan namun bermakna, seperti dzikir, shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, dan sedekah. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa amal kecil yang dilakukan secara konsisten lebih dicintai Allah SWT daripada amal besar yang jarang dilakukan (H.R. Bukhari).

Kegiatan ibadah bagi lansia harus disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Misalnya, shalat dapat dilakukan duduk atau berbaring, dan puasa diganti dengan fidyah bila tidak mampu (Q.S. Al-Baqarah: 184). Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas syariat terhadap keterbatasan usia lanjut (Qardhawi, 2018).

Selain ibadah ritual, pendidikan amal saleh seperti memberi nasihat, mendoakan anak cucu, dan berbagi pengalaman hidup juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan spiritual lansia (Al-Ghazali, 2005).

Majelis dzikir dan halaqah lansia menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif beribadah secara bersama, menumbuhkan rasa damai, dan memperkuat ukhuwah (Zainuddin, 2020). Dengan demikian, pendidikan ibadah bagi lansia harus diarahkan pada *penghayatan makna*, bukan hanya rutinitas, agar mereka dapat menikmati kedekatan dengan Allah SWT secara penuh dan ikhlas.

5. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembinaan Lansia

Dalam Islam, keluarga memiliki peran utama dalam menjaga dan membina lansia. Rasulullah SAW menegaskan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, bahkan setelah mereka meninggal, dengan cara mendoakan dan melanjutkan amal kebaikan (H.R. Muslim).

Keluarga menjadi lingkungan pertama yang memberikan rasa aman dan harga diri bagi lansia. Sikap hormat, komunikasi penuh empati, dan perhatian terhadap kebutuhan emosional mereka merupakan

bentuk nyata pendidikan Islam dalam rumah tangga (Hidayatullah, 2020).

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial melalui kegiatan kemaslahatan seperti pelayanan kesehatan, bimbingan spiritual, dan kunjungan sosial (Hasan, 2017). Nilai *ukhuwah Islamiyah* mendorong terbentuknya solidaritas antargenerasi.

Lembaga sosial Islam seperti masjid dan majelis ta'lim dapat menjadi pusat dukungan spiritual dan sosial bagi lansia. Kegiatan berbasis komunitas membantu mengurangi kesepian dan memperkuat rasa keterlibatan sosial (Kettani, 2019).

Dengan demikian, pembinaan lansia harus bersifat kolektif—melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan—agar nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap orang tua tetap terjaga.

6. Program Pendidikan Islam Lansia di Lembaga Sosial dan Masjid

Lembaga sosial dan masjid memainkan peran penting dalam menyediakan program pendidikan untuk lansia. Program ini meliputi halaqah tafsir, pelatihan ibadah, bimbingan spiritual, dan terapi ruhani berbasis komunitas (Syukri, 2020). Di Indonesia, banyak masjid mengembangkan “majlis taklim lansia” yang fokus pada tazkiyah, pembacaan Al-Qur'an, dan tausiah ringan. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana pembinaan iman sekaligus terapi psikologis untuk menjaga keseimbangan jiwa (Hidayatullah, 2020).

Selain itu, lembaga sosial berbasis Islam dapat mengadakan program pemberdayaan lansia melalui keterampilan ringan, berbagi pengalaman, dan aktivitas sosial yang memperkuat harga diri mereka (Nata, 2019).

Integrasi antara aspek spiritual, sosial, dan edukatif menjadikan masjid sebagai *center of community learning* yang mampu menjangkau semua usia. Program semacam ini dapat memperkuat peran masjid sebagai institusi pendidikan sepanjang hayat (Al-Attas, 2018). Dengan demikian, pendidikan lansia di lembaga sosial dan masjid mencerminkan prinsip Islam tentang *rahmatan lil 'alamin*—menebarkan kasih sayang dan pembinaan untuk seluruh lapisan masyarakat.

7. Lansia dan Ketenangan Jiwa: Pendekatan Spiritual Islami

Ketenangan jiwa (*nafs al-muthmainnah*) adalah tujuan tertinggi bagi pendidikan spiritual lansia. Dalam Q.S. Al-Fajr (89): 27–30, Allah memanggil jiwa yang tenang untuk kembali kepada-Nya dengan ridha dan diridhai. Pendidikan lansia berorientasi pada pembentukan kondisi spiritual ini melalui dzikir, doa, dan muhasabah (Al-Ghazali, 2005).

Lansia perlu dibimbing agar memandang hidup dengan syukur dan menerima ketentuan Allah sebagai bentuk kedewasaan spiritual. Proses ini menumbuhkan rasa damai dan optimisme menghadapi ajal (Nasr, 2010). Pendekatan psikospiritual Islami membantu lansia melepaskan kecemasan dan ketakutan terhadap kematian dengan memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Kegiatan seperti dzikir kolektif dan kajian tafsir tematik mampu meningkatkan *spiritual well-being* (Zainuddin, 2020).

Pendidikan spiritual juga mengajarkan konsep *rida*—menerima segala ketentuan dengan ikhlas sebagai bentuk kedewasaan iman. Dengan demikian, lansia dapat mencapai kebahagiaan sejati di penghujung usia (Qardhawi, 2018). Maka, pendidikan Islam bagi lansia adalah proses pembentukan jiwa yang tenteram dan penuh keyakinan, menuju kehidupan akhirat dengan hati yang damai dan beriman sempurna.

F. Pendidikan Inklusif Perspektif Islam

1. Landasan Teologis dan Etis Pendidikan Inklusif dalam Islam

Islam menegaskan bahwa semua manusia diciptakan Allah dengan kehormatan dan potensi yang unik. Dalam QS. Al-Isra:70, Allah berfirman bahwa manusia dimuliakan tanpa kecuali. Hal ini menjadi dasar teologis bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif dalam Islam bukan sekadar pendekatan sosial, melainkan wujud dari keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah).

Etika pendidikan Islam mengajarkan bahwa perbedaan kemampuan bukan alasan untuk diskriminasi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan penghormatan terhadap setiap individu, tanpa memandang fisik atau kecerdasan. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, tetapi melihat hati

dan amalnya. Nilai ini menjadi fondasi moral bagi guru dan masyarakat untuk memperlakukan ABK dengan penuh hormat dan cinta kasih.

Secara filosofis, pendidikan inklusif dalam Islam berpijak pada konsep fitrah, yakni potensi bawaan manusia untuk berkembang menuju kebaikan. ABK pun memiliki fitrah tersebut, hanya membutuhkan pendekatan yang sesuai. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak menemukan jalannya menuju kesempurnaan spiritual dan moral.

Selain itu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* juga menuntun umat Islam untuk memperjuangkan hak-hak ABK agar tidak terpinggirkan. Pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan Islam inklusif adalah bagian dari ibadah sosial yang bernilai tinggi.

Implementasi nilai-nilai teologis dan etis ini dapat terlihat dalam praktik lembaga pendidikan Islam yang menampung ABK, seperti pesantren dan madrasah inklusif yang tumbuh di Indonesia. Prinsip utamanya adalah memanusiakan manusia, menghormati setiap perbedaan, dan menumbuhkan potensi spiritual setiap anak.

2. Konsep Rahmatan lil 'Alamin dalam Pendidikan Inklusif

Pendidikan Islam berlandaskan pada prinsip *rahmatan lil 'alamin*, yaitu rahmat bagi seluruh makhluk. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menyingkirkan siapa pun, termasuk ABK. Islam memandang bahwa kasih sayang Allah meliputi seluruh ciptaan-Nya, sehingga lembaga pendidikan harus mencerminkan nilai universal ini.

Pendidikan inklusif merupakan manifestasi konkret dari misi kenabian Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam konteks pendidikan, rahmat ini diwujudkan melalui kesempatan belajar yang sama dan lingkungan yang suportif. ABK bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembelajaran yang berhak berkembang sesuai kemampuannya.

Dalam praktiknya, pendidikan Islam inklusif menuntut perubahan paradigma dari pendekatan “defisit” ke pendekatan “potensi”. Setiap anak dipandang memiliki keunikan yang dapat menjadi kekuatan jika didukung dengan metode dan lingkungan yang tepat. Hal ini sejalan dengan nilai *ihsan* — melakukan yang terbaik untuk setiap individu.

Guru dan masyarakat perlu menyadari bahwa penerapan konsep *rahmatan lil 'alamin* menuntut empati sosial, kesabaran, dan keikhlasan. Pendidikan bagi ABK menjadi ladang pahala dan ujian bagi kesungguhan umat dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Pendidikan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya membangun intelektualitas, tetapi juga spiritualitas dan kemanusiaan. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam harus mampu menghadirkan kasih sayang, penghormatan, dan keadilan bagi seluruh peserta didik.

3. Peran Guru dan Orang Tua dalam Membimbing ABK secara Islami

Guru dan orang tua memiliki peran sentral dalam membimbing ABK. Dalam Islam, mereka dipandang sebagai *murabbi* — pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan iman dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari).

Pendampingan ABK menuntut kesabaran luar biasa dan kasih sayang mendalam. Orang tua harus memahami kondisi anak dengan penuh penerimaan (*qana'ah*) dan keyakinan bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah. Sementara guru perlu memiliki empati dan strategi pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam konteks pendidikan Islam, bimbingan terhadap ABK juga bermakna spiritual. Setiap interaksi menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ikhlas. Pembiasaan doa, dzikir, dan akhlak baik perlu menjadi bagian integral dari kegiatan belajar mengajar.

Kolaborasi antara guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Islam menekankan *syura* (musyawarah) dalam menyelesaikan masalah dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, termasuk dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

Dengan sinergi antara rumah dan sekolah, ABK dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang penuh cinta, dukungan, dan penghormatan terhadap martabatnya sebagai insan mulia.

4. Model Pembelajaran Islami Adaptif untuk ABK

Model pembelajaran Islami untuk ABK harus bersifat adaptif, yaitu disesuaikan dengan kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan fisik

anak. Prinsip *taysir* (kemudahan) menjadi dasar dalam merancang kegiatan belajar yang tidak memberatkan tetapi tetap bermakna.

Guru dalam pendidikan Islam dituntut kreatif dalam menggunakan metode visual, auditori, kinestetik, serta aktivitas keagamaan sederhana seperti doa dan kisah nabi. Pendekatan *storytelling* Qur'ani sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai spiritual pada ABK.

Selain itu, pembelajaran adaptif menekankan *learning by doing*, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung. Aktivitas seperti berkebun, wudhu, atau berbagi makanan menjadi sarana penguatan karakter dan akhlak.

Pendidikan inklusif Islam juga mendorong penggunaan teknologi pendukung seperti aplikasi edukatif Islami yang dapat diakses dengan mudah oleh ABK. Dengan bimbingan guru, media digital ini dapat menjadi alat pembelajaran spiritual yang menyenangkan.

Kurikulum adaptif Islami hendaknya tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga keberhasilan anak dalam beribadah, berinteraksi sosial, dan mengembangkan rasa percaya diri sebagai hamba Allah yang istimewa.

5. Integrasi Nilai Akhlak dan Spiritual dalam Pendidikan ABK

Pendidikan Islam bagi ABK menekankan keseimbangan antara aspek akhlak dan spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, rasa syukur, dan kasih sayang harus ditanamkan sejak dini dengan pendekatan personal. Dalam Islam, akhlak merupakan buah dari iman yang benar. Oleh karena itu, pembinaan spiritual seperti doa bersama, membaca Al-Qur'an, dan mengenal sifat Allah menjadi media penting dalam menumbuhkan karakter anak.

Guru dan orang tua perlu mencontohkan akhlak melalui keteladanan. Prinsip *uswah hasanah* (contoh yang baik) sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW menjadi kunci keberhasilan pendidikan bagi ABK.

Integrasi nilai spiritual juga memperkuat daya tahan psikologis ABK dalam menghadapi keterbatasan mereka. Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran bahwa semua adalah kehendak Allah akan melahirkan pribadi yang sabar dan tawakal. Dengan demikian, pendidikan Islam bagi ABK tidak hanya berorientasi pada kompetensi

akademik, tetapi juga pada pencapaian kebahagiaan ruhani dan kedekatan dengan Sang Pencipta.

6. Peran Lembaga Pendidikan Islam Inklusif di Indonesia

Lembaga pendidikan Islam inklusif berperan penting dalam memberikan ruang bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar dan berkembang bersama teman sebaya. Prinsip yang mendasari lembaga ini adalah keadilan pendidikan, sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Maidah:8 untuk berlaku adil terhadap semua pihak. Dalam konteks pendidikan, keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama, bukan perlakuan yang sama.

Di Indonesia, lembaga seperti *Raudhatul Athfal (RA) Inklusif*, *Madrasah Inklusif*, dan *Pesantren Inklusif* mulai bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim. Beberapa pesantren seperti *Pesantren Nurul Yaqin* di Pasuruan dan *Pesantren Inklusi Darul Hikmah* di Yogyakarta telah mengembangkan model pembelajaran Islami yang ramah terhadap ABK dengan pendekatan empatik dan spiritual.

Kehadiran lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat dakwah sosial. Pendidikan inklusif dalam Islam tidak memisahkan anak dengan keterbatasan dari masyarakat, tetapi justru mengintegrasikan mereka agar menjadi bagian utuh dari komunitas. Hal ini mencerminkan semangat *ukhuwah Islamiyah* dan *rahmah* yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam inklusif juga berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi pengembangan kurikulum Islami yang adaptif. Kolaborasi antara ulama, akademisi, psikolog, dan praktisi pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang holistik, menyentuh aspek kognitif, afektif, dan spiritual.

Pemerintah dan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga telah menginisiasi berbagai pelatihan guru dan program beasiswa untuk mendukung pendidikan ABK di madrasah. Dukungan struktural ini memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam inklusif sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat berkeadaban yang menghargai keberagaman dan kemanusiaan.

7. Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam untuk ABK di Masa Depan

Pendidikan Islam untuk anak berkebutuhan khusus menghadapi tantangan besar di era modern. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta masih terbatasnya sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki guru dengan kompetensi inklusif dan fasilitas yang memadai untuk melayani ABK secara profesional.

Tantangan lain adalah adanya stigma sosial yang masih kuat di masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas. Dalam Islam, pandangan semacam ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan kemanusiaan. Setiap individu adalah makhluk Allah yang memiliki kehormatan dan potensi untuk beramal saleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengedukasi masyarakat agar lebih menerima dan menghormati keberagaman ciptaan Allah SWT.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Teknologi digital membuka ruang baru bagi pembelajaran Islami yang adaptif bagi ABK, seperti penggunaan aplikasi edukatif Islami, video pembelajaran dengan bahasa isyarat, dan konten interaktif Al-Qur'an. Inovasi ini sejalan dengan prinsip *ijtihad* dalam Islam, yaitu upaya kreatif mencari solusi baru untuk kemaslahatan umat.

Peluang lain terletak pada kolaborasi lintas sektor — antara lembaga pendidikan Islam, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas penyandang disabilitas. Melalui pendekatan *syura* (musyawarah) dan *ta'awun* (kerjasama dalam kebaikan), sistem pendidikan inklusif dapat diperkuat dari aspek kebijakan hingga implementasi lapangan.

Dengan visi rahmatan lil 'alamin, masa depan pendidikan Islam untuk ABK diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan, empati, dan spiritualitas dalam kehidupan modern yang semakin kompleks.

Daftar Bacaan

- Abdullah, M. (2019). *Paradigma Baru Pembelajaran Islam Inklusif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdullah, M. A. (2015). *Islamic Education and Human Development: Towards an Integrated Approach*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

- Al-Abrasyi, M. A. (2013). *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: Ta'dib International.
- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, VA: IIIT.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Tarbiya al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh al-Hayah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Anwar, S. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Assegaf, A. (2018). *Dakwah Humanistik di Era Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- As-Syaibani, O. M. A. (2000). *Falsafat al-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Azra, A. (2016). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bredenkamp, S., & Copple, C. (2019). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington, DC: NAEYC.
- Bronfenbrenner, U. (2005). *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Daud, W. M. N. W. (2013). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Erikson, E. H. (1982). *The Life Cycle Completed*. New York: Norton.
- Esposito, J. L. (2003). *Islam and the West: The Making of an Image*. Oxford: Oxford University Press.
- Fauzi, A. (2020). *Integrasi Pendidikan Islam Inklusif dan Akhlak Mulia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, M. (2010). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. (2020). *Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, N. (2017). *Islamic Youth Movement and Moral Education*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, N. (2017). *Islamic Youth Movement and Moral Education*. Yogyakarta: UII Press.
- Kettani, M. (2019). *Youth and Islamic Civilization*. Rabat: ISESCO.

- Hasan, N. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam: Basis Nilai dan Etika Pendidikan Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, N. (2020). *Kurikulum Pendidikan Islam: Integrasi Nilai dan Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasanah, U. (2020). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hashim, R., & Langgung, H. (2008). *Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Budaya Populer di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Budaya Populer di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hidayat, A. (2018). *Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Integratif*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, M. F. (2020). *Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huda, M. (2021). *Pesantren Inklusif: Pendidikan Islam untuk Semua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hurlock, E. B. (2012). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E. B. (2015). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Khaldun. (2005). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jalaluddin. (2019). *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kettani, M. (2019). *Youth and Islamic Civilization*. Rabat: ISESCO.
- Knowles, M. (2015). *The Adult Learner*. London: Routledge.
- Montessori, M. (2017). *The Absorbent Mind*. New York: Holt Paperbacks.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen Madrasah Inklusif di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen PAUD Inklusif Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, I. (2001). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasir, A. R. (2020). *Islam dan Disabilitas: Perspektif Fikih dan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasir, A. R. (2020). *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Paradigma Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasr, S. H. (2010). *Islam in the Modern World*. New York: HarperOne.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Memperkuat Jati Diri dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Tengah Tantangan Globalisasi: Rekontruksi dan Reaktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nizar, S. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2012). *Human Development* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Piaget, J. (1969). *The Psychology of the Child*. New York, NY: Basic Books.
- Piaget, J. (1973). *To Understand Is to Invent: The Future of Education*. New York: Viking Press.
- Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge.
- Qodir, Z. (2020). *Islam dan Kemanusiaan Inklusif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2018). *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2019). *Model Pengembangan Madrasah Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, F. (2017). *Islamic Ethics and Education: Building a Moral Society*. London: Routledge.
- Ramayulis. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Saada, N., & Al-Faraj, S. (2017). Islamic education and students' moral development: A study in Saudi Arabia. *Journal of Education and Practice*, 8(11), 120–131.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Syukri, M. (2020). *Kepemimpinan Islami di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Yusuf, S. (2020). *Pendidikan Islam Inklusif: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, M. (2020). *Psikologi Islam dan Spiritualitas Lansia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zakiah, D. R. (2018). *Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2016). *Metodologi Dakwah di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Zuhdi, M. (2018). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Humanistik*. Malang: UIN Maliki Press.

Pendidikan Karakter Islami dan Budaya Lokal

A. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, atau watak yang membedakan seseorang dari orang lain. Karakter juga mencakup seperangkat nilai, sikap, dan kebiasaan yang menjadi dasar perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Lickona, 1991). Dalam konteks pendidikan, karakter dipahami sebagai kualitas moral dan etika yang tertanam dalam diri individu dan tercermin dalam tindakan sehari-hari (Samani & Hariyanto, 2017). Dengan demikian, karakter tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial dan spiritual manusia.

Karakter juga bisa diartikan sebagai seperangkat sifat yang membentuk kepribadian dan mengarahkan seseorang pada kebiasaan atau keyakinan tertentu, seperti kejujuran, keberanian, disiplin, dan tanggung jawab (Gunawan, 2016). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk perilaku positif yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter berfungsi menanamkan nilai-nilai tersebut agar individu mampu mengambil keputusan moral yang benar dan bertindak sesuai norma yang berlaku (Megawangi, 2004).

Selain itu, dalam konteks linguistik dan teknologi, istilah “karakter” juga dapat merujuk pada huruf, lambang, atau simbol yang digunakan

dalam sistem penulisan atau komputer. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa kata “karakter” memiliki makna yang luas, baik dalam aspek moral maupun teknis (KBBI, 2024). Namun, dalam konteks pendidikan dan psikologi, pengertian karakter lebih difokuskan pada dimensi kepribadian dan moralitas manusia.

Disisi lain, pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian individu melalui internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang diharapkan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembiasaan dan penghayatan nilai untuk membentuk keutuhan kepribadian (Lickona, 2004). Dalam konteks modern, pendidikan karakter dianggap sebagai jawaban atas krisis moral yang melanda dunia pendidikan.

Pendidikan karakter dalam perspektif Islam identik dengan *tarbiyah al-akhlaq* atau pendidikan akhlak, yang bertujuan membentuk manusia beradab (*insan adabi*). Al-Ghazali menegaskan bahwa inti pendidikan adalah pembentukan akhlak, karena ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kerusakan sosial (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*). Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Islam menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual.

Secara filosofis, pendidikan karakter memiliki akar pada pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk kebajikan (*virtue*), bukan sekadar pengetahuan. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Miskawaih yang menyebut pendidikan sebagai proses penyempurnaan jiwa menuju kebahagiaan (*sa'adah*). Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya integral untuk menumbuhkan moralitas sejati.

Pendidikan karakter dalam konteks Indonesia menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Tujuannya adalah melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Implementasi nilai-nilai karakter dilakukan melalui seluruh mata pelajaran, kegiatan kokurikuler, dan pembiasaan di lingkungan sekolah.

Pendidikan karakter mencakup tiga komponen utama: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*) (Lickona, 1991). Ketiganya harus

dikembangkan secara terpadu agar siswa tidak hanya tahu nilai yang benar, tetapi juga mau dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan nyata.

Selain itu, pendidikan karakter bersifat kontekstual, artinya nilai-nilai yang ditanamkan harus sesuai dengan budaya, agama, dan lingkungan sosial masyarakat. Pendidikan karakter di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan tradisi lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab.

Pendidikan karakter dalam kerangka Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga ukhrawi. Artinya, nilai moral tidak sekadar diukur dari norma sosial, tetapi dari kesesuaiannya dengan kehendak Allah SWT. Konsep ini menjadikan pendidikan karakter Islam lebih holistik dan transendental.

Secara metodologis, pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembelajaran, mulai dari desain kurikulum, proses pengajaran, hingga evaluasi perilaku peserta didik. Guru bukan hanya pengajar (*mu'allim*), tetapi juga teladan moral (*uswah hasanah*). Keteladanan menjadi instrumen paling efektif dalam pendidikan karakter Islam.

Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan proses multidimensional yang menggabungkan nilai-nilai moral, spiritual, sosial, dan budaya secara harmonis. Ia bertujuan melahirkan manusia yang berintegritas, berakhlak, dan memiliki kesadaran moral tinggi.

B. Pendidikan Karakter dalam Islam

Pendidikan karakter dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Islam menempatkan pendidikan akhlak sebagai inti dari seluruh proses pendidikan, karena keberhasilan manusia di dunia dan akhirat sangat bergantung pada kualitas akhlaknya. Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk menyebarkan ilmu, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *"Innamā bu'itstu li utammima makārim al-akhlaq"* — "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Ahmad). Hadis ini menjadi landasan fundamental bahwa pendidikan karakter adalah tujuan utama pendidikan Islam.

Konsep pendidikan karakter dalam Islam sering disebut dengan istilah *tarbiyah al-akhlaq*, *ta'dib*, dan *tazkiyah al-nafs*. Istilah *tarbiyah*

mengandung makna pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, *ta'dib* menekankan pembentukan adab atau perilaku beradab, sedangkan *tazkiyah* berarti penyucian jiwa. Ketiga istilah ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik—menyentuh aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial (Al-Attas, 1991).

Tujuan utama pendidikan karakter dalam Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Al-Qur'an menyebut manusia yang ideal dengan istilah *ulul albab*, yaitu orang yang mampu memadukan nalar dan iman dalam setiap tindakan (QS. Ali Imran [3]: 190–191). Pendidikan karakter yang Islami diarahkan untuk melahirkan pribadi seperti ini: rasional, spiritual, dan berakhlak luhur. Dengan demikian, pendidikan karakter Islam menekankan keseimbangan antara dimensi intelektual, spiritual, dan moral.

Proses pembentukan karakter dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari prinsip *tauhid*. Tauhid menjadi landasan filosofis sekaligus etis bagi seluruh perilaku manusia. Seorang muslim yang memiliki pemahaman tauhid yang kuat akan menampilkan akhlak yang baik karena menyadari bahwa setiap tindakannya diawasi Allah SWT. Inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai *muraqabah* — kesadaran batin bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap gerak langkah manusia (Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*).

Sumber utama pendidikan karakter Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an berisi petunjuk moral yang sangat komprehensif, mencakup hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*) dan hubungan manusia dengan sesama (*habl min al-nas*). Surah Luqman, misalnya, memberikan model pendidikan karakter yang utuh: mengajarkan tauhid, adab terhadap orang tua, kejujuran, kesabaran, serta kesadaran sosial (QS. Luqman [31]: 12–19). Sementara itu, Sunnah Nabi menampilkan teladan nyata penerapan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak ulama dalam sejarah pendidikan Islam klasik menekankan pentingnya pendidikan akhlak sebagai prioritas utama. Ibnu Sina dalam *Al-Siyasah* menulis bahwa pendidikan tidak hanya membina akal, tetapi juga membiasakan jiwa dengan kebajikan. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya menambahkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah menumbuhkan kepribadian yang matang dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi

bagian integral dari filsafat pendidikan Islam sejak periode awal peradaban Islam.

Metode pendidikan karakter dalam Islam meliputi teladan (*uswah hasanah*), nasihat (*mau'izhah*), pembiasaan (*ta'wid*), dan pengawasan (*muraqabah*). Rasulullah SAW adalah figur teladan yang sempurna sebagaimana disebut dalam QS. Al-Ahzab [33]: 21: "*Laqad kāna lakum fī rasūlillāh uswatun ḥasanah.*" Pendidikan karakter melalui keteladanan dianggap metode paling efektif karena peserta didik meniru perilaku pendidik yang dihormatinya (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudud*).

Selain itu, pendidikan karakter dalam Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), amanah, dan kejujuran menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk pribadi yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga yang bermanfaat bagi masyarakat (*khairu al-nas anfa'uhum li al-nas*). Dalam konteks ini, pendidikan karakter Islam berfungsi sebagai sarana membangun tatanan sosial yang berkeadaban.

Pendidikan karakter Islam dalam era modern menjadi semakin relevan menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan krisis moral. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan spiritualitas perlu dihidupkan kembali melalui sistem pendidikan Islam yang kontekstual. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren telah membuktikan efektivitas pendidikan berbasis nilai moral dan keteladanan (Zuhri, 2019). Integrasi antara kurikulum formal dan pembentukan karakter menjadi solusi strategis untuk membangun generasi berakhlak mulia.

Dengan demikian, pendidikan karakter dalam Islam bukan sekadar pengajaran nilai, tetapi proses transformatif untuk membentuk insan kamil — manusia sempurna yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pendidikan ini berorientasi pada keseimbangan antara akal, hati, dan amal. Dalam kerangka inilah pendidikan Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan moral dan spiritual umat manusia.

C. Tujuan, Fungsi, dan Media Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian utuh, berakhlak mulia, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan pribadi

maupun sosial. Dalam konteks Islam, tujuan ini sejalan dengan misi penciptaan manusia sebagai *'abdullah* (hamba Allah) dan *khalifatullah* (pemimpin di muka bumi). Kedua fungsi ini hanya dapat dijalankan dengan baik apabila manusia memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai iman serta takwa. Dengan demikian, pendidikan karakter Islam bertujuan menumbuhkan insan berilmu dan beradab yang mampu memakmurkan bumi dengan nilai-nilai keislaman (Al-Attas, 1991).

Tujuan pendidikan karakter dalam Islam juga diarahkan pada pembentukan *akhlakul karimah*, yaitu kepribadian yang terpuji dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya"* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas keimanan seseorang tercermin dari perilaku moralnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Islam bukan sekadar pengajaran teori moral, tetapi proses penanaman kebiasaan baik yang mengakar dalam hati dan tercermin dalam tindakan sehari-hari.

Selain itu, tujuan pendidikan karakter Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Al-Qur'an menggambarkan manusia ideal sebagai *ummatan wasathan* — umat yang moderat dan seimbang (QS. Al-Baqarah [2]: 143). Pendidikan karakter yang berimbang akan melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan spiritual yang menjadi fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis (Zubaedi, 2015).

Sedangkan fungsi pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam membentuk peradaban bangsa. Dalam Islam, pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu, tetapi juga sarana *tazkiyah* (penyucian jiwa). Fungsi utama pendidikan karakter adalah membentuk kesadaran moral (*moral awareness*), menumbuhkan kebiasaan baik (*moral habits*), dan menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran (*moral commitment*). Ketiga fungsi ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*).

Fungsi pendidikan karakter juga mencakup peran preventif dan kuratif. Secara preventif, pendidikan karakter mencegah munculnya perilaku menyimpang, korupsi, dan dekadensi moral di masyarakat.

Secara kuratif, pendidikan ini menjadi sarana pemulihan nilai-nilai etika yang telah luntur akibat arus globalisasi dan sekularisasi. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga nilai moral dan meneguhkan kembali fondasi spiritual masyarakat (Nata, 2016).

Sementara itu, media pendidikan karakter dalam Islam sangat beragam. Al-Qur'an dan Hadis merupakan media utama karena berisi pedoman nilai-nilai akhlak dan etika hidup. Selain itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga menjadi media penting dalam proses pembentukan karakter. Dalam pandangan Bronfenbrenner (1979), perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosialnya. Dalam Islam, keluarga disebut sebagai madrasah pertama (*al-usrah madrasah al-ula*) yang berperan membentuk dasar kepribadian anak melalui teladan dan pembiasaan ibadah.

Media pendidikan karakter dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nonformal dan informal. Masjid, pesantren, dan majelis taklim berfungsi sebagai ruang edukatif yang membentuk nilai spiritual dan sosial masyarakat. Rasulullah SAW sendiri menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, tempat pembinaan akhlak, serta media dakwah. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak terbatas di ruang kelas, tetapi berlangsung sepanjang kehidupan (*life-long education*), sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat (*thalab al-'ilm min al-mahdi ila al-lahdi*).

Pendidikan karakter juga dapat menggunakan media teknologi dan seni budaya sebagai sarana yang kontekstual. Penggunaan film edukatif, literatur Islami, dan platform digital dapat menjadi instrumen efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral pada generasi muda. Namun, penggunaannya harus disertai dengan filter nilai Islam agar tidak terjebak dalam hedonisme atau relativisme moral (Assegaf, 2014). Integrasi teknologi dan nilai spiritual merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan media pendidikan karakter di era digital.

Perspektif kelembagaan, pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek pembelajaran, bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan. Setiap guru diharapkan menjadi figur teladan yang mengajarkan nilai moral melalui perilaku dan interaksi sehari-hari. Pendidikan karakter yang efektif adalah yang berbasis keteladanan, pembiasaan, dan internalisasi nilai. Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam QS. Ash-Shaff [61]: 2–3 yang menegaskan pentingnya kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Dengan demikian, pendidikan karakter dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk manusia paripurna, berfungsi sebagai penjaga moral masyarakat, dan menggunakan berbagai media yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Pendidikan ini bukan proyek jangka pendek, tetapi proses jangka panjang yang menuntut sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan karakter akan sangat menentukan arah peradaban Islam di masa depan.

D. Sumber dan Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter

Sumber utama pendidikan karakter dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berfungsi sebagai kitab moral yang memberikan prinsip-prinsip dasar akhlak, sedangkan hadis merupakan penjelasan praktis melalui teladan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu*" (QS. Al-Ahzab [33]: 21). Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi model ideal karakter mulia yang harus diteladani dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, maupun profesional.

Selain dua sumber utama tersebut, ijtihad para ulama juga menjadi sumber penting dalam pendidikan karakter. Melalui pendekatan fiqh, tasawuf, dan filsafat Islam, para ulama merumuskan nilai-nilai moral yang relevan dengan konteks sosial dan budaya. Misalnya, konsep *ihsan* dalam tasawuf menekankan kesadaran spiritual dalam setiap perbuatan, sedangkan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam fiqh menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia sebagai tujuan moral hukum Islam (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, pendidikan karakter Islam tidak bersifat dogmatis, tetapi dinamis dan kontekstual.

Sumber lain dari pendidikan karakter adalah tradisi dan budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam sejarah Islam di Indonesia, para ulama Nusantara telah mengintegrasikan budaya lokal ke dalam sistem pendidikan, seperti tradisi *ngaji*, *pengajian malam Jumat*, dan *majlis taklim*. Nilai-nilai gotong royong, sopan santun, dan musyawarah yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian dari moralitas Islam yang diinternalisasi melalui budaya. Dengan demikian,

budaya lokal dapat menjadi media efektif untuk memperkuat nilai-nilai karakter Islami (Azra, 2000).

Nilai-nilai pendidikan karakter Islam bersumber dari konsep tauhid, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah SWT. Tauhid menjadi dasar moral karena menanamkan kesadaran bahwa semua tindakan manusia harus berorientasi kepada Allah. Dengan landasan tauhid, seseorang akan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, karena menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Mujadilah [58]: 7). Nilai tauhid inilah yang melahirkan integritas moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah.

Selain tauhid, nilai-nilai akhlak dalam pendidikan karakter Islam mencakup kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, adil, sabar, dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai *al-Amīn* (orang yang dapat dipercaya), dan sifat ini menjadi teladan utama bagi pembentukan karakter Muslim. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ini bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan. Proses ini sesuai dengan prinsip *ta'dib* (pendisiplinan moral) yang menekankan harmonisasi antara ilmu, amal, dan akhlak (Al-Attas, 1991).

Nilai-nilai karakter Islam juga bersumber dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendidikan yang berkarakter harus mengembangkan kelima nilai tersebut dalam diri peserta didik agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Misalnya, pendidikan yang menumbuhkan kecerdasan akal harus diimbangi dengan pengendalian moral agar ilmu tidak disalahgunakan (Al-Qaradawi, 2007).

Dalam konteks pendidikan nasional, nilai-nilai karakter Islam juga sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan, seperti keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, cinta damai, dan kerja sama. Islam tidak menolak nilai-nilai universal ini selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Justru Islam memperluasnya dengan dimensi spiritual, sehingga pendidikan karakter tidak berhenti pada moral sosial, tetapi juga mencakup moral transendental yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta (Nasution, 2012).

Nilai-nilai pendidikan karakter juga bersumber dari pengalaman dan realitas sosial. Dalam Islam, proses pembentukan akhlak bukan hanya melalui teori, tetapi melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW membina para sahabat melalui interaksi sosial dan praktik nyata, bukan hanya melalui ceramah. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan berbasis keteladanan (*uswah hasanah*) dan pengalaman (*experiential learning*) dalam menanamkan nilai-nilai karakter (Ihsan, 2015).

Nilai-nilai karakter Islam dalam dunia pendidikan modern dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama yaitu spiritual (hubungan dengan Allah), sosial (hubungan dengan sesama), dan moral personal (pengendalian diri). Ketiga ranah ini membentuk kesatuan yang integral dalam membangun insan kamil, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nilai spiritual melahirkan kesadaran batin, nilai sosial menumbuhkan empati, dan nilai moral membangun kepribadian yang berintegritas (Zubaedi, 2015).

Dengan demikian, sumber dan nilai-nilai pendidikan karakter Islam bersifat komprehensif, mencakup wahyu, akal, tradisi, dan pengalaman sosial. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk individu yang baik secara moral, tetapi juga membangun masyarakat yang berperadaban. Karakter Islami bukan hasil hafalan nilai, melainkan hasil internalisasi yang berakar pada iman, ilmu, dan amal saleh. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum karakter Islam harus berpijak pada integrasi antara wahyu dan realitas kehidupan modern.

Sedangkan sumber nilai dari Pendidikan karakter di Indonesia meliputi Pancasila, agama, budaya, dan tujuan Pendidikan nasional. Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dengan nilai-nilai luhurnya, sementara agama menjadi panduan moral dan etika. Budaya menjadi dasar pembentukan makna dalam masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional memuat nilai-nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara.

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan 18 nilai pendidikan karakter bangsa Indonesia yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini dikembangkan untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan manusia yang utuh.

E. Proses Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter dalam pendidikan Islam merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial secara terpadu. Dalam Islam, karakter (*akhlak*) tidak hanya diartikan sebagai perilaku lahiriah, tetapi juga sebagai kondisi batin yang melahirkan perbuatan baik secara spontan tanpa paksaan (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, proses pembentukan karakter harus dimulai dari pembinaan hati (*tazkiyah al-nafs*) agar perilaku yang muncul merupakan cerminan kesucian jiwa dan ketulusan niat karena Allah SWT.

Proses pembentukan karakter dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman, *"Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya"* (QS. Asy-Syams [91]: 9–10). Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada pengetahuan moral, tetapi pada penyucian jiwa yang melahirkan kesadaran etis dari dalam diri. Dengan demikian, pendidikan karakter dalam Islam harus berorientasi pada pembentukan hati yang bersih (*qalibun salim*) sebagai pusat nilai dan perilaku manusia (Al-Attas, 1991).

Menurut Nata (2012), proses pembentukan karakter terdiri atas tiga tahap utama: (1) internalisasi nilai, yaitu pengenalan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral Islam; (2) transformasi nilai, yaitu proses menanamkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai tersebut; dan (3) aktualisasi nilai, yaitu penerapan nilai dalam perilaku nyata. Ketiga tahap ini sejalan dengan konsep *iman, Islam, dan ihsan* dalam Islam, yang menggambarkan perkembangan spiritual dan moral seseorang menuju kesempurnaan akhlak.

Pendidikan karakter juga harus menekankan prinsip keteladanan (*uswah hasanah*) sebagai metode paling efektif dalam proses pembentukan akhlak. Nabi Muhammad SAW membina para sahabat melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar nasihat verbal. Menurut Syed M. Naquib al-Attas (1991), keteladanan merupakan wujud dari *adab*, yaitu harmonisasi antara ilmu, tindakan, dan niat yang benar. Dalam konteks pendidikan modern, guru dan orang

tua menjadi figur sentral dalam memberikan teladan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

Selain keteladanan, pembiasaan (*ta'wid*) juga menjadi strategi utama dalam pembentukan karakter. Anak dan peserta didik perlu dibiasakan dengan perilaku positif secara konsisten agar nilai-nilai moral menjadi bagian dari kebiasaannya. Misalnya, pembiasaan salat tepat waktu, berkata sopan, atau berbagi dengan sesama. Menurut Zubaedi (2015), pembiasaan merupakan proses pembentukan kebiasaan moral yang berulang hingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Dalam Islam, pembiasaan ini diperkuat oleh dorongan spiritual berupa niat ikhlas dan harapan pahala dari Allah SWT.

Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan karakter. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan ekosistem moral yang memengaruhi perilaku individu. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"* (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya peran pendidikan dan lingkungan dalam menjaga kesucian fitrah anak. Karena itu, sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan konsistensi nilai-nilai karakter yang diajarkan (Lickona, 2004).

Konteks pendidikan Islam modern, pembentukan karakter juga harus memanfaatkan pendekatan psikologis dan pedagogis yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Piaget dan Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral memiliki tahapan yang harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif anak. Islam mengakomodasi hal ini melalui prinsip *tadarruj* (bertahap), di mana nilai moral diperkenalkan secara bertahap sesuai usia dan tingkat pemahaman peserta didik (Arifin, 2011). Pendekatan ini menjamin agar nilai-nilai moral tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati secara emosional.

Selain itu, evaluasi karakter harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan Islam. Penilaian karakter tidak cukup hanya berdasarkan hasil akademik, tetapi harus melibatkan observasi perilaku, sikap, dan spiritualitas. Menurut Zarkasyi (2019), evaluasi karakter dapat dilakukan melalui refleksi diri (*muhasabah*), penilaian sejawat, dan penilaian guru secara holistik. Dalam Islam, evaluasi ini mencerminkan

konsep *hisab*, yaitu introspeksi moral terhadap setiap perbuatan manusia di dunia sebagai bekal menuju akhirat.

Peran spiritualitas dan ibadah tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan karakter. Ibadah dalam Islam bukan hanya ritual, tetapi sarana pembinaan moral. Salat menumbuhkan disiplin dan kesadaran spiritual, puasa menanamkan empati dan pengendalian diri, sedekah mengajarkan solidaritas sosial. Seperti dinyatakan oleh Al-Qaradawi (2007), pendidikan karakter sejati tidak akan terwujud tanpa penguatan dimensi spiritual yang menjadi fondasi kepribadian Muslim sejati.

Akhirnya, pembentukan karakter Islam harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan (*lifelong process*). Karakter tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang pembelajaran, pengalaman, dan pembiasaan. Dalam era modern yang penuh tantangan moral, pendidikan karakter Islam harus terus dikontekstualisasikan agar mampu menuntun peserta didik menjadi manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat (Marzuki, 2018).

F. Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an dan Hadis

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam Islam bersumber utama dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Keduanya bukan hanya mengajarkan aspek ritual, tetapi juga menuntun manusia membangun moralitas dan kepribadian mulia. Menurut Al-Attas (1991), Al-Qur'an adalah sumber adab tertinggi karena memuat prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab yang membentuk pribadi beradab. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi penjelas praktis atas nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pendidikan karakter dalam Islam memiliki fondasi wahyu yang menyeluruh dan universal.

Salah satu nilai utama dalam pendidikan karakter Islam adalah kejujuran (*ṣidq*). Allah SWT berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur*" (QS. At-Taubah [9]: 119). Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran merupakan dasar dari keimanan dan kunci kepercayaan sosial. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke*

surga” (HR. Bukhari dan Muslim). Nilai kejujuran ini menjadi inti pendidikan karakter yang menumbuhkan integritas moral peserta didik (Lickona, 2004).

Nilai berikutnya adalah amanah (tanggung jawab) yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman, *“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya; dan dipikullah amanah itu oleh manusia”* (QS. Al-Ahzab [33]: 72). Amanah menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kepercayaan yang diberikan. Menurut Nata (2012), pendidikan karakter berbasis amanah menanamkan kesadaran akan kewajiban dan konsekuensi moral dari setiap perbuatan.

Nilai disiplin dan keteguhan (*istiqāmah*) juga memiliki posisi penting dalam pendidikan karakter. Allah SWT berfirman, *“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas”* (QS. Hud [11]: 112). Istiqamah berarti konsisten dalam kebaikan meskipun menghadapi kesulitan. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan, *“Katakanlah: aku beriman kepada Allah, lalu beristiqamahlah”* (HR. Muslim). Nilai ini melatih peserta didik untuk memiliki keteguhan prinsip, tidak mudah tergoda oleh kepentingan sesaat, dan tetap berpegang pada nilai moral yang benar (Marzuki, 2018).

Selain itu, nilai kasih sayang (*rahmah*) menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit”* (HR. Tirmidzi). Nilai rahmah ini menumbuhkan empati sosial, kepedulian, dan semangat kemanusiaan universal. Dalam konteks pendidikan, nilai kasih sayang menjadi dasar pendekatan humanistik dan pedagogi Islam yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang perlu dihormati dan disayangi (Syamsuddin, 2019).

Nilai keadilan (*‘adl*) juga menjadi unsur fundamental dalam pembentukan karakter. Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan”* (QS. An-Nahl [16]: 90). Keadilan dalam pendidikan karakter bermakna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak

berlebihan, dan tidak merugikan orang lain. Menurut Zarkasyi (2019), pendidikan yang menanamkan nilai keadilan mendorong peserta didik untuk berpikir objektif dan menghargai hak orang lain sebagai bagian dari etika sosial Islam.

Nilai berikutnya adalah tawakal dan kesabaran (*ṣabr*). Allah SWT memuji orang-orang yang sabar dalam firman-Nya, *“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”* (QS. Al-Baqarah [2]: 153). Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi kekuatan mental untuk menghadapi ujian hidup dengan optimisme. Dalam hadis disebutkan, *“Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran”* (HR. Bukhari). Nilai sabar dan tawakal menumbuhkan ketangguhan karakter (*resilience*), yang penting dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di era modern (Al-Qaradawi, 2007).

Nilai rendah hati (*tawāḍuʿ*) juga menjadi ciri penting akhlak Islami. Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan Allah tidak menambah kepada seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan; dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya”* (HR. Muslim). Tawadhu’ membentuk karakter yang tidak sombong, mau belajar, dan menghormati orang lain. Menurut Zubaedi (2015), pendidikan karakter yang menumbuhkan kerendahan hati menghasilkan individu yang mampu berinteraksi dengan empati dan menghargai keberagaman.

Selain itu, nilai tolong-menolong (*taʾāwun*) juga ditegaskan dalam Al-Qur’an: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”* (QS. Al-Ma’idah [5]: 2). Nilai ini mengajarkan kerja sama sosial, solidaritas, dan semangat gotong royong yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa. Dalam pendidikan, taʾāwun membentuk karakter kolektif yang menghargai kebersamaan dan menolak individualisme ekstrem (Hidayatullah, 2016).

Keseluruhan nilai-nilai tersebut pada dasarnya berorientasi pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas. Menurut Al-Attas (1991), insan kamil adalah hasil pendidikan yang menempatkan *ta’dīb* (penanaman adab) sebagai tujuan utama. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Al-Qur’an dan hadis tidak hanya

mencetak individu berakhlak baik secara personal, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

G. Pendidikan Karakter sebagai Proses Sosialisasi, Enkulturas, dan Internalisasi Nilai

Pendidikan karakter tidak hanya berfungsi sebagai proses pembelajaran kognitif, tetapi juga merupakan suatu proses sosial dan kultural yang menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam diri individu. Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter terjadi melalui mekanisme sosialisasi, enkulturas, dan internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Tilaar (2002), pendidikan merupakan instrumen utama bagi reproduksi dan transformasi budaya, karena melalui pendidikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini memastikan kesinambungan moralitas dalam kehidupan sosial umat manusia.

Sosialisasi nilai dalam pendidikan karakter berarti proses mengenalkan norma dan perilaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Proses ini dimulai sejak masa kanak-kanak melalui teladan keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Menurut Lickona (2004), sosialisasi moral menuntut adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan dari pendidik agar nilai yang ditanamkan dapat ditiru oleh anak. Dalam Islam, sosialisasi nilai juga dipandu oleh konsep *uswah hasanah* (keteladanan yang baik) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 21 bahwa Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik bagi umatnya. Dengan demikian, sosialisasi karakter Islami harus berakar pada teladan akhlak Rasulullah.

Sementara itu, enkulturas adalah proses pembiasaan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi identitas suatu komunitas. Enkulturas menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, dan penghormatan kepada orang tua adalah contoh konkret dari internalisasi budaya yang sejalan dengan ajaran Islam. Menurut Koentjaraningrat (2009), enkulturas merupakan jalan untuk menumbuhkan identitas kultural individu agar dapat berfungsi secara harmonis di masyarakatnya. Dalam pendidikan Islam,

proses ini berjalan melalui kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, majelis ta'lim, dan kegiatan keumatan lainnya.

Proses internalisasi nilai merupakan tahap paling dalam dalam pendidikan karakter. Internalisasi berarti penanaman nilai hingga menjadi bagian dari kesadaran diri seseorang, bukan sekadar pengetahuan. Nilai-nilai yang sudah diinternalisasi akan membentuk sistem kepercayaan dan motivasi moral yang memandu perilaku individu. Menurut Hidayatullah (2016), internalisasi nilai dalam pendidikan karakter dilakukan melalui tiga tahapan: pengetahuan nilai (*knowing*), penghayatan nilai (*feeling*), dan pengamalan nilai (*doing*). Dalam pendidikan Islam, proses ini diperkuat oleh dimensi spiritual seperti dzikir, refleksi diri, dan niat yang ikhlas.

Ketiga proses tersebut—sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi—tidak berlangsung secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan menguatkan. Sosialisasi menjadi pintu awal pengenalan nilai, enkulturasi memperkaya nilai dengan makna budaya, dan internalisasi meneguhkan nilai dalam kepribadian. Menurut Zubaedi (2015), keberhasilan pendidikan karakter ditentukan oleh sinergi antara ketiga proses ini dalam berbagai lingkungan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan karakter perlu holistik dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya peserta didik.

Sosialisasi dan enkulturasi nilai dalam perspektif Islam berlandaskan pada prinsip *ta'dib* (pembentukan adab). Al-Attas (1991) menjelaskan bahwa *ta'dib* mencakup proses mengenalkan seseorang kepada kebenaran hakiki dan menempatkannya sesuai dengan derajatnya dalam tatanan ciptaan. Dengan kata lain, pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan etika sosial, tetapi juga mengarahkan manusia untuk memahami posisinya di hadapan Allah SWT. Sosialisasi dan enkulturasi dalam konteks ini berarti membentuk manusia beradab yang sadar akan tanggung jawab spiritual dan sosialnya.

Ketiga proses tersebut dalam konteks keluarga, menjadi pilar utama pendidikan karakter. Orang tua berperan sebagai agen sosialisasi pertama, memperkenalkan nilai moral melalui teladan dan pembiasaan sehari-hari. Keluarga juga menjadi ruang pertama enkulturasi, di mana anak belajar mengenal budaya, bahasa, dan tradisi keagamaan. Menurut Hasan (2010), keluarga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai

religius dan sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter di sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai institusi moral pertama.

Sekolah kemudian berfungsi memperkuat proses tersebut melalui kurikulum, kegiatan belajar, dan budaya sekolah. Melalui program pembiasaan seperti shalat berjamaah, kegiatan sosial, dan disiplin belajar, peserta didik belajar menerapkan nilai-nilai yang disosialisasikan dalam keluarga. Menurut Naim (2011), sekolah merupakan tempat internalisasi nilai secara sistematis, di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang kebaikan, tetapi juga mengalami dan mempraktikkannya. Sekolah berperan sebagai jembatan antara dunia keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter Islami.

Sementara itu, masyarakat menjadi ruang aktualisasi dari nilai-nilai yang telah diinternalisasi. Lingkungan sosial yang kondusif akan memperkuat karakter individu yang berakhlak baik, sedangkan lingkungan yang rusak dapat mengikis nilai-nilai moral yang telah ditanamkan. Oleh karena itu, menurut Marzuki (2018), pendidikan karakter harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sosialisasi dan enkulturasi nilai menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat.

Proses sosialisasi dan enkulturasi nilai dalam era globalisasi menghadapi tantangan besar berupa pengaruh budaya luar dan individualisme modern. Nilai-nilai materialistik sering kali mendominasi media dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus mampu menyeleksi budaya yang sesuai dengan prinsip Islam dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa. Menurut Darmiyati Zuchdi (2011), pendidikan karakter yang efektif di era modern harus berfungsi sebagai filter moral terhadap deras arus globalisasi, sekaligus sebagai sarana pelestarian budaya dan moral bangsa.

Kesimpulannya, pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses yang menyeluruh, yang mencakup sosialisasi nilai melalui keteladanan, enkulturasi melalui pembiasaan budaya, dan internalisasi melalui pembentukan kesadaran moral-spiritual. Ketiga proses ini tidak hanya membentuk individu yang berakhlak mulia, tetapi juga memperkuat identitas keislaman dan kebangsaan. Dengan mengintegrasikan ketiganya secara sistematis, pendidikan Islam dapat

mencetak generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu menjaga harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan modern.

H. Urgensi Pendidikan Karakter bagi Pembangunan Bangsa

Pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa karena menjadi fondasi moral, sosial, dan spiritual bagi terbentuknya peradaban yang bermartabat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kemajuan ekonomi atau teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Menurut Megawangi (2004), krisis yang melanda bangsa ini bukan semata-mata krisis ekonomi atau politik, melainkan krisis moral dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi kunci utama dalam membangun bangsa yang beradab dan berdaya saing.

Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Dalam pandangan Tilaar (2002), pendidikan merupakan sarana strategis untuk mewujudkan masyarakat madani yang berkeadaban. Artinya, pembangunan bangsa yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan moral individu melalui pendidikan karakter. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dalam membentuk kepribadian dan etika sosial warga negaranya.

Pendidikan karakter dalam perspektif Islam, memiliki urgensi yang sangat tinggi karena terkait langsung dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai *'abdullah* (hamba Allah) dan *khalifah fil ardh* (pemakmur bumi). Menurut Al-Ghazali (2005), pembangunan manusia sejati adalah pembangunan moral dan spiritual yang menghasilkan pribadi beriman dan bertanggung jawab terhadap sesama. Tanpa nilai-nilai akhlak dan iman, pembangunan duniawi akan kehilangan arah dan makna. Oleh karena itu, pendidikan karakter Islami menjadi pondasi bagi pembangunan bangsa yang tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Pendidikan karakter juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap degradasi moral yang terjadi di masyarakat modern. Fenomena

seperti korupsi, kekerasan, intoleransi, dan penyalahgunaan teknologi merupakan bukti lemahnya penghayatan nilai moral. Menurut Zubaedi (2015), pendidikan karakter tidak boleh dipahami sebagai program tambahan, melainkan sebagai inti dari seluruh proses pendidikan nasional. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan sistem nilai yang membentuk individu berintegritas tinggi. Tanpa karakter yang kuat, bangsa akan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman dan kepentingan pragmatis.

Selain membentuk moral individu, pendidikan karakter juga memperkuat integrasi sosial dan solidaritas kebangsaan. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, karakter toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi modal utama menjaga persatuan bangsa. Menurut Ki Hadjar Dewantara (1935), pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi wahana untuk menanamkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air dalam bingkai nilai-nilai spiritual dan budaya lokal.

Pendidikan karakter dalam era globalisasi berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh negatif budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Gaya hidup konsumtif, hedonisme, dan individualisme merupakan tantangan besar bagi generasi muda. Menurut Darmiyati Zuchdi (2011), pendidikan karakter di abad ke-21 harus berfungsi sebagai benteng moral sekaligus sebagai sarana pembentukan *global citizenship* yang beretika dan berkeadaban. Artinya, pendidikan tidak hanya menyiapkan generasi cerdas, tetapi juga generasi yang memiliki kepribadian kuat dan tangguh menghadapi perubahan dunia.

Lebih jauh, pendidikan karakter juga memiliki dimensi ekonomi dan politik yang signifikan. Bangsa yang berkarakter kuat cenderung memiliki etos kerja tinggi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian Lickona (2004), negara-negara maju menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas utama karena terbukti meningkatkan produktivitas dan stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan amanah merupakan kunci membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Pendidikan karakter juga menjadi modal sosial bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut Coleman (1998), modal sosial terbentuk dari jaringan kepercayaan, norma, dan nilai yang hidup di masyarakat. Dalam pendidikan Islam, hal ini sejalan dengan konsep *ukhuwah Islamiyah* dan *amanah*, yang menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Masyarakat dengan karakter yang kuat akan lebih mudah membangun solidaritas sosial, inovasi, dan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pembangunan holistik.

Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi disrupsi teknologi dan ekonomi digital. Menurut UNESCO (2015), pendidikan abad ke-21 harus menanamkan empat pilar utama: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Pendidikan karakter berperan pada dua pilar terakhir, yaitu membentuk kepribadian yang utuh dan kemampuan hidup bersama secara damai. Dengan demikian, pembangunan bangsa tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kualitas moral dan kemanusiaan.

Akhirnya, urgensi pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa terletak pada perannya sebagai penuntun arah moral peradaban. Bangsa yang besar bukanlah bangsa dengan sumber daya alam melimpah, tetapi bangsa dengan karakter warga negara yang jujur, disiplin, dan berakhlak. Dalam pandangan Hidayatullah (2016), pendidikan karakter adalah jalan menuju peradaban unggul (*civilized nation*) yang menempatkan nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai dasar pembangunan. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam dan budaya lokal menjadi prasyarat bagi terwujudnya bangsa yang maju, beradab, dan berkeadilan.

I. Nilai-Nilai Karakter dalam Budaya Lokal

Budaya lokal memiliki kekayaan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan pembentukan karakter masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan refleksi dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni sosial. Dalam konteks pendidikan karakter, nilai-nilai budaya lokal ini dapat dijadikan rujukan utama untuk memperkuat jati diri peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia serta sikap sosial yang adaptif terhadap lingkungan masyarakatnya (Tilaar, 2012). Pendidikan

karakter berbasis budaya lokal mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Selanjutnya, nilai-nilai budaya lokal juga berfungsi sebagai sistem moral yang telah teruji oleh waktu dan diwariskan melalui tradisi, pepatah, upacara adat, serta kesenian rakyat. Misalnya, dalam budaya Jawa terdapat falsafah *"ngajeni liyan"* (menghormati orang lain), sedangkan dalam budaya Bugis dikenal konsep *"siri' na pacce"* (harga diri dan solidaritas). Nilai-nilai ini mendukung terbentuknya perilaku sosial yang beradab, saling menghormati, dan berempati terhadap sesama (Koentjaraningrat, 2009). Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal semacam ini mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kultural bangsa.

Integrasi budaya lokal dalam pendidikan juga menumbuhkan kesadaran multikultural di kalangan peserta didik. Dengan mengenali dan menghargai perbedaan budaya, siswa dapat memahami bahwa karakter tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan dalam konteks sosial yang kaya akan makna. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong akan memperkuat ketahanan sosial bangsa di tengah arus globalisasi (Wibowo, 2013). Karena itu, guru perlu berperan sebagai fasilitator yang menanamkan nilai-nilai luhur lokal melalui pembelajaran kontekstual.

Di sisi lain, globalisasi yang membawa budaya konsumtif dan individualistik berpotensi mengikis nilai-nilai luhur budaya lokal. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus berperan sebagai benteng moral yang menjaga warisan nilai bangsa. Misalnya, penguatan nilai kesederhanaan dan tanggung jawab sosial dapat menjadi penyeimbang terhadap gaya hidup hedonistik. Dalam konteks ini, pendidikan karakter tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai yang dihidupi dalam perilaku sehari-hari (Suparlan, 2015).

Pendidikan berbasis budaya lokal juga memiliki implikasi pada pembentukan etos kerja dan moralitas masyarakat. Dalam banyak budaya Nusantara, kerja keras, keikhlasan, dan rasa syukur merupakan nilai utama yang mendorong kemandirian dan keberhasilan hidup. Nilai-nilai ini relevan untuk ditanamkan dalam konteks pendidikan modern agar peserta didik memiliki daya saing sekaligus berkarakter kuat (Suyanto, 2018). Oleh karena itu, pendidikan karakter yang mengakar

pada budaya lokal dapat menjadi strategi kultural dalam membangun peradaban bangsa yang bermoral.

Lebih jauh, nilai-nilai lokal dapat menjadi sumber pembelajaran kontekstual yang memperkaya kurikulum nasional. Guru dapat menggunakan cerita rakyat, tradisi lisan, atau praktik adat sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Pendekatan ini tidak hanya mendekatkan peserta didik pada lingkungannya, tetapi juga memperkuat identitas nasional di tengah keragaman budaya (Suyatno, 2019). Dengan demikian, pendidikan karakter tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial.

Pendidikan karakter berbasis budaya lokal juga berkontribusi dalam memperkuat moral spiritual bangsa. Banyak nilai budaya Nusantara memiliki dasar religius, seperti sikap hormat kepada orang tua, kesederhanaan, dan ketaatan terhadap norma sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan *akhlaq al-karimah* sebagai inti dari keimanan. Sinergi antara nilai budaya dan nilai agama dapat menciptakan pendidikan karakter yang integral dan kontekstual (Azra, 2010).

Selain itu, pendidikan berbasis budaya lokal mampu menumbuhkan sense of belonging terhadap masyarakat dan tanah air. Ketika peserta didik memahami makna budaya leluhur, mereka akan lebih mencintai dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan modern. Hal ini menjadi bentuk nyata dari nasionalisme kultural yang memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk (Dewantara, 2020). Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diarahkan pada pembentukan warga negara yang berbudaya sekaligus beriman.

Penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan juga memerlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ketiganya menjadi ekosistem yang saling melengkapi dalam membentuk karakter peserta didik. Misalnya, lembaga adat dan tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pendidikan untuk memperkuat keterhubungan antara sekolah dan komunitas (Hidayat, 2021). Dengan demikian, pendidikan karakter akan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial yang nyata.

Akhirnya, nilai-nilai budaya lokal harus terus dikaji, diadaptasi, dan dikembangkan agar tetap relevan dengan konteks zaman. Pendidikan

karakter yang efektif adalah pendidikan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan substansi moralnya. Dengan cara ini, pendidikan berbasis budaya lokal akan terus menjadi fondasi kuat bagi pembangunan karakter bangsa yang beradab, beriman, dan berkepribadian Indonesia (Gunawan, 2016).

J. Konstruksi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal

Konstruksi pendidikan karakter berbasis budaya lokal adalah upaya sistematis untuk membangun model pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur masyarakat melalui proses pembelajaran. Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa setiap bangsa memiliki warisan budaya yang sarat nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak boleh bersifat impor, tetapi harus berakar pada konteks sosial-budaya bangsa sendiri (Suyatno, 2019). Pendidikan yang dikonstruksi dari budaya lokal akan lebih mudah diterima oleh peserta didik karena dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Model konstruktif ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap nilai-nilai tradisional agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern. Misalnya, nilai gotong royong dapat diaktualisasikan dalam bentuk kolaborasi dalam proyek belajar, sedangkan nilai sopan santun diwujudkan dalam etika komunikasi digital di era teknologi. Dengan cara ini, pendidikan karakter tidak menjadi romantisasi masa lalu, tetapi proses dinamis yang relevan dengan tantangan zaman (Gunawan, 2016). Relevansi inilah yang membuat pendidikan karakter berbasis budaya lokal tetap hidup dan kontekstual.

Konstruksi pendidikan karakter berbasis budaya lokal juga harus memperhatikan landasan filosofis dan pedagogis. Secara filosofis, pendidikan ini berlandaskan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Secara pedagogis, pendekatannya menekankan partisipasi aktif peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai melalui pengalaman langsung (Tilaar, 2012). Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun siswa menemukan makna moral dari nilai-nilai budaya lokal yang dipelajari.

Dalam konteks Islam, konstruksi ini menemukan legitimasi teologis dalam konsep *'urf* (tradisi) yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Banyak nilai budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam seperti tolong-menolong (*ta'awun*), kejujuran (*shidq*), dan hormat pada orang tua (*birrul walidain*). Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia (Azra, 2010). Integrasi ini menciptakan sinergi antara agama dan budaya dalam proses pendidikan moral.

Selain itu, konstruksi pendidikan karakter berbasis budaya lokal memerlukan kebijakan pendidikan yang mendukung. Kurikulum harus memberi ruang bagi muatan lokal yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan daerah. Pemerintah daerah bersama sekolah dan komunitas adat dapat berkolaborasi dalam mengembangkan program pendidikan karakter yang sesuai dengan identitas budaya masing-masing daerah (Hidayat, 2021). Dengan demikian, pendidikan menjadi proses sosial yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan kebudayaan.

Konstruksi pendidikan karakter berbasis budaya lokal dapat dilakukan dengan:

1. Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Kurikulum Sekolah. Konstruksi pertama adalah integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan, baik secara eksplisit maupun implisit. Nilai-nilai seperti *gotong royong*, *musyawarah*, *hormat kepada orang tua*, *kejujuran*, dan *tanggung jawab* dapat dimasukkan dalam mata pelajaran PPKn, IPS, maupun Pendidikan Agama Islam. Guru berperan sebagai fasilitator yang menautkan konsep akademik dengan kearifan lokal daerah. Integrasi ini membuat peserta didik tidak hanya memahami konsep moral, tetapi juga merasakan relevansinya dengan kehidupan nyata di lingkungannya (Zubaedi, 2011).
2. Pembiasaan dan Keteladanan Berbasis Budaya. Konstruksi kedua adalah pendidikan karakter melalui pembiasaan dan keteladanan (*habit formation and modeling*). Peserta didik belajar dari perilaku guru, orang tua, dan tokoh masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Pembiasaan seperti *gotong royong membersihkan lingkungan sekolah*, *menghormati tamu*, *berbicara sopan*, dan *menjaga harmoni sosial* merupakan praktik nyata pendidikan karakter. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan konsep *uswah hasanah* (keteladanan yang

- baik) sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. (QS. Al-Ahzab [33]: 21).
3. Pembelajaran Kontekstual dan Partisipatif. Konstruksi ketiga adalah pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) yang menempatkan budaya lokal sebagai sumber belajar. Peserta didik diajak untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan berbasis proyek (*project-based learning*), eksplorasi tradisi lokal, dan observasi budaya masyarakat. Metode ini mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman hidup peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan transformatif (Sauri, 2017).
 4. Revitalisasi Tradisi dan Kearifan Lokal. Konstruksi keempat adalah revitalisasi tradisi dan kearifan lokal sebagai sarana pembentukan karakter. Tradisi daerah seperti *wayang kulit*, *pantun nasihat Melayu*, *petatah-petitih Minangkabau*, atau *upacara adat Sunda* mengandung pesan moral yang kuat. Melalui kegiatan seni, permainan tradisional, dan budaya tutur, nilai-nilai seperti disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab dapat dihidupkan kembali. Pendekatan ini sesuai dengan gagasan pendidikan *inkulturatif* yang menempatkan budaya sebagai sarana internalisasi nilai (Tilaar, 2012).
 5. Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Komunitas Lokal. Konstruksi kelima menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat lokal (*community-based education*). Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga melibatkan tokoh adat, ulama, dan komunitas budaya setempat. Model ini membangun *ekosistem pendidikan karakter* yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai budaya tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam praktik sosial sehari-hari (Azra, 2016).

Daftar Bacaan

- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Arifin, M. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Assegaf, A. R. (2014). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azra, A. (2016). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Coleman, J. S. (1998). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology, 94(S1), S95–S120.
- Darmiyati Zuchdi. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Gunawan, H. (2016). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, S. H. (2010). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- Hidayat, M. (2021). *Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, M. F. (2016). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Ibnu Khaldun. (2000). *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Ibnu Miskawaih. (2010). *Tahdzib al-Akhlak*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibnu Sina. (2005). *Al-Siyasah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ihsan, F. (2015). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Psikologi*. Bandung: Alfabeta.
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Daring)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kemdiknas. (2010). *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta.
- Ki Hadjar Dewantara. (1935). *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. New York: Simon & Schuster.
- Marzuki. (2018). *Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.

- Naim, N. (2011). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasution, H. (2012). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samani, M., & Hariyanto. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sauri, S. (2017). *Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2015). *Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Urgensi Pendidikan Karakter di Era Global*. Malang: UMM Press.
- Suyatno. (2019). *Pendidikan Karakter dalam Konteks Budaya Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, M. (2019). *Etika Sosial dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebudayaan dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* Paris: UNESCO Publishing.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zarkasyi, H. F. (2019). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter di Era Globalisasi*. Malang: UIN Press.
- Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, S. (2019). "Model Pendidikan Karakter di Pesantren Tradisional." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–162.

Pendidikan Entrepreneurship dalam Tinjauan Pendidikan Islam

A. Pengertian Pendidikan Entrepreneurship

Secara umum, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha baru dengan memanfaatkan peluang serta menanggung risiko yang terkait untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis *entreprendre* yang berarti “melakukan” atau “memulai sesuatu” (Zimmerer & Scarborough, 2008). Dalam konteks ekonomi modern, entrepreneur tidak hanya berfokus pada penciptaan keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga pada inovasi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi sosial (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2017).

Entrepreneur dalam pandangan Islam disebut sebagai *at-tijarah* (perdagangan atau usaha) yang memiliki dimensi spiritual dan moral, bukan sekadar ekonomi. Seorang wirausahawan Muslim dituntut untuk berbisnis dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, dan tanggung jawab (*mas’uliyah*) sesuai ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dipercaya (*al-Amīn*), sehingga menjadi teladan utama dalam etika kewirausahaan Islami (Qardhawi, 1997).

Dengan demikian, entrepreneur adalah individu yang memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif dan risiko dalam mengembangkan ide atau peluang menjadi usaha yang bernilai ekonomi dan sosial. Seorang entrepreneur tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada proses penciptaan nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Lebih jauh, entrepreneur ditandai dengan semangat inovatif, kemandirian, serta kemampuan membaca dan mengelola perubahan. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan juga dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT melalui kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, entrepreneur ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual dalam setiap aktivitas usahanya.

Sedangkan entrepreneurship adalah proses atau kemampuan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dengan tujuan menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk ekonomi maupun sosial. Entrepreneurship mencakup berbagai aktivitas seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian sumber daya, hingga pengelolaan risiko untuk mencapai keberhasilan usaha (Zimmerer & Scarborough, 2008).

Dalam konteks yang lebih luas, entrepreneurship juga merupakan sikap hidup yang menekankan kreativitas, keberanian, dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan. Dalam pandangan Islam, entrepreneurship tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada kemaslahatan umat serta keberkahan rezeki yang diperoleh secara halal (Abdurrahman, 2019). Dengan demikian, entrepreneurship merupakan kombinasi antara inovasi, etika, dan spiritualitas dalam menciptakan kemajuan ekonomi yang berkeadilan.

Disisi lain pendidikan entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan proses sistematis untuk menumbuhkan jiwa, sikap, dan kemampuan seseorang agar mampu menciptakan peluang, mengelola sumber daya, serta berinovasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam konteks Islam, entrepreneurship tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan manifestasi nilai-nilai kemandirian, kerja keras, serta tanggung jawab sosial. Menurut Drucker (1985), entrepreneurship adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai melalui inovasi.

Islam memandang wirausaha sebagai profesi mulia, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Aktivitas perdagangan merupakan salah satu sumber ekonomi yang sangat dihargai dalam Islam karena mendukung kemandirian umat dan menghindarkan dari ketergantungan. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa “sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada pada perdagangan.” Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan entrepreneurship dalam membangun kesejahteraan umat.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengertian pendidikan entrepreneurship mengandung dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya membentuk manusia yang kreatif dan produktif, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (*amānah*). Oleh sebab itu, pendidikan entrepreneurship Islami menjadi bagian integral dari misi pendidikan Islam yang bertujuan menghasilkan insan kamil.

Pendekatan pendidikan entrepreneurship dalam Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan duniawi dan nilai ukhrawi. Proses pembelajaran diarahkan agar peserta didik memahami konsep usaha sebagai ibadah yang memiliki nilai di sisi Allah SWT. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari keberkahan dan kontribusi sosialnya.

Pendidikan entrepreneurship Islami menciptakan individu yang tidak sekadar mampu mengelola bisnis, melainkan juga menjadi agen perubahan yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, pendidikan ini perlu dikembangkan sejak dini melalui kurikulum yang menumbuhkan semangat kemandirian, inovasi, dan tanggung jawab sosial.

Nilai spiritualitas menjadi fondasi utama dalam pendidikan kewirausahaan Islam. Hal ini menegaskan bahwa setiap usaha manusia harus disertai niat yang benar dan berlandaskan etika Islam. Dalam QS. Al-Jumu‘ah [62]:10, Allah SWT berfirman: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” Ayat ini menunjukkan keseimbangan antara aktivitas duniawi dan orientasi ukhrawi.

Pendidikan entrepreneurship Islami juga menekankan pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Rasulullah SAW bersabda: *“Pedagang yang*

jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi). Nilai ini harus menjadi inti dalam setiap kurikulum kewirausahaan yang dikembangkan di lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, pendidikan entrepreneurship dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat. Melalui kegiatan produksi dan distribusi yang beretika, peserta didik dilatih untuk menciptakan solusi atas masalah sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Konsep ini dikenal sebagai *social entrepreneurship* dalam kerangka Islam.

Secara filosofis, pendidikan entrepreneurship Islami mengandung unsur tauhid, yakni meyakini bahwa segala aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, motivasi utama dalam berwirausaha bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menggapai ridha-Nya.

Kurikulum pendidikan entrepreneurship dalam Islam harus mencakup tiga dimensi utama: penguatan spiritual, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter. Ketiganya menjadi pondasi bagi munculnya wirausahawan Muslim yang unggul dan beretika.

Dengan demikian, pengertian pendidikan entrepreneurship dalam Islam lebih luas daripada konsep konvensional. Ia merupakan upaya menyatukan nilai iman, amal, dan ilmu untuk menciptakan insan berjiwa mandiri yang berkontribusi bagi kemaslahatan umat.

B. Esensi dan Urgensi Pendidikan Entrepreneurship

Pendidikan entrepreneurship dalam perspektif Islam memiliki esensi yang lebih dalam dibandingkan dengan pendidikan kewirausahaan konvensional. Esensinya terletak pada integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan ekonomi yang berpijak pada prinsip tauhid. Tujuan utama pendidikan entrepreneurship bukan sekadar mencetak individu yang mandiri secara finansial, melainkan membentuk insan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberkahan rezeki yang diperolehnya (Haneef, 2011).

Dalam pandangan Islam, kewirausahaan adalah bagian dari ibadah muamalah yang memiliki nilai di sisi Allah SWT. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat baik, kejujuran, dan etika menjadi bentuk pengabdian kepada-Nya. Karena itu, pendidikan entrepreneurship Islami memiliki urgensi dalam membangun kesadaran bahwa bekerja keras dan

berinovasi merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia di muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]:105: “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.”

Esensi pendidikan entrepreneurship juga mencakup dimensi kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki mandat untuk mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, urgensi pendidikan entrepreneurship adalah membentuk individu yang kreatif, produktif, dan beretika, serta mampu menjadikan kegiatan ekonominya sebagai sarana pengabdian dan pelayanan sosial (Asnawi, 2019).

Dalam konteks sosial, pendidikan entrepreneurship berfungsi sebagai sarana pemberdayaan umat. Melalui pendidikan ini, masyarakat Islam didorong untuk mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain, sehingga tercipta ekonomi umat yang kuat dan berkeadilan. Hal ini menjadi relevan di tengah fenomena ketimpangan ekonomi global dan krisis moral dalam dunia bisnis modern (Zainuddin, 2020).

Urgensi lainnya terletak pada peran pendidikan entrepreneurship dalam membangun karakter. Nilai-nilai seperti kerja keras (*al-jidd wa al-ijtihad*), kejujuran (*ash-shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*‘adl*) harus menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi. Pendidikan kewirausahaan yang berlandaskan nilai Islam akan melahirkan pelaku usaha yang tidak hanya sukses secara material tetapi juga berakhlak mulia.

Dari sisi ekonomi, pendidikan entrepreneurship Islami berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya bekerja dan melarang umatnya berpangku tangan. Dalam hadis riwayat al-Bukhari, beliau bersabda: “Sungguh, seseorang di antara kalian yang mengambil tali lalu pergi membawa kayu bakar di punggungnya dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta.” Hadis ini menunjukkan nilai kemandirian dan kerja keras sebagai bagian dari ajaran Islam.

Pendidikan entrepreneurship juga menjadi kebutuhan strategis bagi lembaga pendidikan Islam. Di era globalisasi dan digitalisasi, peserta didik harus dibekali kemampuan berpikir kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan ekonomi yang berubah cepat. Sekolah, madrasah, dan pesantren perlu mengembangkan program pendidikan

kewirausahaan Islami yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kompetensi (Nata, 2019).

Esensi lain dari pendidikan entrepreneurship Islami adalah keberkahan (*barakah*) dalam usaha. Keberkahan diperoleh ketika usaha dilakukan dengan niat yang benar dan menjauhi praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan penipuan. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan Islami harus menanamkan pemahaman tentang etika bisnis syariah dan prinsip halal dalam seluruh aktivitas ekonomi.

Pendidikan entrepreneurship dalam Islam juga mendukung tujuan *maqāṣid al-syarīʿah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kegiatan wirausaha yang jujur dan bermanfaat berkontribusi terhadap perlindungan kelima unsur tersebut. Dengan demikian, pendidikan entrepreneurship Islami memiliki posisi penting dalam mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Urgensi pendidikan entrepreneurship semakin terasa di tengah perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital. Generasi muda Muslim perlu dibekali wawasan syariah agar mampu beradaptasi dengan era digital tanpa kehilangan nilai spiritual. Pendidikan ini juga berfungsi menumbuhkan *mindset* inovatif yang berlandaskan akhlak karimah dan nilai ukhuwah Islamiyah.

Dengan demikian, pendidikan entrepreneurship dalam Islam merupakan kebutuhan multidimensi. Ia berfungsi sebagai sarana pembinaan akhlak, pemberdayaan ekonomi, dan transformasi sosial. Tanpa dimensi spiritual dan moral, kewirausahaan hanya akan melahirkan materialisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Akhirnya, pendidikan entrepreneurship Islami menjadi jembatan antara iman dan amal dalam konteks ekonomi modern. Ia memadukan profesionalisme, kreativitas, dan tanggung jawab spiritual, sehingga umat Islam dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkeberkahan.

C. Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan dalam Al-Qur'an

Nilai-nilai kewirausahaan dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Islam tidak memandang aktivitas ekonomi sebagai urusan dunia semata, melainkan bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan Islami harus menanamkan prinsip-prinsip spiritual yang

membentuk etos kerja berlandaskan iman, kejujuran, dan tanggung jawab moral (Chapra, 2000).

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya *'amal ṣāliḥ* (perbuatan baik) dalam setiap aktivitas, termasuk dalam dunia bisnis. Kewirausahaan dalam Islam bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Nilai ini ditegaskan dalam QS. Al-Mulk [67]:15, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya." Ayat ini menegaskan perintah untuk berusaha dan memproduksi dalam batas etika yang diridhai Allah.

Salah satu nilai utama kewirausahaan dalam Al-Qur'an adalah kejujuran (*ṣidq*). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33]:70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Kejujuran merupakan pondasi penting bagi setiap pelaku usaha agar mendapatkan keberkahan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi).

Selain kejujuran, nilai amanah juga menjadi aspek fundamental dalam pendidikan kewirausahaan Islam. QS. Al-Anfal [8]:27 menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." Amanah dalam konteks kewirausahaan berarti menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjalankan bisnis secara adil.

Al-Qur'an juga menekankan nilai kerja keras dan ketekunan (*al-jidd wa al-ijtihād*). Dalam QS. An-Najm [53]:39 disebutkan, "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ikhtiar, bukan semata-mata keberuntungan. Karena itu, pendidikan kewirausahaan harus menanamkan semangat pantang menyerah dan produktivitas tinggi.

Nilai lain yang sangat penting adalah keadilan (*'adl*). Dalam konteks ekonomi, Al-Qur'an menyeru agar umat Islam berlaku adil dalam transaksi dan tidak menzalimi orang lain. QS. Al-Muthaffifin [83]:1-3 mengingatkan, "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang

lain, mereka mengurangi." Ayat ini menjadi dasar etika bisnis yang melarang segala bentuk penipuan dan eksploitasi.

Al-Qur'an juga mengajarkan nilai *ta'awun* (kerja sama) dalam kewirausahaan. Dalam QS. Al-Maidah [5]:2 disebutkan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Prinsip ini dapat diaplikasikan dalam kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan kemudharatan. Pendidikan kewirausahaan Islami harus menanamkan nilai sinergi sosial ini untuk memperkuat solidaritas ekonomi umat.

Selain itu, Al-Qur'an menanamkan nilai *qana'ah* (rasa cukup) dan *syukur*. Dalam dunia bisnis modern, orientasi pada keuntungan sering menimbulkan keserakahan. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha maksimal dan kepasrahan kepada Allah. QS. Ibrahim [14]:7 menegaskan, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu." Sikap syukur menjaga keseimbangan spiritual agar wirausahawan tidak terjebak dalam materialisme.

Nilai-nilai kewirausahaan Islam juga mencakup prinsip kehalalan. QS. Al-Baqarah [2]:168 menyeru, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik." Prinsip halal tidak hanya berkaitan dengan produk, tetapi juga proses bisnis yang bersih dari riba, penipuan, dan korupsi. Pendidikan kewirausahaan Islam harus menjadikan prinsip halal sebagai pondasi moral setiap pelaku usaha.

Selain nilai-nilai individu, Al-Qur'an juga menegaskan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. QS. Al-Hasyr [59]:7 menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ayat ini mengandung pesan keadilan distributif agar wirausahawan Muslim memiliki kepedulian terhadap fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan dalam Islam tidak hanya membentuk keterampilan manajerial, tetapi juga karakter spiritual dan sosial. Nilai-nilai Al-Qur'an seperti *amanah*, *'adl*, *ta'awun*, dan *syukur* menjadi landasan dalam membangun etika bisnis yang berkeadilan dan berkeberkahan. Pendidikan ini menumbuhkan kesadaran bahwa berwirausaha bukan sekadar profesi, melainkan bentuk ibadah dan kontribusi sosial.

Akhirnya, nilai-nilai kewirausahaan dalam Al-Qur'an menjadi pedoman hidup yang membedakan pendidikan Islam dari pendidikan

sekuler. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dalam sistem pendidikan, maka akan lahir generasi Muslim yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga berakhlak karimah, berjiwa sosial, dan berorientasi pada keberkahan hidup dunia dan akhirat.

D. Proses Pendidikan Entrepreneurship

Proses pendidikan entrepreneurship dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan penguasaan keterampilan bisnis, tetapi juga pembentukan kepribadian (*syakhsiyyah*) dan spiritualitas. Pendidikan ini harus mengintegrasikan antara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan), sebagaimana prinsip pendidikan Islam yang holistik (Nata, 2016). Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan Islami bukan sekadar mengajarkan cara mencari keuntungan, tetapi bagaimana menjadikan kegiatan ekonomi sebagai ibadah dan jalan menuju keberkahan hidup.

Langkah pertama dalam proses pendidikan kewirausahaan adalah penanaman niat (*niyyah*) yang benar. Dalam Islam, segala amal tergantung pada niatnya (HR. Bukhari). Artinya, motivasi utama dalam berwirausaha bukanlah semata keuntungan duniawi, tetapi pengabdian kepada Allah melalui aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi sesama. Guru, dosen, dan mentor kewirausahaan harus menanamkan nilai ini agar peserta didik memahami bahwa bisnis adalah ladang amal saleh yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab.

Tahap berikutnya adalah pembentukan mindset kewirausahaan Islami. Mindset ini mencakup sikap kreatif, mandiri, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, serta tidak bergantung pada orang lain kecuali kepada Allah (tauhid). Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah dari hasil kerja tangannya sendiri" (HR. Ahmad). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kemandirian ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab dan kehormatan diri. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menumbuhkan semangat *self-reliance* di kalangan peserta didik.

Tahap ketiga adalah pemberian pengetahuan dan keterampilan praktis. Pendidikan kewirausahaan perlu mengajarkan konsep bisnis, manajemen, pemasaran, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan dalam kerangka syariah. Menurut Qardhawi (2001), pengetahuan

ekonomi dan perdagangan yang disertai nilai-nilai keislaman akan menghasilkan wirausahawan yang beretika dan tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*) di bumi. Kurikulum kewirausahaan Islam harus berbasis pada praktik dan simulasi nyata, bukan teori semata.

Tahap keempat adalah pembinaan karakter dan etos kerja. Nilai seperti *amanah*, *istiqamah*, dan *ihsan* harus menjadi landasan setiap aktivitas bisnis. Dalam QS. Al-Mulk [67]:15 dan QS. Al-Jumu'ah [62]:10, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja keras dan mencari karunia-Nya setelah menunaikan kewajiban ibadah. Oleh karena itu, proses pendidikan entrepreneurship Islami menuntut keseimbangan antara kerja keras (*juhd*) dan spiritualitas (*tazkiyah an-nafs*).

Tahap kelima adalah pembentukan jiwa sosial dan tanggung jawab moral. Pendidikan kewirausahaan dalam Islam menolak orientasi individualistik dan mendorong munculnya wirausahawan sosial (*social entrepreneurs*) yang peduli pada kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain" (HR. Thabrani). Dengan demikian, pembelajaran kewirausahaan harus mencakup program pengabdian masyarakat, zakat produktif, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi umat.

Tahap keenam adalah praktik nyata melalui *learning by doing*. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang mempraktikkan nilai-nilai kejujuran dan profesionalitas sejak muda. Model pembelajaran kewirausahaan Islam dapat dilakukan melalui *project-based learning*, magang di usaha syariah, atau pendirian unit bisnis sekolah dan kampus. Proses ini menumbuhkan pengalaman nyata tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial (Zainuddin, 2020).

Tahap ketujuh adalah evaluasi dan refleksi spiritual. Dalam pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya diukur dari hasil ekonomi, tetapi juga dari niat, etika, dan dampak sosial. Prinsip *hisbah* (pengawasan moral) menjadi bagian penting dari proses evaluasi kewirausahaan. Guru dan pembimbing harus mendorong peserta didik untuk melakukan muhasabah atas niat dan tindakan mereka dalam berbisnis, agar tetap berada dalam koridor syariah (Asmawi, 2018).

Tahap kedelapan adalah internalisasi nilai tauhid dalam seluruh aktivitas kewirausahaan. Kesadaran bahwa rezeki datang dari Allah menjadikan pelaku usaha tidak sombong ketika sukses dan tidak putus asa ketika gagal. QS. Al-Ankabut [29]:69 menegaskan bahwa Allah

bersama orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh. Nilai tauhid ini mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal dalam dunia bisnis (Rahman, 2019).

Tahap kesembilan adalah pengembangan inovasi dan kreativitas dalam bingkai halal. Pendidikan Islam mendorong inovasi yang memberi manfaat, bukan yang menimbulkan kemudharatan. QS. Al-Baqarah [2]:195 menegaskan, “Berbuatlah kebaikan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Maka, inovasi dalam bisnis harus diarahkan untuk kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan (*eco-entrepreneurship*).

Tahap kesepuluh adalah kolaborasi dan jejaring usaha Islami. Dalam konteks globalisasi, peserta didik perlu diajarkan untuk membangun kemitraan dengan sesama pengusaha Muslim dan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan ekonomi umat (*ummah-based economy*). Lembaga pendidikan Islam dapat menjadi katalisator dalam pembentukan jaringan ini (Sukardi, 2021).

Tahap kesebelas adalah pembentukan visi jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Kewirausahaan Islam tidak berorientasi pada keuntungan sesaat, tetapi pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan di bumi) mengajarkan tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat (Esposito, 2003).

Tahap terakhir adalah kontinuitas pembelajaran (*lifelong learning*). Proses pendidikan kewirausahaan dalam Islam tidak berhenti setelah seseorang sukses dalam bisnis. Justru kesuksesan harus menjadi sarana untuk terus belajar, berbagi, dan memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah). Pendidikan kewirausahaan Islami yang berkelanjutan akan melahirkan generasi yang produktif, berakhlak, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

E. Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Entrepreneur Islami

Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Muslim yang tidak hanya berilmu dan berakhlak mulia, tetapi juga mandiri secara ekonomi melalui pendidikan kewirausahaan Islami. Dalam konteks globalisasi dan disrupsi ekonomi

digital, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai entrepreneurship yang berakar pada ajaran Islam seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kerja keras (*juhd*). Menurut Nata (2016), lembaga pendidikan Islam tidak boleh hanya mencetak lulusan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Peran pertama lembaga pendidikan Islam adalah sebagai *center of value education*, yakni pusat penanaman nilai moral dan spiritual dalam berwirausaha. Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam dunia perdagangan yang mengedepankan etika dan integritas. Maka, lembaga pendidikan harus menanamkan prinsip *business with barakah* — bisnis yang membawa keberkahan karena sesuai dengan tuntunan syariat (Qardhawi, 2001). Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam bukan sekadar tempat transfer ilmu ekonomi, tetapi juga pembinaan karakter wirausaha yang beretika.

Peran kedua adalah sebagai penyedia kurikulum kewirausahaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Kurikulum harus mencakup aspek konseptual (ilmu ekonomi Islam), praktikal (simulasi bisnis), dan spiritual (akhlak serta niat yang lurus). Menurut Zainuddin (2020), desain kurikulum kewirausahaan Islami perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri halal global. Hal ini berarti kurikulum pendidikan Islam tidak boleh statis, tetapi harus adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Peran ketiga adalah sebagai *incubator of entrepreneurs*, yaitu lembaga yang melahirkan dan mendampingi calon wirausahawan Muslim melalui program pembinaan dan pelatihan. Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dapat mendirikan unit usaha seperti koperasi syariah, toko santri, atau startup berbasis syariah sebagai laboratorium bisnis. Program semacam ini memungkinkan peserta didik belajar langsung tentang manajemen usaha, pemasaran, dan etika kerja Islami (Sukardi, 2021).

Peran keempat lembaga pendidikan Islam adalah membangun budaya kerja dan etos produktif. QS. Al-Jumu'ah [62]:10 menegaskan, "Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa bekerja dan berwirausaha merupakan bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, lembaga

pendidikan Islam harus menanamkan paradigma bahwa kerja keras dan produktivitas merupakan cerminan ketaatan kepada Allah (Chapra, 2000).

Peran kelima adalah pembinaan jiwa sosial melalui kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan program zakat produktif, pelatihan ekonomi bagi masyarakat, atau *social entrepreneurship*. Dalam hal ini, pendidikan kewirausahaan Islam tidak berhenti pada pencarian keuntungan pribadi, tetapi pada tanggung jawab sosial untuk memberdayakan sesama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Thabrani).

Peran keenam adalah kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan dunia industri. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan Islami yang sehat dan berkelanjutan. Perguruan tinggi Islam, misalnya, dapat menjalin kerja sama dengan bank syariah, BMT, dan koperasi pesantren untuk mendukung modal usaha mahasiswa. Rahman (2019) menegaskan bahwa pendidikan kewirausahaan Islami akan berhasil jika disertai kemitraan strategis antara dunia pendidikan dan sektor ekonomi berbasis syariah.

Peran ketujuh adalah penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Guru dan dosen tidak hanya harus memahami teori kewirausahaan, tetapi juga memiliki pengalaman praktik dan integritas spiritual yang tinggi. Menurut Asmawi (2018), pendidik dalam lembaga Islam berperan sebagai *murabbi* yang menanamkan nilai dan keteladanan. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi kewirausahaan Islami bagi tenaga pendidik perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pembelajaran.

Peran kedelapan adalah penelitian dan pengembangan (*research and development*). Lembaga pendidikan Islam perlu aktif melakukan riset tentang model bisnis syariah, ekonomi halal, dan inovasi kewirausahaan berbasis pesantren atau kampus Islam. Melalui penelitian, lembaga pendidikan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi ekonomi umat yang relevan dengan kondisi kontemporer (Esposito, 2003). Hal ini juga memperkuat posisi lembaga Islam sebagai penggerak intelektual ekonomi syariah.

Peran kesembilan adalah digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Era industri 5.0 menuntut lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan teknologi digital, baik dalam pembelajaran maupun pengembangan usaha. Program seperti *e-commerce syariah*, *digital marketing halal*, dan *financial literacy* Islami dapat diajarkan sejak dini agar peserta didik siap bersaing di pasar global. Menurut Zainuddin (2020), digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas dakwah ekonomi Islam.

Peran kesepuluh adalah penguatan jejaring alumni dan komunitas usaha Islami. Lembaga pendidikan Islam dapat membentuk forum wirausaha alumni untuk saling berbagi pengalaman, modal, dan peluang usaha. Jejaring ini akan menciptakan sinergi ekonomi yang kuat di antara sesama Muslim, sekaligus memperluas pengaruh nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis (Sukardi, 2021).

Peran kesebelas adalah menciptakan budaya kampus atau sekolah yang berorientasi pada kemandirian dan produktivitas. Misalnya, setiap peserta didik dilibatkan dalam kegiatan wirausaha sekolah, bazar produk halal, atau proyek sosial berbasis ekonomi. Lingkungan pendidikan yang mendukung kreativitas dan tanggung jawab akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan Islami yang tangguh dan berakhlak (Nata, 2016).

Peran terakhir adalah membentuk paradigma *khilafah ekonomi*, yaitu kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi. QS. Al-Baqarah [2]:30 menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tidak hanya melahirkan pengusaha sukses secara materi, tetapi juga pemimpin ekonomi yang amanah, adil, dan membawa kemaslahatan bagi umat dan lingkungan (Qardhawi, 2001).

F. Penerapan Jiwa Kewirausahaan dalam Pendidikan Islam

Penerapan jiwa kewirausahaan dalam pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Dalam Islam, kewirausahaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari manifestasi keimanan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang sukses yang menunjukkan teladan etika

bisnis yang tinggi. Menurut Ahmad (2009), semangat kewirausahaan dalam Islam berakar pada nilai kerja keras, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek pembelajaran.

Penerapan jiwa kewirausahaan dalam pendidikan Islam harus dimulai dari paradigma berpikir. Peserta didik perlu diajarkan bahwa setiap pekerjaan halal yang dilakukan dengan niat baik merupakan ibadah. Prinsip ini berangkat dari QS. Al-Jumu'ah [62]:10 dan QS. Al-Mulk [67]:15 yang menegaskan pentingnya mencari karunia Allah melalui usaha dan kerja keras. Dengan paradigma ini, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai jalan spiritual menuju keberkahan hidup (Chapra, 2000).

Secara pedagogis, lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dan praktik wirausaha langsung (*experiential learning*). Peserta didik diajak untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi usaha sederhana seperti bazar halal, koperasi siswa, atau produk digital Islami. Menurut Zainuddin (2020), pembelajaran yang menggabungkan teori ekonomi syariah dan praktik bisnis riil mampu meningkatkan *entrepreneurial mindset* dan rasa tanggung jawab sosial.

Guru dalam pendidikan Islam berperan sebagai *murabbi* yang tidak hanya mengajarkan teori kewirausahaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual seperti amanah, syukur, dan tawakal. Asmawi (2018) menegaskan bahwa dalam pendidikan Islam, aspek spiritual tidak dapat dipisahkan dari aktivitas duniawi termasuk bisnis. Oleh sebab itu, guru perlu menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam menunjukkan etika kerja, kedisiplinan, dan integritas dalam mengelola kegiatan ekonomi sekolah.

Penerapan jiwa kewirausahaan juga perlu memperhatikan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah atau pesantren harus menciptakan ekosistem yang mendorong kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kolaborasi. Misalnya, dengan membentuk klub wirausaha Islami, program mentoring bisnis, dan kompetisi inovasi halal. Menurut Rahman (2019), lingkungan belajar yang mendukung kemandirian dan kreativitas akan mempercepat internalisasi nilai-nilai wirausaha dalam diri peserta didik.

Selain itu, nilai-nilai kewirausahaan perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya pada pelajaran ekonomi atau

kewirausahaan. Misalnya, dalam pelajaran agama, siswa belajar tentang keutamaan bekerja keras dan kejujuran dalam berdagang; dalam pelajaran matematika, siswa belajar manajemen keuangan Islami; dan dalam pelajaran bahasa, siswa belajar komunikasi bisnis yang etis. Pendekatan integratif ini sesuai dengan prinsip *tauhidic integration* dalam pendidikan Islam (Nata, 2016).

Lembaga pendidikan Islam juga dapat membangun unit usaha mandiri sebagai laboratorium bisnis, seperti koperasi sekolah, kantin syariah, percetakan Islami, atau platform digital. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola keuangan, produksi, dan pemasaran sesuai prinsip syariah. Sukardi (2021) menekankan bahwa pengalaman nyata lebih efektif membentuk karakter wirausaha Islami dibandingkan pengajaran teoritis semata.

Penerapan jiwa kewirausahaan dalam pendidikan Islam juga harus menanamkan nilai tanggung jawab sosial. Setiap bentuk usaha hendaknya diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi. Prinsip *maslahah* (kemanfaatan) menjadi dasar etika bisnis Islam yang membedakan wirausaha Muslim dengan kapitalisme sekuler. Qardhawi (2001) menegaskan bahwa wirausaha sejati adalah yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan keberkahan spiritual.

Dalam konteks pesantren, jiwa kewirausahaan dapat diterapkan melalui kegiatan *santripreneurship* seperti produksi makanan halal, budidaya pertanian, atau teknologi ramah lingkungan. Program ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pesantren, tetapi juga menjadi wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Esposito (2003) menyebut pesantren sebagai “inkubator sosial” yang memiliki potensi besar dalam mencetak pengusaha Muslim berbasis etika spiritual.

Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi Islam, penerapan jiwa kewirausahaan dilakukan melalui pembentukan *entrepreneurial campus*. Kampus Islam harus mendorong mahasiswa untuk berinovasi, melakukan riset terapan, dan menciptakan lapangan kerja berbasis nilai-nilai syariah. Program *studentpreneur*, *startup halal*, dan *inkubator bisnis syariah* dapat dijadikan wadah konkret bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ide bisnis Islami (Zainuddin, 2020).

Evaluasi terhadap penerapan jiwa kewirausahaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan

ekonomi. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah usaha yang dibangun, tetapi juga dari integritas moral dan kepedulian sosial peserta didik. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam memandang kewirausahaan sebagai sarana pembinaan akhlak dan pengabdian kepada umat (Nata, 2016).

Akhirnya, penerapan jiwa kewirausahaan dalam pendidikan Islam merupakan bentuk aktualisasi nilai tauhid dalam ranah ekonomi. Manusia sebagai khalifah diberi amanah untuk memakmurkan bumi melalui kerja produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan menanamkan semangat ini sejak dini, lembaga pendidikan Islam tidak hanya melahirkan generasi yang mandiri secara ekonomi, tetapi juga generasi yang berakhlak, adil, dan membawa keberkahan bagi masyarakat luas (Chapra, 2000).

G. Pendidikan Madrasah Berbasis Entrepreneurship

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mandiri secara ekonomi. Dalam konteks modern, madrasah dituntut tidak hanya melahirkan lulusan yang religius, tetapi juga produktif, kreatif, dan inovatif. Pendidikan madrasah berbasis *entrepreneurship* menjadi jawaban atas tantangan globalisasi dan krisis lapangan kerja. Menurut Nata (2016), madrasah perlu melakukan transformasi dari paradigma konservatif menuju paradigma produktif, di mana nilai spiritual dan ekonomi berjalan seiring untuk kemaslahatan umat.

Pendidikan kewirausahaan di madrasah bukan sekadar pelajaran tambahan, tetapi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum tersebut perlu mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, etos kerja Islami, dan keterampilan bisnis yang aplikatif. Menurut Qardhawi (2001), Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan berinovasi, karena setiap bentuk kerja yang halal dan bermanfaat memiliki nilai ibadah. Maka dari itu, madrasah harus mengajarkan siswa bahwa menjadi wirausahawan bukan hanya profesi, tetapi bentuk pengabdian kepada Allah dan masyarakat.

Pendekatan pendidikan madrasah berbasis *entrepreneurship* dapat dilakukan melalui penguatan *life skills* dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengembangkan ide-ide bisnis yang

berlandaskan prinsip syariah. Misalnya, pembuatan produk lokal seperti makanan halal, kerajinan tangan, dan media dakwah digital. Zainuddin (2020) menekankan bahwa model pembelajaran berbasis proyek mendorong kreativitas dan keberanian dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara moral.

Selain aspek kognitif, pembentukan karakter wirausaha Islami juga menjadi fokus penting. Madrasah harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), amanah, kerja keras (*jiddiyyah*), dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan melalui keteladanan guru, pembiasaan kegiatan positif, dan pengelolaan organisasi siswa berbasis *entrepreneurship*. Menurut Asmawi (2018), karakter kewirausahaan dalam Islam sejatinya merupakan manifestasi dari akhlak Nabi Muhammad SAW yang menyeimbangkan antara spiritualitas dan produktivitas.

Peran guru di madrasah sangat penting dalam menanamkan semangat kewirausahaan Islami. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing spiritual dan mentor bisnis bagi peserta didik. Guru dapat mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks ekonomi produktif, misalnya dengan membahas ayat tentang perdagangan, kejujuran, dan larangan riba. Chapra (2000) menegaskan bahwa pendidikan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan spiritual yang menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan madrasah berbasis *entrepreneurship* juga harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking*). Siswa diajak untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, mengembangkan ide inovatif, dan merancang produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rahman (2019), pendidikan kewirausahaan Islami yang dikaitkan dengan konteks sosial mampu membentuk generasi yang tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga berjiwa sosial tinggi.

Implementasi pendidikan kewirausahaan di madrasah memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Madrasah dapat mendirikan unit usaha seperti koperasi siswa, *school market*, percetakan Islami, atau unit produksi berbasis komunitas. Unit usaha ini berfungsi sebagai laboratorium bisnis yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pengelolaan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran berbasis etika Islam. Sukardi (2021) menyatakan bahwa

praktik langsung dalam lingkungan madrasah efektif membentuk sikap kemandirian dan tanggung jawab ekonomi.

Selain itu, madrasah dapat menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha, lembaga zakat, dan perguruan tinggi Islam. Kolaborasi ini dapat menghadirkan pelatihan bisnis syariah, pendampingan usaha, serta peluang magang bagi siswa. Menurut Ahmad (2009), kemitraan lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat kompetensi kewirausahaan dan memperluas jejaring sosial-ekonomi umat Islam.

Kurikulum madrasah perlu menyesuaikan dengan dinamika digitalisasi ekonomi. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi kreatif menuntut siswa memiliki literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Madrasah dapat memperkenalkan konsep *digital entrepreneurship* berbasis nilai Islam, seperti pembuatan konten dakwah online, toko daring halal, atau platform edukasi Islam. Esposito (2003) menegaskan bahwa pendidikan Islam modern harus mampu menjembatani nilai spiritual dan inovasi teknologi agar tidak tertinggal dalam arus global.

Aspek evaluasi dalam pendidikan *entrepreneurship* madrasah harus mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan peserta didik tidak diukur semata dari kemampuan berbisnis, tetapi juga dari akhlak, integritas, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Nata (2016) menegaskan bahwa indikator pendidikan Islam sejati adalah munculnya manusia yang produktif sekaligus berakhlak mulia.

Dampak penerapan pendidikan kewirausahaan di madrasah tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Madrasah dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan. Melalui pelatihan keterampilan, pelibatan orang tua, dan kegiatan wirausaha komunitas, madrasah memperkuat fungsi sosial-ekonomi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Hal ini menunjukkan bahwa madrasah bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga agen perubahan sosial (Azra, 2016).

Secara keseluruhan, pendidikan madrasah berbasis *entrepreneurship* adalah bentuk integrasi antara ilmu, iman, dan amal. Ia menumbuhkan generasi Muslim yang tidak hanya pandai beribadah, tetapi juga produktif dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, madrasah dapat memainkan peran strategis dalam membangun ekonomi umat yang mandiri, beretika, dan berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan

oleh Qardhawi (2001), ekonomi yang berlandaskan iman dan moral akan melahirkan kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia.

H. Pendidikan Pesantren Berbasis Entrepreneurship

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan kemandirian santri. Dalam sejarahnya, pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga wadah pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks modern, konsep *entrepreneurship* di pesantren menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan globalisasi dan ekonomi digital. Menurut Azra (2016), pesantren perlu mengembangkan model pendidikan yang mampu menyeimbangkan spiritualitas, intelektualitas, dan produktivitas ekonomi santri.

Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam sistem pesantren bukanlah hal baru. Nilai-nilai kemandirian, kerja keras, dan tanggung jawab telah lama menjadi bagian dari budaya pesantren. Namun, dalam era modern, nilai-nilai tersebut perlu diformulasikan dalam bentuk pendidikan kewirausahaan yang terencana dan berbasis kurikulum. Menurut Hidayat (2020), pesantren dapat menjadi inkubator sosial-ekonomi berbasis syariah yang menghasilkan santri bermental mandiri dan siap menjadi pelaku ekonomi Islam di masyarakat.

Kewirausahaan pesantren sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan kerja dan usaha sebagai bagian dari ibadah. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang jujur dan inovatif, sehingga menjadi teladan utama bagi pembentukan karakter wirausaha santri. Qardhawi (2001) menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatn bagi umat. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan di pesantren bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial.

Model pendidikan pesantren berbasis *entrepreneurship* dapat diterapkan melalui pembelajaran kontekstual dan kegiatan praktis. Santri tidak hanya belajar teori bisnis, tetapi juga praktik usaha seperti pertanian organik, peternakan, perikanan, kerajinan, dan perdagangan berbasis komunitas. Menurut Sukardi (2020), praktik ekonomi produktif

di lingkungan pesantren efektif membentuk karakter santri yang kreatif, inovatif, dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi modern.

Salah satu contoh konkret penerapan *entrepreneurship* di pesantren adalah berdirinya *Pesantren Preneurship* yang mengembangkan berbagai unit usaha, seperti koperasi syariah, toko kitab, percetakan, hingga bisnis digital. Unit-unit usaha ini tidak hanya menopang ekonomi pesantren, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran kewirausahaan bagi santri. Menurut Rahman (2019), model ini terbukti meningkatkan motivasi dan keterampilan wirausaha santri, sekaligus memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat.

Selain aspek ekonomi, pendidikan kewirausahaan di pesantren juga berfungsi membentuk *entrepreneurial mindset* Islami. Santri dilatih berpikir strategis, berani mengambil risiko, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Namun, semua tindakan bisnis tetap diikat oleh nilai moral Islam. Hasil penelitian Syarifudin (2020) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis akhlak memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan etika bisnis Islami di kalangan santri.

Penguatan pendidikan kewirausahaan di pesantren juga memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Kementerian Agama telah mendorong program *Santripreneur* untuk mengembangkan potensi bisnis pesantren melalui pelatihan, pendanaan, dan pendampingan. Inisiatif ini mendorong lahirnya ribuan santri pengusaha muda di berbagai daerah. Menurut Rosyada (2019), kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan Islam yang berkelanjutan.

Dalam konteks kurikulum, pendidikan kewirausahaan pesantren dapat diintegrasikan dengan pelajaran fiqh muamalah, akhlak, dan ekonomi Islam. Pendekatan *integratif holistik* memungkinkan santri memahami hubungan antara ibadah, etika, dan kegiatan ekonomi. Nata (2016) menekankan bahwa pendidikan Islam yang ideal adalah yang menghubungkan ilmu dengan amal, serta spiritualitas dengan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, pesantren menjadi pusat lahirnya ulama yang sekaligus berjiwa wirausaha.

Transformasi digital juga memengaruhi dunia pesantren. Banyak pesantren kini memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar

produk santri, seperti e-commerce syariah, pemasaran media sosial, hingga *digital dakwah entrepreneurship*. Menurut Hamid (2021), literasi digital di pesantren merupakan fondasi penting untuk membentuk generasi santri yang siap bersaing di era industri 4.0 tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Namun demikian, pendidikan kewirausahaan di pesantren tidak boleh terjebak dalam orientasi materialistik. Spirit utama pesantren tetaplah pengabdian dan keberkahan. Setiap kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Chapra (2000) menyatakan bahwa ekonomi Islam sejati tidak sekadar menambah kekayaan, tetapi mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat solidaritas umat.

Dengan mengembangkan pendidikan *entrepreneurship*, pesantren memiliki potensi menjadi *center of Islamic economic empowerment*. Santri bukan lagi hanya pencari kerja, melainkan pencipta lapangan kerja berbasis nilai Islam. Pesantren dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang membangun ekonomi umat secara berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Menurut Asmawi (2018), pesantren dengan basis *entrepreneurship* adalah manifestasi dari pendidikan Islam yang transformatif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, pendidikan pesantren berbasis *entrepreneurship* merupakan sintesis antara tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan modern. Ia melahirkan generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan berdaya ekonomi. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi benteng moral bangsa, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat. Sebagaimana visi Islam rahmatan lil ‘alamin, pendidikan pesantren berbasis *entrepreneurship* berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadaban.

I. Strategi Perguruan Tinggi Mewujudkan Entrepreneurial Kampus

Perguruan tinggi Islam di era disrupsi dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang berilmu dan berakhlak, tetapi juga memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Konsep *entrepreneurial campus* menjadi paradigma baru yang menekankan integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam konteks kewirausahaan. Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), kampus masa depan harus

menjadi pusat inovasi ekonomi dan sosial melalui sinergi antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah (*triple helix model*). Dalam konteks Islam, hal ini berarti mewujudkan kampus yang berlandaskan nilai spiritualitas dan keadilan sosial.

Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam bertujuan menanamkan etos kerja, inovasi, dan tanggung jawab sosial berbasis nilai-nilai syariah. Mahasiswa tidak hanya diajarkan teori bisnis, tetapi juga dilatih membangun usaha yang halal, beretika, dan bermanfaat bagi umat. Menurut Nata (2016), perguruan tinggi Islam harus menjadi wadah bagi lahirnya *entrepreneur Muslim* yang tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan keberkahan (*barakah*) dalam setiap aktivitas bisnisnya. Nilai-nilai tauhid menjadi fondasi utama bagi pembentukan jiwa wirausaha Islami.

Implementasi *entrepreneurial campus* di perguruan tinggi Islam memerlukan desain kurikulum yang integratif. Kurikulum harus menggabungkan ilmu manajemen, ekonomi syariah, fiqh muamalah, dan etika bisnis Islami. Hasil penelitian dari Yusuf dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa model kurikulum integratif tersebut efektif meningkatkan minat dan kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha. Selain itu, pendekatan *project-based learning* dan *experiential learning* dapat membantu mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola bisnis.

Strategi lain yang krusial adalah pembentukan *business incubator center* di lingkungan kampus. Inkubator ini berfungsi sebagai ruang praktik bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide usaha, mendapatkan pendampingan bisnis, serta mengakses modal dan jaringan mitra usaha. Menurut Rahman (2019), perguruan tinggi yang memiliki inkubator bisnis berbasis syariah mampu melahirkan mahasiswa yang lebih adaptif, kreatif, dan berjiwa pemimpin. Program ini juga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi universitas melalui kerja sama dengan investor halal.

Perguruan tinggi Islam juga harus memanfaatkan potensi digital entrepreneurship. Transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis dan membuka peluang baru bagi mahasiswa untuk menjadi *digitalpreneur*. Melalui pelatihan e-commerce syariah, desain konten Islami, dan pemasaran digital etis, kampus dapat menyiapkan generasi muda Muslim yang mampu berkompetisi di era industri 4.0. Menurut

Hamid (2021), digitalisasi kewirausahaan di kampus Islam adalah langkah strategis untuk menjembatani nilai spiritual dan kemajuan teknologi.

Selain itu, peran dosen dan tenaga kependidikan sangat menentukan keberhasilan *entrepreneurial campus*. Mereka perlu bertransformasi dari sekadar pengajar menjadi mentor dan fasilitator bagi mahasiswa. Menurut Suryana (2020), dosen yang memiliki pengalaman wirausaha mampu menumbuhkan motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa. Oleh karena itu, pelatihan dan kolaborasi antara dosen, pengusaha Muslim, dan praktisi industri menjadi sangat penting dalam membangun budaya kewirausahaan di kampus Islam.

Kegiatan kewirausahaan di kampus juga dapat diintegrasikan dengan program pengabdian masyarakat. Melalui *community-based entrepreneurship*, mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keterampilan bisnis mahasiswa, tetapi juga menjadi bentuk dakwah sosial yang nyata. Menurut Hidayat (2020), kolaborasi antara kampus dan masyarakat dalam bidang ekonomi produktif merupakan wujud nyata dari *amal saleh sosial* dalam pendidikan Islam.

Perguruan tinggi Islam juga perlu memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, industri halal, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan bank syariah, misalnya, mahasiswa dapat memperoleh pelatihan manajemen keuangan Islami serta akses modal usaha halal. Rahmawati (2021) menegaskan bahwa kemitraan lintas sektor memperkuat posisi perguruan tinggi Islam sebagai pusat inovasi ekonomi syariah.

Selain pendekatan akademik, pembentukan budaya kewirausahaan di kampus juga bergantung pada *entrepreneurial spirit* civitas akademika. Lingkungan kampus harus menumbuhkan nilai-nilai keberanian, kreativitas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menurut Ahmad (2018), budaya akademik yang berorientasi pada inovasi dan keberkahan akan membentuk lulusan yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga beretika dan berjiwa sosial tinggi. Nilai ini menjadi pembeda utama antara kampus Islam dan kampus sekuler.

Dalam konteks global, kampus Islam juga dapat berperan sebagai mitra dalam jaringan *Islamic entrepreneurial education*. Kolaborasi internasional dengan universitas Islam di Malaysia, Turki, atau Timur Tengah dapat memperkaya wawasan mahasiswa dan membuka peluang riset kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pandangan Asmawi (2018) bahwa pendidikan Islam modern harus memiliki orientasi global namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas Islam.

Kebijakan internal kampus juga harus mendukung terciptanya lingkungan kewirausahaan yang kondusif. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi mahasiswa yang berhasil mengembangkan startup, menyediakan ruang inkubasi usaha, serta mengintegrasikan mata kuliah kewirausahaan di semua program studi. Menurut Rosyada (2019), kebijakan universitas yang visioner adalah kunci dalam menciptakan *entrepreneurial ecosystem* yang kokoh dan berkelanjutan di perguruan tinggi Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan entrepreneurial kampus, yaitu:

1. Integrasi Kurikulum Kewirausahaan di Semua Program Studi. Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kurikulum lintas disiplin ilmu. Tidak hanya pada fakultas ekonomi atau bisnis, tetapi juga pada bidang lain seperti pendidikan, teknik, pertanian, dan humaniora. Integrasi ini bertujuan menumbuhkan pola pikir kreatif, inovatif, dan solutif pada mahasiswa sejak awal perkuliahan.
2. Pembentukan Inkubator Bisnis dan Start-up Center. Pendirian *business incubator* di kampus berperan sebagai wadah pengembangan ide bisnis mahasiswa menjadi usaha nyata. Inkubator ini menyediakan pelatihan, pendampingan, akses modal, serta jejaring dengan dunia industri. Melalui strategi ini, mahasiswa tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja.
3. Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri dan Pemerintah. Kemitraan dengan dunia usaha, industri, lembaga pemerintah, dan komunitas lokal menjadi kunci pengembangan kampus kewirausahaan. Bentuk kolaborasi dapat berupa *internship*, *joint research*, *co-creation project*, dan *entrepreneurship mentorship*.

4. Penguatan Ekosistem Inovasi dan Riset Terapan. Kampus harus menumbuhkan budaya riset yang berorientasi pada inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat. Hasil riset dosen dan mahasiswa diarahkan untuk memiliki nilai komersial dan sosial, sehingga mendukung pengembangan *social entrepreneurship*.
5. Pemberdayaan Dosen sebagai Role Model Entrepreneurial Educator. Dosen perlu menjadi teladan dalam menerapkan semangat kewirausahaan melalui penelitian inovatif, pengabdian berbasis pemberdayaan, dan pengembangan produk akademik bernilai ekonomi. Hal ini akan membentuk ekosistem kampus yang inspiratif dan produktif.
6. Penanaman Nilai Spiritual dan Etika Bisnis Islami. Perguruan tinggi Islam perlu memastikan bahwa pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa didasari nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi profit tetapi juga maslahat.
7. Digitalisasi dan Pengembangan Platform Entrepreneurial Learning. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran kewirausahaan memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan mentor global, mengikuti kompetisi *startup*, dan memasarkan produk secara daring. Kampus perlu membangun *entrepreneurial learning hub* berbasis digital untuk memperluas akses dan inovasi.

Dengan demikian, strategi mewujudkan *entrepreneurial campus* di perguruan tinggi Islam bukan sekadar inovasi ekonomi, tetapi juga misi spiritual. Kampus berperan membentuk generasi Muslim yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam membangun peradaban. Melalui sinergi antara nilai Islam dan semangat kewirausahaan, perguruan tinggi dapat menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi umat. Sebagaimana ditegaskan oleh Qardhawi (2001), Islam menuntun umatnya untuk berusaha secara produktif sambil tetap menjaga etika, keadilan, dan keberkahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2019). *Etika Bisnis dan Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, M. (2009). *Business ethics in Islam*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT)

- Ahmad, Z. (2018). *Entrepreneurial Spirit in Islamic Education*. International Journal of Islamic Studies, 6(2), 115–130.
- Al-Bukhari, M. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Asmawi, A. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Tauhid*. Rajawali Pers.
- Asnawi, N. (2019). *Entrepreneurship dalam Perspektif Islam: Integrasi Iman dan Bisnis*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Azra, A. (2016). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Mizan.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row.
- Esposito, J. L. (2003). *Islam and Development in the Global Context*. Oxford University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations*. Research Policy, 29(2), 109–123.
- Hamid, F. (2021). *Digitalisasi pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam di era 4.0*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haneef, M. A. (2011). *A critical survey of Islamization of knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hidayat, M. (2020). *Pendidikan Islam dan kewirausahaan sosial di perguruan tinggi*. Yogyakarta: UIN Press.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill Education.
- Nata, A. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Rajawali Pers.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, F. (2019). *Islamic ethics and entrepreneurship*. London: Routledge.
- Rahmawati, D. (2021). *Sinergi Kampus dan Industri Halal dalam Membangun Ekonomi Umat*. Journal of Islamic Economic Studies, 9(1), 56–70.
- Rosyada, D. (2019). *Entrepreneurial Ecosystem di Perguruan Tinggi Islam*. Kemenag RI.
- Rosyada, D. (2019). *Santripreneurship: Model Pendidikan Pesantren Berbasis Ekonomi Kreatif*. Kemenag RI.
- Sukardi, I. (2019). *Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

- Sukardi, I. (2021). *Ekonomi Umat dan Pendidikan Kewirausahaan Islam*. Prenadamedia Group.
- Suryana, Y. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat.
- Suryana, Y. (2020). *Entrepreneurship Education and Islamic Leadership*. Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syarifudin, A. (2020). *Akhlaq dan Etika Bisnis Santri dalam Pendidikan Pesantren*. Alfabeta.
- Yusuf, H., & Handayani, S. (2020). *Integrative Curriculum Design for Islamic Entrepreneurial Education*. *Journal of Islamic Pedagogy*, 8(3), 201–218.
- Zainuddin, M. (2020). *Etika Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. New Jersey: Pearson Education.

Daftar Pustaka

- Abaza, M. (2019). *Debates on Islam and Knowledge in Postcolonial Egypt: The Al-Azhar University and the State*. Cairo: American University in Cairo Press.
- Abduh, M. (2015). *Al-A'māl al-Kāmilah* [Edisi Modern]. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Abdullah, A. (2018). *Islamic Governance and the Concept of Civil Society in Early Caliphate*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Abdullah, M. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Abdullah, M. (2019). *Paradigma Baru Pembelajaran Islam Inklusif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdullah, M. A. (2010). *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Abdullah, M. A. (2015). *Islam dan Masyarakat Madani di Indonesia: Relevansi dan Tantangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2015). *Islamic Education and Human Development: Towards an Integrated Approach*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Abdullah, M. A. (2020). *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, A. (2019). *Etika Bisnis dan Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abou El Fadl, K. M. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York, NY: HarperCollins.

- Ahmad, M. (2009). *Business ethics in Islam*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Ahmad, Z. (2018). *Entrepreneurial Spirit in Islamic Education*. International Journal of Islamic Studies, 6(2), 115–130.
- Al- Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh al-Hayah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Abrasyi, M. A. (2013). *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Attas, S. M. N. (2018). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- al-Attas, S. M. N. (2018). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Azhar University. (2015). *Annual Report on Islamic Education and Global Outreach*. Cairo: Al-Azhar Publications.
- Al-Bukhari, M. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Farabi. (2018). *The Virtuous City: Al-Madina al-Fadhila*. London: Routledge.
- Al-Faruqi, I. R. (2018). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Alfian. (2010). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, M. (2015). *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawdudi, A. A. (2017). *Political Theory of Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Al-Nahlawi, A. (1995). *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Al-Islām wa al-'Ilm*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-Wāqi'*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Tarbiyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Dirasat fi Fiqh al-Maqasid: Bayna al-Maqasid al-'Ammah wa al-Maqasid al-Khassah*. Cairo: Dar al-Syuruq.

- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Tarbiya al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Syaibānī, O. M. (1979). *Falsafat al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*. Maktabah al-Nahdah al-Miṣriyyah.
- Al-Zarnūjī, B. (n.d.). *Ta'lim al-Muta'allim Ṭarīq al-Ta'allum*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin Abdullah, M. (2003). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Anwar, M. S. (2000). *Masyarakat Madani: Agenda dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Anwar, S. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Peluang dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, M. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asad, M. (2018). *The Principles of State and Government in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Asmawi, A. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Tauhid*. Rajawali Pers.
- Asnawi, N. (2019). *Entrepreneurship dalam Perspektif Islam: Integrasi Iman dan Bisnis*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Assegaf, A. (2018). *Dakwah Humanistik di Era Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Assegaf, A. R. (2014). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- As-Syaibani, O. M. A. (2000). *Falsafat al-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Azra, A. (2002). *Civil Society dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, A. (2010). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan.
- Azra, A. (2012). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Azra, A. (2016). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Mizan.
- Azra, A. (2016). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Azra, A. (2017). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Jakarta: Mizan.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective*. *Annual Review of Psychology*, 52, 1–26.
- Basri, H. (2018). *Gerakan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia: Studi tentang Persis, Al-Irsyad, dan Perti*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bhikhu Parekh. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bredekamp, S., & Copple, C. (2019). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington, DC: NAEYC.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (2005). *Making Human Beings Human: Bioecological Perspectives on Human Development*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Bruinessen, M. van. (2015). *Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of Islam*. Leiden: Brill.
- Bruinessen, M. van. (2015). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Burhanuddin, J. (2016). *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia*. Leiden: Brill.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Castells, M. (2004). *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Coleman, J. S. (1998). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. *American Journal of Sociology*, 94(S1), S95–S120.
- Daradjat, Z. (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmiyati Zuchdi. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.

- Daud, W. M. N. W. (2013). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Daudy, A. (2011). *Kuliah filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daulay, H. P. (2014). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Depag RI. (2019). *Sistem Pendidikan Nasional dan Implementasinya di Madrasah*. Jakarta: Kemenag.
- Dewantara, K. H. (2013). *Pendidikan: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Drucker, P. (1993). *Post-Capitalist Society*. New York: Harper Business.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. Harper & Row.
- Durkheim, E. (2002). *Education and Sociology*. New York: Free Press.
- Effendy, B. (2015). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- El-Menouar, Y. (2017). *Islamic Education and the Formation of Modern Muslim Identities*. Leiden: Brill.
- Epstein, J. L. (2018). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. New York: Routledge.
- Erikson, E. H. (1982). *The Life Cycle Completed*. New York: Norton.
- Esposito, J. (2011). *Islam and Globalization*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2003). *Islam and Development in the Global Context*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2003). *Islam and the West: The Making of an Image*. Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2003). *The Oxford History of Islam* (ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2015). *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2016). *Islam and Democracy after the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations*. Research Policy, 29(2), 109-123.
- Fadeli, S., & Subhan, A. (2012). *Jejak Pembaruan Sosial dan Pendidikan Islam di Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Fakhry, M. (2019). *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press.

- Fauzan, A. (2018). *Modernisasi Pesantren dan Tantangan Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, A. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam di Madrasah*. Jakarta: UIN Press.
- Fauzi, A. (2020). *Integrasi Pendidikan Islam Inklusif dan Akhlak Mulia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2022). *Pesantren dan Modernitas Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Feillard, A. (2011). *The End of Innocence? Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Friedman, T. (2005). *The World is Flat*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gunawan, H. (2016). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
- Halstead, J. M. (2007). *Islamic Values: A Distinctive Framework for Moral Education? Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296.
- Hamid, F. (2021). *Digitalisasi pendidikan pesantren dan perguruan tinggi Islam di era 4.0*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanafi, H. (2011). *Min al-'Aqidah ila al-Thawrah: Al-Ma'rifah wa al-Tarbiyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Haneef, M. A. (2011). *A critical survey of Islamization of knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Haneef, M. A. (2019). *Contemporary Islamic Thought: A Critical Survey*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Harahap, S. (2016). *Al Jam'iyatul Washliyah: Peran dan Kontribusinya dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Press.
- Hasan, A. (2019). *The Legacy of Muslim Scholars in Education: Revisiting Ibn Sina and Ibn Khaldun. Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 45–59.
- Hasan, M. (2010). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. (2020). *Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, N. (2017). *Islamic Youth Movement and Moral Education*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, N. (2017). *Islamic Youth Movement and Moral Education*. Yogyakarta: UII Press.
- Kettani, M. (2019). *Youth and Islamic Civilization*. Rabat: ISESCO.
- Hasan, N. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam: Basis Nilai dan Etika Pendidikan Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

- Hasan, N. (2018). *Islamic Education and Multicultural Society*. Leiden: Brill.
- Hasan, N. (2020). *Kurikulum Pendidikan Islam: Integrasi Nilai dan Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, N. (2020). *Pesantren dan Isu Radikalisme di Era Global*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, S. H. (2010). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- Hasanah, U. (2020). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hashim, R., & Langgung, H. (2008). *Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hassan, R. (2016). *Islamic Thought in the Classical Age: The Rise of Al-Azhar and Sunni Orthodoxy*. Oxford: Oxford University Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (Eds.). (2007). *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Budaya Populer di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Budaya Populer di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hidayat, A. (2018). *Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Integratif*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A. (2020). *Entrepreneurial Pesantren: Kemandirian Ekonomi Berbasis Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, K. (2020). *Masyarakat Madani: Konsep dan Aktualisasi dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, M. (2020). *Digitalisasi Pendidikan Islam di Era 4.0*. Malang: UIN Press.
- Hidayat, M. (2020). *Digitalisasi Pesantren dan Inovasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayat, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, M. (2020). *Pendidikan Islam dan kewirausahaan sosial di perguruan tinggi*. Yogyakarta: UIN Press.
- Hidayat, M. (2020). *Pendidikan Islam di Era Digital dan Masyarakat Multikultur*. Bandung: Alfabeta.

- Hidayat, M. (2021). *Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, M. F. (2016). *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Hidayatullah, M. F. (2020). *Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. New York: McGraw-Hill Education.
- Hourani, A. (2013). *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huda, M. (2021). *Pesantren Inklusif: Pendidikan Islam untuk Semua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hurlock, E. B. (2015). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Khaldun. (2005). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd (Averroes). (2016). *The Incoherence of the Incoherence*. New York: Cambridge University Press.
- Ibnu Miskawaih. (2010). *Tahdzib al-Akhlaq*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ibnu Sina. (2005). *Al-Siyasah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ibrahim, R. (2020). *Revisiting Ibn Khaldun's Theory of Education: A Contemporary Analysis*. *International Journal of Islamic Thought*, 17(1), 33–47.
- Ichwan, M. N. (2018). *Islam, Politics and Identity in Indonesia: Local Politics in Madura*. London: Routledge.
- Ihsan, F. (2015). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Psikologi*. Bandung: Alfabeta.
- Jalaluddin. (2019). *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamali, M. H. (2019). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Daring)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kemdiknas. (2010). *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta.
- Kettani, M. (2019). *Youth and Islamic Civilization*. Rabat: ISESCO.
- Knowles, M. (2015). *The Adult Learner*. London: Routledge.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development: Vol. I. The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row.
- Kohlberg, L. (2008). *The Philosophy of Moral Development*. New York: Harper & Row.

- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Pearson Education.
- Kurzman, C. (2010). *Modernist Islam, 1840–1940: A Sourcebook*. New York: Oxford University Press.
- Langgulong, H. (2003). *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. New York: Simon & Schuster.
- Lubis, M. (2019). *Dinamika Gerakan Islam Lokal: Studi tentang Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara*. Medan: Perdana Publishing.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (1999). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (1999). *Masyarakat Religius dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (2019). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.
- Malik, J. (2019). *Islam in South Asia: Revised and Updated Edition*. Leiden: Brill.
- Mansur, M. (2021). *Perempuan dan Transformasi Madrasah di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki. (2018). *Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Menocal, M. R. (2011). *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*. Boston: Little, Brown and Company.
- Metcalf, B. D. (2009). *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900*. New Delhi: Oxford University Press.
- Montessori, M. (2017). *The Absorbent Mind*. New York: Holt Paperbacks.
- Moosa, E. (2015). *What is a Madrasa?* Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

- Muhaimin. (2019). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman. (2018). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press.
- Mulia, S. M. (2011). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen Madrasah Inklusif di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen PAUD Inklusif Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, E. (2022). *Pendidikan Vokasional di Pesantren: Strategi Penguatan Kemandirian Santri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muslim, I. (2001). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Naim, N. (2011). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nashir, H. (2019). *Islam Berkemajuan: Respons Muhammadiyah terhadap Isu-Isu Aktual*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasir, A. R. (2020). *Islam dan Disabilitas: Perspektif Fikih dan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasir, A. R. (2020). *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Paradigma Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasr, S. H. (2007). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2007). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne.
- Nasr, S. H. (2010). *Islam in the Modern World*. New York: HarperOne.
- Nasr, S. H. (2010). *Islamic science: An illustrated study*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Nasr, S. H. (2012). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, UK: Islamic Texts Society.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Governance and Ethics: Historical Perspectives*. New York: Routledge.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. New York: State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2016). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. Albany: State University of New York Press.
- Nasution, H. (2012). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan.

- Nasution, H. (2015). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Memperkuat Jati Diri dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, A. (2018). *Integrasi Ilmu dan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nata, A. (2018). *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Transformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di Tengah Tantangan Globalisasi: Rekonstruksi dan Reaktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nizar, S. (2019). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Pendidikan Islam: Lintasan Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-tokohnya*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, S. (2019). *Sejarah Sosial dan Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nizar, S. (2021). *Madrasah dan Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California Press.
- Noer, D. (2018). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2012). *Human Development* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Piaget, J. (1969). *The Psychology of the Child*. New York, NY: Basic Books.

- Piaget, J. (1973). *To Understand Is to Invent: The Future of Education*. New York: Viking Press.
- Piaget, J. (2001). *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qodir, Z. (2020). *Islam dan Kemanusiaan Inklusif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, D. (2019). *Pesantren dan Transformasi Sosial: Peran Pendidikan Islam dalam Modernisasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2018). *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2019). *Model Pengembangan Madrasah Inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, F. (2018). *Contemporary Approaches to Islamic Education*. Oxford: Routledge.
- Rahman, F. (2018). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2019). *Islamic Education and Digital Ethics in the 21st Century*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahman, F. (2019). *Islamic ethics and entrepreneurship*. London: Routledge.
- Rahman, F. (2020). *Madrasah dan Transformasi Digital Pendidikan Islam*. Bandung: UPI Press.
- Rahman, F. (2020). *Modern Islamic Education Movements in Indonesia: Between Tradition and Reform*. *Journal of Islamic Studies and Education*, 8(2), 145–162.
- Rahmawati, D. (2021). *Sinergi Kampus dan Industri Halal dalam Membangun Ekonomi Umat*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(1), 56–70.
- Raihani. (2014). *Creating Multicultural Citizens: A Portrayal of Contemporary Indonesian Education*. London: Routledge.
- Ramadan, T. (2014). *Islam and Education: The Challenge of Modernity*. Oxford: Oxford University Press.
- Ramayulis. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramayulis. (2018). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ricklefs, M. C. (2012). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press.

- Rida, R. (2015). *The Caliphate or Supreme Imamate* (Ed. & Trans. Elie Kedourie). New Haven, CT: Yale University Press.
- Rosenthal, F. (2015). *The Muqaddimah: An Introduction to History by Ibn Khaldun* (translated edition). Princeton: Princeton University Press.
- Rosenthal, F. (2016). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: Brill.
- Rosenthal, F. (2017). *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden: Brill.
- Rosyada, D. (2019). *Entrepreneurial Ecosystem di Perguruan Tinggi Islam*. Kemenag RI.
- Rosyada, D. (2019). *Santripreneurship: Model Pendidikan Pesantren Berbasis Ekonomi Kreatif*. Kemenag RI.
- Saada, N., & Al-Faraj, S. (2017). Islamic education and students' moral development: A study in Saudi Arabia. *Journal of Education and Practice*, 8(11), 120–131.
- Samani, M., & Hariyanto. (2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sauri, S. (2017). *Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Q. (2011). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siregar, A. (2017). *Sejarah dan Perkembangan Al Jam'iyatul Washliyah 1930–2015*. Medan: Lembaga Penelitian UIN Sumatera Utara.
- Soroush, A. K. (2010). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. New York: Oxford University Press.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suharto, T. (2017). *Madrasah dan Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, I. (2019). *Kewirausahaan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, I. (2021). *Ekonomi Umat dan Pendidikan Kewirausahaan Islam*. Prenadamedia Group.

- Suparlan, P. (2015). *Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, A. (2019). *Modernisasi Madrasah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Suryana, Y. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat.
- Suryana, Y. (2020). *Entrepreneurship Education and Islamic Leadership*. Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, E. (2017). *Modernisasi Pendidikan Islam: Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 45–59.
- Suyanto. (2018). *Urgensi Pendidikan Karakter di Era Global*. Malang: UMM Press.
- Suyatno. (2019). *Pendidikan Karakter dalam Konteks Budaya Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyatno. (2019). *Sinergi Pendidikan Islam dalam Tripusat Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, A. (2019). *Ketahanan Keluarga Muslim di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syamsuddin, A. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2019). *Etika Sosial dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2020). *Akhlaq dan Etika Bisnis Santri dalam Pendidikan Pesantren*. Alfabeta.
- Syukri, M. (2020). *Kepemimpinan Islami di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tayeb, A. (2018). *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. Abingdon: Routledge.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebudayaan dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* Paris: UNESCO Publishing.
- Van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wahid, A. (2018). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahid, Y. (2020). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama NU*. Yogyakarta: LKiS.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wood, W., & Neal, D. T. (2007). *A New Look at Habits and the Habit-Goal Interface*. *Psychological Review*, 114(4), 843–863.
- Yunus, M. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf, H., & Handayani, S. (2020). *Integrative Curriculum Design for Islamic Entrepreneurial Education*. *Journal of Islamic Pedagogy*, 8(3), 201–218.
- Yusuf, M. (2017). *Pendidikan Islam dalam Keluarga Modern*. Malang: UIN Press.
- Yusuf, S. (2020). *Pendidikan Islam Inklusif: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, A. R. (2021). *Filsafat Pendidikan Islam dan Implementasinya dalam Keluarga Muslim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin, M. (2020). *Etika Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Zainuddin, M. (2020). *Psikologi Islam dan Spiritualitas Lansia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zakaria, A. (2017). *Parenting Islami di Era Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zakiyah, D. R. (2018). *Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Alfabeta.
- Zarkasyi, H. F. (2015). *Modernisasi Pesantren: Respons terhadap Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zarkasyi, H. F. (2019). *Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter di Era Globalisasi*. Malang: UIN Press.
- Zed, M. (2016). *Metodologi Dakwah di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
- Ziemek, M. (2019). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. New Jersey: Pearson Education.
- Zra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhairini. (2010). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhdi, M. (2017). *Pesantren dan Tradisi Keilmuan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhdi, M. (2018). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Humanistik*. Malang: UIN Maliki Press.
- Zuhdi, M. (2019). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhdi, M. (2020). *Tantangan Madrasah dalam Era Digitalisasi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Zuhri, S. (2019). "Model Pendidikan Karakter di Pesantren Tradisional." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–162.

Biodata Penulis



Rahmat Hidayat, lahir di Medan, 26 Pebruari 1982. Dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu yang berdarah pendidik. Ayah Drs. H. Sofyan (pensiunan Guru PNS MAN Tanjung Morawa) dan Ibu Hj. Suriati Lubis (yang memutuskan untuk berhenti menjadi guru setelah kelahiran anak yang pertama).

Mempunyai saudara kandung berjumlah 3 orang, yaitu: Kakak: Rahmi Aulia, SE dan adik Syariful Azmi, SH, MH serta Ahmad Fikri, SH. Menikah pada tahun 2010 dengan Rini Adhariani, S.PdI dan dikaruniai seorang putra bernama M. Shohibul Mumtaz Hidayat pada tanggal 25 Oktober tahun 2011. Namun pada tahun 2012 isteri tercinta dipanggil oleh Allah Swt. Pada tahun 2013 memutuskan untuk menikah kembali, dan Alhamdulillah diberikan Allah Swt. pendamping bernama Mahanum, ST. Berdomisili di Jl. Seser Komplek Citra Mulia Residence Blok. D.14 Kelurahan Amplas, Medan.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Al-Washliyah 11 Kelurahan Amplas diselesaikan pada tahun 1994, SLTP Pondok Pesantren Al-Husna Medan diselesaikan pada tahun 1997, MAN 2 Model Medan diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara program studi Pendidikan

Agama Islam strata satu (S.1) pada tahun 2004, dan selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program studi Pendidikan Islam pada tahun 2009. Pada tahun 2016 menyelesaikan strata tiga (S.3) pada Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bertugas di Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan sejak tahun 2009 dan bertugas di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sejak tahun 2010. Dalam perannya sebagai dosen, penulis mengasuh beberapa mata kuliah diantaranya: Ilmu Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Profesi Keguruan Sejarah Peradaban Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Prasekolah.

Penulis juga telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah yang berjudul: *Starategi Pembelajaran Qiraat Quran* (dipublikasikan pada Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2012); *Pendidikan Karakter Berbasis Alquran* (dipublikasikan di Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Tahun 2012); *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Alumni Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN SU "Tadbir" pada Tahun 2015); *Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan "Integritas" pada Tahun 2016); *Pengembangan Orientasi dan Kurikulum dalam Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Unggul* (dipublikasikan pada Jurnal Hijri, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2016 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN SU, ISSN: 1979-8075); *Epistimologi Pendidikan Islam: Sistem, Kurikulum, Pembaharuan dan Upaya dalam Membangun Epistimologi Pendidikan Islam* (dipublikasikan pada Jurnal Al-Mufida, Vol. I No. 1 Juli-Desember 2016 FAI Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2549-1954); *Pendidikan Islam Sebagai Ilmu: Tinjauan Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi* (dipublikasikan pada Jurnal Sabilarrasyad, Vol. I No. 1 Oktober-Desember 2016 Jurusan PAI Fak. Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2548-2203); *The Relationship Between Teacher's Teaching style with student's Learning Motivation in Indonesia* (dipublikasikan pada Jurnal Intelektualita, Vol. II No. 02 Maret-April 2017 Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FKIMI)

bekerjasama dengan LPPPI ISSN: 2527-3329); *Cara Cerdas Belajar PTK* (disampaikan pada pelatihan PTK guru-guru SLB Se-Sumatera Utara Tahun 2013); dan Diskusi Publik "Pancasila sebagai Ideologi dalam Pandangan Islam yang diselenggarakan DPD Gerhana Kota Medan pada Tahun 2017. Buku: *Ilmu Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Filsafat Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016), *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2017) dan Konsep-Konsep Keguruan dalam Pendidikan Islam (Terbit pada Tahun 2017).

Disisi lain penulis juga aktif menulis pada opini Harian Waspada Medan, adapun tulisan yang pernah dipublikasikan diantaranya: *Berguru Mendidik Anak kepada Nabi Ibrahim*; *Berjihad Melawan Narkoba*; *Formulasi Pendidikan Akhlak*; *Haji Sebagai Madrasah Ilahiyah*; *Haji: Simbol Perjuangan Kemanusiaan*; *Islam dan Kebudayaan*; *Karakteristik Umat Muhammad saw.*; *Kebangkitan Peradaban Islam*; *Kepemimpinan TNI Masa Depan*; *Kewajiban Manusia*; *Makna Ukhuwah Islamiyah*; *Masjid dan Aktivitas Umat Islam*; *Masjid Sebagai Pusat Peradaban*; *Masyarakat Sholeh*; *Memaknai Ujian dalam Kehidupan*; *Nilai-Nilai Demokrasi dalam Alquran*; *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam*; *Profil Umat Pilihan*; dan lain-lain.

Disela-sela tugas sebagai dosen penulis aktif sebagai *Master Trainer* pada SNIP *Madrasah Development Centre* (MDC) Sumatera Utara. Alhamdulillah penulis telah berkeliling pada daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, mulai dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menyampaikan materi Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Disisi lain, penulis juga diberi amanah oleh Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara untuk menjadi narasumber Kurikulum 2013 di sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2016. Penulis juga aktif dalam mengisi seminar dan diskusi ilmiah. Selanjutnya penulis juga aktif pada beberapa Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya: Direktur Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah; Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GEMA) 165; dan organisasi kemasyarakatan lainnya.